

Memperkuat Konektivitas Kinerja untuk Mendukung Perkembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Strengthening Performance Connectivity
to Support Sustainable Infrastructure Development



Memperkuat Konektivitas Kinerja untuk Mendukung Perkembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Strengthening Performance Connectivity to Support Sustainable Infrastructure Development

Tahun 2021 menjadi tahun yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan kendala akibat pandemi COVID-19 yang secara masif menyebar dan meluas hingga seluruh belahan dunia. Adanya pandemi tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia, dan turut mempengaruhi pergerakan bisnis global, termasuk bisnis operasional pembangunan infrastruktur.

Menyadari situasi tidak terhindarkan tersebut, PT Nusantara Infrastructure Tbk menyusun langkah untuk menghadapi kondisi tersebut agar tidak memberi dampak yang sangat signifikan pada aktivitas operasional bisnis yang dilakukan Perseroan. Langkah tersebut kemudian didukung dengan adanya bisnis infrastruktur Perseroan yang terdiversifikasi dan telah terbukti mampu mendukung Perseroan menghadapi tantangan dan menangani gangguan yang muncul akibat pandemi. Untuk itulah, penguatan hubungan kinerja dari seluruh anak usaha Perseroan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mendukung Perseroan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terus berkelanjutan, terutama di tengah kondisi tidak kondusif akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2021.

Selain itu, Perseroan memastikan aktivitas operasi tetap berjalan dengan baik kendati harus dijalankan di tengah kondisi tidak kondusif dengan menjalankan penerapan cara kerja baru melalui konsep kerja dari rumah (*Work from Home*/WFH) secara efektif. Dengan memanfaatkan perkembangan jaringan media internal, Perseroan dapat dengan sigap, tepat, dan lancar mengatur protokol kerja WFH dan *Work from Office* (WFO) untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan setiap harinya.

Berkat adanya upaya yang disertai komitmen tinggi dari seluruh insan Perseroan untuk tetap menjaga kinerja, meningkatkan kualitas performa, serta memperkuat keunggulan operasional dari Unit Bisnis, Perseroan mampu menghadapi tantangan yang hadir di sepanjang tahun 2021 dan mempertahankan kestabilan bisnisnya di bidang infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terus terwujud. Berangkat dari upaya dan komitmen yang dilakukan Perseroan untuk memperkuat konektivitas kinerja sekaligus keunggulan bisnis dalam menghadapi kondisi saat ini, Perseroan mengambil tema dengan tajuk *“Strengthening Performance Connectivity to Support Sustainable Infrastructure Development.”*

The year 2021 was a year of various challenges and obstacles due to the COVID-19 pandemic, which has massively spread and expanded to all parts of the world. The existence of this pandemic had an impact on the social and economic life of the world's communities and affected the movement of global businesses, including the operations of infrastructure development.

Realizing this inevitable situation, PT Nusantara Infrastructure Tbk has drawn up several steps to deal with this condition to prevent its significant impact on the Company's business operations. This move was supported by the Company's diversified infrastructure business, which has been proven to be able to support the Company in facing challenges and dealing with disruptions arising from the pandemic. For this reason, strengthening the performance relationship of all its subsidiaries was one of the efforts made by the Company to support its realization of sustainable infrastructure development, especially in the midst of unfavorable conditions due to the COVID-19 Pandemic in 2021.

In addition, the Company ensured that operating activities continued to run well even though they must be carried out in the midst of unfavorable conditions by implementing new ways of working through the concept of effective *Work from Home* (WFH). By utilizing the development of the internal media network, the Company could swiftly, precisely, and smoothly manage WFH and *Work from Office* (WFO) protocols, which were then adjusted according to the Company's daily needs.

Due to the efforts and accompanied by high commitment from all employees to maintain performance, improve the quality of performance, and strengthen operational excellence of its Business Units, the Company was able to face the challenges throughout 2021 and maintain business stability in the infrastructure sector, thus ensuring the realization of sustainable infrastructure development. Based on the efforts and commitments made by the Company to strengthen its performance connectivity as well as business excellence in dealing with current conditions, the Company took a theme entitled *“Strengthening Performance Connectivity to Support Sustainable Infrastructure Development”* for the 2021 Annual Report of PT Nusantara Infrastructure Tbk.

Daftar Isi

Table of Contents

	Kilas Kinerja Performance Highlights			
	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8		
	Ikhtisar Saham Stock Highlights	11		
	Aksi Korporasi Corporate Actions	13		
	Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham Information on Suspension of Trading	13		
	Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Summary of Bond, Sukuk, or Convertible Bonds	13		
	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Information on Other Fundings	13		
	Peristiwa Penting 2021 Significant Events 2021	14		
	Penghargaan Awards	22		
	Laporan Manajemen Management Reports			
	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	28		
	Laporan Direksi Report of the Board of Directors	36		
	Profil Perusahaan Company Profile			
	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Corporate Identity	52		
	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	54		
	Rekam Jejak Pencapaian Milestones	56		
	Visi dan Misi Vision and Mission	62		
	Nilai Perusahaan Corporate Value	62		
	Kegiatan Usaha Business Activities	63		
	Produk dan Jasa Products and Services	64		
	Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership	67		
	Struktur Organisasi Organization Structure	68		
	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile	70		
	Profil Direksi Board of Directors' Profile	74		
	Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers' Profile	82		
	Demografi Karyawan Employee Demography	86		
	Informasi Pemegang Saham Shareholders Information	88		
	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	89		
	Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	91		
	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	92		
	Entitas Anak dan Asosiasi Subsidiaries and Associate Entities	93		
	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	102		
	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions	102		
	Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis			
	Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha Business Segment Overview	107		
	Strategi Usaha Tahun 2021 Business Strategy for 2021	107		
	Profitabilitas Per Segmen Usaha Business Segment Profitability	115		
	Tinjauan Keuangan Financial Review	117		
	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit/Loss and Other Comprehensive Income	118		
	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Statement of Consolidated Financial Position	120		
	Aset Assets	120		
	Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	121		
	Laporan Arus Kas Konsolidasian Statement of Consolidated Cash Flow	122		
	Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios	122		
	Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debts	123		
	Kolektibilitas Piutang Collectability of Receivables	123		
	Struktur Modal Capital Structure	123		
	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditures	124		
	Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditures	124		
	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to the Date of Account Report	125		
	Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Impact of Changes in Foreign Exchange Rates	125		
	Perbandingan Target dan Realisasi Comparison of Targets With Realization	125		
	Aspek Pemasaran Marketing Aspect	126		
	Dividen Dividend	128		

Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)	128
Penggunaan Dana Penawaran Umum Use of Proceeds from Public Offering	128
Informasi Transaksi Material Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau dengan Pihak Afiliasi Material Information Regarding Affiliate Transactions	129
Perubahan Peraturan Perundang-undangan Impact of Changes to Laws and Regulations	130
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun Buku Changes in Accounting Policies Applied in the Fiscal Year	130



Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Landasan Hukum Penerapan GCG Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance	135
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Implementation of Open Corporate Governance Guidelines	135
Struktur dan Kebijakan Tata Kelola Good Corporate Governance Structure and Policy	140
Rapat Umum Pemegang Saham General Meetings of Shareholders	141
Dewan Komisaris Board of Commissioners	151
Direksi Board of Directors	159

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination Board of Commissioners and Board of Directors	173
Remunasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Board of Commissioners and Board of Directors	171
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation Between the Board of Commissioners and the Board of Directors	174
Komite Audit Audit Committee	175
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	180
Komite Investasi dan Investment and Strategy Committee	184
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	187
Audit Internal Internal Audit	190
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	193
Manajemen Risiko Risk Management	195
Perkara Penting dan Sanksi Administratif yang Dihadapi Legal Case and Administrative Sanctions Faced	197
Etika dan Norma Perilaku Ethics and Conducts	197
Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Provision of Performance-Based Long-Term Compensation	199
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	199
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	201



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Kinerja Ekonomi Economic Performance	204
Kinerja Sosial Social Performance	205
Kinerja Lingkungan Management Structure	205

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Statement Letter Board of Commissioners and the Board of Directors about the Responsibility of Annual Report 2021 PT Nusantara Infrastructure Tbk	208
---	-----



Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statement	209
----------------------------------	-----

Sekilas tentang Kami

About Us



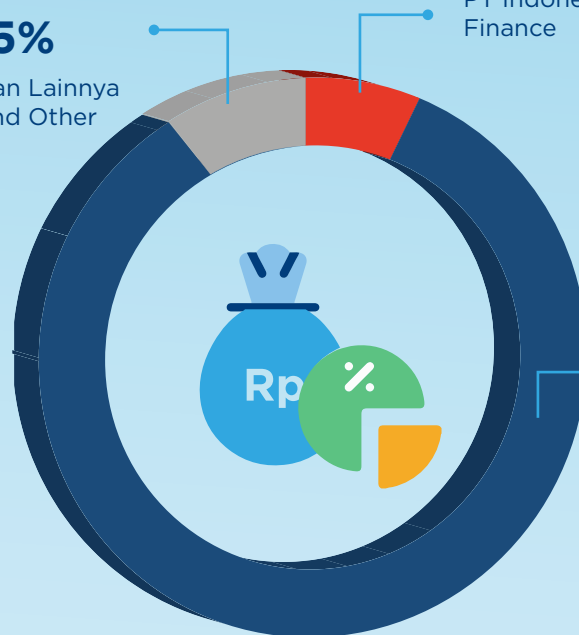
PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS

15,35%

Publik dan Lainnya
Public and Other

10,00%

PT Indonesia Infrastructure
Finance

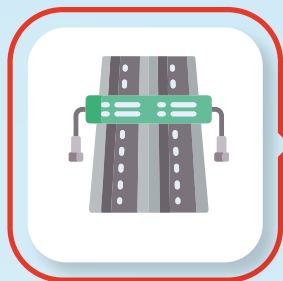


74,65%

PT Metro Pacific
Tollways Indonesia



SEKTOR USAHA BUSINESS SECTOR



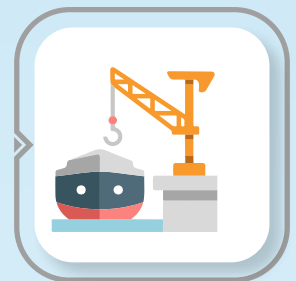
Jalan Tol
Toll Road



Air Bersih
Clean Water



Energi Terbarukan
Renewable Energy



Pelabuhan
Port

Pencapaian 2021

Achievements in 2021



Pada tahun 2021, Perseroan memperoleh penghargaan penting, yaitu “The Mino Best Project Award” untuk jalan tol layang A.P. Pettarani, Makassar yang diberikan oleh Road Engineering Association for Asia dan Australasia (REAAA). Penghargaan ini diberikan untuk proyek jalan maupun jembatan baru terbaik yang berlokasi di Asia Pasifik yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

In 2021, the Company received an important award, namely “The Mino Best Project Award” for the A.P. Pettarani, Makassar elevated toll road, which was awarded by the Road Engineering Association for Asia and Australasia (REAAA). This award is given for the best new road and bridge project located in Asia Pacific, which is held every 4 (four) years.

Pendapatan segmen usaha energi terbarukan Perseroan tahun 2021 mencapai Rp155,62 miliar, lebih tinggi 26,87% dibandingkan tahun 2020 yang Rp122,66 miliar.

The revenue of the Company's renewable energy business segment in 2021 reached Rp155.62 billion, an increase of 26.87% compared to 2020, which amounted to Rp122.66 billion.

26,87% ↑

27,91% ↑

Pendapatan usaha dan penjualan Perseroan pada tahun 2021 tumbuh 27,91% menjadi Rp661,57 miliar, dari Rp517,20 miliar di tahun 2020.

The Company's operating revenues and sales in 2021, a growth of 27.91% to Rp661.57 billion, from Rp517.20 billion in 2020.

12,67% ↑

Total aset Perseroan pada tahun 2021 mencapai Rp6,58 triliun, naik 12,67% dibandingkan posisi tahun sebelumnya, antara lain karena peningkatan kas dan setara kas, dan aset konsesi.

The Company's total assets in 2021 reached Rp6.58 trillion, an increase of 12.67% compared to the position in the previous year, partly due to an increase in cash and cash equivalents, and concession assets.

1,27% ↑

Pada tahun 2021, kargo yang melakukan loading dan unloading komoditas di pelabuhan kelolaan Perseroan mencapai 1,53 juta metrik ton, tumbuh 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya.

In 2021, cargo loading and unloading of commodities at ports managed by the Company reached 1.53 million metric tons, growing by 1.27% compared to the previous year.

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain | expressed in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020- 2021 (%)
Total Pendapatan dan Penjualan* Total Revenues and Sales*	844.789	1.570.119	1.592.594	781.768	792.013	-46,20
Laba Bruto Gross Profit	406.284	337.418	434.487	451.106	517.235	20,41
Laba Usaha Profit from Operations	150.783	132.764	261.148	226.298	320.654	13,57
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	25.761	112.622	205.367	217.086	93.115	-77,13
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit (Loss) for the Year	16.698	95.518	205.991	215.702	91.782	-82,52
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan Direct Costs and Cost of Sales	(268.827)	(200.986)	(214.591)	(224.407)	(227.862)	33,75
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parents	5.989	69.392	143.814	179.651	38.700	-91,37
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensive Profit (Loss)	19.772	43.230	61.553	37.434	54.415	-54,26
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parents	136	57.939	144.019	178.042	37.655	-99,76
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	16.562	37.579	61.972	37.660	54.127	-55,93
EBITDA	341,57	241.231	351.958	334.409	450.972	41,59
Jumlah Saham (dalam jutaan lembar) Number of Shares (in million shares)	17.711	17.711	17.711	17.711	15.236	0,00
Laba (Rugi) per Saham (dalam rupiah penuh) Earnings (Loss) per Share (in full amount Rupiah)	0,34	3,92	8,12	12,08	2,60	-91,33



POSISI KEUANGAN Financial Position

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain | expressed in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020- 2021 (%)
Aset Assets						
Aset Lancar Current Assets	1.264.942	643.801	813.662	1.056.764	1.241.035	96,48
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	5.322.387	5.202.882	4.263.737	3.248.927	4.079.261	2,30
Jumlah Aset Total Assets	6.587.329	5.846.683	5.077.400	4.305.691	5.320.297	12,67
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	599.501	499.998	481.639	396.159	461.886	19,90
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2.626.365	1.991.578	1.401.974	930.276	2.323.188	31,87
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.225.865	2.491.576	1.883.613	1.326.435	2.785.074	29,47
Ekuitas Equity						
Ekuitas Equity	3.361.463	3.355.108	3.193.787	2.979.256	2.535.222	0,19

RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019	2018	2017	YoY 2020- 2021 (%)
Modal Kerja Bersih (dalam jutaan rupiah) Net Working Capital (in million rupiah)	Rp	666.440	143.803	332.023	660.605	800.502	362,74
Rasio Lancar Current Ratio	%	211,00	128,76	168,94	266,75	273,31	63,87
Margin Usaha Gross Margin	%	48,09	21,49	27,28	28,95	40,49	123,79
Margin Bersih Net Margin	%	3,05	7,17	12,90	22,98	4,89	-57,49
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	40,43	15,36	22,10	42,77	56,94	164,31
Tingkat Pengembalian Aset Return-on-Assets	%	0,09	1,19	2,83	4,17	0,73	-92,34
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return-on-Equity	%	0,18	2,07	4,50	6,03	0,73	-91,39
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) Debt-to-Equity Ratio	%	85,18	59,96	42,58	35,47	73,25	46,06
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt-to-Assets Ratio	%	43,46	34,41	26,78	24,54	34,90	26,33
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Profit (Loss) to Equity Ratio	%	0,77	3,36	6,43	7,29	3,67	-77,17
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan dan Penjualan Profit (Loss) to Revenue and Sales Ratio	%	3,05	7,17	12,90	27,77	11,76	-57,49
Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas Total Liabilities to Equity Ratio	%	95,97	74,26	58,98	44,52	109,86	29,26
Rasio Total Liabilitas terhadap Aset Total Liabilities to Assets Ratio	%	48,97	42,62	37,10	30,81	52,35	14,91



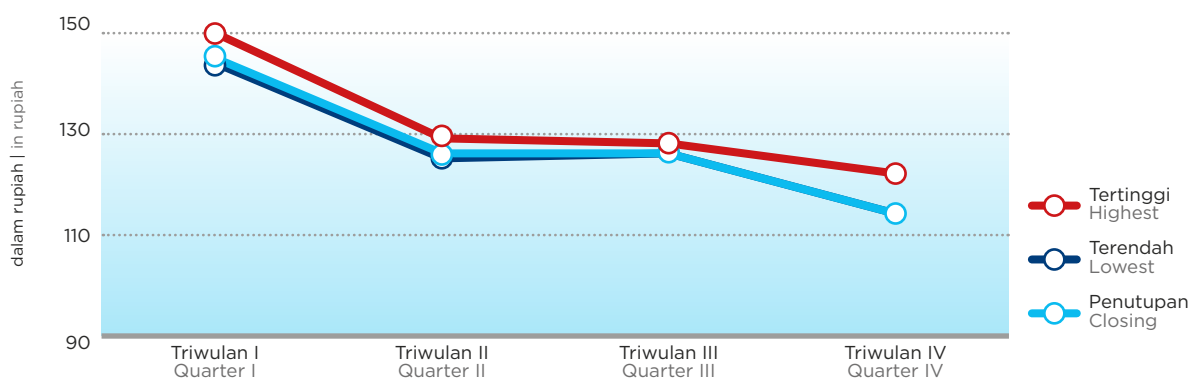
Ikhtisar Saham

Stock Highlights

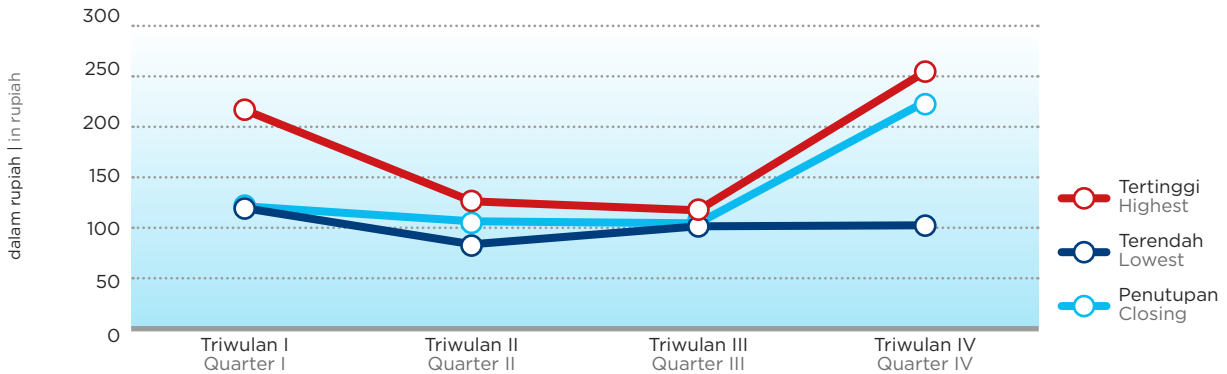
Uraian Description	Harga per Saham (Rp) Price per Share (Rp)			Jumlah Saham Beredar (dalam satuan lembar saham) Total Outstanding Shares (in unit of shares)	Volume Transaksi (dalam satuan lembar saham) Transaction Volume (in unit of shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp juta) Market Capitalization (million Rp)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
2021						
Triwulan I Quarter I	150	144	145	17.710.708.194	2.466.559.100	2.568.053
Triwulan II Quarter II	129	125	126	17.710.708.194	234.341.300	2.231.549
Triwulan III Quarter III	128	126	126	17.710.708.194	233.000.300	2.231.549
Triwulan IV Quarter IV	122	114	114	17.710.708.194	233.936.200	2.019.021
2020						
Triwulan I Quarter I	216	118	120	11.710.708.194	56.290.700	2.125.285
Triwulan II Quarter II	125	82	105	11.710.708.194	56.256.800	1.859.624
Triwulan III Quarter III	116	100	103	11.710.708.194	21.753.200	1.824.203
Triwulan IV Quarter IV	254	101	224	11.710.708.194	1.473.500.600	3.967.199
2019						
Triwulan I Quarter I	234	198	204	11.710.708.194	51.667.400	3.612.984
Triwulan II Quarter II	204	170	195	11.710.708.194	24.827.200	3.453.588
Triwulan III Quarter III	204	176	195	11.710.708.194	10.466.000	3.453.588
Triwulan IV Quarter IV	224	200	220	11.710.708.194	91.460.100	3.896.356

PERGERAKAN HARGA SAHAM TAHUN 2021 DI BURSA EFEK INDONESIA

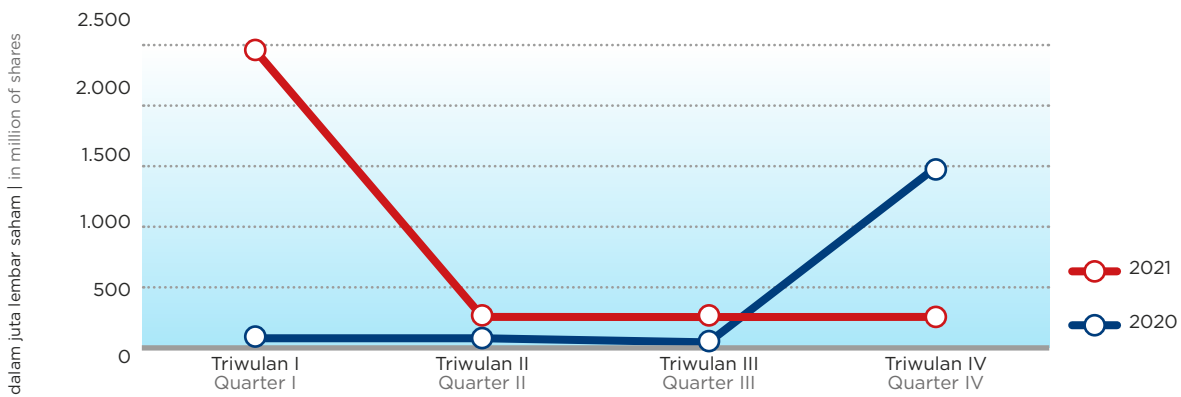
Stock Movement in 2021 at the Indonesia Stock Exchange



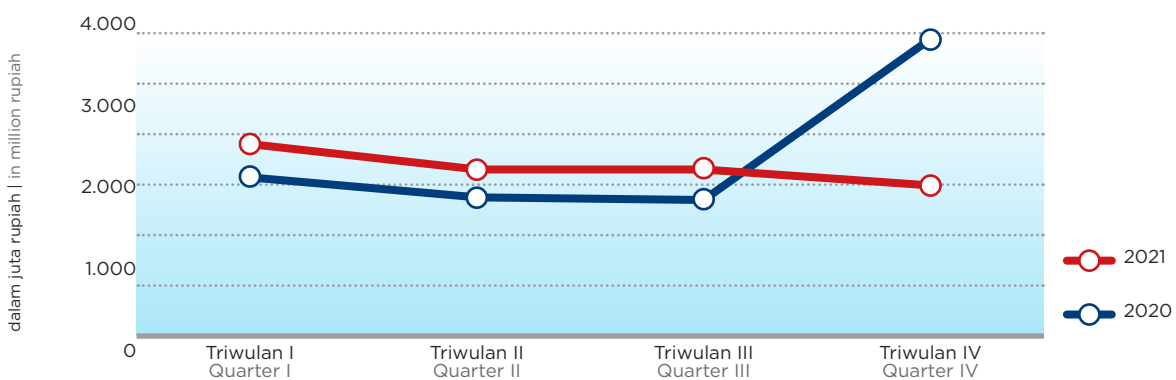
PERGERAKAN HARGA SAHAM TAHUN 2020 DI BURSA EFEK INDONESIA Stock Movement in 2020 at the Indonesia Stock Exchange



VOLUME TRANSAKSI/PERDAGANGAN TAHUN 2021 DAN 2020 DI BURSA EFEK INDONESIA Transaction/Trading Volume in 2021 and 2020 at the Indonesia Stock Exchange



KAPITALISASI PASAR TAHUN 2021 DAN 2020 Market Capitalization in 2021 and 2020





Aksi Korporasi

Corporate Action

Sepanjang tahun 2021 Perseroan tidak melakukan aksi korporasi.

Throughout 2021 the Company did not take any corporate actions.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham

Information on Suspension

Pada tahun buku 2021, perdagangan saham Perseroan dengan kode saham META di Bursa Efek Indonesia tidak pernah mengalami penghentian sementara perdagangan saham.

In the 2021 financial year, the trading of the Company's shares, listed as META on the Indonesia Stock Exchange, has never experienced a suspension.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Summary of Bonds, Sharia Bonds, or Conversion Bonds

Hingga akhir tahun 2021 Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi.

Until the end of 2021 the Company did not issue bonds, sharia bonds, or convertible bonds.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Fundings

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, sehingga tidak terdapat adanya informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Until the end of 2021, the Company did not have any funding sources from other securities, so there was no information related to this matter.

Peristiwa Penting 2021

2021 Event Highlights

Januari | January



Fasilitas Pinjaman POTUM POTUM Loan Facility

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM), entitas anak usaha Perseroan, menerima dukungan pendanaan melalui pemberian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior senilai Rp95 miliar dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), salah satu pemegang saham Perseroan.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis di sektor pengelolaan air bersih dengan memperkuat pengembangan bisnis aset baru di beberapa daerah strategis di Indonesia. Seperti mendukung pengembangan Kawasan Industri Semarang sebesar 100 liter/detik dan Kawasan Perumahan & Industri di kabupaten Bekasi sebesar 200 liter/detik.

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM), a subsidiary of the Company, received a funding of Senior Term Loan amounting Rp95 billion from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), a shareholder of the Company.

The funds will be utilized for business development in clean water management sector by strengthening the development of new assets in several strategic areas across Indonesia. One of the examples is for supporting the development of Industrial Estate in Semarang of 100 liters/second and Residential & Industrial Area in Bekasi Regency of 200 liters/second.

Maret | March

Perseroan mulai mengoperasikan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani di Makassar, Sulawesi Selatan. Peresmian ikon baru Kota Makassar ini dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono, serta dioperasikan secara perdana oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Pengoperasian jalan tol sepanjang 4,3 kilometer tersebut mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1619/KPST/M/2020 tanggal 12 November 2020 tentang penetapan pengoperasian Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3. Jalan ini dibangun sejak April 2018 dengan melibatkan lebih dari 2.000 pekerja lokal.

The Company commenced the operations of A.P. Pettarani elevated toll road in Makassar, South Sulawesi. The Makassar City's new landmark was inaugurated by Minister of Public Works and Housing (PUPR) Basoeki Hadimoeljono and operated for the first time by the President of Republic of Indonesia, Joko Widodo.

The operation of the 4.3 kilometer toll road was pursuant to the Minister of Public Works and Housing (PUPR) Decree No. 1619/KPST/M/2020 dated November 12, 2020 concerning the determination of Ujung Pandang Toll Road Section 3 operations. The toll road was constructed since April 2018 involving more than 2,000 local workers.



Peresmian Tol A.P. Pettarani Inauguration of A.P. Pettarani Toll Road



April | April

Perseroan melakukan *Commissioning Test (Tes Fungsi) Structural Health Monitoring System (SHMS) Jalan Tol Layang A.P. Pettarani* pada 10-11 April 2021. Tes dilaksanakan oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan Direktorat terkait Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menguji dan mengukur keseluruhan sistem perangkat SHMS.

Sistem tersebut berfungsi sebagai kontrol yang memonitor kinerja dan kondisi struktur jalan tol akibat beban kendaraan, beban gempa dan pengaruh suhu selama masa operasional tol. SHMS juga dapat memonitor secara berkala dan memberikan informasi jika terjadi kerusakan struktur jalan saat masa operasional yang diakibatkan oleh gempa atau ledakan dengan getaran yang mencurigakan.

The Company conducted Commissioning Test for Structural Health Monitoring System (SHMS) of A.P. Pettarani Elevated Toll Road on April 10-11, 2021. The test was carried out by the Bridge and Road Tunnel Safety Commission (KKJTJ) and related Directorate of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) to test and measure the entire system of SHMS devices.

The system works as a control to monitor the toll road structure's performance and condition against vehicle loads, earthquake loads and temperature impact throughout the toll road's operational period. SHMS also enables regular monitoring and provides information in the event of road structures damage during operations, resulted from earthquakes or explosions with suspicious vibrations.



10-11

Commissioning Test (Tes Fungsi) Structural Health Monitoring System (SHMS) Jalan Tol Layang A.P. Pettarani
Commissioning Test for Structural Health Monitoring System (SHMS) of A.P. Pettarani

April | April



22

Amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
Amendment to the Toll Road Concession Agreement

Entitas anak Perseroan, PT Makassar Metro Network (MMN) yang diwakili oleh Anwar Toha selaku Direktur Utama, melaksanakan penandatanganan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan notaris di kantor BPJT.

Amandemen ini berkenaan dengan perubahan rencana penerapan penyesuaian tarif pada jalan tol ruas Ujung Pandang Seksi 1, 2, dan 3 Layang A.P. Pettarani, Makassar.

The Company's subsidiary, PT Makassar Metro Network (MMN), represented by Anwar Toha as the President Director, signed the amendment to the Toll Road Concession Agreement jointly with the Head of Toll Road Regulatory Agency (BPJT) Danang Parikesit. The signing-off took place before notary at the BPJT office.

This amendment was in relation with changes in the plan for tariff adjustments on Ujung Pandang Sections 1, 2 and 3 of A.P. Pettarani Elevated Toll Road, Makassar.

Mei | May



Tarif Baru Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2, dan 3
New Rates for Sections 1,2, and 3 Ujung Pandang Toll Roads

Setelah Jalan Tol Layang A.P. Pettarani (Tol Ujung Pandang Seksi 3) Makassar resmi beroperasi sejak 19 Maret 2021, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 552/KPTS/M/2021 menetapkan penerapan tarif baru ini berlaku untuk kendaraan golongan I sampai V di enam (6) gerbang tol: Gerbang Tol Cambaya, Ramp Parangloe, Parangloe, Kalukubodoa, Ramp Tallo Timur dan Ramp Tallo Barat mulai 8 Mei 2021 untuk Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1,2, dan 3, sebagai bentuk pengembalian investasi sekaligus untuk meningkatkan kualitas, fasilitas, dan layanan di tiap ruas tol.

After the A.P. Pettarani Elevated Toll Road (Section 3 Ujung Pandang Toll Road) Makassar officially operates on 19 March 2021, the government through the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 552/KPTS/M/2021 stipulates that the application of the new rate applies to class I to V vehicles at six (6) toll gates: Cambaya Toll Gate, Ramp Parangloe Toll Gate, Parangloe Toll Gate, Kalukubodoa Toll Gate, Tallo Timur Ramp and Tallo Barat Ramp as a form of return on investment as well as to improve quality, facilities, and services in each toll road section.

Saat penerapan tarif baru, Perseroan juga memberikan tarif khusus terbatas bagi angkutan kota (angkot) yang rutenya melewati Jalan Samping Tol dan Gerbang Tol Tallo Timur. Tarif khusus terbatas ini merupakan insentif bagi pengemudi kendaraan angkot. Tarif khusus terbatas akan diberikan selama 1 (satu) tahun sejak pemberlakuan ini diterapkan yang nantinya akan dievaluasi lebih lanjut.

While implementing new tariffs, the Company also provided special fares for public transportation (angkot) passing through the Toll's Side Road and East Tallo Toll Gate. This limited fare was an incentive for angkot drivers. The special fare will be valid for 1 (one) year since its implementation, and subject to further evaluation.

Mei | May

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM), entitas anak usaha Perseroan akan memenuhi kebutuhan air minum sesuai aspek 3K yaitu, kualitas, kuantitas dan kontinuitas di wilayah Kuala Tanjung, Kabupaten Batu. Manajemen POTUM telah melakukan pembahasan dengan Bupati Kabupaten Batu Bara beserta jajarannya, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tanjung, perwakilan dari anggota konsorsium dan tim konsultan mengadakan pertemuan lanjutan.

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM), a subsidiary of the Company, aimed at fulfilling the needs of Bara drinking water according to three aspects, namely, quality, quantity, and continuity (3K) in Kuala Tanjung area, Batu Regency. POTUM management held discussions with the Regent of Batu Bara Regency and his staff, the Director of the Tirta Tanjung Water Company, representatives of consortium members and the consultant team held a follow-up meeting.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ir. H. Zahir, M.Ap, Bupati Batu Bara, yang dilakukan secara virtual yang membahas akselerasi progres pengembangan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pembahasan mencakup berbagai aspek terutama mengenai jadwal pengembangan dan aspek komersial.

The meeting was chaired by Ir. H. Zahir, M.Ap, Regent of Batu Bara, which was held virtually to discuss the acceleration of the Drinking Water Supply System (SPAM) Project construction in Kuala Tanjung Area, Batu Bara Regency, North Sumatra. The discussion covered various aspects, especially on construction schedule and commercial aspects.



POTUM Dukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kuala Tanjung
POTUM Supported the Development of Drinking Water Supply System in Kuala Tanjung



Agustus | August



19

RUPST Nusantara Infrastructure AGMS of Nusantara Infrastructure

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dilaksanakan secara fisik dan virtual melalui aplikasi Zoom sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Acara dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, perwakilan Biro Administrasi Efek (BAE), Notaris, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan para pemegang saham.

Seluruh penyelenggaraan acara berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi seluruh peserta yang hadir secara langsung di lokasi acara dengan memastikan telah melakukan tes antigen, melakukan pengecekan suhu, menyediakan *hand-sanitizer*. Seluruh peserta rapat selalu menggunakan masker selama acara berlangsung dan menjaga jarak aman.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held in person and virtually through Zoom application in accordance with provisions set by the government. The event was attended by the entire Board of Commissioners, Board of Directors, representatives of the Securities Administration Bureau (BAE), Notary, Public Accounting Firms (KAP) and shareholders.

The event ran well under strict health protocols for all participants attending in person at the event location by implementing antigen test, temperature check, and providing *hand-sanitizer*. All participants wore masks at all times throughout the event and maintained a safe physical distancing.

Setelah menyelesaikan dua proyek strategis yakni Pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung di Sumatera Utara, kali ini Nusantara Infrastructure melalui sektor bisnisnya di jalan tol PT Bintaro Serpong Damai (BSD) mendapatkan dukungan finansial berbentuk pemberian fasilitas kredit investasi senilai Rp750 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk untuk mendukung pembiayaan dan pengembangan proyek jalan tol.

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan perwakilan pihak PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di Gedung Equity Jakarta. Fasilitas kredit ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kegiatan operasional sekaligus memperkuat stabilitas finansial dalam mendukung pengembangan proyek strategis yang saat ini tengah menjadi fokus perusahaan. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai aset perusahaan dalam waktu dekat.

Following the completion of two strategic projects, namely the construction of A.P. Pettarani Makassar Elevated Toll Road and Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) in North Sumatra, this time, Nusantara Infrastructure through its business sector on toll roads, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD), received financial support in the form of investment credit facilities worth Rp750 billion from PT Bank Central Asia Tbk which will be used to support the financing and development of toll road projects.

The signing of this agreement was carried out by the President Director of PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and representatives of PT Bank Central Asia Tbk (BCA) at the Equity Building, Jakarta. This credit facility is expected to have a positive impact on operational activities as well as strengthen financial stability in supporting the development of strategic projects that are currently underway be the focus of the company. This project is also expected to increase the value of the Company's assets in the near future.

Agustus | August



30

Fasilitas Kredit Investasi Pengembangan Bisnis Sektor Jalan Tol Credit Facility for the Investment of Toll Road Business Development

September | September



POTUM Dukung Penyediaan Air Bersih Manado POTUM Supported Manado's Clean Water Supply

Unit bisnis Perseroan di sektor air bersih, yaitu PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM) berkomitmen untuk menyediakan air bersih di berbagai daerah, antara lain Kota Manado dan Bitung dengan menggunakan teknologi *non-chemical*. POTUM bersama dan PT Alam Wiratama Kencana (AWK) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Manado dalam hal pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Manado mulai dari kapasitas *existing* 500 liter/detik.

The Company's business unit in the clean water sector, namely PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM) is committed to providing clean water in various areas, including Manado City and Bitung using non-chemical technology. POTUM together with PT Alam Wiratama Kencana (AWK) have signed a memorandum of understanding (MoU) with the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Dharma Manado for managing and developing the Drinking Water Supply System (SPAM) in the city of Manado starting from existing capacity 500 liters/second.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur POTUM Donny Pradono Suleiman, Direktur Utama AWK Nicolas William Sompotan dan Direktur Utama PDAM Kota Manado Meiky Taliwuna yang diselenggarakan di Equity Tower, Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur dan Komisaris NI, POTUM, dan PDAM Tirta Dharma Kota Manado.

The signing of the MoU was carried out by POTUM Director Donny Pradono Suleiman, AWK President Director Nicolas William Sompotan and Manado City PDAM President Director Meiky Taliwuna held at Equity Tower, Jakarta. This event was also attended by the Director and Commissioner of NI, POTUM, and PDAM Tirta Dharma Manado City.

Oktober | October

PT Bintaro Serpong Damai (Tol BSD), unit bisnis PT Nusantara Infrastructure Tbk di sektor jalan tol terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan ruas tol Pondok Aren-Serpong dengan memberikan kemudahan dalam mencetak struk melalui sistem digitalisasi elektronik struk (*e-receipt*). Pencetakan *e-receipt* di gerbang tol Pondok Aren 1 dan 2 kini dapat diakses secara *real time* hanya dengan mengakses *website* resmi PT Bintaro Serpong Damai (BSD), yaitu: bsdtol.com.

Program digitalisasi ini merupakan salah satu upaya manajemen untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna jalan Tol BSD dengan mengakomodir kebutuhan pencetakan struk saat bertransaksi di Gerbang Tol Pondok Aren 1 dan 2. Selain itu, diharapkan melalui sistem digitalisasi dapat mengurangi penggunaan kertas dan mendukung kelestarian lingkungan.

PT Bintaro Serpong Damai (BSD Toll), a business unit of PT Nusantara Infrastructure Tbk in the toll road sector, continuously strived to improve its services to Pondok Aren-Serpong toll road users by providing convenience in printing receipts through electronic receipt digitization system (*e-receipt*). *E-receipt* printing at Pondok Aren 1 and 2 toll gates can now be accessed in real time through the official website of PT Bintaro Serpong Damai (BSD), namely: bsdtol.com.

This digitization program is one of the management's efforts in providing convenient services to BSD Toll Road users by accommodating the need for receipt printing when transacting at Pondok Aren 1 and 2 Toll Gates. In addition, digitized system also reduces the use of paper and promotes environmental sustainability.



Tol Bintaro Serpong Damai (BSD) Gunakan Sistem Digital *E-Struk* Bintaro Serpong Damai (BSD) Toll Road Implemented Digital E-Receipt



Oktober | October



18

POTUM Dukung Penyediaan Air Bersih Bitung POTUM Supported Bitung Clean Water Supply

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM), entitas anak Perseroan dan PT Alam Wiratama Kencana (AWK) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dua Saudara Kota Bitung telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bitung dengan memanfaatkan sumber air baku di wilayah kota Bitung sebesar 200-300 liter/detik. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Donny P Suleiman, Direktur Utama AWK; Raymond Luntungan, Direktur Utama PDAM Kota Bitung yang juga disaksikan langsung oleh Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung dan Johny Lumintang, Komisaris NI.

Melalui penandatanganan kerja sama ini, perusahaan diharapkan dapat menambah portofolio di sektor air bersih. Selain itu, berupaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendistribusian air bersih yang ramah lingkungan dan memenuhi aspek 3K yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

PT Potum Mundi Infranasantara (POTUM), a subsidiary of the Company and PT Alam Wiratama Kencana (AWK) and Regional Drinking Water Company (PDAM) Dua Saudara of Bitung City have signed a memorandum of understanding (MoU) for drinking water supply system (SPAM) in Bitung City by utilizing raw water sources in Bitung city area of 200-300 liters/second. The MoU sign-off was carried out by Donny P Suleiman, President Director of AWK; Raymond Luntungan, President Director of PDAM Bitung City, also witnessed by Maurits Mantiri, Mayor of Bitung and Johny Lumintang, Commissioner of NI.

By signing this cooperation, the Company is expected to expand its portfolio in the clean water sector. In addition, it seeks to support government programs in improving the distribution of clean water that is environmentally friendly and satisfy the 3K aspects, namely quality, quantity, and continuity, to fulfill community needs.

November | November

Manajemen PT Makassar Metro Network (MMN) & PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) yang merupakan salah satu anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk di sektor jalan tol bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama Penanggulangan Keadaan Darurat Wilayah Makassar di Makassar. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Anwar Toha selaku Direktur Utama MMN, Ismail Malliungan, Direktur Utama JTSE dan jajaran Direksi lain dari masing-masing perusahaan. Kerja sama ini juga melibatkan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan insiden yang dapat terjadi di jalan raya, jalan tol, dan wilayah operasi perusahaan dalam penanggulangan kebakaran, evakuasi medis, penanggulangan tumpahan minyak dan kebocoran pipa serta latihan simulasi keadaan darurat bersama. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dapat memberikan penanganan pertama dalam situasi keadaan darurat secara cepat, tepat, dan proaktif.

The management of PT Makassar Metro Network (MMN) & PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), a subsidiary of PT Nusantara Infrastructure Tbk in the toll road sector, together with PT Pertamina Patra Niaga signed a Memorandum of Understanding for Makassar Region Emergency Management Cooperation in Makassar. The signing of this agreement was carried out by Anwar Toha as the President Director of MMN, Ismail Malliungan, the President Director of JTSE and other directors of respective company. This collaboration also involved Regional Disaster Management Agency (BPBD) and Fire Department team of Makassar City.

This memorandum of understanding aimed to accelerate the handling of incidents that may occur on roads, toll roads and the company's operational areas in preventing fire, medical evacuation, handling of oil spills and pipe leaks as well as joint emergency simulation exercises. Thus, the parties involved can provide first aid during emergency situation quickly, accurately, and proactively.



18

Kerja Sama Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana Tol Toll Disaster Emergency Response Cooperation

Desember | December



Fasilitas Pembiayaan Pembangkit Energi Terbarukan
Renewable Energy Power Plant Financing Facility

PT Inpolo Meka Energi (IME) yang merupakan operator dan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung menerima dukungan Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp375 miliar berdasarkan prinsip syariah dengan skema pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pembiayaan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan. Penandatanganan telah dilakukan oleh Direksi IME dan SMI di Jakarta.

Dalam perjanjian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertindak sebagai agen penampungan. PLTA Lau Gunung melayani sekitar 10.000 masyarakat di Kabupaten Dairi dan Karo melalui jaringan listrik PLN. Keberadaan PLTA Lau Gunung mampu mendukung berbagai kegiatan sehari-hari masyarakat dari sisi pendidikan, perekonomian, industri dan kegiatan lainnya melalui pendistribusian listrik ke berbagai tempat di wilayah Sumatera Utara.

PT Inpolo Meka Energi (IME) as the operator and management of Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA) received financing facility amounting Rp375 billion based on sharia principles under Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) financing scheme from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI), a State-Owned Enterprises (BUMN) engages in infrastructure financing under the Ministry of Finance. The signing was carried out by the Directors of IME and SMI in Jakarta.

In the agreement, PT Bank Syariah Indonesia Tbk acts as the escrow agent. Lau Gunung hydropower plant serves around 10,000 people in Dairi and Karo regencies through PLN electricity network. Lau Gunung hydropower plant supports daily activities of the community in education, economy, industry, and other activities by distributing electricity to various places in North Sumatra.

PT Margautama Nusantara (MUN) unit bisnis PT Nusantara Infrastructure Tbk di sektor jalan tol mengadakan webinar berskala internasional bertajuk “Indonesia’s Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Perspective” secara virtual. Webinar ini terdiri dari 2 (dua) sesi dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi yakni regulator, institusi keuangan, operator dan investor sampai dengan akademisi di berbagai negara seperti Indonesia, Jepang, Filipina, Cina, Kanada dan Inggris.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit serta Hedy Satrya Putera, Staf Ahli 1 Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Webinar ini membahas lebih dalam mengenai sektor infrastruktur, khususnya jalan tol mulai dari regulasi dan peraturan; sumber dan jumlah pendanaan; peluang dan tantangan; hingga upaya pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dukungan pihak swasta dalam meningkatkan investasi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.

PT Margautama Nusantara (MUN), a business unit of PT Nusantara Infrastructure Tbk in the toll road sector, held an international webinar virtually entitled “Indonesia’s Toll Road Infrastructure Competitiveness in Global Perspective”. This webinar consisted of 2 (two) sessions, presenting speakers from various institutions, such as regulators, financial institutions, operators, and investors to academicians in various countries such as Indonesia, Japan, Philippines, China, Canada, and the UK.

The event was opened by the Head of the Toll Road Regulatory Agency Danang Parikesit and Hedy Satrya Putera, Expert Staff 1 for Investment Competitiveness Improvement at the Investment Coordinating Board (BKPM). This webinar discussed infrastructure sector in depth, particularly toll roads, starting from regulations, source and amount of funding, opportunities and challenges to the efforts of the government, State-Owned Enterprises (BUMN) and the support from private sector in increasing investment to support the acceleration of sustainable toll road infrastructure development.

Desember | December



Penyelenggaraan Webinar Internasional
International Webinar



Desember | December



14

Paparan Publik Perseroan Company Public Expose

PT Nusantara Infrastructure Tbk menyelenggarakan acara paparan publik (*public expose*) secara virtual melalui aplikasi Zoom yang juga disiarkan secara langsung melalui platform YouTube. Kegiatan tersebut merupakan paparan kinerja dan performa Perusahaan selama tahun 2021 dan apa yang akan dilakukan di tahun 2022.

Manajemen diwakili oleh Ramdani Basri selaku Direktur Utama dan Danni Hasan sebagai Direktur. Usai paparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh moderator Deden Rochmawaty sebagai General Manager Corporate Affairs Perusahaan. Acara ini dihadiri oleh berbagai *stakeholder*, di antaranya manajemen Perseroan, para pemegang saham, analis, sekuritas, media, dan tamu undangan dari unit bisnis Perseroan.

PT Nusantara Infrastructure Tbk held a virtual public expose through Zoom application, which was also broadcasted live on the YouTube platform. This event discussed the Company's performance throughout 2021 and strategic plans in 2022.

Management was represented by Ramdani Basri as President Director and Danni Hasan as Director. After the presentation, the event continued with question and answer session led by moderator Deden Rochmawaty as General Manager of Corporate Affairs of the Company. This event was attended by various stakeholders, including the Company's management, shareholders, analysts, securities, media and invited guests from the Company's business units.

Desember | December

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) selaku operator dan pengelola jalan tol Seksi IV, Makassar resmi berlakukan penyesuaian tarif berkala bagi pengguna jalan. Penyesuaian tarif ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1485/KPTS/M/2021 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Makassar Seksi IV.

Sebelum melakukan penyesuaian tarif, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktur Jalan Bebas Hambatan (DJBH), Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan penilaian dan evaluasi atas seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penyesuaian tarif dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan regulasi yang berlaku dengan skema perhitungan tarif lama yang disesuaikan dengan inflasi.

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) as the operator and management of the Section IV toll road, Makassar officially applied a periodic rate adjustments for road users. This tariff adjustment was pursuant to Minister of Public Works and Housing (PUPR) Decree No. 1485/KPTS/M/2021 concerning Adjustment of Toll Tariffs on Makassar Toll Road Section IV.

Prior to making tariff adjustments, Toll Road Regulatory Agency (BPJT) and Director of Toll Road (DJBH), Directorate General of Highways have assessed and evaluated all Minimum Service Standards (SPM). Tariff adjustments were required every 2 (two) years in accordance with prevailing regulations, by adjusting the initial tariff to inflation.



15

Tarif Baru Jalan Tol Seksi IV Makassar New Tariffs for Section IV Makassar Toll Road

Penghargaan Awards



South Sulawesi Digifest 2021 South Sulawesi Digifest 2021

“Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Pertama di Indonesia yang Menerapkan Sistem Pembayaran Non-Tunai Menggunakan QR Code (QRIS CPM) di Jalan Tol” untuk PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) diberikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan.

“The First Toll Road Business Entity (BUJT) in Indonesia to Implement a Non-Cash Payment System by Using a QR Code (QRIS CPM) on Toll Roads” for PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) awarded by Bank Indonesia Representative Office South Sulawesi.

9 April 2021
April 9, 2021

Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) COVID-19 COVID-19 Prevention and Control Award

“5 Penghargaan Silver atas Keberhasilan Menjalankan Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) COVID-19” untuk PT Makassar Metro Network diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan.

“5 Silver Awards for Successfully Running the Covid-19 Prevention and Control (P2P) Program” for PT Makassar Metro Network awarded by South Sulawesi Provincial Manpower Office.



22 April 2021
April 22, 2021



Penghargaan Nihil Kecelakaan Zero Accident Award

“2 Penghargaan terkait Nihil Kecelakaan/Zero Accident Tingkat Nasional” diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

“2 Awards related to Zero Accident at National Level” awarded Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

22 April 2021
April 22, 2021



2nd Mino Best Project Award 2nd Mino Best Project Award

2nd Mino Best Project Award (REAAA - Road Engineering Association Of Asia And Australasia) untuk Jalan Tol Layang A.P. Pettarani diberikan oleh Road Engineering for Asia and Australasia (REAAA).

2nd Mino Best Project Award (REAAA - Road Engineering Association Of Asia And Australasia) for A.P. Pettarani Elevated Toll Road awarded by Road Engineering for Asia and Australasia (REAAA).

15 September 2021
September 15, 2021

Penghargaan Green Leadership Green Leadership Award

“Green Leadership Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” untuk PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi Empat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Green Leadership in Environmental Protection and Management” for PT Makassar Metro Network and PT Jalan Tol Seksi Empat awarded by Makassar City Environment Office.



23 September 2021
September 23, 2021



Penghargaan Standar Pelayanan Minimum Untuk Tol BSD Minimum Service Standard Award for BSD Toll Toad

“BUJT Terbaik, Terkooperatif dan Teresponsif dari Hasil Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol Seluruh Indonesia” untuk PT Bintaro Serpong Damai (TOL BSD) diberikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Best, Most Cooperative and Most Responsive BPJT Based on Fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) of Toll Roads Across Indonesia” for PT Bintaro Serpong Damai (BSD TOL) awarded by Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR).

1 November 2020-23 Juni 2021
November 1, 2020-June 23, 2021



Penghargaan Kondisi Jalan Tol Untuk Tol Ujung Pandang Seksi 4 Toll Road Condition Award For Section 4 Of Ujung Pandang Toll Road

“Peringkat Lima (5) sebagai Jalan Tol berdasarkan Kondisi Jalan Tol” untuk PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat tol Ujung Pandang (Tol Ujung Pandang seksi 1 & 2) diberikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

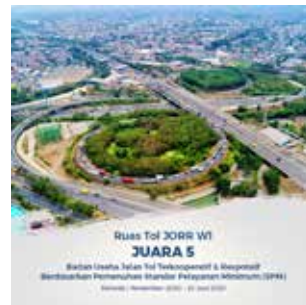
“Fifth (5th) Ranked Toll Road Based on Toll Road Condition” for PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat Ujung Pandang Toll Road (Ujung Pandang Toll Road sections 1 & 2) awarded by Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR).

1 November 2020-23 Juni 2021
November 1, 2020-June 23, 2021

Penghargaan Pemenuhan Spm Untuk JORR W1 Minimum Service Standard Compliance Award For JORR W1

“Peringkat 5 BUJT Paling Kooperatif dan Responsif berdasarkan Pemenuhan SPM” untuk PT Jakarta lingkaran bersatu (Tol JORR W1) diberikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Fifth (5th) Ranked of Most Cooperative and Most Responsive BUJT Based on SPM Fulfillment” for PT Jakarta Lingkaran Bersatu (JORR W1 Toll Road) awarded by Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR).



1 November 2020-23 Juni 2021
November 1, 2020-June 23, 2021



Penghargaan Tol Terbaik Best Toll Award

“Jalan Tol Terbaik berdasarkan Panjang Jalan (Konstruksi di Atas Tanah) di Bawah 15 km” untuk PT Jalan Tol Seksi Empat diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

“Best Toll Road Based on Road Length (Above Ground Construction) Below 15 km” for PT Jalan Tol Seksi Empat awarded by Ministry of Public Works and Housing (PUPR) of Republic of Indonesia.

3 Desember 2021
December 3, 2021



7 Desember 2021
December 7, 2021

Penghargaan OPEXCON Bintaro Serpong Damai (BSD) OPEXCON Bintaro Serpong Damai (BSD) Award

“Silver Achievement” untuk PT Bintaro Serpong Damai atas inovasi struktur digital yang dapat diakses secara online, instalasi *traffic audio announcer* dalam rangka penertiban kendaraan parkir di jalan tol, serta penerapan 5S untuk fasilitas pelayanan lalu lintas pada kendaraan patroli diberikan oleh SHIFT Indonesia.

“Silver Achievement” for PT Bintaro Serpong Damai for the innovation of digital receipts that can be accessed online, the installation of traffic audio announcers for controlling parking vehicles on toll roads, as well as the implementation of 5S for traffic service facilities for patrol vehicles awarded by SHIFT Indonesia.

Penghargaan OPEXCON Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) OPEXCON Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) Award

“Bronze Achievement” untuk PT Jalan Tol Seksi Empat atas inovasi struktur digital yang dapat diakses secara online, instalasi *traffic audio announcer* dalam rangka penertiban kendaraan parkir di jalan tol, serta penerapan 5S untuk fasilitas pelayanan lalu lintas pada kendaraan patroli diberikan oleh SHIFT Indonesia.

“Bronze Achievement” for PT Jalan Tol Seksi Empat for the innovation of digital receipts that can be accessed online, the installation of traffic audio announcers in order to control parking vehicles on toll roads, as well as the implementation of 5S for traffic service facilities on patrol vehicles awarded by SHIFT Indonesia.



7 Desember 2021
December 7, 2021



7 Desember 2021
December 7, 2021

Penghargaan OPEXCON Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari OPEXCON Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari Award

“Bronze Achievement” untuk PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari atas inovasinya dalam meminimalisir “wood waste” pada proses bisnis serta menurunkan proporsi konsumsi bahan bakar cangkang (*palm kernel shell*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan tandan buah kosong (*empty fruit bunch*) pada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) diberikan oleh SHIFT Indonesia.

“Bronze Achievement” for PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari for its innovation in minimizing “wood waste” in business processes and reducing the proportion of palm kernel shell fuel consumption by optimizing the utilization of empty fruit bunches in Biomass Power Plants (PLTBm) awarded by SHIFT Indonesia.

Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Reports



Perseroan telah berhasil merespons dengan sangat baik situasi yang penuh dengan tantangan di tahun 2021, sehingga kinerja Perseroan tetap stabil.

The Company has managed to respond to the challenging situations in 2021 very well, enabling the Company's performance to remain stable.

Jose Ma. K. Lim
Komisaris Utama
President Commissioner



Pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia dan rahmat yang diberikan, sehingga PT Nusantara Infrastructure Tbk (Perseroan) mampu melalui tahun buku 2021 dengan baik, walaupun di tengah kondisi yang masih bergerak dinamis. Tahun buku ini memang bukan situasi yang mudah untuk dihadapi mengingat pandemi COVID-19 belum seluruhnya pulih.

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan pada tahun buku 2021. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha.

Memasuki tahun buku 2021, Dewan Komisaris berpandangan bahwa pemulihan ekonomi mulai terasa seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Aktivitas sosial masyarakat mulai menggeliat, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian.

Kondisi perekonomian nasional pada kuartal I-2021, walaupun masih berkontraksi, namun sangat kecil, yaitu 0,74% secara tahunan (*year on year/yoy*). Pada kuartal berikutnya, perekonomian langsung tumbuh positif. Di awal kuartal III-2021, laju pemulihan ekonomi sempat terhambat akibat varian baru COVID-19, yaitu varian Delta. Kendati demikian, perekonomian nasional sepanjang tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tumbuh 3,69% yoy.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah merespons dengan sangat baik situasi yang penuh dengan tantangan tersebut, sehingga kinerja Perseroan tetap stabil. Dari sisi operasional misalnya, Perseroan berhasil menuntaskan produksi 10 megawatt Pembangkit Listrik Tenaga Air dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak *Commercial Operation Date*, yang direalisasikan secara gradual.

Our sincere gratitude to God Almighty, PT Nusantara Infrastructure Tbk (the Company) successfully thrived throughout 2021 financial despite constantly changing conditions. This financial year was not an easy one to deal with, considering the COVID-19 pandemic that has not been fully recovered yet.

On this occasion, the Board of Commissioners would like to convey a report on the implementation of duties and functions in accordance with the prevailing laws and regulations, especially with regard to the supervision of the Company's business activities in 2021 financial year. The Board of Commissioners also performed its function on providing advice to the Board of Directors in carrying out business activities.

Entering 2021 financial year, the Board of Commissioners viewed that the economic recovery was kicking in, along with the declining COVID-19 cases. Social activities resumed to set off, providing a positive impact on the economy.

The domestic economy in the first quarter of 2021, although remained contracting, grew slightly at 0.74% on an annual basis (*year on year/yoy*). In the following quarter, the economy immediately grew positively. At the beginning of the third quarter of 2021, the pace of economic recovery was hampered by the new variant of Covid-19, namely the Delta variant. Nevertheless, the domestic economy throughout 2021 grew 3.69% yoy, according to the Central Statistics Agency (BPS).

The Board of Commissioners viewed that the Board of Directors responded to this challenging situation very well, so that the Company's performance remained stable. From an operational perspective, for example, the Company has succeeded in completing the production of 10 megawatts of hydroelectric power within a period of 1 (one) year from the *Commercial Operation Date*, which was realized gradually.

Dari sisi keuangan, laba bersih Perseroan pada tahun 2021 mencapai Rp25,7 miliar, turun 77,13% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp112,6 miliar. Dibandingkan dengan target, yaitu Rp95,1 miliar, pencapaiannya adalah 27,06%.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi sejalan dengan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan tanggung jawab atas kebijakan pengurusan Perseroan. Hal ini merupakan mandat yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris memperhatikan pencapaian usaha dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Target tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

Dewan Komisaris juga memberikan perhatian pada proses, yaitu sejak dari perumusan hingga implementasi strategi yang dijadikan penilaian terhadap kinerja Direksi. Tak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan.

Di antara banyak pencapaian penting Perseroan pada tahun buku adalah penghargaan The 2nd Mino Best Project Award untuk Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar yang diberikan oleh Road Engineering Association for Asia dan Australasia (REAAA). Penghargaan ini diberikan untuk proyek jalan maupun jembatan baru terbaik yang berlokasi di wilayah Asia Pasifik yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

Penghargaan yang diterima itu merupakan pengakuan dari pihak eksternal terhadap kinerja Perseroan. Untuk itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut.

Pencapaian produksi listrik 10 megawatt pada Pembangkit Listrik Tenaga Air Perseroan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak *Commercial Operation Date*, juga dicapai di tengah beragam tantangan. Termasuk di antaranya, kondisi *excess supply* listrik yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) serta meningkatnya harga bahan bakar biomasa bagi Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Perseroan.

From the financial side, the Company's net profit in 2021 reached Rp25.7 billion, an decrease of 77.13% compared to 2020, which amounted to Rp112.6 billion. Compared to the target, which was set at Rp95.1 billion, the achievement was 27.06%.

EVALUATION OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

Evaluation of Board of Directors performance was in line with the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities for the Company's management policies. This is a mandate stipulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

In evaluating Board of Directors' performance, the Board of Commissioners examined Company business achievements by comparing them to the targets jointly set by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The target was stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

The Board of Commissioners also paid attention to the process, namely from the stage of formulation to implementation of strategies that were referred to in the evaluation of the Board of Directors' performance. Equally important was the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company.

One of the Company's important achievements in the financial year was The 2nd Mino Best Project Award for the elevated toll road A.P. Pettarani, Makassar, awarded by the Road Engineering Association for Asia and Australasia (REAAA). This award was held every 4 (four) years, given for the best new road and bridge project located in the Asia Pacific region.

The award was an acknowledgment from external parties of the Company's performance. For this achievement, the Board of Commissioners gave the utmost appreciation.

The realization of 10 megawatts of electricity production at the Company's Hydroelectric Power Plant within a span of 1 (one) year from the Commercial Operation Date, was also achieved amidst various challenges, including, among others, the excess supply of electricity faced by PT PLN (Persero) as well as the increasing price of biomass fuel for the Company's Biomass Power Plant.



Pengembangan digital yang dilaksanakan secara berkesinambungan juga mendapat perhatian dari Dewan Komisaris, karena selain memberikan manfaat besar, digitalisasi merupakan salah satu pilar penting Perseroan. Digitalisasi sangat membantu Perseroan mempermudah proses bisnis, sehingga meningkatkan nilai (*value*) Perseroan.

Hingga tahun 2021, seluruh proses bisnis dari tingkat pusat hingga entitas usaha operasional telah terintegrasi, termasuk di bidang keuangan. Dengan demikian, posisi keuangan termasuk kas setiap entitas dapat diketahui melalui sistem digital.

Sistem digital juga telah dikembangkan pada bidang operasional. Pemantauan kegiatan operasional, misalnya pergantian jalan dalam kelolaan Perseroan atau kerusakan kecil lainnya, semua sudah dapat dipantau secara digital.

Atas seluruh pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi pada tahun 2021 sangat baik. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas segala pencapaian yang telah dipersempikan pada Perseroan.

Pengawasan dalam Perumusan dan Implementasi Strategi oleh Direksi

Seperti telah disampaikan sebelumnya, Dewan Komisaris ikut memberikan perhatian sejak dari perumusan hingga implementasi strategi yang dilaksanakan oleh Direksi. Proses pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain dengan melihat langsung kegiatan usaha Perseroan atau meminta laporan pada Direksi melalui mekanisme rapat gabungan.

Selain itu, proses pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut melakukan koordinasi dengan organisasi di bawah Direksi dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk laporan kepada Dewan Komisaris serta usulan rekomendasi untuk diteruskan kepada Direksi.

Dari proses pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris berpandangan bahwa antara perumusan dan implementasi strategi telah berjalan dengan baik dan konsisten, sehingga mampu memberikan hasil memuaskan. Rumusan dan implementasi strategi yang diterapkan oleh Direksi telah mempertimbangkan kondisi eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Perseroan.

Continuous development on digitalization was also attended by the Board of Commissioners. In addition to providing great benefits, digitalization is one of the important pillars of the Company. Digitalization will greatly assist the Company in simplifying business processes, thus increasing the value of the Company.

Until 2021, all business processes from the central level to operational business entities have been integrated, including in the financial sector. Therefore, the financial position including cash balance of each entity can be accessed digitally.

Digital systems have also been developed in the operational aspect. Monitoring of operational activities, such as changes in road under the Company's management or other minor damages, can all be tracked digitally.

For all these achievements, the Board of Commissioners considered the performance of the Board of Directors in 2021 to be very satisfactory. The Board of Commissioners appreciated all the achievements contributed to the Company.

Supervision in Strategy Formulation and Implementation by the Board of Directors

As previously mentioned, the Board of Commissioners also took a close look at the formulation until the implementation of strategies carried out by the Board of Directors. The supervisory process performed by the Board of Commissioners, among others, was by observing directly the Company's business activities or requesting a report to the Board of Directors through a joint meeting mechanism.

In addition, the supervisory process was also carried out by involving committees under the Board of Commissioners. These committees coordinated with organizations under the Board of Directors and submitted the results in the form of report to the Board of Commissioners as well as proposed recommendations to be directed to the Board of Directors.

From the supervisory process that has been carried out throughout 2021, the Board of Commissioners viewed that the formulation and the implementation of strategies have run well and consistently, delivering satisfactory results. The formulation and implementation of strategies adopted by the Board of Directors has taken into account external conditions potentially affecting the Company's performance.

Rumusan serta strategi Direksi juga diteruskan dengan baik ke organisasi di bawahnya, sehingga menjadi seluruh kegiatan usaha relatif berjalan sesuai dengan rencana. Begitu pun antara entitas induk dengan entitas anak atau asosiasi seluruhnya telah terintegrasi, sekaligus menunjukkan bahwa implementasi strategi telah dijalankan dengan baik.

Kenaikan suku bunga acuan tersebut berpotensi mempengaruhi suku bunga pinjaman, sehingga berdampak terhadap bisnis Perseroan dalam pembiayaan. Dewan Komisaris mendukung analisis yang disampaikan oleh Direksi dalam menyusun prospek usaha Perseroan tersebut. Dengan kemampuan mengidentifikasi risiko lebih dini, Perseroan akan mampu melakukan mitigasi atau lebih siap menghadapinya.

Untuk itu, Dewan Komisaris akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Direksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris akan menjadi bagian dalam proses tersebut, sesuai dengan peran dan fungsi yang melekat.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dewan Komisaris merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam struktur penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan bersama Direksi. Di antara tujuan penting penerapan GCG adalah mendorong kemandirian, profesionalisme dan objektivitas organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan operasional.

Penerapan GCG akan mendukung reputasi Perseroan sejalan dengan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di lingkungan Perseroan telah berjalan dengan baik. Beragam pedoman terkait GCG telah diterapkan sebagai panduan dalam implementasi prinsip-prinsip GCG.

The formulations and strategies of the Board of Directors were also well cascaded to the lower organizations, so that all business activities performed in line with the plan. Accordingly, the parent entity and its subsidiaries or associations have all been integrated, showing that the strategy implementation has been carried out properly.

The increase in the benchmark interest rate would then potentially affect loan interest rates, impacting the Company's business in financing. The Board of Commissioners supported the Board of Directors analysis in preparing the Company's business prospects. Having the ability to identify risks earlier, the Company will be able to mitigate or become better prepared to deal with them.

Therefore, the Board of Commissioners will provide its full support to the Board of Directors in achieving the targets that have been set. The Board of Commissioners will become part of the process, in accordance with its inherent roles and functions.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Together with the Board of Directors, the Board of Commissioners is an integral part in the structure of Good Corporate Governance (GCG) implementation in the Company's environment. Among the important objectives of implementing GCG is to encourage the independence, professionalism and objectivity of the Company's bodies in making decisions and carrying out operational activities.

The implementation of GCG will support the Company's reputation, in line with increasing trust from stakeholders. Throughout 2021, the Board of Commissioners viewed that the implementation of GCG within the Company has been going well. Various guidelines related to GCG have been applied as a guidance in the implementation of GCG principles.



Kendati semuanya telah berjalan, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan kepada Direksi untuk terus mengembangkan penerapan GCG, mengingat tantangan yang dihadapi Perseroan sangat dinamis. Dengan demikian, norma dan penerapan tata kelola mampu beradaptasi dan merespons perkembangan kondisi eksternal dengan baik.

Sebagai bagian dari penerapan GCG di lingkungan Perseroan adalah implementasi manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan sejak dari awal proyek melalui tim yang melakukan analisis atas potensi risiko yang dialami oleh Perseroan. Pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi operasional untuk proses awal dan perencanaan, sementara di akhir oleh Tim Manajemen Risiko.

Perseroan senantiasa memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di seluruh proses operasional. Untuk itu, Perseroan menetapkan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Kebijakan tersebut selalu dikomunikasikan seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan dilaksanakan, serta dievaluasi tingkat efektivitasnya.

Even though everything has been in place, the Board of Commissioners always reminds the Board of Directors to continue on developing the implementation of GCG, considering the dynamic challenges faced by the Company. Thus, the norms and implementation of governance should be able to adapt and respond well to the development of external conditions.

The implementation of risk management is also part of GCG implementation within the Company. Risk management is carried out from the beginning of the project, performed by a team that analyzes the potential risks exposed by the Company. Its implementation is then carried out by the operational organization for the initial process and planning whilst the Risk Management Team is responsible for the later stage.

The Company always ensures that risk management has been implemented across all operational processes. To that end, the Company establishes an effective and efficient integrated risk management policy. The policy is always communicated to all stakeholders to ensure comprehension and implementation, while its level of effectiveness is also evaluated.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhirnya tahun buku 2021 tidak ada perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunannya adalah:

Jabatan	Nama Name	Position
Komisaris Utama	Jose Ma. K. Lim	President Commissioner
Komisaris	Rodrigo E. Franco	Commissioner
Komisaris Independen	Johny J. Lumintang	Independent Commissioner
Komisaris	Farid Harianto	Commissioner

APRESIASI

Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah berhasil melalui tahun 2021 dengan sangat baik, seperti ditunjukkan oleh berbagai pencapaian. Atas hal itu, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan kepada Perseroan, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang solid.

Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi bagian dalam perjalanan bisnis Perseroan. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada para pemangku kepentingan lain atas kerja sama yang terjalin, begitu pun dengan regulator yang turut membimbing perjalanan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris berharap kerja sama yang telah terjalin dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus meningkat, sehingga memberikan dukungan bagi Perseroan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Until the end of 2021 financial year, there was no change in the composition of the Board of Commissioners. Thus, the Board of Commissioners' composition was:

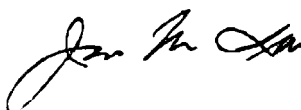
APPRECIATION

The Board of Commissioners views that the Company has performed very well in 2021, as shown by various achievements. The Board of Commissioners expresses its high appreciation to the Board of Directors and management as well as all employees for the dedication and hard work contributed to the Company in realizing a solid performance.

We would like to also express our gratitude to the shareholders for the trust given to the Board of Commissioners to become a part of the Company's business journey. Our utmost appreciation to other stakeholders for the cooperation that has been established, as well as to the regulators who have assisted in guiding the Company's business milestones.

The Board of Commissioners hopes that the ongoing cooperation with all stakeholders will continue to deepen, thereby supporting the Company in achieving its targets.

Jakarta, April 2022



Jose Ma. K. Lim
Komisaris Utama
President Commissioner



Dewan Komisaris

Board of Commissioners



**Letjend TNI (Purn)
Johnny J. Lumintang**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Rodrigo E. Franco
Komisaris
Commissioner

Jose Ma. K. Lim
Komisaris Utama
President Commissioner

Farid Harianto
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Selain penghargaan, pencapaian penting lain Perseroan adalah keberhasilan produksi 10 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Air.

In addition to awards, another important achievement of the Company is the successful production of 10 megawatts (MW) from the Hydroelectric Power Plant.

M. Ramdani Basri
Direktur Utama
President Director/Chief Executive Officer



Pemegang saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa atas karunia dan rahmat yang diberikan, PT Nusantara Infrastructure Tbk (Perseroan) mampu melewati tahun 2021 dengan baik. Beragam pencapaian juga dapat diraih, sehingga menjadi bagian penting dalam jejak perjalanan Perseroan.

Laporan tahunan yang disampaikan ini merupakan bagian dari penerapan keterbukaan informasi kepada publik tentang kinerja Perseroan sepanjang tahun buku. Laporan Direksi memberikan gambaran singkat tentang penyampaian kinerja yang rinciannya diuraikan pada masing-masing bagian yang terdapat dalam laporan tahunan.

Secara umum, kinerja Perseroan pada tahun 2021 tetap berjalan dengan baik, walaupun kondisi eksternal masih bergerak dinamis. Namun Perseroan berhasil menerapkan strategi serta respons yang tepat atas perkembangan kondisi eksternal, sehingga Perseroan dapat melaluinya dengan beragam pencapaian.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol, Perseroan menerapkan prinsip terintegrasi: mobilitas, akses dan konektivitas. Tiga hal ini merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan, karena memiliki keterkaitan. Mobilitas tinggi akan tercipta karena akses yang disediakan menciptakan konektivitas, baik bagi kebutuhan rumah tangga maupun industri serta kawasan komersial.

Selain itu, kepedulian terhadap lingkungan hidup telah menjadi komitmen Perseroan yang melekat dalam melaksanakan proyek di bidang infrastruktur, bersamaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Proyek-proyek Perseroan yang merupakan hasil dari penerapan prinsip-prinsip tersebut telah mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal, yang antara lain diwujudkan melalui sejumlah penghargaan pada tahun 2021.

Di antara penghargaan yang diterima Perseroan adalah “The Mino Best Project Award” untuk jalan tol layang A.P. Pettarani, Makassar yang diberikan oleh Road Engineering Association for Asia dan Australasia (REAAA). Penghargaan tersebut diberikan untuk proyek jalan maupun jembatan baru terbaik yang berlokasi di wilayah Asia Pasifik yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.

Our sincere gratitude to God Almighty, PT Nusantara Infrastructure Tbk (the Company) performed well throughout the 2021 financial year. Various achievements were recorded, thus becoming an important part of the Company's milestones.

This annual report is part of information disclosure to the public regarding the Company's performance throughout the financial year. The Board of Directors' report provides a brief description of the Company's performance, the details of which are elaborated in each section of the annual report.

Overall, the Company's performance in 2021 ran well, despite the dynamics of external conditions. However, the Company succeeded in implementing the right strategy and response to the development of external conditions, so that the Company was able to sail through with various achievements.

In carrying out its business activities in infrastructure development, such as toll roads, the Company applied integrated principles: mobility, access, and connectivity. These three aspects were inseparable and intertwined. A high mobility would occur because the access provided created connectivity for the needs of households, industrial and commercial areas.

In addition, concern for the environment and occupational health and safety has become an inherent commitment of the Company in operating infrastructure projects. Following the implementation of such principles, the Company's projects have received recognition from external parties, including through a number of awards in 2021.

Among the awards received by the Company was “The Mino Best Project Award” for the elevated toll road A.P. Pettarani, Makassar, awarded by the Road Engineering Association for Asia and Australasia (REAAA). The award, held every 4 (four) years, is given for the best new road and bridge project located in the Asia Pacific region.

Penghargaan lainnya “Badan Usaha Jalan Tol Terbaik (BUJT) Terbaik, Terkooperatif dan Terresponsif dari Hasil Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol Seluruh Indonesia”. Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Perseroan meraih “2 Penghargaan terkait Nihil Kecelakaan/*Zero Accident* Tingkat Nasional”. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

PERKEMBANGAN EKONOMI TAHUN 2021

Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai terjadi seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat mulai bergerak kembali. Kegiatan dunia usaha juga ikut bergerak positif.

Pada triwulan I-2021, kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional pun mulai menipis sejalan dengan kegiatan ekonomi yang makin bergairah, yaitu sebesar 0,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year/yoy*). Bahkan pada kuartal II-2021, pertumbuhan ekonomi sudah bergerak positif, yaitu 7,07% *yoy*.

Memasuki kuartal III-2021, kehadiran varian baru COVID-19, yaitu varian omicron, ikut menghambat proses pemulihan ekonomi yang sedang terjadi. Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan wilayah dan level. Pada saat bersamaan, vaksinasi kian diperluas. Intervensi pemerintah memberikan hasil yang baik, sehingga di akhir kuartal ketiga itu, pertumbuhan ekonomi masih positif, yakni mencapai 3,51% *yoy*.

Hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2021 mencapai 3,69%, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Bahkan pada tahun tersebut, anggaran di bidang infrastruktur yang dialokasikan pemerintah juga sangat besar. Menurut dataa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, jumlahnya mencapai Rp417,4 triliun, sementara tahun sebelumnya hanya Rp281,1 triliun.

URAIAN PENCAPAIAN KINERJA USAHA

Kendala/Tantangan yang Dihadapi

Sepeti umumnya dialami dunia usaha, pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 memberikan tantangan bagi Perseroan. Apalagi mengingat Perseroan bergerak di bidang infrastruktur, sehingga pergerakan manusia dalam proses produksi tidak dapat dihindari. Karena itu, Perseroan melakukan mitigasi sejak dini, sehingga kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik.

Another award was “The Best, Most Cooperative, and Most Responsive Toll Road Business Entity (BUJT), from the Fulfilment of Minimum Service Standards (SPM) for Toll Roads throughout Indonesia”. The award was given by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry of Public Works and Housing.

Moreover, the Company won “2 Awards related to Zero Accident at the National Level”. This award was given by the Ministry of Manpower.

ECONOMIC DEVELOPMENT IN 2021

Entering 2021, the economic recovery began to occur along with the improving state of the COVID-19 pandemic. Social and economic activities of the community began to improve and business activities were also moving in a positive direction.

In the first quarter of 2021, the contraction of domestic economic growth began to lessen, and in line with thriving economic activities. The domestic economy grew at 0.74% compared to that of the same period in the previous year (*year on year/yoy*). In the second quarter of 2021, economic growth turned positive at 7.07% *yoy*.

Commencing the third quarter of 2021, the presence of a new variant of COVID-19, namely Omicron, hampered the ongoing economic recovery. The government responded to this condition by enacting a policy of Community Activity Restrictions (PPKM) based on region and level. At the same time, vaccination roll-out was widely expanded. Government intervention delivered positive results, enabling positive economic growth at 3.51% *yoy* at the end of the third quarter.

By the end of the year, domestic economic growth throughout 2021 reached 3.69%, improving from the contraction that took place in the previous year. Even in such a challenging year, the government budget for infrastructure remained huge. According to the 2021 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) issued by the Ministry of Finance, the amount reached Rp417.4 trillion, while that of the previous year was Rp281.1 trillion.

BUSINESS PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

Obstacles/Challenges Faced

As commonly experienced by the business world, the prolonged COVID-19 pandemic in 2021 presented challenges for the Company. Especially since the Company engages in infrastructure, people movement within the production process is unavoidable. Therefore, the Company undertook mitigation measures early on, so that these conditions could be resolved properly.



Dalam proses mitigasi tersebut, Perseroan melakukan pemantauan setiap saat melalui sistem yang terintegrasi antara lokasi proyek di daerah dengan kantor pusat. Setiap ada permasalahan, bahkan sekecil apa pun, semuanya diketahui oleh kantor pusat untuk diambil tindakan pencegahan.

Pengorganisasian yang baik tersebut memberikan hasil maksimal. Proyek-proyek Perseroan berjalan lancar dan dapat selesai sesuai rentang waktu yang direncanakan.

Dari sisi investasi dan proyek seperti pada energi terbarukan, Perseroan juga masih menghadapi tantangan. Antara lain, karena masih dominannya batu bara sebagai energi primer pembangkit listrik. Begitu pun dengan masalah tarif dan insentif. Padahal harus diakui, komitmen pemerintah seperti kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa energi terbarukan menjadi prioritas pemerintah ke depan.

Dalam kondisi seperti itu, Perseroan tetap berupaya mendorong kinerja di sektor energi terbarukan, namun dengan analisis yang lebih sensitif terhadap potensi risiko. Investasi di sektor tersebut dilakukan secara terukur. Mulai dari analisis awal, survei hingga feasibility study atau tahap-tahap selanjutnya, termasuk penentuan nilai investasi, semuanya diperhitungkan dengan baik sejak dari perencanaan sampai eksekusi proyek.

Dalam prosesnya, unsur kehati-hatian tetap melekat. Pada setiap tahapan yang dilalui hingga diperoleh perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN (Persero), Perseroan senantiasa melakukan evaluasi untuk memastikan proyek akan berjalan dengan baik.

Selain itu, Perseroan juga mengatasinya melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam realisasi investasi. Hal ini misalnya, dilakukan pada proyek solar panel.

Kerja sama tersebut bertujuan, antara lain dalam rangka meminimalisir potensi risiko, mengingat tantangan lain di sektor energi terbarukan adalah struktur pasar yang bersifat monopsoni atau pembelinya tunggal, yaitu PLN. Pada saat bersamaan, PLN menjadi satu-satunya penjual ke masyarakat (monopoli). Untuk itu, dalam investasi di bidang energi terbarukan, Perseroan juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku.

Strategi dan Kebijakan Strategis: Fokus pada Infrastruktur Strategis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, fokus Perseroan adalah investasi di sektor infrastruktur strategis yang berkualitas serta mengedepankan keamanan dan lingkungan hidup. Prinsip ini melekat dalam proses yang dijalankan, bukan bagian terpisah.

In the mitigation process, the Company performed monitoring at all time through an integrated system between project sites in the regions and the head office. Whenever problems occurred, even a tiny one, every aspect was tracked by the head office for preventive actions.

Such good organization provided maximum results. The Company's projects ran smoothly and were completed according to the suggested timeline.

In terms of investments and projects, such as in renewable energy, the Company also encountered challenges. Some were due to the predominance of coal as the primary energy for power generation, as well as issues on tariffs and incentives. These issues lingered despite the government's commitment on putting renewable energy as a priority going forward, as often stated by President Joko Widodo.

Under such circumstances, the Company strived to boost its performance in the renewable energy sector, by accommodating a more sensitive analysis toward potential risks. Investments in this sector were carried out in a measurable manner. Starting from the initial analysis and survey, to feasibility study or later stages, including investment value, all aspects were calculated properly from planning to project execution.

In the process, the prudence principal remained paramount. Within each stage, up until a power purchase agreement with PT PLN (Persero) took place, the Company performed evaluation to ensure that the project ran well.

In addition, the Company also mitigated risks through cooperation with third parties in realizing investments. This measure was carried out on a solar panel project, as one of the examples.

The cooperation aimed, among other things, at minimizing potential risks, considering that another challenge in the renewable energy sector was a monopsony market structure or a single buyer, namely PLN. At the same time, PLN was the only seller to the community (monopoly). Therefore, in investing in renewable energy, the Company should adapt to the prevailing conditions.

Strategy and Strategic Policy: Focus on Strategic Infrastructure

In carrying out its business activities, the Company focused on investment in quality strategic infrastructure sector that prioritized security and the environment. This principle was inherent, not a separate part, in the ongoing process.

Pelaksanaan prinsip tersebut merupakan manifestasi dari komitmen Perseroan yang berorientasi pada konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, Perseroan senantiasa berupaya memberikan yang terbaik.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi Perseroan dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis saat menjalankan kegiatan usaha. Bagi Perseroan, dalam pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya, 3 (tiga) prinsip yang tak dapat dipisahkan adalah mobilitas, akses, dan konektivitas.

Mobilitas berkenaan dengan ruang untuk mendukung pengguna jalan beraktivitas. Karena itu, ruang berupa infrastruktur jalan tersebut harus memiliki konektivitas dengan pusat kegiatan lain, misalnya pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik seperti pelabuhan dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi dari sisi rantai pasok.

Semua simpul-simpul tersebut, dari kehidupan masyarakat yang personal hingga kegiatan ekonomi secara umum, harus saling terkoneksi dengan baik. Di sinilah terobosan Perseroan dalam membangun infrastruktur jalan, termasuk jalan tol. Dengan konektivitas serta akses yang baik, mobilitas tinggi akan tercipta.

Untuk itu, strategi yang diterapkan Perseroan dalam bisnis infrastruktur jalan, bukan sekadar panjang jalan yang dibangun, namun sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta perekonomian melalui penerapan prinsip terintegrasi: mobilitas, akses dan konektivitas.

Pola pembangunan infrastruktur Perseroan adalah menghubungkan pengguna dengan titik-titik strategis. Dari kebutuhan industri, komersial, maupun rumah tangga.

Sejak awal perencanaan, Perseroan selalu mempertimbangkan prinsip interdependensi sebuah infrastruktur. Kehadiran infrastruktur jalan merupakan akses bagi masyarakat atau pengguna untuk mobilitas ke wilayah-wilayah penting lainnya, seperti komersial maupun industri. Begitu juga dengan perlunya konektivitas kawasan industri dengan kawasan komersial. Infrastruktur jalan tidak bersifat independen karena bersifat menghubungkan, sehingga mampu memberikan manfaat besar.

Strategi usaha yang diterapkan oleh Perseroan tersebut mampu menyeimbangkan antara target usaha dalam hal ini adalah profit dengan manfaat besar yang diterima oleh para pengguna atau konsumen. Dengan demikian, tercipta kesinambungan dalam pembangunan infrastruktur.

The implementation of the principle was a manifestation of the Company's commitment to being consumer-driven in carrying out business activities. Therefore, the Company always strived to deliver the best.

These principles served as a reference for the Company in formulating strategies and strategic policies for the business. The Company believed that there were 3 (three) inseparable principles in the development of toll road infrastructure, such as mobility, access, and connectivity.

Mobility relates to spaces that support activities of road users. Therefore, the road infrastructure must have connectivity with other activity centers, such as shopping centers and public facilities e.g. ports, to facilitate economic activities from the supply chain side.

All these dots, from activities at personal level to economic activities in overall, must be well connected. This was where the Company's breakthrough in building road infrastructure, including toll roads, will add value. By having good connectivity and accessibility, high mobility will be created.

Therefore, the strategy implemented by the Company in the road infrastructure business was not solely on the length of the roads built, but more on the extent to which the infrastructure provided great benefits to the community and the economy through the application of integrated principles: mobility, access and connectivity.

The Company's infrastructure development scheme was to connect users with strategic points, ranging from industrial, commercial, to household needs.

Since the beginning of the planning stage, the Company has always considered the interdependence of an infrastructure. The presence of road infrastructure is an access for the community or users for mobility to other key areas, such as commercial or industrial areas. Similarly with the need for connectivity between industrial areas and commercial areas. Road infrastructure is not independent as it has a connecting function; therefore it would provide great benefits.

The business strategy implemented by the Company was able to balance out the business target, namely profit, and great benefits received by users or consumers, thus creating sustainability in infrastructure development.



Pola pembangunan terintegrasi tersebut juga menjadi pertimbangan Perseroan dalam memutuskan investasi pada sektor usaha lain. Misalnya, pengelolaan air bersih hingga sektor energi di area yang terkoneksi dengan infrastruktur jalan, sehingga tercipta keseimbangan dalam bisnis.

Harus diakui, sebagai entitas usaha, Perseroan juga mempertimbangkan aspek profitabilitas dalam investasi di bidang infrastruktur. Inilah alasan Perseroan sangat selektif terhadap proyek yang akan dibangun.

Perseroan yang menjalankan bisnis dengan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta dunia usaha, baik industri maupun komersial, berharap pemerintah memiliki komitmen yang sejalan. Apalagi pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pembangunan pemerintah untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju.

Dalam proses mewujudkan prinsip pembangunan infrastruktur tersebut, Perseroan menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai prioritas yang melekat sejak perencanaan. Bahkan dari masalah yang paling rinci, misalnya penggunaan bahan bakar dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Semua sudah terencana dengan baik.

Dalam perencanaan tersebut, Perseroan juga telah memasukkan rencana mitigasi. Semuanya melekat (*embedded*) serta tertulis, sehingga pelaksana proyek mendapatkan standar pelaksanaan kegiatan dengan baik dan bertanggung jawab dalam realisasinya.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi Perseroan terlibat secara langsung dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis kegiatan usaha. Begitu juga dengan pelaksanaannya, yaitu menjalankan pemantauan (*monitoring*) serta evaluasi terhadap realisasi kebijakan strategis yang telah ditetapkan sejak awal, yaitu dalam tahap perumusan.

Perumusan kegiatan usaha Perseroan yang memasukkan elemen kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup atau *health, safety and environment* (HSE) bukan sekadar berupa slogan, tetapi melekat dalam proses. Karena itu, aspek HSE tidak pernah lepas dari setiap proyek Perseroan, selalu menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Kebijakan mengedepankan HSE tersebut tidak hanya berlaku bagi internal Perseroan, tetapi juga untuk seluruh kontraktor yang menjadi mitra.

The integrated development scheme also became the Company's consideration in investing in other business sectors. For example, investment in sectors from clean water management to energy in areas connected to road infrastructure was taken to foster a harmony in the business.

As a business entity, the Company also considered the profitability aspect in investing in infrastructure. This is the reason why the Company was very selective on the upcoming projects.

Running a business that provides great benefits to the community and the business world, both industrial and commercial, the Company hopes that the government upholds the same commitment. Moreover, infrastructure development has become the government's priority to support Indonesia's advancement to become a developed country.

In realizing the principles of infrastructure development, the Company put occupational health and safety as an inherent priority since the planning stage. It was implemented at the most detailed task, for example the use of fuel in the project activities. Everything was planned properly.

In the planning stage, the Company has also included a mitigation plan. Every aspect was embedded and written so that project officers would understand well the standard of activities implementation and be responsible for the performance.

Role of the Board of Directors in the Formulation of Strategy and Strategic Policy

The Board of Directors of the Company was directly involved in the formulation of strategies and strategic policies for business activities. Similarly in the implementation stage, namely by performing monitoring and evaluation on strategic policies realization, compared to those already set in the formulation stage.

The formulation of the Company's business activities that incorporated health, safety and environment (HSE) was not just a motto, but was also embedded in the process. Therefore, the HSE aspects were never separated from any of the Company's projects, always an integrated part in the implementation of infrastructure projects. The policy of prioritizing HSE did not apply only to the internal Company, but also to all contractors as part of Company's partners.

Secara organisasi, kantor pusat memiliki mitra di perusahaan-perusahaan operasional yang merupakan bagian penting dalam mekanisme distribusi kebijakan atau strategi serta mekanisme kontrol. Kantor pusat dan mitra di entitas asosiasi atau proyek tersebut merupakan bagian dari rantai operasional di lingkungan Perseroan.

Inilah prinsip dalam perumusan strategi serta implementasinya yang diterapkan oleh Perseroan. Karena itu, Direksi menjadi bagian penting serta selalu di dalamnya. Keputusan atau rumusan serta kebijakan strategis yang telah diputuskan oleh Direksi, kemudian disampaikan ke organisasi di bawahnya untuk dilaksanakan. Seperti itulah sistem atau organisasi yang berjalan.

Direksi selalu memastikan semua rumusan strategi serta kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Selain mendistribusikan strategi dan kebijakan, Direksi selalu mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaannya. Hingga saat ini, semuanya berjalan dengan lancar serta proyek-proyek investasi dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian Kinerja: Perbandingan Target dan Realisasi

Selain penghargaan di bidang infrastruktur jalan, pencapaian penting lain Perseroan hingga akhir tahun 2021 adalah keberhasilan pencapaian produksi 10 megawatt (MW) Pembangkit Listrik Tenaga Air Perseroan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sejak *Commercial Operation Date*, yang direalisasikan secara gradual. Pencapaian tersebut juga diraih di tengah beragam tantangan yang dihadapi Perseroan, termasuk di tengah kondisi *excess supply* listrik yang tengah dihadapi oleh PLN serta meningkatnya harga bahan bakar biomasa bagi Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Perseroan.

Pada tahun 2021, Perseroan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai kontraktor juga telah mulai menjajaki pemasangan solar panel bagi rumah tangga dan menggali kesempatan pemasangan solar panel bagi pabrikan.

Perseroan akan terus mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen terhadap dukungan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, dalam rangka menjadi bagian penting dari program jangka panjang pemerintah di sektor energi.

Pencapaian penting lainnya adalah digitalisasi yang menjadi salah satu pilar Perseroan. Seluruh proses bisnis, dari tingkat pusat hingga entitas usaha operasional telah terintegrasi, termasuk di bidang keuangan. Dengan demikian, posisi keuangan termasuk kas setiap entitas dapat diketahui melalui sistem digital.

In the organizational perspective, the head office had partners within operating companies who became an important part of the policy or strategy distribution mechanism and control mechanism. The head office and partners in the associated entity or project were part of the operational chain within the Company.

It was the principle in strategy formulation and implementation that the Company applied. Therefore, the Board of Directors played an important role and would always be a part of it. Resolutions or formulations as well as strategic policies that have been set by the Board of Directors, were then submitted to the lower organizations for implementation. This was how the system or organization ran.

The Board of Directors always ensured that all strategy formulations and policies that have been set can be implemented properly. In addition to allocating strategies and policies, the Board of Directors always controlled and evaluated the implementation. So far, every aspect ran smoothly and investment projects can be realized according to the targets.

Performance Achievement: Comparison of Target and Realization

In addition to awards in road infrastructure, another important achievement of the Company until the end of 2021 was the successful 10 megawatts (MW) production from Hydroelectric Power Plant of the Company within a span of 1 (one) year from the Commercial Operation Date, which was realized gradually. This achievement was also attained amidst various challenges faced by the Company, including PLN's excess supply of electricity and increasing price of biomass fuel for the Company's Biomass Power Plant.

In 2021, the Company, in collaboration with a third party as contractor, started exploring the installation of solar panels for households and exploring opportunities to install solar panels for manufacturers.

The Company will continue to develop renewable energy as part of its commitment in supporting the environment, as well as contributing to the government's long-term program in the energy sector.

Another important achievement was digitalization, which is one of the pillars of the Company. All business processes, from the central level to operational business entities, have been integrated, including in the financial aspect. Thus, the financial position including cash balance of each entity can be accessed digitally.



Sistem digital juga tersedia untuk bidang operasional. Pemantauan kegiatan operasional, misalnya pergantian jalan dalam kelolaan Perseroan atau kerusakan kecil lainnya, semua sudah dapat dipantau secara digital.

Digitalisasi tersebut sangat membantu Perseroan mempermudah proses bisnis, sehingga meningkatkan nilai (*value*) Perseroan. Proses ini tidak hanya diterapkan secara internal tetapi juga secara eksternal, misalnya dengan konsumen di sektor pengadaan air. Pemakaian atau konsumsi air oleh pelanggan dapat dipantau, baik oleh Perseroan maupun konsumen secara *real time*.

Bahkan teknologi di jalan tol dalam kelolaan Perseroan juga terus berevolusi, seperti dalam sistem pembayaran. Dari pembayaran tunai, kemudian diganti dengan kartu, selanjutnya pembayaran tanpa kartu. Pengembangan di bidang digital dilakukan untuk memudahkan proses bisnis.

Dari sisi pendanaan, Perseroan juga senantiasa berupaya mendapatkan pendanaan yang kompetitif dalam upayanya menjaga profitabilitas Perseroan dan memberikan hasil yang optimal bagi seluruh stakeholders.

Dari sisi pendanaan, Perseroan juga senantiasa berupaya mendapatkan pendanaan yang kompetitif dalam upayanya menjaga profitabilitas Perseroan dan memberikan hasil yang optimal bagi seluruh *stakeholders*.

Dari sisi keuangan, pendapatan usaha pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp661 miliar. Dibandingkan tahun 2020 yang Rp517 miliar, terjadi kenaikan 27,91%. Sedangkan dibandingkan target, pencapaiannya 84,56%.

Laba Usaha tahun 2021 sebesar Rp150,78 miliar, lebih tinggi 13,57% dibandingkan tahun 2020 yang Rp132,76 miliar, dengan margin 17,85%.

Sementara EBITDA Perseroan tercatat sebesar Rp341,5 miliar, naik dibandingkan tahun 2020 yang Rp241,2 miliar. Dari target yang sebesar Rp439,7 miliar, pencapaian EBITDA tersebut sekitar 77,67%.

Laba bersih Perseroan pada tahun 2021 mencapai Rp25,7 miliar, turun 77,13% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp112,6 miliar. Dibandingkan dengan target, yaitu Rp95,1 miliar, pencapaiannya adalah 27,06%.

Penurunan laba bersih pada tahun 2021 terutama dikarenakan kenaikan beban bunga pinjaman bank. Pada tahun 2021, Perseroan tidak dapat lagi mengkapitalisasi beban bunga pinjaman sehingga terjadi peningkatan signifikan untuk beban bunga tersebut.

Digital systems were also available for operational aspects. Monitoring of operational activities, such as changes in roads under the Company's management or other minor damages, can all be tracked digitally.

Such digitalization was very beneficial in simplifying business processes, thereby increasing the value of the Company. This process was not only applied internally but also externally, for example with consumers in the water supply sector. Water usage or consumption by customers can be monitored, both by the Company and by consumers in real time.

The technology on toll roads under the Company's management also continued to evolve, such as in the payment system. The cash payments were upgraded with card payments, and then upgraded with cardless payments. Development in the digital aspect was undertaken to facilitate business processes.

In terms of funding, the Company also strived to obtain competitive funding in upholding the Company's profitability and providing optimum results for all stakeholders.

In terms of funding, the Company also strived to obtain competitive funding in upholding the Company's profitability and providing optimum results for all stakeholders.

In terms of finance, operating income in 2021 was posted a Rp661 billion. Compared to 2021, which amounted to Rp517 billion, there was an increase of 27.91%. Furthermore, compared to the set target, the achievement was 84.56%.

Operating profit in 2021 amounted to Rp150.78 billion, 13.57% higher compared to 2020, which amounted to Rp132.76 billion, with a margin of 17.85%.

Meanwhile, the Company's EBITDA was posted at Rp341.5 billion, an increase compared to 2020, which amounted to Rp241.2 billion. Compared to the target of Rp439.7 billion, the EBITDA achievement was around 77.67%.

The Company's net profit in 2021 reached Rp25.7 billion, an decrease of 77.13% compared to 2020, which amounted to Rp112.6 billion. Compared to the target, which was set at Rp95.1 billion, the achievement was 27.06%.

The decrease in net profit in 2021 was mainly due to an increase in bank loan interest expenses. In 2021, the Company can no longer capitalize on loan interest expense, resulting in a significant increase in the interest expense.

PROSPEK USAHA

Dalam pandangan Perseroan, untuk tahun 2022, kondisi perekonomian akan semakin membaik sejalan dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19. Kondisi ini akan berkebalikan dengan situasi sebelumnya. Dalam kondisi krisis akibat pandemi, likuiditas di sistem perbankan sangat memadai bahkan sangat cukup. Bahkan bank sentral ikut menurunkan suku bunga sebagai langkah ekspansi dalam kebijakan moneter.

Di saat situasi membaik, bank sentral yang sebelumnya mengambil kebijakan ekspansif, pelan-pelan akan menarik likuiditas. Kebijakan itu akan dilakukan melalui penerapan kenaikan suku bunga acuan, yang selanjutnya diikuti oleh perbankan.

Seperti bank sentral Amerika Serikat dan Jepang misalnya, sudah mulai menarik likuiditas. Hal serupa kemungkinan akan dilakukan oleh bank sentral lain termasuk Indonesia melalui kebijakan suku bunga acuan. Ketika suku bunga naik, maka biaya pinjaman untuk kebutuhan investasi juga akan bertambah.

Pada intinya, kondisi yang terjadi pada tahun 2022 masih akan menimbulkan ketidakpastian. Bagian inilah yang harus diantisipasi oleh Perseroan.

Dalam situasi seperti itu, Perseroan harus meningkatkan kualitas kinerja. Sebab dalam kondisi ketidakpastian, industri perbankan akan menyalurkan pembiayaan ke perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki kinerja baik. Dengan demikian, kreditnya menjadi lancar. Dalam konteks inilah Perseroan harus memacu kinerjanya lebih baik lagi, sehingga lebih mudah dalam merealisasikan investasi.

Dari berbagai krisis yang terjadi, seperti pada tahun 2008 atau setelahnya, Perseroan telah teruji dengan baik. Seluruh proyek yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik, termasuk dengan kualitas yang prima. Begitu juga dengan tahun 2021, banyak pencapaian yang berhasil diraih Perseroan di tengah kondisi yang dinamis.

Selain pendanaan dari bank, strategi lain yang diterapkan oleh Perseroan adalah *growth strategy* melalui kemitraan. Model bisnis seperti ini telah dijalankan oleh Perseroan dan banyak menunjukkan hasil. Dengan demikian, Perseroan telah memiliki mitra-mitra *existing*. Karena itu, Perseroan optimistis bahwa tahun 2022 akan berjalan dengan baik.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan memandang bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan

BUSINESS PROSPECTS

In the Company's view, 2022 economic conditions will recover, in line with the measured control over the COVID-19 pandemic. This condition will turn around the previous situation. In crisis conditions due to the pandemic, liquidity in the banking system was very adequate, even very sufficient, pushing the central bank to lower interest rates as an expansionary measure in monetary policy.

When the situation improves, the central bank, which previously applied an expansionary policy, will slowly tighten liquidity. The policy will be implemented by increasing the benchmark interest rate, which is then followed by the banking sector.

The central bank of the United States and Japan, for example, have started to tighten liquidity. Other central banks, including that of Indonesia, are likely to do the same policy through the benchmark interest rate. When the interest rate rises, the cost of borrowing for investment will also increase.

In essence, the conditions in 2022 will remain uncertain. This is the part that must be anticipated by the Company.

In such a situation, the Company must improve the quality of its performance. In the conditions of uncertainty, the banking industry will channel their financing to companies showing good performance. Thus, credit to well performing companies remains liquid. In this context, the Company must boost its performance even more, enabling it to realize investments.

From various crises occurring in the past, such as that in 2008 or after, the Company has been tested well. All planned projects were realized properly, and with excellent quality. Similarly in 2021, the Company has achieved many achievements amidst dynamic conditions.

In addition to funding from banks, another strategy applied by the Company was a growth strategy through partnerships. This business model has been implemented by the Company and has shown positive results. The Company already has existing partners. Therefore, the Company is optimistic that 2022 performance will be satisfactory.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company views that Good Corporate Governance (GCG) is a value system that benchmarks a company's ability to carry out operational activities and business processes in a healthy manner. This commitment has



aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Komitmen ini telah melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang setiap tahun mengalami evaluasi untuk peningkatan serta penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan mengacu kepada asas-asas pedoman umum GCG yang disebut TARIF: *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independence* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Perseroan telah memiliki sejumlah kebijakan terkait dengan GCG. Di antaranya: Pedoman GCG, Pedoman *Social and Environment Management System* (SEMS), serta Piagam dalam organisasi GCG.

Sebagai bagian dari penerapan GCG di lingkungan Perseroan adalah implementasi manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan sejak dari awal proyek melalui tim yang melakukan analisis atas potensi risiko yang dialami oleh Perseroan. Pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi operasional untuk proses awal dan perencanaan, sementara di akhir oleh Tim Manajemen Risiko.

Perseroan senantiasa memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di seluruh proses operasional. Untuk itu, Perseroan menetapkan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Kebijakan tersebut selalu dikomunikasikan seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan dilaksanakan, serta dievaluasi tingkat efektivitasnya.

KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN

Perseroan memiliki komitmen di bidang keberlanjutan, yang secara umum mengacu pada Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Implementasinya, antara lain dilaksanakan pada sektor lingkungan hidup, sosial masyarakat, serta ekonomi.

Di bidang lingkungan hidup, Perseroan telah mematuhi segala ketentuan dan standar pengelolaan lingkungan yang berlaku melalui Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, khususnya dalam perencanaan dan perumusan upaya pengelolaan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi. Begitu juga dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

been embedded in the implementation of the Company's business activities, which are evaluated annually for improvement and adjustment to ongoing developments.

The implementation of GCG principles within the Company refers to the general guiding principles of GCG called TARIF: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

As an implementation of this commitment, the Company has a number of policies related to GCG, including: GCG Guidelines, Social and Environment Management System (SEMS) Guidelines, as well as Charters of the GCG bodies.

The implementation of risk management is also part of GCG implementation within the Company. Risk management is carried out from the beginning of the project, performed by a team that analyzes the potential risks exposed by the Company. Its implementation is then carried out by the operational organization for the initial process and planning whilst the Risk Management Team is responsible for the later stage.

The Company always ensures that risk management has been implemented across all operational processes. To that end, the Company establishes an effective and efficient integrated risk management policy. The policy is always communicated to all stakeholders to ensure comprehension and implementation, while its level of effectiveness is also evaluated.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

The Company has a commitment to sustainability, which generally refers to OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. Its implementation, among others, is carried out in the environmental, social and economic sectors.

In terms of environment, the Company has complied with all prevailing environmental management regulations and standards through the ISO 14001 on Environmental Management System, particularly in planning and formulating environmental management efforts driven by construction activities. Similarly with Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Law no. 12 of 2012 concerning Environmental Permits.

Kegiatan pengelolaan lingkungan Perseroan menjadi tanggung jawab Departemen Health, Safety, and Environment (HSE) yang mengawasi dan memastikan bahwa semua aktivitas Perseroan telah sesuai dengan praktik terbaik HSE yang berlaku secara global. Setiap unit bisnis dilengkapi dengan Komite HSE khusus yang melapor dan bertanggung jawab kepada Departemen HSE.

Sementara program di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diimplementasikan melalui Program Nusantara Care yang diinisiasi sejak tahun 2010. Nusantara Care memiliki peranan penting sebagai media dan sarana penggerak untuk memastikan bahwa seluruh program TJSL telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal kepada seluruh pihak terkait.

Melalui Nusantara Care, Perseroan mengintegrasikan berbagai program TJSL agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Program Nusantara Care fokus pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan keselamatan, serta komunitas dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga berkolaborasi dan bermitra dengan lembaga pendidikan dan yayasan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASANNYA

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Dengan demikian, susunan Direksi hingga akhir tahun buku 2021 adalah:

The Company's environmental management activities are the responsibility of the Health, Safety, and Environment (HSE) Department, which oversees and ensures that all of the Company's activities are in accordance with HSE best practices that apply globally. Each business unit is equipped with a dedicated HSE Committee that reports to and is responsible to the HSE Department.

Meanwhile, social and environmental responsibility (TJSL) programs are implemented through Nusantara Care Program, which was initiated in 2010. Nusantara Care has an important role as a medium and driver to ensure that all CSR programs run well and provide maximum benefits to all parties concerned..

Through Nusantara Care, the Company integrates various CSR programs so that they can be implemented in a sustainable manner. Nusantara Care program focuses on 3 (three) main pillars, namely education, health and safety, as well as community and environment. In its implementation, the Company also collaborates and partners with educational institutions and foundations.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION AND REASONING

In 2021 there was no change in the composition of the Company's Board of Directors. Thus, the Board of Directors' composition by the end of 2021 financial year was:

Jabatan	Nama Name	Position
Direktur Utama	M. Ramdani Basri	President Director
Direktur	Danni Hasan	Director
Direktur	Ridwan Irawan	Director
Direktur	Benny S. Santoso	Director
Direktur	Denn Charly G. Espanola	Director
Direktur	Christopher Daniel C. Lizo	Director
Direktur	Francis Emmanuel D. Rojas	Director
Direktur	Amadeo N. Bejec	Director



APRESIASI

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaannya untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Begitu juga dengan Dewan Komisaris yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bisnis Perseroan melalui perannya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat.

Kepada regulator, Perseroan menyampaikan terima kasih atas bimbingannya, sehingga dapat melalui tahun buku 2021 dengan kinerja yang baik. Perseroan berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja usaha yang berkelanjutan.

Perseroan juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh karyawan atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan terhadap pencapaian usaha yang baik sepanjang tahun 2021. Begitu pun kepada para mitra usaha atas kerja sama yang baik. Perseroan berharap agar kerja sama yang telah terjadi dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

APPRECIATION

The Board of Directors would like to express its gratitude to the Shareholders for the trust given in performing the Company's business activities, as well as to the Board of Commissioners that has become an important part of the Company's business milestones through its supervisory and advisory roles.

The Company also extends its appreciation to the regulators for their guidance, enabling the Company to deliver a solid performance throughout the 2021 financial year. The Company is committed to always complying with applicable laws and regulations to realize sustainable business performance.

The Company also conveys its utmost appreciation to all employees for the contribution and dedication given to business achievements throughout 2021, and to business partners for outstanding cooperation. The Company hopes that the ongoing partnership will be continuously enhanced in the future.

Jakarta, April 2022

M. Ramdani Basri
Direktur Utama
President Director

Direksi

Board of Directors



Denn Charly G. Espanola
Direktur
Director

Christopher Daniel C. Lizo
Direktur
Director

M. Ramdani Basri
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

Francis Emmanuel D. Rojas
Direktur
Director



Amadeo N. Bejec
Direktur
Director

Danni Hasan
Direktur
Director

Benny S. Santoso
Direktur
Director

Ridwan Irawan
Direktur
Director

Profil Perusahaan

Company Profile





Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Corporate Identity



Nama Perusahaan Company Name

PT Nusantara Infrastructure Tbk



Produk dan Jasa Product and Service

Investasi
Investment



Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian
Akta No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta.

Perubahan Anggaran Dasar Terakhir
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta.

Deed of Establishment
Deed No. 3 dated September 1, 1995 drawn up before Abdullah Ashal, SH., Notary in Jakarta.

Last Amendment to the Articles of Association
Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company No. 94 dated November 18, 2020 drawn up before Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notary in Jakarta.



Bidang Usaha Line of Business

Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
Large Trading Based on Fee or Contract



Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation

1 September 1995
September 1, 1995



Perubahan Nama Name Changes

Tahun 1998
Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya, berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 10 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2001, nama Perseroan diubah menjadi PT Metamedia Technologies.

Tahun 2006
Perseroan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk dan menjadi nama yang hingga saat ini digunakan oleh Perseroan. Pada tahun 2001, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) dengan kode saham META.

Year of 1998
The Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya, based on Notarial Deed No. 23 dated June 10, 1998 drawn up before Linda Herawati, SH, Notary in Jakarta. Subsequently in 2001, the Company name was changed to PT Metamedia Technologies.

Year of 2006
The Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk, the name that is currently used by the Company. In 2001, the Company conducted an Initial Public Offering, changing its status to a Public Company (Tbk) under ticker code META.



Kepemilikan Saham Share Ownership

Saham Seri A | Series A Share
• PT Bosowa Utama: 100%

Saham Seri B | Series B Share
• PT Metro Pacific Tollways Indonesia: 74,65%
• PT Indonesia Infrastructure Finance: 10,00%

Masyarakat | Public: 13,17%
Saham Tresuri | Treasury Stock: 2,18%



Modal Dasar Authorized Capital

Rp5.670.000.000.000

Modal Dasar terdiri dari 2 saham Seri A dengan nilai nominal Rp35 per saham dan 80.999.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham
The Company's Authorized Capital consists of 2 Series A shares with a nominal value of Rp35 per share and 80,999,999,999 Series B shares with a nominal value of Rp70 per share



Kontak Perusahaan Company Contact

Dahlia Evawani
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Telp: +6221 5150100
Fax: +6221 515 1221
corsec@nusantarainfrastructure.com



Alamat Kantor Pusat Company Contact

Equity Tower Lantai 38
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta 12190

Equity Tower 38th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan Sub-District, Kebayoran Baru District, South
Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province
12190



Pencatatan Saham di Bursa Saham Listing on Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia, 18 Juli 2011
Indonesia Stock Exchange, July 18, 2011



Kode Saham Ticker Code

META



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital

Rp1.239.749.573.545

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh terdiri dari 1 (satu) saham Seri A dengan nominal Rp35 per saham dan 17.710.708.193 saham Seri B dengan nominal Rp70 per saham
The Company's Issued and Fully Paid-up Capital consists of 1 (one) Series A shares with a nominal value of Rp35 per share and 17,710,708,193 Series B shares with a nominal value of Rp70 per share



Jumlah Karyawan Number of Employees

310 karyawan | employees



Telepon dan Faksimili Telephone and Facsimile

T: +62 21 515 0100
F: +62 21 515 1221



Surat Elektronik E-mail

information@nusantarainfrastructure.com



Situs Web Website

www.nusantarainfrastructure.com



Media Sosial Social Media

Instagram: nusantara.infrastructure
Facebook: Nusantara Infrastructure
Twitter: @nusantarainfra

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

PT Nusantara Infrastructure Tbk (“Perseroan”) didirikan pada 1 September 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7.375.HT.01.01.TH.95 tertanggal 28 Desember 1995 dan didaftarkan pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 41/2000 tanggal 19 Oktober 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2001, Tambahan No. 1140. Perseroan didirikan dengan fokus tujuan sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian.

Sejak didirikan hingga saat ini, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Di tahun 1998, Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya, dan selanjutnya pada tahun 2001, nama Perseroan diubah menjadi PT Metamedia Technologies, dan kemudian pada tahun 2006, Perseroan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk dan menjadi nama yang hingga saat ini digunakan oleh Perseroan.

Perseroan terus berkomitmen dan berupaya untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis guna meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Pada tahun 2001, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan kode saham META dan status Perseroan berubah menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk).

Komitmen dan upaya tersebut terus dipegang teguh hingga tahun-tahun berikutnya dan kemudian kembali dihadirkan secara nyata melalui merger yang dilakukan dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia pada tahun 2006 berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Nusantara Infrastructure Tbk (“Company”) was established on September 1, 1995 based on Deed of Establishment No. 3 dated September 1, 1995 drawn up before Abdullah Ashal, SH, Notary in Jakarta. The deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-7.375.HT.01.01.TH.95 dated December 28, 1995, registered with the Registrar of the Central Jakarta District Court under No. 41/2000 dated October 19, 2000, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 15 dated February 20, 2001, Supplement No. 1140. The Company was incorporated with the aim of being a company engages in the fields of trade, construction, industry, transportation, services, and agriculture.

Since its establishment, the Company has undergone several changes to its name. The Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya in 1998, and to PT Metamedia Technologies in 2001. In 2006, the Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk, a name that has been used by the Company until present.

The Company strives to carrying out various strategic initiatives in improving the overall quality of its performance. In 2001, the Company conducted an Initial Public Offering with ticker code META, and consequently became a Public Company (Tbk).

The commitment and effort have been continuously upheld throughout the Company’s journey and manifested through a merger with PT Nusantara Konstruksi Indonesia in 2006, based on the Notary Deed No. 17 dated October 20, 2006, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.



Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan terakhir pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 94 tanggal 18 November 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta, dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan perubahan Pasal 3 maksud dan tujuan serta perubahan pengurus Perseroan.

Pembangunan di sektor jalan tol menjadi proyek pembangunan pertama Perseroan dan langkah pertama tersebut membawa Perseroan memiliki konsesi infrastruktur di bagian barat dan timur Indonesia. Hingga kini, konsesi jalan tol yang dikelola Perseroan melalui entitas anak usaha, yaitu Jalan Tol Serpong-Pondok Aren, Jalan Tol Pelabuhan Soekarno Hatta-A.P. Pettarani, Makassar, Jalan Tol Jembatan Tallo-Simpang Mandai Makassar, dan Jalan Tol Kebon Jeruk-Penjarangan. Selain jalan tol, Perseroan terus memperluas portofolio ke berbagai sektor infrastruktur di Indonesia, yaitu pelabuhan laut, pengelolaan air minum, dan energi terbarukan.

Sampai akhir tahun 2020, Perseroan telah memiliki 4 (empat) entitas anak, 8 (delapan) entitas anak tidak langsung, dan 3 (tiga) entitas asosiasi sebagai kelompok usaha yang bergerak di 4 (empat) sektor infrastruktur, yaitu jalan tol, pengelolaan air bersih, energi terbarukan, dan pelabuhan.

Hingga kini Perseroan terus aktif memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Pemerintah mewujudkan program percepatan pembangunan infrastruktur terutama di ranah infrastruktur ekonomi, yakni berbagai infrastruktur yang hadir untuk mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dan keberadaannya dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, seperti prasarana umum, energi listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, sanitasi dan pembuangan limbah.

The Company's Articles of Association were lastly amended in 2020 as stated in the Deed of Limited Liability Company Meeting Resolutions No. 94 dated November 18, 2020, drawn up before Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notary in Jakarta, on adjusting the Company's Articles of Association, amendment to Article 3 of purposes and objectives as well as changes to the Company's management.

Construction in toll road sector was the Company's first construction project, leading to the Company's milestones in owning infrastructure concessions in the western and eastern parts of Indonesia. Until present, the Company has managed a number of toll road concessions through its subsidiary entities, such as Serpong-Pondok Aren Toll Road, Soekarno Hatta Harbor-A.P. Pettarani Makassar Toll Road, Tallo Bridge-Simpang Mandai Makassar Toll Road, and Kebon Jeruk-Penjarangan Toll Road. Apart from toll road, the Company continues to expand its portfolio to various infrastructure sectors in Indonesia, namely seaports, drinking water management, and renewable energy.

As of the end of 2020, The Company has 4 (four) subsidiaries, 8 (eight) indirect subsidiaries, and 3 (three) associate entities as a business group that operates in 4 (four) infrastructure sectors, such as toll roads, clean water management, renewable energy, and ports.

The Company continues to proactively make direct contributions in supporting the government to realize the acceleration program for infrastructure development, especially in the economic infrastructure, namely various infrastructures enabling economic activities and widely utilized by the community, such as public infrastructure, electricity, telecommunication, transportation, irrigation, clean water, sanitation, and waste disposal.

Rekam Jejak Pencapaian

Milestones



1995

Perseroan didirikan pada tanggal 1 September 1995 dengan nama PT Sawitia Bersama Darma berdasarkan Akta Notaris No. 3 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta.

The Company was established on September 1, 1995 under the name PT Sawitia Bersama Darma based on Notarial Deed No. 3 drawn up before Abdullah Ashal, S.H., Notary in Jakarta.



1998

Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya berdasarkan Akta No. 23 tanggal 10 Juni 1998, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.

The Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya based on Deed No. 23 dated June 10, 1998, drawn up before Linda Herawati, S.H., Notary in Jakarta.



2001

1. Perseroan mengubah nama menjadi PT Metamedia Technologies berdasarkan Akta No. 4 tanggal 6 Februari 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Metamedia Technologies Tbk dan kode saham META.

1. The Company changed its name to PT Metamedia Technologies based on Deed No. 4 dated February 6, 2001, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.
2. The Company conducted an Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta Stock Exchange) and changed its status to a listed company under the name PT Metamedia Technologies Tbk and ticker code META.



2006

1. Perseroan mengubah nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk berdasarkan Akta No. 59 tanggal 21 Juni 2006, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
2. Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia berdasarkan Akta No. 17 tanggal 20 Oktober 2006, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

1. The Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk based on Deed No. 59 dated June 21, 2006, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.
2. The Company merged with PT Nusantara Konstruksi Indonesia based on Deed No. 17 dated October 20, 2006, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta.



2007

Perseroan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Jalan Tol Seksi IV (JTSE) yang dimiliki oleh PT Jalan Tol Seksi Empat di Makassar.

The Company conducted groundbreaking of the Section IV Toll Road (JTSE) construction operated by PT Jalan Tol Seksi Empat in Makassar.



2008

Jalan tol JTSE di Makassar mulai beroperasi, sebagai satu-satunya proyek dari konsesi Infrastructure Summit 2005 yang berhasil diwujudkan.

The JTSE toll road in Makassar commenced its operation as the only completed project of the Infrastructure Summit 2005 concession.



2010

1. Perseroan mengakuisisi 99,97% saham PT Margautama Nusantara, yang memiliki 25% saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu yang mengoperasikan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) ruas W1 (Kebon Jeruk, Penjarangan).
2. Perseroan memperoleh dana masyarakat dari hasil penerbitan saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) senilai Rp745,9 miliar.

1. The Company acquired 99.97% stake in PT Margautama Nusantara, which owns 25% shares in PT Jakarta Lingkar Baratsatu that operates the Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 sector (Kebon Jeruk, Penjarangan).
2. The Company obtained public funding from the issuance of shares with Pre-emptive Rights (HMETD) in the Limited Public Offering I (LPO I) amounting Rp745.9 billion.



2014

1. Perseroan berhasil masuk ke dalam indeks Kompas 100.
2. Perseroan melalui entitas anak usahanya PT Telekom Infranusantara, resmi mengakuisisi mayoritas saham sebesar 70,17% milik PT Tara Cell Intrabuana, operator independen menara telekomunikasi di Indonesia. Dengan akuisisi tersebut, PT Tara Cell Intrabuana mengganti nama menjadi PT Komet Infra Nusantara (KIN).
3. Peresmian sarana penyediaan air bersih tahap pertama, sebanyak 100 liter/ detik oleh entitas anak, PT Dain Celicani Cemerlang kepada PT Kawasan Industri Medan di Kawasan Industri Medan.
4. Peletakan batu pertama peresmian sistem pengolahan dan distribusi air bersih oleh PT Sarana Catur Tirta Kelola di Serang Timur, Banten.
5. JEXWAY dan NEXCO masuk sebagai pemegang saham PT Bintaro Serpong Damai (BSD), entitas anak Perseroan, dengan kepemilikan masing-masing sebesar 2,93% dan 1,25%.

1. The Company was listed in the Kompas 100 index.
2. Through its subsidiary, PT Telekom Infranusantara, the Company acquired the majority shares (70.17%) of PT Tara Cell Intrabuana, an independent operator of telecommunications towers in Indonesia. With this acquisition, PT Tara Cell Intrabuana changed its name to PT Komet Infra Nusantara (KIN).
3. Inauguration of the first phase of clean water facility with a capacity of 100 liters/second by The Company subsidiary, PT Dain Celicani Cemerlang, to PT Kawasan Industri Medan in Medan Industrial Area.
4. Groundbreaking of clean water treatment plant and distribution by PT Sarana Catur Tirta Kelola in East Serang, Banten.
5. JEXWAY and NEXCO became the shareholders of PT Bintaro Serpong Damai (BSD), a subsidiary of The Company, each holding 2.93% and 1.25% ownership, respectively.



2015

1. EI meningkatkan kepemilikannya menjadi 54,64% dalam IME, entitas anak yang mengembangkan proyek PLTA Lau Gunung.
2. IME telah menyelesaikan finalisasi desain teknis dengan optimasi desain dari 10 MW menjadi 15 MW sehingga potensi pembangkit menjadi efisien sejalan dengan nilai investasi.
3. Peningkatan portofolio menara telekomunikasi KIN, dari 591 menara di akhir tahun 2014 menjadi 901 menara di akhir tahun 2015.
4. Operasionalisasi *Water Treatment Plan (WTP) 2* SCKT mengalami peningkatan kapasitas produksi (uprating) dari 25 liter/ detik menjadi 50 liter/detik.

1. EI increased its ownership in IME, a subsidiary developing the PLTA Lau Gunung project, to 54.64%.
2. IME finalized the technical design with design optimization from 10 MW to 15 MW, improving the potential efficiency of the plant in proportion to the investment value.
3. KIN expanded its portfolio of telecommunication towers from 591 towers by the end of 2014 to 901 towers by the end of 2015.
4. SCKT's Water Treatment Plan (WTP) 2 operation saw an increase in its production capacity (uprating) from 25 liters/second to 50 liters/second.



2016

1. Perseroan berhasil meraih sertifikat Eksternal Audit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 untuk area tol BSD, MMN dan JTSE.
2. JTSE mengoperasikan Jembatan Tallo II mulai 1 Juli 2016 untuk menampung kepadatan kendaraan pada arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1437 H.
3. JTSE mengembangkan solusi sistem informasi lalu lintas (*Traffic Information System/TIS*). TIS adalah platform informasi terkini dan *real time* yang memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai kelancaran lalu lintas di jalan tol dan luar tol.
4. Perseroan melalui MMN dan JTSE memulai kerja sama dengan Pertamina sejak Oktober 2016 untuk jangka waktu 20 tahun, dengan nilai kerja sama sebesar Rp77.000.000.000, meliputi pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) tol yang dikelola oleh MMN & JTSE untuk pipanisasi menyalurkan avtur dari terminal BBM Makassar ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Hasanuddin.
5. Penambahan tower pada KIN sebanyak 327 menara di tahun 2016.
6. Peresmian TapCash BNI di jalan tol Makassar.
7. Penyelesaian rekonstruksi *frontage*. KIN telah membuat dan menandatangani *Facilities Agreement* pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan Cathay United Bank Co. Ltd., ING Bank N.V., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited masing-masing sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Original Lender*.
8. Perseroan mendapatkan sertifikat merek atas hak merek "Nusantara Infrastructure dan Nusantara Care" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat diperpanjang.
1. The Company successfully obtained the External Audit certificates of ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18000 for BSD, MMN, and JTSE.
2. JTSE commenced the operations of Tallo II Bridge on July 1, 2016, to accommodate traffic density during the homebound traffic and returning traffic in Eid al-Fitr 1437H.
3. JTSE developed a solution called Traffic Information System (TIS). TIS is the latest and real-time information platform that provides information on traffic situation, both on and outside toll roads, to toll road users.
4. The Company, through MMN and JTSE, established a collaboration with Pertamina in October 2016 for the period of 20 years, with a value of Rp77,000,000,000, covering the utilization of toll road space (RUMIJA) managed by MMN and JTSE for pipelining jet fuel distribution from Makassar Fuel Terminal to Hasanuddin Aircraft Fuel Depot (DPPU).
5. Addition of 327 telecommunication towers under the management of KIN in 2016.
6. Launching of TapCash BNI on Makassar toll road.
7. Completion of frontage reconstruction. KIN prepared and signed a Facilities Agreement on October 19, 2016 with Cathay United Bank Co. Ltd., ING Bank NV, and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited as Mandated Lead Arrangers and Original Lenders, respectively.
8. The Company received a certificate for "Nusantara Infrastructure and Nusantara Care" trademark from the Ministry of Law and Human Rights, valid for 10 years from the date of receipt of trademark registration with option for extension.



2017

1. Perseroan memperoleh penghargaan dalam acara Warta Ekonomi Award sebagai salah satu dari 5 (lima) perusahaan terbaik di bidang infrastruktur yang menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Perseroan memperoleh Infobank Award sebagai salah satu dari 100 perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia.
3. Pada bulan Juni, PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM), entitas asosiasi anak POTUM, menandatangani Perjanjian Perpanjangan Konsesi dengan PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) Kabupaten Tangerang untuk jangka waktu 20 tahun.
4. Entitas anak Perseroan pada bidang jalan tol, yaitu MMN, JTSE dan BSD menerapkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk Tol Makassar dan BSD sebagai bentuk pemenuhan Peraturan Menteri terkait Transaksi Non Tunai di Jalan Tol.
5. MMN melakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) untuk pembangunan Jalan Tol Layang AP. Pettarani sepanjang 4,3 km.
6. MMN menandatangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan untuk mencari solusi pemecahan masalah kemacetan.
7. DCC dan Kawasan Industri Medan (KIM) menandatangani Berita Acara Kesepakatan mengenai kenaikan tarif pada tanggal 21 April 2017.
8. Pada bulan Juni 2017, SCTK telah menyelesaikan konstruksi peningkatan kapasitas menjadi 350 lps dari sebelumnya 150 lps.
9. Pada bulan Desember 2017, perusahaan asosiasi TKCM melakukan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas sebesar 300 lps menjadi 1.575 lps dari sebelumnya 1.275 lps.
1. The Company obtained an award from Warta Ekonomi Award as one of the best 5 (five) infrastructure companies implementing Good Corporate Governance (GCG) principles.
2. The Company received Infobank Award as one among 100 companies with the fastest growth in Indonesia.
3. In June, PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM), an associate entity of POTUM, signed a Concession Extension Agreement with PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) Tangerang Regency for a period of 20 years.
4. The Company subsidiaries in toll road sector, namely MMN, JTSE, and BSD, implemented the National Cashless Movement (GNNT) in Makassar and BSD toll roads pursuant to the Ministry Regulation on Cashless Transaction on Toll Roads.
5. MMN carried out groundbreaking for the construction of 4.3-km A.P. Pettarani Elevated Toll Road.
6. MMN signed a Memorandum of Understanding with Makassar Government to find the solution to traffic congestion issues.
7. DCC and Medan Industrial Estate (KIM) signed the Minutes of Agreement concerning tariff increase on April 21, 2017.
8. In June 2017, SCTK completed the construction to increase capacity from 150 lps to 350 lps.
9. In December 2017, TKCM, an associate company, improved its capacity by 300 lps, from 1,275 lps to 1,575 lps.



2018

1. Perseroan terpilih menjadi salah satu perusahaan infrastruktur Indonesia yang mendapat kehormatan untuk hadir di acara ASEAN Business Summit 2018.
2. Perseroan menandatangani kontrak kerja sama desain dan konstruksi pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani, Makassar dengan Wika Beton.
3. Perseroan masuk dalam daftar peraih penghargaan 100 Fastest Growing Companies 2018 dari Infobank.
4. Perseroan melalui entitas anaknya yaitu El, mengakuisisi 80% Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Kalimantan Barat.
5. MUN meraih penghargaan ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2018 dari Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO).
6. BSD meraih penghargaan Zero Accident dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
7. Pencatatan Obligasi JLB senilai Rp1,3 triliun.
8. Perseroan meraih penghargaan Tata Kelola Perusahaan Terbaik pada Corporate Secretary Award 2018 yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi.
9. Perseroan membagikan Dividen Interim dan Dividen Final, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2018 dan 27 Juni 2018.
10. Pada bulan Juli - September 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) dengan harga penawaran Rp211/saham untuk 3.760.231.769 saham.
11. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Perseroan menawarkan sebanyaknya 4.950.072.626 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
12. Pada 30 Mei 2018, Perseroan melakukan divestasi KIN dengan nilai Rp1.044 miliar dan rasio valuasi EV/EBITDA 12,2 kali.
13. Perseroan menerima kredit sindikasi untuk pembiayaan konstruksi Jalan Tol Layang A.P. Pettarani di Makassar.
14. Akuisisi tambahan 10% saham JLB pada 29 Agustus 2018. MUN menjadi pemilik atas 35% saham JLB.
15. Penerapan UNIK di tol MMN-JTSE Makassar pada tanggal 10 November 2018.
1. The Company was selected as one of Indonesian infrastructure companies to attend the 2018 ASEAN Business Summit.
2. The Company signed a design and construction collaboration contract with WIKA Beton for the A.P. Pettarani Elevated Toll Road, Makassar.
3. The Company was listed as one the 100 Fastest Growing Companies 2018 from Infobank.
4. The Company through its subsidiary, El, acquired 80% shares of a Biomass Power Plant (PLTBm) in Siantan, West Kalimantan.
5. MUN received the ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2018 from the Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO).
6. BSD received the Zero Accident Award from the South Tangerang Municipal Government.
7. Listing of JLB Bonds I amounted Rp1.37 trillion .
8. The Company received the Best Corporate Governance award in the Corporate Secretary Award 2018, organized by Warta Ekonomi Magazine.
9. The Company distributed Interim Dividend and Final Dividend on May 15, 2018, and June 27, 2018, respectively.
10. Within July - September 2018, PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) carried out a Mandatory Tender Offer (MTO) with an offering price of Rp211/ share for 3,760,231,769 shares.
11. In accordance with the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), the Company offered 4,950,072,626 Regular Registered Series B Shares with a nominal value of Rp70 per share through Preemptive Rights (HMETD).
12. On May 30, 2018, the Company divested KIN with a divestment value of Rp1,044 billion and an EV/EBITDA valuation ratio of 12.2 times.
13. The Company received a syndicated loan for the funding of A.P. Pettarani Elevated Toll Road construction in Makassar.
14. Through the acquisition of additional 10% of JLB shares of JLB on August 29, 2018, MUN owned 35% of JLB's shares.
15. Implementation of UNIK in the MMN-JTSE Makassar toll road on November 10, 2018.

2019

1. Perseroan kembali meraih penghargaan 100 Fastest Growing Companies 2019 dari Majalah Infobank.
2. PT Energi Infranasantara meningkatkan jumlah kepemilikan di PT Inpol Meka Energi menjadi 56,23%.
3. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara POTUM dan Pemerintah Kabupaten Batubara Medan, Sumatera Utara terkait dengan studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kuala Tanjung.
4. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Potum dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak terkait dengan studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rumbai.
5. MUN menandatangani Perjanjian Konsorsium Pengusahaan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dengan PT Mahkota Permata Perdana, PT Summarecon Agung Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
6. JTSE meraih penghargaan dalam ajang "Tax Award 2019: Wajib Pajak Berprestasi" pada 26 November 2019 di Makassar. Acara diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar.
7. JTSE meraih penghargaan "Gold Achievement" pada acara The 8th Annual Indonesia Operational Excellence Conference Award 2019 yang diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia, pada 7 November 2019.
1. The Company won another award as one of the 100 Fastest Growing Companies 2019 from Infobank Magazine.
2. PT Energi Infranasantara increased its share ownership in PT Inpol Meka Energi to 56.23%.
3. Signing of a Memorandum of Understanding between POTUM and the Government of Batubara District of Medan, North Sumatra, related to the feasibility study of Kuala Tanjung Drinking Water Supply System (SPAM).
4. Signing of a Memorandum of Understanding between Potum and Local Government Owned Water Utilities Company (PDAM) Tirta Siak related to feasibility study of Rumbai Drinking Water Supply System (SPAM).
5. MUN signed Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Consortium Agreement with PT Mahkota Permata Perdana, PT Summarecon Agung Tbk, and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
6. JTSE won an award in "Tax Award 2019: Outstanding Taxpayers" on November 26, 2019 in Makassar. The event was organized by Makassar City Government Regional Revenue Agency.
7. JTSE won "Gold Achievement" award at the 8th Annual Indonesia Operational Excellence Conference Award 2019 event held by SHIFT Indonesia, on November 7, 2019.

8. Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) mengakuisisi saham milik CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, dan CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (funds yang dikelola oleh Cap Asia) pada 23 September 2019 sehingga terjadi perubahan komposisi pemegang saham pada PT Margautama Nusantara, menjadi: Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 74,98%, MPTC melalui CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, dan CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (funds yang dahulu dikelola oleh Cap Asia) dengan kepemilikan saham sebesar 25,00% dan Sadikin Aksa sebesar 0,02%.

8. Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) acquired the shares of CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, and CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (funds managed by Cap Asia) on September 23, 2019, resulting in a change in the composition of shareholders of PT Margautama Nusantara, to be as follows: the Company with 74.98% share ownership, MPTC through CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, and CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, (funds that were formerly managed by Cap Asia) with 25.00% share ownership, and Sadikin Aksa with 0.02% share ownership.



1. Penyesuaian Tarif Tol BSD Ruas Pondok Aren-Serpong dan Tol MMN Ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II.
2. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara POTUM dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) dalam Penyediaan Air Minum (SPAM) pada 31 Januari 2020.
3. Perseroan melalui PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) meraih empat penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada 12 Februari 2020.
4. Pembangunan Proyek Jalan Tol A.P. Pettarani, Makassar memasuki tahap akhir pemasangan balok jembatan (box girder) yang disiarkan melalui media video conference pada 17 Mei 2020.
5. Pemberlakuan sistem pengisian ulang (top up) uang elektronik (UNIK) via Aplikasi Whatsapp pada Tol Makassar mulai 24 Juli 2020.
6. Perseroan untuk pertama kalinya memperoleh penghargaan Top CSR 2020 dalam kategori #Star3 dari Majalah Top Business yang diberikan pada 29 Juli 2020.
7. Pada September 2020, Perseroan berhasil menyelesaikan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar yang direncanakan akan disahkan pada bulan Maret 2021.
8. Uji Laik Fungsi (ULF) pada Tol A.P. Pettarani dengan melibatkan tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Unit Pelayanan Perizinan Jalan Bebas Hambatan (UPP JBH), Dinas Perhubungan Darat (HUBDAT), dan KORLANTAS yang diselenggarakan pada 7-9 Oktober 2020.
9. Perubahan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) pada 5 November 2020.
10. Pada 6 November 2020, Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Untuk Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.
11. Perseroan melalui PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan PT Makassar Metro Network (MMN) meraih penghargaan Silver Achievement untuk kategori Services dalam ajang "The 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020" yang diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia pada 25 November 2020.
12. Pada 26 November 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Struktur Jembatan Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3 (Jalan Tol Layang A.P. Pettarani) Makassar.
13. PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) sebagai unit bisnis Perseroan memperoleh penilaian dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai jalan tol berkelanjutan terbaik ke-3 dari seluruh tol di Indonesia pada 3 Desember 2020.
14. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung milik PT Inpol Meka Energi (IME) dioperasikan atau memasuki Commercial Operation Date (COD) sejak 16 Desember 2020 dan sebelumnya telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada 12 Desember 2020.

1. Tariff Adjustment of BSD Toll for Pondok Aren-Serpong Section and MMN Toll Road for Ujung Pandang Toll Road Sections I and II.
2. Signing of Memorandum of Understanding between POTUM and PT Gerbang NTB Emas (GNE) for Drinking Water Supply System (SPAM) on January 31, 2020.
3. Through PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), the Company received an award from the Governor of South Sulawesi on the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) program on February 12, 2020.
4. Construction of A.P. Pettarani Elevated Toll Road project in Makassar entered its final stage of box girder installation, which was broadcasted through video conference on May 17, 2020.
5. Implementation of electronic money top up system (UNIK) through Whatsapp Application on Makassar Toll Road starting from July 24, 2020.
6. For the first time, the Company received the Top CSR 2020 award in the #Star3 category from Top Business Magazine, which was awarded on July 29, 2020.
7. In September 2020, the Company successfully completed A.P. Pettarani Elevated Toll Road in Makassar, which was planned to be inaugurated in March 2021.
8. Conducted Commissioning Test at A.P. Pettarani Toll Road, involving a team from Toll Road Regulatory Agency (BPJT), Freeway Permit Service Unit (UPP JBH), Land Transportation Office (HUBDAT), and KORLANTAS, on October 7-9, 2020.
9. Change of name from PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) to PT Makassar Metro Network (MMN) on November 5, 2020.
10. On November 6, 2020, the Director General of Highways issued a Commissioning Certificate for the Section 3 Ujung Pandang Toll Road (A.P. Pettarani Elevated Toll Road) in Makassar.
11. Through PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and PT Makassar Metro Network (MMN), the Company received Silver Achievement award for Services category in "The 9th Indonesia Operational Excellence Conference Award 2020" organized by SHIFT Indonesia on November 25, 2020.
12. On November 26, 2020, the Minister of Public Works and Housing issued a Commissioning Certificate for Section 3 Ujung Pandang Toll Road Bridge (A.P. Pettarani Elevated Toll Road) in Makassar.
13. PT Makassar Metro Network (MMN) and PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), as the Company's business units, were assessed by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) as the 3rd best sustainable toll road in Indonesia on December 3, 2020.
14. The Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA) of PT Inpol Meka Energi (IME) entered its Commercial Operation Date (COD) or commenced its operations on December 16, 2020. Previously, the power plant obtained the Commissioning Certificate on December 12, 2020.



1. Perseroan melalui entitas anak usahanya di sektor jalan tol, yaitu PT Makassar Metro Network (MMN) telah mengoperasikan jalan tol ujung pandang seksi 3 (Tol Layang A.P. Pettarani Makassar) sepanjang 4,3 km sejak 19 Maret 2021.
 2. Perseroan melalui entitas anak usahanya di sektor jalan tol PT Marga Metro Nusantara pada tanggal 30 Juli 2021 berhasil lolos dalam tahap pra-kualifikasi untuk pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami bersama-sama dengan anggota konsorsium lainnya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Acset Indonusa Tbk, yang selanjutnya akan diundang untuk mengikuti tahapan lelang;
 3. Pada tanggal 19 Agustus 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
 4. Pada tanggal 14 Desember 2021, Perseroan telah menyelenggarakan Public Expose Tahunan secara daring melalui media konferensi video zoom dengan agenda pemaparan kinerja Perseroan.
 5. PT Bintaro Serpong Damai (Tol BSD), entitas anak usaha di sektor jalan tol terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan ruas tol Pondok Aren-Serpong dengan memberikan kemudahan dalam mencetak struk melalui sistem digitalisasi elektronik struk (*e-receipt*).
1. The Company through its subsidiary in the toll road sector, namely PT Makassar Metro Network (MMN) has operated the 4.3 km Section 3 Ujung Pandang Toll Road (A.P. Pettarani Elevated Toll Road in Makassar) since March 19, 2021.
 2. On July 30, 2021, the Company through its subsidiary in the toll road sector PT Marga Metro Nusantara successfully passed the pre-qualification stage for the concession of the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami Toll Road along with other consortium members, namely PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Acset Indonusa Tbk, who will then be invited to participate in the auction stage;
 3. On August 19, 2021, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the financial year ending 31 December 2020.
 4. On December 14, 2021, the Company held an Annual Public Expose online through Zoom video conference with the agenda of presenting the Company's performance.
 5. PT Bintaro Serpong Damai (BSD Toll), a subsidiary in the toll road sector, continues to improve services to users of the Pondok Aren-Serpong toll road by providing convenience in printing receipts through the electronic receipt digitization system (*e-receipt*).



Visi dan Misi

Vision and Mission



Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur.

To be the leading Indonesian private infrastructure investor and developer.

Memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Providing services of the highest standard to meet infrastructure needs in order to improve quality of life and create best value for all stakeholders.



Seluruh visi dan misi Perseroan telah melalui *review* dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta Direksi.
All of the Company's vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Nilai Perusahaan

Corporate Value



GROWING

Tumbuh lebih besar dan lebih cepat seiring berjalannya waktu.

Become bigger and faster over a period of time.



WILLING

Siap memberikan yang terbaik dan melebihi dari tuntutan tugas.

Ready and eager to perform beyond duties.



RELIABLE

Memenuhi komitmen dengan standar yang tinggi.

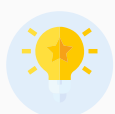
Delivering commitments with high standards.



TEAM UP

Satu tim, satu rencana, satu tujuan.

One team, one plan, one goal.



OPTIMISTIC

Memiliki impian dan percaya diri dalam menyongsong masa depan.

Hopeful and confident about the future.



HARMONIOUS

Hidup bersama dalam harmoni.

Existing together in harmony.



Nilai Perusahaan Corporate Values

Nilai “*GROWTH*” merupakan nilai yang ditanamkan dan TUMBUH dalam benak dan karakter para pemimpin, karyawan, dan semua insan dalam lingkungan Nusantara Infrastructure. Sebuah sikap, pola pikir, dan SEMANGAT yang akan diraih bersama sebagai SATU TIM, SATU RENCANA, dan SATU TUJUAN.

The value of “*GROWTH*” is embedded and GROW in the minds and characters of the leaders, workers, and every individual at Nusantara Infrastructure. An attitude, mindset, and SPIRIT to be achieved together as ONE TEAM, ONE PLAN, ONE GOAL.

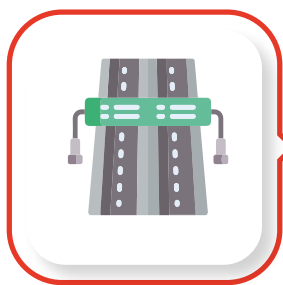
Kegiatan Usaha Business Activities

BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian. Hingga tahun 2021, kegiatan usaha Perseroan masih berorientasi pada bidang infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas yang terdiri dari 4 (empat) sektor utama, yaitu pengelolaan jalan tol, pelabuhan laut, pengelolaan air minum, dan energi terbarukan.

BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

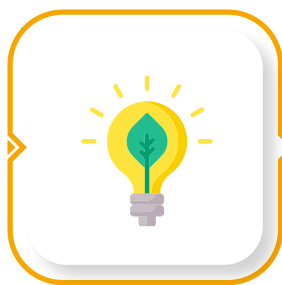
As stipulated in Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s purposes and objectives are to carry out business in the fields of trade, construction, industry, transportation, services and agriculture. Until 2021, business activities of the Company have been focused on transportation infrastructure and utility infrastructure, consisting of 4 (four) main sectors such as toll road management, ports, drinking water management, and renewable energy.



Pengelolaan Jalan Tol
Toll Road Management



Pengelolaan Air Minum
Drinking Water Management



Energi Terbarukan
Renewable Energy



Jasa Pelabuhan
Port Service

DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku sejalan dengan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan.

DURING FISCAL YEAR

The business activities carried out during the fiscal year were in line with those stipulated by the Company’s Articles of Association.

Produk dan Jasa

Products and Services

PENGELOLAAN JALAN TOL

Kegiatan usaha di bidang pengelolaan jalan tol dilaksanakan oleh Perseroan melalui entitas anak, yaitu PT Margautama Nusantara (MUN). Kegiatan usaha tersebut mencakup pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol serta mengusaha lahan di ruang milik jalan tol (RUMIJA tol) dan lahan yang berbatasan dengan RUMIJA tol untuk tempat istirahat dan pelayanan, serta berbagai fasilitas dan usaha lainnya.

Perseroan memastikan bahwa pengelolaan jalan tol dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menaruh perhatian besar pada aspek-aspek unggulan seperti kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan kepuasan dari para pengguna jalan tol. Informasi terkait ruas tol yang dikelola pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TOLL ROAD MANAGEMENT

Business activities in the field of toll road management are carried out by the Company through a subsidiary, namely PT Margautama Nusantara (MUN). These business activities include the operation and/or maintenance of toll roads as well as operation of land in the toll road space (toll road's RUMIJA) and land adjacent to the toll road's RUMIJA for rest area and services, along with other facilities and businesses.

The Company ensures that the toll road management is carried out effectively and efficiently by focusing on superior aspects such as convenience, comfort, safety, and satisfaction of toll road users. Information on toll roads managed by the Company in 2021 is described in the following table:

Perusahaan Company	Keterangan	Information
PT Bintaro Serpong Damai (BSD)	Mulai Beroperasi: 1999 Panjang: 7,2 km jalur Jalur: Serpong-Pondok Aren Masa Konsesi: Sampai dengan 1 Oktober 2028	Commencing Operation: 1999 Length: 7.2 km track Path: Serpong-Pondok Aren Concession Period: Until October 1, 2028
PT Makassar Metro Network (MMN)	Mulai Beroperasi: 1998 Panjang: 1. Seksi II: 5,9 km 2. Seksi III Pettarani: 4,3 km Jalur: - Pelabuhan Soekarno Hatta-A.P. Pettarani - Akhir jalan tol seksi II, Persimpangan Jl. Urip Sumoharjo-Persimpangan Jl. Boulevard Panakkukkang-Jl. Hertasning-Persimpangan Jl. Sultan Alauddin Masa Konsesi: Sampai dengan 12 April 2043	Commencing Operation: 1998 Length: 1. Section II: 5.9 km 2. Section III Pettarani: 4.3 km Path: - Soekarno Hatta Port-AP Pettarani - End of section II toll road, Intersection of Jl. Urip Sumoharjo-Intersection Jl. Boulevard Panakkukkang-Jl. Hertasning- Intersection of Jl. Sultan Alauddin Concession Period: Until April 12, 2043
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)	Mulai Beroperasi: 2006 Panjang: 11,6 km Jalur: Jembatan Tallo—Simpang Mandai, Makassar Masa Konsesi: Sampai dengan 30 September 2041	Commencing Operation: 2006 Length: 11.6 km Path: Tallo Bridge—Mandai Simpang, Makassar Concession Period: Until September 30, 2041
PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)	Mulai Beroperasi: 1995 Panjang: 9,7 km Jalur: Kebon Jeruk-Penjarangan Masa Konsesi: Sampai dengan 2 Februari 2042	Commencing Operation: 1995 Length: 9.7 km Path: Kebon Jeruk-Penjarangan Concession Period: Until February 2, 2042



PENGELOLAAN AIR MINUM

Perseroan menjalankan usahanya di sektor pengelolaan air minum dengan mencakup pengelolaan air bersih dan distribusi air bersih untuk industri dan rumah tangga melalui PDAM setempat. Perseroan melaksanakan bisnis usaha di bidang pengelolaan air bersih melalui entitas anak PT Potum Mundi Infranasantara (Potum). Selama tahun 2021, Potum telah mengoperasikan 3 (tiga) instalasi pengolahan air bersih atau water treatment plant (WTP), yaitu:

1. SCKT WTP, Serang, Banten
2. DCC WTP, Medan, Sumatera Utara
3. TKCM WTP, Cikokol, Tangerang, Banten

Perseroan juga melalui Potum telah mengoperasikan 3 (tiga) lokasi SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) sesuai dengan ketentuan HSE (*Health, Safety and Environment* atau Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan) yang ketat. Melalui sektor ini, Perseroan mewujudkan kontribusinya dalam turut mendukung penyediaan air bersih guna mengatasi krisis air bersih sekaligus mendukung terwujudnya program pelestarian lingkungan secara nyata di Indonesia.

ENERGI TERBARUKAN

Komitmen Perseroan untuk meningkatkan ketersediaan energi terbarukan dalam rangka mendukung kehidupan yang berkelanjutan serta memperluas portofolio di bidang energi terbarukan, diwujudkan melalui usaha di sektor energi terbarukan. Dalam bidang ini, Perseroan fokus pada pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan melalui entitas anak, yaitu PT Energi Infranasantara (EI).

Melalui PT Inpola Meka Energi (IME), entitas anak tidak langsung, Perseroan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang berlokasi di Kecamatan Tanah Pinem, Sumatera Utara. Perseroan memiliki proyek konstruksi pembangunan PLTA 2x7,5 Megawatt (MW) yang telah selesai pada tahun 2020 dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 16 Desember 2020.

Tidak hanya PLTA Lau Gunung, Perseroan juga mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pembangkit tersebut berkapasitas 1x15 Megawatt (MW) yang telah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 23 April 2018 melalui EI dan entitas anak tidak langsung, yaitu PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL).

DRINKING WATER MANAGEMENT

The Company's business in drinking water management sector encompasses clean water management and clean water distribution for industry and households through Local Government Owned Water Utilities Companies (PDAMs). The Company conducts clean water management business through its subsidiary, PT Potum Mundi Infranasantara (Potum). During 2021, Potum has operated 3 (three) water treatment plants (WTP), namely:

1. SCKT WTP, Serang, Banten
2. DCC WTP, Medan, North Sumatra
3. TKCM WTP, Cikokol, Tangerang, Banten

Through Potum, the Company has operated 3 (three) SPAM (Drinking Water Treatment System) locations in accordance with strict HSE (Health, Safety and Environment) provisions. Through this sector, the Company realizes its contribution in providing clean water to overcome the clean water crisis as well as supporting the implementation of environmental conservation program in Indonesia.

RENEWABLE ENERGY

The Company's commitment to increasing the supply of renewable energy for sustainable living while expanding its portfolio in the renewable energy sector is manifested through its business in the renewable energy sector. In this field, the Company focuses on developing new and renewable energy power plants through its subsidiary, namely PT Energi Infranasantara (EI).

Through PT Inpola Meka Energi (IME), an indirect subsidiary, the Company developed Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) located in Tanah Pinem District, North Sumatra. The Company manages 2x7.5 Megawatt (MW) hydropower construction project, which was completed in 2020 and has started operating (*Commercial Operating Date/COD*) since December 16, 2020.

Aside from PLTA Lau Gunung, the Company operates a Biomass Power Plant (PLTBm) in Siantan, Wajok Hulu Village, Siantan District, Mempawah Regency, West Kalimantan. The 1x15-Megawatt (MW) plant commenced its operations (*Commercial Operating Date/COD*) on April 23, 2018, through EI and PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), the Company's indirect subsidiary.

PLTBm Siantan menjadi pembangkit energi terbarukan pertama di Kalimantan Barat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi gasifikasi, yaitu boiler dengan tipe water tube yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari sumber daya alami. Di antaranya, cangkang kelapa sawit dan kayu, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu dan limbah pertanian serta perkebunan lainnya.

JASA PELABUHAN

Di sektor jasa kepelabuhanan, Perseroan melalui entitas anak, yaitu PT Portco Infranasantara (Portco) dan entitas asosiasi PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) menjalankan bisnis usaha di bidang jasa pelabuhan dengan cakupan bisnis meliputi layanan manajemen kepelabuhanan, pergudangan, jasa bongkar muat, dan jasa penyewaan tangki penyimpanan. ISAB memiliki lahan seluas 9,1 hektar serta gudang seluas 11.200 meter persegi yang berlokasi di area Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Saat ini, terdapat ikatan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara ISAB dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terkait pembangunan dan pengoperasian terminal kargo kering dan cair di Pelabuhan Panjang dan Lampung.

PLTBm Siantan is the first renewable energy power plant in West Kalimantan that is operated by using the gasification technology through a boiler with water tube and fuel derived from natural resources, among others oil palm shells and wood, rice husks, corncobs, sugarcane bagasse, sawdust, and other agricultural waste.

PORT SERVICE

Through PT Portco Infranasantara (Portco), a subsidiary, and PT Intisentosa Alambahtera (ISAB), an associate entity, the Company engages in port service sector and carries out port management services including warehousing, loading and unloading, and storage tank rental. ISAB owns a 9.1 hectare of land and a warehouse with a total area of 11,200 sqm located in Panjang Port area in Bandar Lampung. At present, ISAB and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) enters into a Joint Operation Agreement (JO) for the construction and operation of dry and liquid cargo terminals in Panjang Port and Lampung.



Keanggotaan pada Asosiasi

Association Membership

No	Nama Asosiasi Name of Association	Status	Mulai Bergabung Joining Since
1	Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI)	Aktif Active	2021
2	Asosiasi Pengembang PLTA (APPLTA)	Aktif Active	2020
3	Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)	Aktif Active	2018
4	Asosiasi Tol Indonesia Indonesian Toll Road Association	Aktif Active	2018
5	Asosiasi Perusahaan Air Minum Swasta Perpipaan Indonesia (Aspasindo) Association of Indonesian Piping Drinking Water Private Companies	Aktif Active	2016
6	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Aktif Active	2015
7	Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Association of Indonesian Water Supply Enterprises (Perpamsi)	Aktif Active	2013
8	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)	Aktif Active	2006

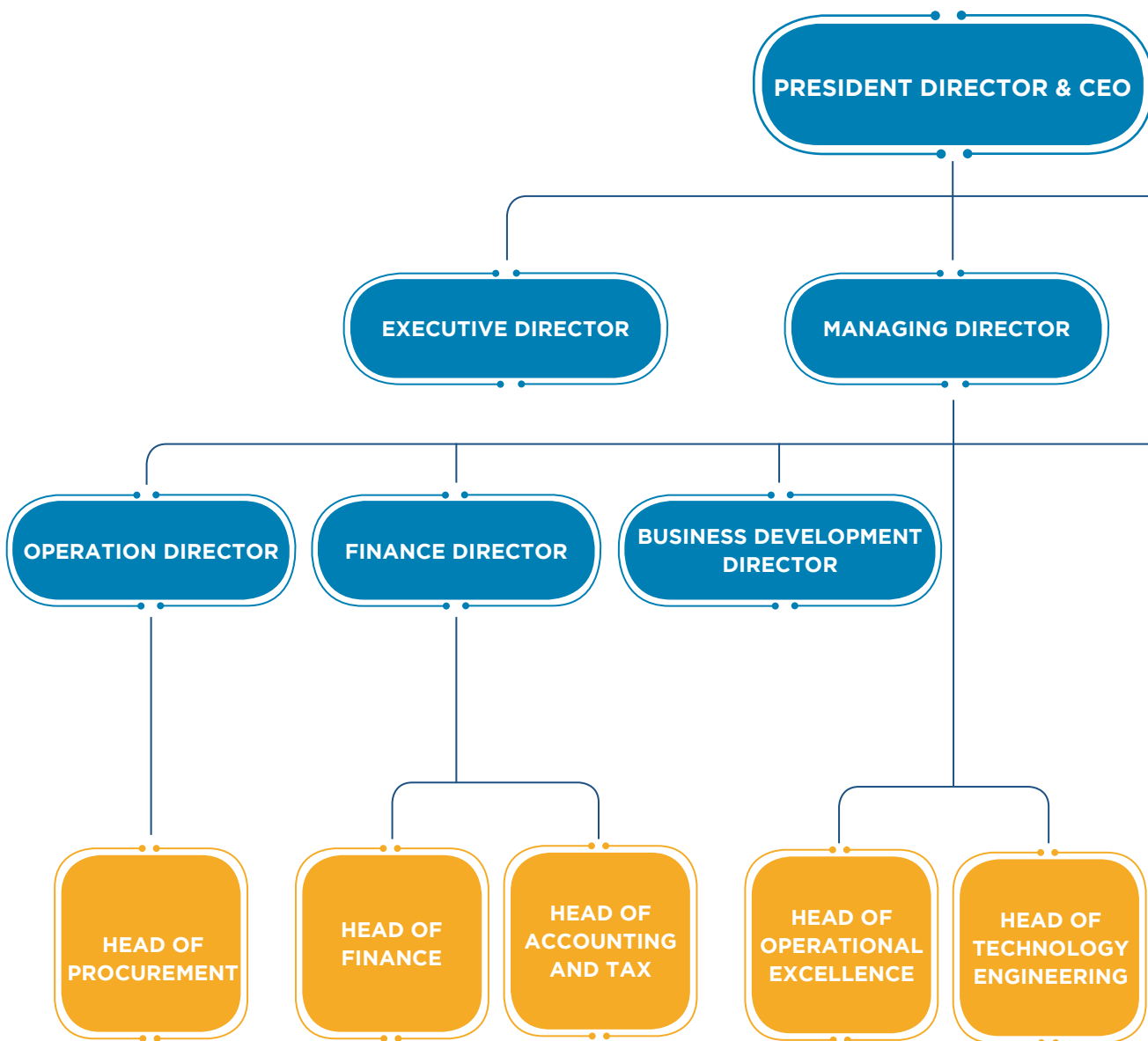


Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur Organisasi Perusahaan dibentuk sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Berikut Struktur Organisasi PT Nusantara Infrastructure Tbk:

The Company's Organizational Structure was established in accordance with the development of the Company's business. The following is the Organizational Structure of PT Nusantara Infrastructure Tbk:





NON RESIDENTIAL
DIRECTOR

NON RESIDENTIAL
DIRECTOR

HEAD OF
CORPORATE
AFFAIRS

HEAD OF
HUMAN
RESOURCES /
GENERAL
AFFAIRS

HEAD OF
LEGAL

HEAD OF
INTERNAL
AUDIT



EXECUTIVE DIRECTOR



NON EXECUTIVE DIRECTOR



NON DIRECTOR

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Jose Ma. K. Lim
Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Filipina, berusia 69 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di 21 CD, Strata Suites 300, P. Guevarra St., Bgy. Sta. Lucia, San Juan City, Filipina.

Filipino, 69 years old in 2021 financial year. Domiciled in 21 CD, Strata Suites 300, P. Guevarra St., Bgy. Sta. Lucia, San Juan City, Philippines.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as President Commissioner based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Master of Business Administration</i> dari Universitas Asian Institute of Management, Filipina pada tahun 1978 • <i>Bachelor of Arts Degree in Philosophy</i> dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina (1972) 	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration from the Asian Institute of Management, the Philippines in 1978 • Bachelor of Arts Degree in Philosophy from Ateneo de Manila University, the Philippines (1972)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan CEO PT Metro Pacific Investment Corporation (2003-2021). • Wakil Presiden Grup dan Direktur Keuangan Equitable Banking Corporation, Fort Bonaficio Development Corporation (2001-2003) • Wakil Presiden Equitable Banking Corporation, Fort Bonaficio Development Corporation (FBDC) (1995-2000) • Direktur Investment Banking, First National Bank of Boston (1994-1995). • Pejabat Senior dan Wakil Presiden Equitable Banking Corporation (1988-1994) 	<ul style="list-style-type: none"> • President and CEO of PT Metro Pacific Investment Corporation (2003-2021). • Group Vice President & Chief Finance Officer, Fort Bonifacio Development Corporation (FPBDC), (2001-2003) • Treasury Vice President, Fort Bonifacio Development Corporation (FPBDC), 1995-2000 • Investment Banking Director, First National Bank of Boston (1994-1995) • Senior Officer and and Vice President of Equitable Banking Corporation (1988-1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Presiden dan CEO PT Metro Pacific Investment Corporation	President and CEO of PT Metro Pacific Investment Corporation
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Johny J. Lumintang
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 74 tahun pada tahun buku 2021.
Berdomisili DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 74 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI
Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Independent Commissioner based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi Hukum Militer (2002) • Akademi Militer Indonesia tahun (1970) 	<ul style="list-style-type: none"> • School of Military Law (2002) • Indonesian Military Academy (1970)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Duta Besar Indonesia untuk Republik Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall (2014-2017) • Direktur Utama PT Adimitra Baratama Nusantara (2012-2014) • Komisaris Utama PT Borneo Indobara (2011-2014) • Direktur Utama PT Borneo Indobara (2007-2011) • Komisaris Utama PT Bank Sinarmas Tbk (2005-2009) • Komisaris PT Topindo Atlas Indonesia (2003-2014) • Penasihat PT Arara Abadi (2003-2005) • Komisaris Utama PT Dahana (Persero) (2001-2002) • Komisaris Utama PT Asabri (Persero) (2001-2002) • Komisaris Utama PT Bank Yudha Bhakti Tbk (2001-2002). • Komisaris Utama PT ITCI Hutani Manunggal (1999-2000). • Komisaris Utama PT Bank Artha Graha Internasional (1999-2000) • Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1993-1998) • Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (1998 - 2002) • Letnan Jendral Terntara Nasional Indonesia (Purn) (2002 - sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambassador of Indonesia to the Republic of the Philippines, Palau, and the Marshall Islands (2014-2017) • President Director of PT Adimitra Baratama Nusantara (2012-2014) • President Commissioner of PT Borneo Indobara (2011-2014) • President Director of PT Borneo Indobara (2007-2011). • President Commissioner of PT Bank Sinarmas Tbk (2005-2009). • Commissioner of PT Topindo Atlas Indonesia (2003-2014) • Advisor to PT Arara Abadi (2003-2005) • President Commissioner of PT Dahana (Persero) (2001-2002) • President Commissioner of PT Asabri (Persero) (2001-2002). • President Commissioner of PT Bank Yudha Bhakti Tbk (2001-2002). • President Commissioner of PT ITCI Hutani Manunggal (1999-2000). • President Commissioner of PT Bank Artha Graha Internasional (1999-2000) • Member of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (1993-1998) • Lieutenant General of the Indonesian Armed Forces (1998 - 2002) • Lieutenant General of the Indonesian Armed Forces (Retired) (Purn) (2002 - present)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Borneo Indobara • Ketua Komite Audit Perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> • President Commissioner of PT Borneo Indobara • Chairman of the Company's Audit Committee
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Majority/Controlling Shareholders.



Rodrigo E. Franco
Komisaris
Commissioner

Warga Negara Filipina, berusia 62 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di 100 Symphony Tower, 6 Sgt. Esguerra St., South Triangle, Quezon City, Filipina.

Filipino, 62 years old in 2021 financial year. Domiciled in 100 Symphony Tower, 6 Sgt. Esguerra St., South Triangle, Quezon City, the Philippines.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Commissioner based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humbert Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Master in Business Administration</i> dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina (1988) • <i>Bachelor of Science in Management Engineering</i> dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina (1981) 	<ul style="list-style-type: none"> • Master in Business Administration from Ateneo de Manila University, the Philippines (1988) • Bachelor of Science in Management Engineering from Ateneo de Manila University, the Philippines (1981)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur & CEO, PT Metro Pacific Investment Corporation (2003-2021). • Group VP & Chief Finance Officer (CFO), Fort Bonifacio Development Corporation (FPBDC) (2001-2003) • VP Treasury, Fort Bonifacio Development Corporation (FPBDC) 1995-2000 • Direktur Investment Banking, First National Bank of Boston (1994-1995) • Senior Officer dan VP, Equitable Banking Corporation (1988-1994) 	<ul style="list-style-type: none"> • President and CEO of PT Metro Pacific Investment Corporation (2003-2021). • Group Vice President & Chief Finance Officer, Fort Bonifacio Development Corporation (FPBDC), (2001-2003) • Treasury Vice President, Fort Bonifacio Development Corporation (FPBDC), 1995-2000 • Investment Banking Director, First National Bank of Boston (1994-1995) • Senior Officer and Vice President of Equitable Banking Corporation (1988-1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden & CEO Metro Pacific Tollways Corporation (2016-sekarang) • Presiden & CEO NLEX Corporation (2010-sekarang) • Komisaris PT Margautama Nusantara (2019-sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • President & CEO of Metro Pacific Tollways Corporation (2016-present). • President & CEO of NLEX Corporation (2010-present). • Commissioner of PT Margautama Nusantara (2019-present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Farid Harianto
Komisaris
Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 69 tahun pada tahun buku 2021.
Berdomisili DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 69 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 19 Agustus 2020 hingga RUPST Tahun 2025.	First appointed as Commissioner based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 94 dated November 18, 2020 drawn up before Humbert Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 19, 2020 until 2025 AGMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science dari The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1989) • Master of Applied Economics and Managerial Science dari The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1988) • Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1975) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science from The Wharton School of University of Pennsylvania, United States (1989) • Master of Applied Economics and Managerial Science from The Wharton School of University of Pennsylvania, United States (1988) • Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1975)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk (2020-sekarang) • Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika (PBM-IHC, 2020-sekarang) • Komisaris PT Tripatra Engineering (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera (2012-2020) • Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (2011-2020) • Komisaris Independen PT Siloam Hospitals Tbk (2008-2019) • Wakil Ketua Dewan Rumah Sakit Pang Hlay Siloam di Myanmar (2014-2019) • Penasihat Khusus untuk Wakil Presiden RI (2009-2014) • Penasihat Senior untuk Gubernur Bank Indonesia (2008-2014) • Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk (2005-Sekarang) • Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN/IBRA) (1998-2000) • CEO Credit Rating Indonesia (PT Pefindo) (1995-1998), • Professor dan Ketua Studi ASEAN di Pusat Studi Internasional (CIS, University of Toronto, Canada) (1993-1995) 	<ul style="list-style-type: none"> • Independent Commissioner of PT Indika Energy Tbk (2020-present) • President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika (PBM-IHC, 2020-present) • Commissioner of PT Tripatra Engineering (2019-present) • Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera (2012-2020) • Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (2011-2020) • Independent Commissioner of PT Siloam Hospitals Tbk (2008-2019) • Deputy Chairman of Pang Hlay Siloam Hospital Board in Myanmar (2014-2019) • Special Advisor to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014) • Senior Advisor to the Governor of Bank Indonesia (2008-2014) • Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk (2005-present) • Deputy Chairman of the National Bank Restructuring Agency (IBRA/IBRA) (1998-2000) • CEO of Credit Rating Indonesia (PT Pefindo) (1995-1998), • Professor and Chairman of ASEAN Studies at the Center for International Studies (CIS, University of Toronto, Canada) (1993-1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk • Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk • Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika • Komisaris PT Tripatra Engineering • Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera • Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk • Anggota Komite Risk Oversight, PT Maybank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk • Independent Commissioner of PT Indika Energy Tbk • President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika • Commissioner of PT Tripatra Engineering • Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera • Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk • Member of the Risk Oversight Committee, PT Maybank Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Majority/Controlling Shareholders.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



M. Ramdani Basri
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun pada tahun buku 2021.
Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 60 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI
Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as President Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Executive Education in Economic Infrastructure dari Harvard Kennedy School, Amerika Serikat (2012) Master of Science dalam bidang Public Policy dari Universitas Indonesia (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> Executive Education in Economic Infrastructure from Harvard Kennedy School, United States (2012) Master of Science in Public Policy from the University of Indonesia (2002)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Potum Mundi Infranasantara (2017-sekarang). Komisaris PT Margautama Nusantara (2016-sekarang). 	<ul style="list-style-type: none"> President Director of PT Potum Mundi Infranasantara (2017-present). Commissioner of PT Margautama Nusantara (2016-present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Potum Mundi Infranasantara Komisaris PT Margautama Nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> President Director of PT Potum Mundi Infranasantara. Commissioner of PT Margautama Nusantara
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Majority/Controlling Shareholders.



Benny S. Santoso

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 63 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 19 Agustus 2020 hingga RUPST Tahun 2025.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 94 dated November 18, 2020 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 19, 2020 until 2025 AGMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Bisnis Study dari Ngee Ann College, Singapura (1981).	Bachelor's degree in Business Study from Ngee Ann College, Singapore (1981).
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-sekarang) • Komisaris Presiden dari ICBP (2009-2015) • Komisaris Presiden PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2013-2015) • Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (2007-2015) • Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-sekarang) • Anggota Dewan First Pacific (2003-sekarang) • Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-sekarang) • Direktur PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (1994-sekarang) • Dewan Penasihat PLDT Inc (2005-sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-present) • President Commissioner of ICBP (2009-2015) • President Commissioner of PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2013-2015) • Commissioner of PT Bumi Serpong Damai Tbk (2007-2015) • Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-present) • Board Member of First Pacific (2003-present) • Commissioner of PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-present) • Director of PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (1994-present) • Advisory Board of PLDT Inc (2005-present)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk • Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk • Anggota Dewan First Pacific • Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> • President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk • Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk • Board Member of First Pacific • Commissioner of PT Fast Food Indonesia Tbk
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Majority/Controlling Shareholders.



Danni Hasan
Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 58 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humbert Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Pelatihan Program Strategi Kepemimpinan Internasional, dan Program Penggabungan & Akuisisi, The Wharton School of the University of Pennsylvania pada (2015) • Master of Science dalam bidang Manajemen Industri dari Universitas Adamson, Filipina (1998) • Sarjana dalam bidang Teknik Kimia dari Universitas Adamson, Filipina (1986) 	<ul style="list-style-type: none"> • International Leadership Strategy Program Education and Training, and Mergers & Acquisitions Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania in (2015) • Master of Science in Industrial Management from Adamson University, the Philippines (1998) • Bachelor in Chemical Engineering from Adamson University, the Philippines (1986)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) • Direktur Utama PT Centris Multi Pratama (2001- 2007) • Kepala Bagian Keuangan PT Centris Multi Pratama (1995-2001) • Contract Supervisor, Asamera Oil Ltd. (1990-1992). • Head of Private Equity Advisory & Investment PT Sigma Barata (1990-1995) • Technical Superintendent, Akzo Coating Indonesia (1988-1990). 	<ul style="list-style-type: none"> • President Director of PT Margautama Nusantara (2007-present) • President Director of PT Centris Multi Pratama (2001-2007) • Head of the Finance Section of PT Centris Multi Pratama (1995-2001) • Contract Supervisor, Asamera Oil Ltd. (1990-1992). • Head of Private Equity Advisory & Investment PT Sigma Barata (1990-1995) • Technical Superintendent, Akzo Coating Indonesia (1988-1990).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Direktur Utama PT Margautama Nusantara	President Director of PT Margautama Nusantara
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Majority/Controlling Shareholders.



Ridwan Irawan

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun pada tahun buku 2021.
Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 55 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI
Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Master in International Banking & Financial Services</i> dari University of Reading, England (1993) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1991) 	<ul style="list-style-type: none"> • Master in International Banking & Financial Services from the University of Reading, England (1993) • Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1991)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Portco Infranasantara (2020-sekarang) • Direktur PT Energi Infranasantara (2018-sekarang) • Chief Financial Officer, Trada Trading dan Trada Holding (2008-2013) • Chief Financial Officer, Trada Group (2006-2008) • Direktur Delta Advisory Pte Ltd; Wakil Direktur Corporate Finance di PT Holdika Perkasa (1999-2004) • Manajer Senior Divisi Keuangan Perusahaan PT HSBC Securities Indonesia (HSBC Investment Banking) (1997-1999) 	<ul style="list-style-type: none"> • President Director of PT Portco Infranasantara (2020-present) • Director of PT Energi Infranasantara (2018-present) • Chief Financial Officer, Trada Trading and Trada Holding (2008-2013) • Chief Financial Officer, Trada Group (2006-2008) • Director of Delta Advisory Pte Ltd; Deputy Director of Corporate Finance at PT Holdika Perkasa (1999-2004) • Senior Manager of Corporate Finance Division of PT HSBC Securities Indonesia (HSBC Investment Banking) (1997-1999)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Portco Infranasantara • Direktur PT Energi Infranasantara 	<ul style="list-style-type: none"> • President Director of PT Portco Infranasantara • Director of PT Energi Infranasantara
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Majority/Controlling Shareholders.



Amadeo N. Bejec
Direktur
Director

Warga Negara Filipina, berusia 47 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.

Filipino, 47 years old in 2021 financial year. Domiciled in 4 Rosemary St. Dreamhomes Snbd. Brgy. Dela Paz, Pasig City, the Philippines 1600.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humbert Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration di Universitas De La Salle, Filipina (2004) • Bachelor of Accountancy di Universitas De La Salle, Filipina (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration at De La Salle University, the Philippines (2004) • Bachelor of Accounting at De La Salle University, the Philippines (1994)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (2021-sekarang) • Direktur Keuangan PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) (2017-sekarang) • Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation (2003-sekarang) • Manager Corporate Finance C&P Homes (2000-2003) • Auditor di SGV (1996-1999) • Management Trainee, Divisi Treasury Equitable Bank (1995-1996) • Direktur Keuangan di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018 - sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioner of PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (2021-present) • Finance Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) (2017-present) • Vice President of Corporate Finance at NLEX Corporation (2003-present) • Corporate Finance Manager of C&P Homes (2000-2003) • Auditor at SGV (1996-1999) • Management Trainee, Treasury Division of Equitable Bank (1995-1996) • Director of Finance at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018 - present)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Bintaro Serpong Damai (BSD) • Direktur Keuangan PT Metro Pacific Tollways Indonesia • Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation 	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioner of PT Bintaro Serpong Damai (BSD) • Finance Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia • Vice President of Corporate Finance at NLEX Corporation
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Denn Charly G. Espanola

Direktur
Director



Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun pada tahun buku 2021.
Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia.

Indonesian, 51 years old in 2021 financial year. Domiciled in DKI
Jakarta, Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<i>Bachelor of Oceanography</i> dari US Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA (1994)	Bachelor of Oceanography from the US Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA (1994)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasional di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018 - sekarang) • Country Head di Metro Pacific Tollways Corporation (2017-sekarang) • Direktur Utama PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2018-sekarang) • Deputy CEO di CII Bridges and Roads (2015-2018) • Direktur CII Bridges and Roads (2015-2018) • Vice Chairman Board of Directors di MCSC Operations and Maintenance Company (2015-2018) • Vice President Division Head, Subic Freeport Expressway and Subic Clark Tarlac Expressway di Tollways Management - Corporation (2008-2015) • Manager-Subic Freeport Expressway di Tollways Management Corporation (2005-2008) • Manager-Traffic Management, Safety and Security Dept di Tollways Management Corporation (2004-2005) 	<ul style="list-style-type: none"> • Director of Operations at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018 - present) • Country Head of Metro Pacific Tollways Corporation (2017-present) • President Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2018-present) • Deputy CEO of CII Bridges and Roads (2015-2018) • Director of CII Bridges and Roads (2015-2018) • Vice Chairman of the Board of Directors at MCSC Operations and Maintenance Company (2015-2018) • Vice President Division Head, Subic Freeport Expressway and Subic Clark Tarlac Expressway at Tollways Management - Corporation (2008-2015) • Manager-Subic Freeport Expressway at Tollways Management Corporation (2005-2008) • Manager-Traffic Management, Safety and Security Dept at Tollways Management Corporation (2004-2005)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Country Head di Metro Pacific Tollways Corporation • Direktur Utama PT Metro Pacific Tollways Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Country Head of Metro Pacific Tollways Corporation • President Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Christopher Daniel C. Lizo
Direktur
Director

Warga Negara Filipina, berusia 49 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di 113 Carmelite St. Merville Park Subdivision, Paranaque City, Filipina.

Filipino, 41 years old in 2021 financial year. Domiciled in 40-B Mercurio Street, Mabayaan, Olongapo City, the Philippines.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humbert Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Manajemen Eksekutif, University of Wharton, Philadelphia, USA (2015) • Sarjana Ilmu Akuntansi, De La Salle University (1993) 	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Management Education, University of Wharton, Philadelphia, USA (2015) • Bachelor of Accounting Science, De La Salle University (1993)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Operasional dan Keuangan di MP Cala Holdings, Inc (2015-sekarang) • Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation (2013-sekarang) • Senior Vice President CFO di Metro Pacific Tollways Corporation (2009-sekarang) • Treasurer & Director di NLEX Corporation (2009-sekarang) • Treasurer & Director di Tollways Management Corporation (2009-sekarang) • CFO Treasurer di NLEX Corporation (2008-2016) • Director di Metro Pacific Investments Corporation (2007-2008) • Vice President of Treasury di Metro Pacific Investments Corporation (2006-2007) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head of Operations and Finance of MP Cala Holdings, Inc (2015-present) • Treasurer & Director of Cavitex Infrastructure Corporation (2013-present) • Senior Vice President CFO of Metro Pacific Tollways Corporation (2009-present) • Treasurer & Director of NLEX Corporation (2009-present) • Treasurer & Director of Tollways Management Corporation (2009-present) • CFO Treasurer of NLEX Corporation (2008-2016) • Director of Metro Pacific Investments Corporation (2007-2008) • Vice President of Treasury at Metro Pacific Investments Corporation (2006-2007)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Operasional dan Keuangan di MP Cala Holdings, Inc • Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation • Senior Vice President CFO di Metro Pacific Tollways Corporation • Treasurer & Director di NLEX Corporation • Treasurer & Director di Tollways Management Corporation 	<ul style="list-style-type: none"> • Head of Operations and Finance of MP Cala Holdings, Inc • Treasurer & Director of Cavitex Infrastructure Corporation • Senior Vice President CFO of Metro Pacific Tollways Corporation • Treasurer & Director of NLEX Corporation • Treasurer & Director of Tollways Management Corporation
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Francis Emmanuel D. Rojas

Direktur
Director



Warga Negara Filipina, berusia 49 tahun pada tahun buku 2021. Berdomisili di 21 Cucumber St. Valle Verde V, Pasig City, Filipina.

Filipino, 49 years old in 2021 financial year. Domiciled in 21 Cucumber St. Valle Verde V, Pasig City, the Philippines.

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.	First appointed as Director based on the Deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 drawn up before Humberg Lie, SE, M.Kn., Notary in North Jakarta with a term of office from August 31, 2018 until 2023 GMS.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen Bisnis, Asian Institute of Management, Manila pada (1999) • Sarjana Manajemen Bisnis, Ateneo de Manila University (1994) 	<ul style="list-style-type: none"> • Master in Business Management, Asian Institute of Management, Manila (1999) • Bachelor of Business Management, Ateneo de Manila University (1994)
Riwayat Pekerjaan Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Vice President Pengembangan Bisnis di PT Metro Pacific Tollways Corporation (2013-sekarang) • Direktur Senior Ernst and Young Philippines (2001-2007) 	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Vice President of Business Development at PT Metro Pacific Tollways Corporation (2013-present) • Senior Director of Ernst and Young Philippines (2001-2007)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Senior Vice President Pengembangan Bisnis di PT Metro Pacific Tollways Corporation (2013-sekarang).	Senior Vice President of Business Development at PT Metro Pacific Tollways Corporation (2013-present).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers' Profile



Arnaf Radin Yogananta
Senior Procurement Manager
Senior Procurement Manager

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Procurement Senior Manager pada 1 November 2018 berdasarkan 066/SK-HRD/XI/2018. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti pada tahun 2005 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Head of Procurement di PT Nusantara Infrastructure (2018-sekarang); Head of Procurement & Logistic di PT Komet Infra Nusantara (2014-2018); Procurement Manager di SAP Group (2012-2014); Procurement di PT Siemens Indonesia dan PT Nokia Siemens (2006-2012); dan Site Supervisor di CV Hikmah Mandiri (2005-2006).

Indonesian, 41 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Senior Procurement Manager on November 1, 2018 based on Decree No. 066/SK-HRD/XI/2018. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Trisakti University in 2005 and has had various work experiences as Head of Procurement at PT Nusantara Infrastructure (2018-present); Head of Procurement & Logistics at PT Komet Infra Nusantara (2014-2018); Procurement Manager at SAP Group (2012-2014); Procurement at PT Siemens Indonesia and PT Nokia Siemens (2006-2012); and Site Supervisor at CV Hikmah Mandiri (2005-2006).



Nugroho Vembrianto S.
Technical Expert Senior Manager
Technical Expert Senior Manager

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, dan berdomisili di Bandung. Diangkat sebagai Technical Expert Senior Manager pada 25 Mei 2012 berdasarkan 145/SK-DIR/NI/V/2012. Saat ini menjabat sebagai Head of Engineering/Planning/Research/Operation di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2012—sekarang). Menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada bidang *'Highway Engineering and Development'* di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan spesialisasi pada geoteknik jalan dan jembatan dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja antara lain sebagai Anggota tim desain pada beberapa jalan tol di Indonesia; Anggota tim perumus kebijakan Standar Pelayanan Minimal di bawah supervisi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) (2015—sekarang); Project Manager Reconstruction Jalan Tol Seksi Empat Makassar (2010 - 2011); dan Asisten ahli geoteknik pantai dan lepas pantai pada Manajemen Induk Proyek Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) pada tahun 2006.

Indonesian citizen, 39 years old, and domiciled in Bandung. Appointed as Technical Expert Senior Manager on 25 May 2012 based on 145/SK-DIR/NI/V/2012. Currently serving as Head of Engineering/Planning/ Research/Operation at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2012—present). Graduated in the field of Highway Engineering and Development at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB) with a specialization in road and bridge geotechnics and has various work experiences, including as a member of the design team on several toll roads in Indonesia; Member of the Minimum Service Standards policy formulation team under the supervision of the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia (PUPR RI) (2015—present); Project Manager for Section Four Makassar Toll Road Reconstruction (2010 - 2011); and Assistant to Coastal and Offshore Geotechnical Expert in the Master Management of the Surabaya-Madura (Suramadu) Bridge Project in 2006.



Dadi Purwadi
Accounting & Tax Senior Manager
Accounting & Tax Senior Manager

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Accounting & Tax Senior Manager pada 25 April 2018 berdasarkan 034/SK-HRD/ IV/2018. Meraih gelar Master di Bidang Finance and Accounting dari Universitas Pancasila pada tahun 2015; mendapatkan sertifikasi Certified Management Accountant (CMA) dari ICMA Australia pada tahun 2018; mengambil gelar MBA di Singapore Business School; serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Supervisor Internal Audit di Sierad Group (3 tahun); Business Analyst di Kimberly-Lever Indonesia (Unilever Group) (5 tahun); Head of Accounting di Holcim Indonesia (12 Tahun); dan Senior Manager Accounting and Tax di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-sekarang); Komisaris PT SCTK dan DCC (anak Perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk)

Indonesian, 45 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Accounting & Tax Senior Manager on April 25, 2018 based on Decree No. 034/SK-HRD/IV/2018. Earned a Master's degree in Finance and Accounting from Pancasila University in 2015 obtained Certified Management Accountant (CMA) from ICMA Australia in 2018; holds an MBA degree at the Singapore Business School; and has experience as Internal Audit Supervisor at Sierad Group (3 years); Business Analyst at Kimberly-Lever Indonesia (Unilever Group) (5 years); Head of Accounting at Holcim Indonesia (12 years old); and Senior Manager of Accounting and Tax at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-present); Commissioner of PT SCTK and DCC (a subsidiary of PT Nusantara Infrastructure Tbk).



Meggie Burhan
Finance Administration Senior Manager
Finance Administration Senior Manager

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Finance Administration Senior Manager pada 21 Februari 2018 berdasarkan 022/SK-HRD/ II/2018. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 1988 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Senior Manager di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-sekarang); General Manager Finance di PT Tirta Bangun Nusantara (2013-2017); dan General Manager Finance di PT Certis Multipersada Pratama Tbk (1996—2012).

Indonesian, 56 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Finance Administration Senior Manager on February 21, 2018 based on Decree No. 022/SK-HRD/II/2018. Holds a Bachelor's degree in Accounting from the Advent Indonesia University in 1988 and has had various work experiences as a Senior Manager at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-present); General Manager Finance at PT Tirta Bangun Nusantara (2013-2017); and General Manager Finance at PT Certis Multipersada Pratama Tbk (1996—2012).



Helda M. Manuhutu

Human Resources/General Affairs General Manager
Human Resources/General Affairs General Manager

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, dan berdomisili di Bekasi. Diangkat sebagai Human Resource/General Affairs General Manager pada 2 September 2013 berdasarkan 073/PKT/HRD-NI/ VIII/2013. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1996 dan gelar Magister Management Human Resources, Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2021 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Corporate Human Resource/General Affairs/Information Technology General Manager dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nusantara Infrastructure Tbk (2013-sekarang); dan selama 15 tahun menangani berbagai pilar HR di Unilever Indonesia.

Indonesian, 48 years old, and domiciled in Bekasi. Appointed as Human Resource/General Affairs General Manager on September 2, 2013 based on Decree No. 073/PKT/HRD-NI/VIII/2013. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya in 1996 and a Master's degree in Human Resources Management from Pelita Harapan University, Jakarta in 2021. She has had various work experiences as Corporate Human Resource/General Affairs/Information Technology General Manager and Member Nomination and Remuneration Committee of PT Nusantara Infrastructure Tbk (2013-present), and handling various business pillars at Unilever Indonesia for 15 years.



Deden Rochmawaty

Corporate Affairs General Manager
Corporate Affairs General Manager

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Corporate Affairs General Manager pada 6 Januari 2012 berdasarkan 002/PKT/HRD-NI/I/2012. Meraih gelar Master of Business Administration dari Armstrong University pada tahun 1987 dan *Bachelor of Arts, International Business* dari Bedford University (1982) serta berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang *sales & marketing*, media, komunikasi, periklanan dan perbankan di berbagai perusahaan seperti Citibank, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Lippo Karawaci, American Express Bank, Advis Marketing Communication Agency dan Putera Sampoerna Foundation; dan sejak 2012 hingga kini sebagai Corporate Affairs General Manager PT Nusantara Infrastructure Tbk yang menangani internal dan *external communication (media relations, government relations, community relations, dan CSR)*.

Indonesian, 58 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Corporate Affairs General Manager on January 6, 2012 based on Decree No. 002/PKT/HRD-NI/I/2012. Holds a Master of Business Administration from Armstrong University in 1987 and a Bachelor of Arts, International Business from Bedford University (1982) and has had more than 25 years of experience in sales & marketing, media, communications, advertising, and banking in various companies such as Citibank, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Lippo Karawaci, American Express Bank, Advis Marketing Communication Agency and Putera Sampoerna Foundation. Since 2012 until present, she has served as Corporate Affairs General Manager of PT Nusantara Infrastructure Tbk, handling internal and external communication (media relations, government relations, community relations, and CSR).



Real Chandra

Senior Manager-Head of Operational Excellence
Senior Manager-Head of Operational Excellence



Warga Negara Indonesia, 43 tahun, dan berdomisili di Depok. Diangkat sebagai Senior Manager-Head of Operational Excellence pada 12 Oktober 2020 berdasarkan 018/SK-HRD/X/2020. Meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja lebih dari 18 tahun di bidang *Strategic Management, Commercial Excellence, Business Process Optimization, Project Management, dan Microfinancing* di berbagai perusahaan seperti Federal International Finance Group, Holcim Indonesia, dan Semen Indonesia Group.

Indonesian, 43 years old, and domiciled in Depok. Appointed as Senior Manager-Head of Operational Excellence on October 12, 2020 based on Decree No. 018/SK-HRD/X/2020. Earned a Bachelor's degree from Bogor Agricultural University in 2002 and has had various work experiences of more than 18 years in the fields of *Strategic Management, Commercial Excellence, Business Process Optimization, Project Management, and Microfinancing* in various companies such as Federal International Finance Group, Holcim Indonesia, and Semen Indonesia Group.

Junianto T. Prijono

Internal Audit General Manager
Internal Audit General Manager



Warga Negara Indonesia, 66 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Internal Audit General Manager berdasarkan SKD No. 106/NI-DIR1/31/08/2018. Meraih gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya pada tahun 1981 dan *Master of Business Administration* dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1989 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Komisaris PT Nusantara Infrastructure Tbk (2008-2017); Chief Finance Officer di Bosowa Corporation (2008-2009); Star Petrogas Corporation/ Persian Gulf Star Oil Company (2007-2008); PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (2006-2007); Direktur di PT Renaissance Capital Asia (2005-2006); Komisaris PT Bank Lippo Tbk (2002-2004); Deputy Direktur Keuangan-Kontroler & Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero); Deputy Ketua-Dukungan Kerja & Administrasi (2001-2004), Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Partner-Financial Advisory di Deloitte Touche (1991-2001) dan sebagainya.

Indonesian, 66 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Internal Audit General Manager based on Decree No. 106/NI-DIR1/31/08/2018. Holds a Bachelor's degree in Accounting from Faculty of Economics of Brawijaya University in 1981 and a Master of Business Administration from PPM School of Management in 1989. He has had various work experiences as Commissioner of PT Nusantara Infrastructure Tbk (2008-2017); Chief Finance Officer at Bosowa Corporation (2008-2009); Star Petrogas Corporation/ Persian Gulf Star Oil Company (2007-2008); PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (2006-2007); Director at PT Renaissance Capital Asia (2005-2006); Commissioner at PT Bank Lippo Tbk (2002-2004); Deputy Director of Finance-Controller & Risk Management at PT Pertamina (Persero); Deputy Chairman-Work Support & Administration (2001-2004), Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Partner-Financial Advisory at Deloitte Touche (1991-2001) and so on.

Demografi Karyawan

Employee Demography

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PERUSAHAAN

EMPLOYEE COMPOSITION BY COMPANY

Nama Perusahaan Company Name	2021	2020	2019
PT Nusantara Infrastructure Tbk	45	48	43
Entitas Anak Perusahaan Langsung Direct Subsidiaries			
PT Marga Utama Nusantara	11	10	11
PT Potum Mundi Infranasantara	5	6	6
PT Portco Infranasantara	1	1	2
PT Energi Infranasantara	9	8	5
PT Telekom Infranasantara	1	1	1
Entitas Anak Perusahaan Tidak Langsung Indirect Subsidiaries			
PT Bintaro Serpong Damai	38	37	32
PT Makassar Metro Network	50	52	56
PT Jalan Tol Seksi Empat	23	22	20
PT Tirta Bangun Nusantara	10	10	8
PT Dain Celicani Cemerlang	24	22	17
PT Sarana Catur Tirta Kelola	46	48	46
PT Inpolo Meka Energi	5	7	21
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	42	41	41
Jumlah Total	310	313	309

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

Jenis Kelamin Gender	2021	2020	2019
Laki-laki Male	255	256	256
Perempuan Female	55	57	53
Jumlah Total	310	313	309

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

EMPLOYEE COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS

Status	2021	2020	2019
Karyawan Tetap Permanent Employees	261	269	244
Karyawan Kontrak Non-permanent Employees	49	44	65
Total	310	313	309



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN

EMPLOYEE COMPOSITION BY POSITION

Jabatan Position	2021	2020	2019
Executive Vice President	4	6	0
General Manager	17	20	23
Senior Manager	9	10	8
Manager	27	26	23
Assistant Manager	74	66	63
Staff	136	146	139
Non-Staff	43	39	53
Total	310	313	309

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

Tingkat Pendidikan Education Level	2021	2020	2019
Strata 3 Doctoral Degree	2	3	4
Strata 2 Master Degree	27	29	26
Strata 1 Bachelor's Degree	139	141	135
Diploma (D3)	37	37	32
SMA atau Sederajat Senior High or Equivalent	91	92	100
SMP atau Sederajat Junior High or Equivalent	8	5	6
SD Elementary School	6	6	6
Total	310	313	309

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA

EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE

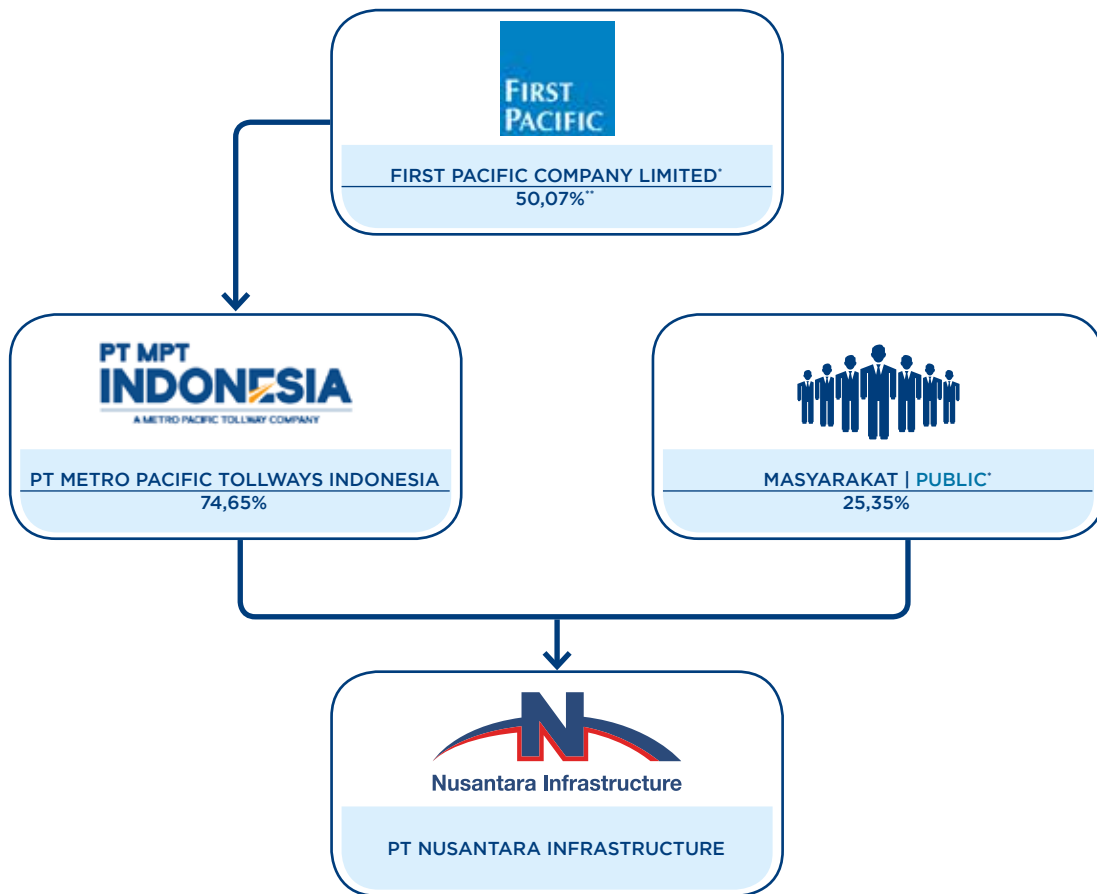
Usia Age	2021	2020	2019
> 60 tahun years old	14	11	10
51-60 tahun years old	53	37	33
41-50 tahun years old	82	86	85
31-40 tahun years old	97	98	93
21-30 tahun years old	63	81	85
< 21 tahun years old	1	0	3
Total	310	313	309

Informasi Pemegang Saham

Shareholders Information

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Majority and Controlling Shareholders



* First Pacific Company Limited merupakan suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan dan memegang kendali secara tidak langsung di First Pacific Company Limited.

** Melalui MPT Asia Corporation, entitas anak tidak langsung dari First Pacific Company Limited.

* First Pacific Company Limited is a company listed on the Hong Kong Stock Exchange. Mr. Anthoni Salim has interest and control both directly and indirectly in First Pacific Company Limited.

** Through MPT Asia Corporation, an indirect subsidiary of First Pacific Company Limited.



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2020

Share Ownership Composition as of December 31, 2020

Pemegang Saham	Jumlah Saham Total Shares	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Kepemilikan Ownership (%)	Shareholder
Seri A				Series A
PT Bosowa Utama	1	35	0,00	PT Bosowa Utama
Sub Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35	0,00	Sub-Total of Outstanding Series A Shares
Seri B				Series B
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	13.220.263.850	925.418.469.500	74,65	PT Metro Pacific Tollways Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.771.071.131	123.974.979.170	10,00	PT Indonesia Infrastructure Finance
Masyarakat	2.333.918.213	163.374.274.910	13,17	Public
Saham Treasuri	385.455.000	26.981.850.000	2,18	Treasury Stock
Sub Jumlah Saham Beredar Seri B	17.710.708.193	1.239.749.573.510	100,00	Sub-Total of Outstanding Series B Shares
Jumlah Saham Beredar	17.710.708.194	1.239.749.573.545	100,00	Total Outstanding Shares
Jumlah Saham dalam Portepel	63.289.291.807	4.430.250.426.455		Total Shares in Portfolio

PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Shareholders with 5% or More Ownership

Pemegang Saham	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Ownership (%)	Shareholder
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	13.220.263.850	74,65	PT Metro Pacific Tollways Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.771.071.131	10,00	PT Indonesia Infrastructure Finance
Masyarakat	2.719.373.214	15,35	Public
Jumlah	17.710.708.195	100,00	Total

PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI

Shareholders Classification

Kategori	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan Ownership (%)	Category
Ritel Domestik	1.369.461.906	7,73	Domestic Retail
Institusi Domestik	16.300.631.356	92,04	Domestic Institution
Jumlah Pemegang Saham Domestik	17.670.093.262	99,77	Total Domestic Investor
Ritel Asing	1.225.900	0,01	Foreign Retail
Institusi Asing	39.389.032	0,22	Foreign Institution
Jumlah Pemegang Saham Asing	40.614.932	0,23	Total Foreign Investor
Jumlah	17.710.708.194	100,00	Total

20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

20 largest Shareholders

No	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Total Share (Shares)	Kepemilikan Ownership (%)
1	PT Metro Pacific Tollways Indonesia	13.220.263.850,00	74,65
2	PT Indonesia Infrastructure Finance	1.771.071.131,00	10,00
3	PT Basri Putra Invesco	243.477.784,00	1,37
4	Reksa Dana Treasure Saham Mantap	199.350.200,00	1,13
5	PT Bosowa Corporindo	134.346.154,00	0,76
6	PT Bosowa Corporindo	116.667.000,00	0,66
7	Sulistiani Sampoerna	86.150.000,00	0,49
8	Chandra Widjaja	70.145.400,00	0,40
9	PT Bosowa Asuransi	65.177.818,00	0,37
10	Suriantien	39.733.800,00	0,22
11	Rahman Kamaruddin	35.000.000,00	0,20
12	Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah	34.120.000,00	0,19
13	M. Ramdani Basri	31.507.933,00	0,18
14	Sutanto	28.082.700,00	0,16
15	Hendra Wangsanata	27.232.167,00	0,15
16	Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif	23.755.300,00	0,13
17	Hendra Wangsanata	23.720.000,00	0,13
18	Reksa Dana Sentra Dana Ekuitas	20.800.000,00	0,12
19	Suriantien	20.222.300,00	0,11
20	Idrus	20.066.100,00	0,11

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SECARA LANGSUNG

Direct Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Director

Nama Name	Jabatan Position	2021	
		Jumlah Saham (Lembar) Total Share (Shares)	Kepemilikan Ownership (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Jose Ma. K. Lim	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Rodrigo Emmanuel Franco	Komisaris Commissioner	-	-
Johny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Farid Harianto	Komisaris Commissioner	-	-
Direksi Board of Directors			
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	64.895.967	0,37
Danni Hasan	Direktur Director	-	-
Ridwan Irawan	Direktur Director	-	-
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director	-	-
Amadeo Navalta Bejec	Direktur Director	-	-
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur Director	-	-
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur Director	-	-
Benny S. Santoso	Direktur Director	-	-



Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Tanggal Pelaksanaan Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah setelah Pencatatan Saham Total Shares after Shares Listing	Modal Disetor Paid-up Capital	Bursa Saham Name of Stock Exchange
18 Juli 2001 July 18, 2001	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	60.000.000	60.000.000	6.000.000.000	
18 Juli 2001 July 18, 2001	Penambahan Pencatatan Listing Addition	375.000.000	435.000.000	43.500.000.000	
8 November 2006 November 8, 2006	Penggabungan Usaha Merger	9.693.571.429	10.128.571.429	354.500.000.015	
20 Juli 2010 July 20, 2010	Penggabungan Nilai Nominal Merger of Nominal Value	-5.064.285.714	5.064.285.715	354.500.000.050	
12 Agustus 2010 August 12, 2010	Penawaran Umum Terbatas 1:2 Limited Public Offering 1:2	8.476.500.000	13.540.785.715	947.855.000.050	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
26 Juli 2013 July 26, 2013	Konversi Waran Seri Warrant Series Conversion	154.308.244	15.235.671.880	1.066.497.031.565	
28 Desember 2018 December 28, 2018	Penambahan Saham Seri B dengan HMETD B Series Shares Addition with Preemptive Rights	2.475.036.314	17.710.708.194	1.239.749.573.545	

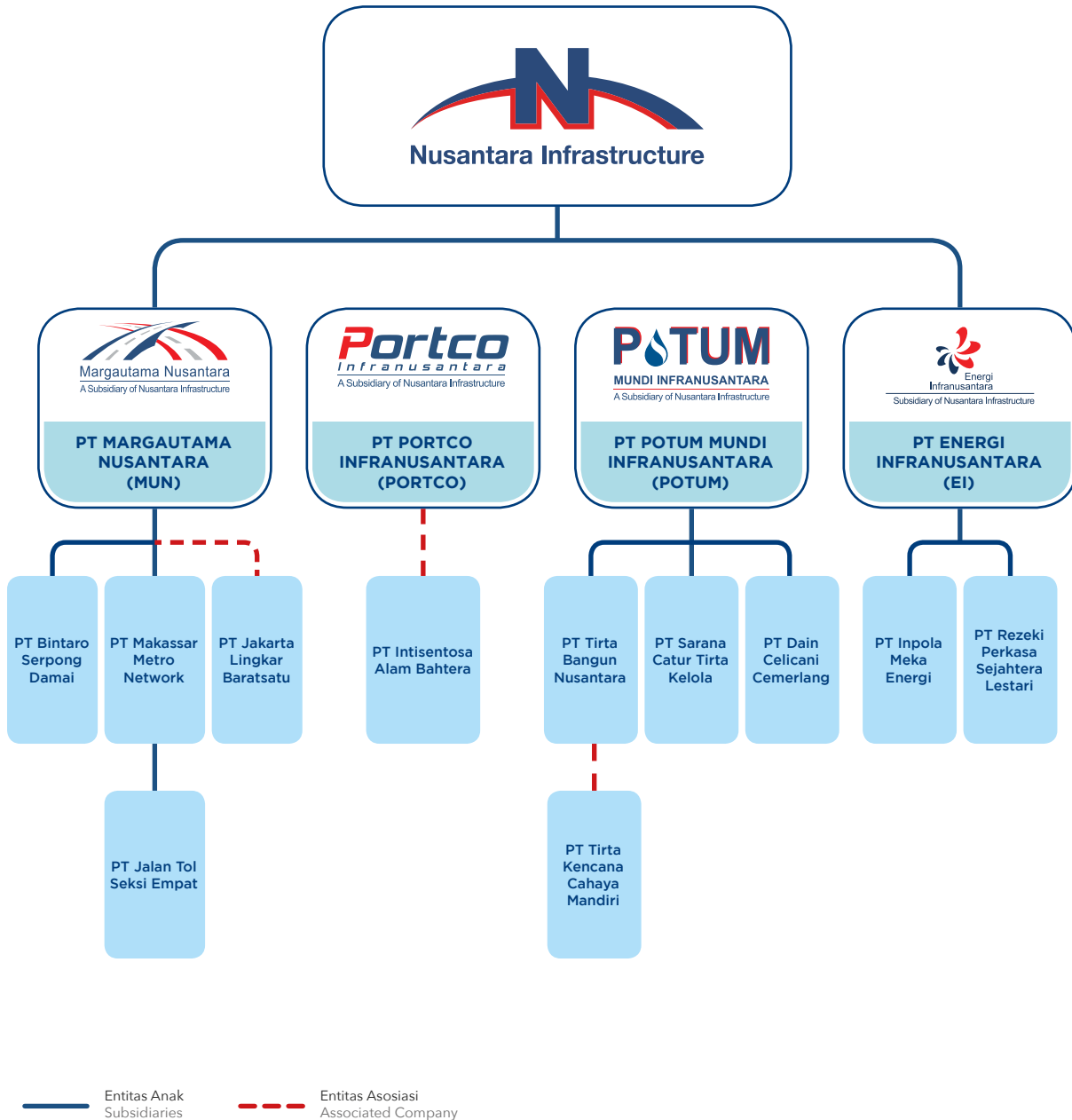
PERATURAN KEPEMILIKAN DAN HAK SAHAM NUSANTARA INFRASTRUCTURE

Ownership Regulation and Share Rights of Nusantara Infrastructure

Jenis Saham Types of Share	Peraturan Kepemilikan Ownership Regulations	Hak Rights
Saham Seri A Series A Share	Akta No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Deed No. 23 dated May 12, 2015, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta	Saham Seri A merupakan saham tanpa hak suara, tidak berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau <i>Right Issue</i> apabila Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas, tidak berhak untuk melakukan penambahan saham, dan Saham Seri A tidak dapat dialihkan kepada siapa pun. Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A hanyalah hak atas dividen yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham Seri B. Series A shares are shares without voting rights, are not entitled to Preemptive Rights (HMETD) or Right Issue if the Company will conduct a Limited Public Offering, are not entitled to add shares, and Series A Shares cannot be transferred to anyone. The rights held by Series A Shareholders are only the right to dividends, which is 50% (fifty per cent) of the rights to dividends received by the Series B Shareholders.
Saham Seri B Series B Share	Akta No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Deed No. 23 dated May 12, 2015, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta	Saham Seri B tidak dapat dipindahkan dengan cara apa pun kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan. Series B shares cannot be transferred in any way unless otherwise specified in the legislation, especially regulations in the capital market and the Company's Articles of Association.

Struktur Grup

Group Structure





Entitas Anak dan Asosiasi

Subsidiaries and Associate Entities

Nama Anak Perusahaan Company Name	Tahun Awal Kegiatan Beginning Year of Commercial Activities	Tahun Penyertaan Year of Investment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Line	Status Operasi Operational Status	Total Aset 2021 (Rp miliar) Total Assets (in billion Rupiah)
Entitas Anak Langsung Direct Subsidiary						
PT Margautama Nusantara	2011	2010	76,51%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	5.179,17
PT Potum Mundi Infranasantara	2012	2011	99,99%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	230,12
PT Portco Infranasantara	2012	2011	99,99%	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Beroperasi Operating	156,20
PT Energi Infranasantara	2013	2012	99,99%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	708,53
PT Telekom Infranasantara	2014	2014	100,00%	Telekomunikasi Telecommunication	Beroperasi Operating	85,19
PT Marga Metro Nusantara	Belum Beroperasi Not Yet Operating	2018	70,00%	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Construction, Trading, and Service	Belum Beroperasi Not Yet Operating	73,04
PT Bintaro Serpong Damai	1999	2006	88,93%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	5.179,17
PT Makassar Metro Network	1998	2006	99,62%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	230,12
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Margautama Nusantara Indirect Subsidiary through PT Margautama Nusantara						
PT Bintaro Serpong Damai	1999	2006	88,93%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	1.481,29
PT Makassar Metro Network	1998	2006	99,62%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	3.081,55
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Potum Mundi Infranasantara Indirect Subsidiary through PT Potum Mundi Infranasantara						
PT Tirta Bangun Nusantara	2013	2012	99,99%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	52,2
PT Dain Celicani Cemerlang	2014	2012	74,52%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	119,32
PT Sarana Catur Tirta Kelola	1997	2013	65,00%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	217,21
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Energi Infranasantara Indirect Subsidiary through PT Energi Infranasantara						
PT Inpola Meka Energi	2020	2013	61,23%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	420,30
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	2018	2018	80,00%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	233,77
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Makassar Metro Network Indirect Subsidiary through PT Makassar Metro Network						
PT Jalan Tol Seksi Empat	2008	2013	99,39%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	660,36

ENTITAS ANAK LANGSUNG

PT Margautama Nusantara (MUN)

PT Margautama Nusantara (MUN) berdiri pada 11 Mei 2007 dengan tujuan untuk menjalankan bisnis usaha pada bidang pengelolaan jalan tol dan berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan akuisisi atas 75% saham MUN dan menjadikan MUN secara resmi sebagai entitas anak Perseroan.

Sebelum diakuisisi, MUN memiliki 2 (dua) entitas anak, yaitu PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dengan kepemilikan saham sebesar 66,68% dan PT Makassar Metro Network (MMN) dengan kepemilikan saham sebesar 73,88%. MUN juga memiliki 1 (satu) entitas anak tidak langsung, yaitu PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan kepemilikan saham sebesar 73,43% serta 1 (satu) entitas asosiasi, yaitu PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dengan kepemilikan saham sebesar 35%.

Untuk memperkuat aspek permodalan MUN serta meningkatkan kinerja dalam pengelolaan jalan tol, MUN membangun kerja sama dengan Capital Advisor Partners Asia Pte Ltd (CapAsia) yang merupakan sebuah perusahaan swasta di sektor investasi di Asia Tenggara, yang diwakili oleh CIIF Infrastructure Holdings Sdn Bhd dan CAIF III Infrastructure Holding Sdn Bhd. Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut, kinerja dan pencapaian MUN dalam bidang pengelolaan jalan tol dapat meningkat. Hingga akhir tahun 2021, kepemilikan saham MUN oleh Perseroan adalah sebesar 76,51%.

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

PT Potum Mundi Infranasantara didirikan pada tahun 2011 sebagai salah satu entitas anak Perseroan yang berfokus pada pengelolaan sektor penyediaan air bersih. Saham di PT Potum oleh Perseroan hingga akhir tahun 2020 adalah sebesar 99,99%.

Di tahun 2012, PT Potum melakukan akuisisi saham dari PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) dan PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) masing-masing sebesar 51%. Kedua perusahaan tersebut telah memiliki kontrak pengelolaan air bersih di wilayah Cikokol, Tangerang, dan Medan serta secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konsesi proyek instalasi penyediaan air bersih di wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun 2013, PT Potum mengakuisisi saham PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) sebesar 65%. SCTK sendiri merupakan sebuah

DIRECT SUBSIDIARIES

PT Margautama Nusantara (MUN)

PT Margautama Nusantara was established on May 11, 2007, to carry out business in the field of toll road management, and is currently located in Jakarta. In 2013, the Company acquired 75% shares of MUN; thus, making it as the Company's subsidiary.

Prior to the acquisition, MUN owns 2 (two) subsidiaries, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD) with 66.68% share ownership and PT Makassar Metro Network (MMN) with 73.88% share ownership. MUN also has 1 (one) indirect subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) with 73.43% share ownership and 1 (one) associate entity, namely PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) with 35% share ownership.

To strengthen MUN's capital structure and improve its performance in toll road management, MUN cooperated with Capital Advisor Partners Asia Pte. Ltd. (CapAsia), a private company engages in investment in Southeast Asia, represented by CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd. and CAIF III Infrastructure Holding Sdn. Bhd. With this cooperation, it is expected that MUN's performance and achievement in toll road management can improve. As of 2020, the Company owned 76.51% share ownership in MUN.

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

PT Potum Mundi Infranasantara was established in 2011 as the Company's subsidiary focusing on clean water supply and management. As of the end of 2020, the Company owned 99.99% shares of Potum.

In 2012, Potum acquired the shares of PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) and PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), each amounting to 51%. Both companies entered into clean water management contracts in Cikokol, Tangerang, and Medan; and were involved both directly and indirectly in the concessions of water supply installation projects in these regions. In 2013, Potum acquired 65% shares of PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK), a company that holds the concession of clean water treatment and distribution focusing on providing services to industrial customers in



perusahaan pemegang konsesi pengolahan dan distribusi air bersih yang berfokus pada pelayanan bagi pelanggan industri di area Serang, Banten. Kemudian pada tahun 2018, PT Potum kembali melakukan akuisisi saham milik TBN, sehingga kini kepemilikan PT Potum di TBN menjadi 99,9% dan pada tahun 2019, PT Potum kembali melakukan akuisisi saham milik DCC sehingga kepemilikan di DCC menjadi 74,52%. Melalui PT Potum, Perseroan turut ambil bagian dalam penyediaan air bersih yang penting untuk menangani krisis air bersih di Indonesia.

PT Portco Infranasantara (Portco)

Perseroan mendirikan PT Portco Infranasantara pada 8 Maret 2011 dengan tujuan untuk menyediakan layanan manajemen pelabuhan. Seluruh aktivitas bisnis usaha dijalankan Portco dengan menerapkan prosedur Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Business to Business (B2B). PT Portco telah mendapatkan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada Oktober 2011 untuk mendukung Portco menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan Menteri yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Guna meningkatkan performa pelayanannya, Portco mengembangkan bisnisnya dengan menjadi pemegang saham PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) sebesar 39%. Hingga akhir tahun 2020, kepemilikan saham PT Portco oleh Perseroan adalah sebesar 99,99%.

PT Energi Infranasantara (EI)

Perseroan mendirikan PT Energi Infranasantara (EI) pada tahun 2012 sebagai entitas bisnis yang bergerak di bidang pengelolaan sektor energi terbarukan. Hingga akhir tahun 2021, kepemilikan saham Perseroan di EI adalah sebesar 99,99%.

Pada tahun 2013, EI mengakuisisi saham PT Inpola Meka Energi (IME), sebuah perusahaan pengembang pembangkit listrik tenaga air, sebesar 61,23%. Dengan akuisisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung secara otomatis dimiliki oleh EI. IME memiliki proyek konstruksi pembangunan PLTA 2x7,5 MW yang telah selesai pada tahun 2020 dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 16 Desember 2020.

Pada 16 Agustus 2018, EI melakukan akuisisi saham PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) sebesar 80%. RPSL merupakan sebuah perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm) yang berlokasi di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas 1x15 MW dan sudah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak tanggal 23 April 2018. PLTBm tersebut menjadi pembangkit listrik bertenaga bio massa pertama di Kalimantan Barat. Seluruh akuisisi yang dilakukan Perseroan melalui EI menjadi salah satu bentuk strategi bisnis Perseroan dalam mengembangkan portofolio di bidang Energi Bersih (*Green*) Baru dan Terbarukan (EBT).

Serang region, Banten. Then in 2018, Potum acquired the remaining shares of TBN, making its ownership in TBN 100%, and in 2019, Potum also increased its ownership at DCC through share acquisition reaching 74.52% share ownership at DCC. Through Potum, the Company takes part in providing clean water, an essential effort to address clean water crisis in Indonesia.

PT Portco Infranasantara (Portco)

Established on March 8, 2011, PT Portco Infranasantara provides port management service. All business activities of Portco are carried out through the Public-Private Partnership (PPP) and Business-to-Business (B2B) schemes. To support its business, Portco had obtained the Port Business Entity (BUP) license in October 2011 through a ministerial decree issued by the Minister of Transportation. Portco also holds 39% shares of PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) to improve its service performance and develop its business. As of the end of 2020, the Company owned 99.99% shares of Portco.

PT Energi Infranasantara (EI)

The Company established PT Energi Infranasantara in 2012 as a business entity engaging in the renewable energy management sector. As of the end of 2020, the Company owned 99.99% shares of EI.

In 2013, EI acquired 56.23% shares of PT Inpola Meka Energi (IME), a hydropower development company. Through this acquisition, EI automatically owns the Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA). IME also has a 2x7.5 MW PLTA construction project which was completed in 2020 and has started operating (*Commercial Operating Date/COD*) since December 16, 2020.

On August 16, 2018, EI acquired 80% shares of PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), an Independent Power Producer (IPP) for Biomass Power Plant (PLTBm) located in Siantan, Mempawah, West Kalimantan, with the capacity of 1x15 MW and has been operating (*Commercial Operating Date/COD*) since April 23, 2018. This PLTBm is the first bio-mass powered power plant in West Kalimantan. All acquisitions made by the Company through EI are one of the Company's business strategy in developing a portfolio in the field of New and Renewable Green Energy (EBT).

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG

Sektor Pengelolaan Jalan Tol

PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) adalah perusahaan yang memegang konsesi jalan tol sepanjang 7,25 km antara Serpong dan Pondok Aren di wilayah Tangerang Selatan. Saham BSD diakuisisi oleh Perseroan melalui MUN dengan kepemilikan saham sebesar 88,93%. BSD mulai menjalankan operasionalnya sejak 2 Februari 1999, Jalan Tol Serpong-Pondok Aren menjadi jalur utama yang memiliki peran besar dalam membantu menekan waktu tempuh dan mengurai kepadatan kendaraan secara efisien di wilayah Tangerang Selatan.

PT Makassar Metro Network (MMN)

PT Makassar Metro Network (MMN) didirikan pada tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan jalan tol yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) secara resmi berganti nama menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bosowa Marga Nusantara sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tertanggal 2 November 2020 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta. Melalui MUN, kepemilikan saham MMN oleh Perseroan sejak tahun 2006 hingga kini adalah sebesar 99,62%.

MMN merupakan perusahaan pemegang konsesi jalan tol penghubung sepanjang 5,95 km antara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan Jalan A.P. Pettarani (*flyover* Urip Sumoharjo) yang juga terhubung dengan Jalan Tol Seksi Empat. Kedua jalan tol ini menjadi jalur utama antar kota di wilayah tersebut.

Pembangunan tahap awal dilakukan pada akhir Jalan Tol Seksi II, tepatnya di persimpangan Jl. Urip Sumoharjo dengan melewati persimpangan Jl. Boulevard Panakkukkang, Jl. Hertasning, kemudian berakhir di Persimpangan Jl. Sultan Alauddin. Lajur jalan tol memiliki jumlah 2 x 2 dengan lebar 3,50 meter dan mempunyai dua *on-off ramp*, yaitu di Boulevard dan Alauddin.

Pada tahun 2020, proyek pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani sepanjang 4,3 km yang dilaksanakan oleh MMN dan Pemerintah Daerah telah melalui tahapan Uji Laik Fungsi (ULF). Pembangunan jalan tol layang pertama di Makassar ini bertujuan untuk menekan kemacetan lalu lintas dan menunjang terwujudnya konektivitas secara lebih optimal di area Timur Indonesia yang berdampak pada tercapainya percepatan pada aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

INDIRECT SUBSIDIARIES

Toll Road Management Sector

PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) is the concession holder of 7.25 km toll road of Serpong-Pondok Aren in South Tangerang. The Company, through MUN, acquired 88.93% shares of BSD. The Serpong-Pondok Aren Toll Road commenced its operations on February 2, 1999 and has become the main route with a key role in helping to reduce travel time and efficiently break down vehicle congestion in South Tangerang area.

PT Makassar Metro Network (MMN)

PT Makassar Metro Network (MMN) was established in 1998 in Makassar, South Sulawesi, under the name of PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) and engaged in the toll road management sector. In 2020, PT Bosowa Marga Nusantara officially changed its name to PT Makassar Metro Network as stipulated in the Deed of Resolutions of Shareholders of PT Bosowa Marga Nusantara in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2 dated November 2, 2020, drawn up before Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta. Through MUN, the Company has owned 99.62% shares of MMN since 2006.

MMN is the concession holder of 5.95 km toll road connecting the Soekarno-Hatta Port of Makassar with A.P. Pettarani Road (Urip Sumoharjo flyover), which is also connected with Jalan Tol Seksi Empat. Both toll roads become the main route between cities in the region.

The initial construction was carried out at the end of Section II Toll Road, precisely at the junction of Jl. Urip Sumoharjo passing the intersection of Jl. Boulevard Panakkukkang and Jl. Hertasning, and ending at Jl. Sultan Alauddin. The toll road has 2 x 2 lanes with a width of 3.50 meters, and has two on-off ramps located on Boulevard and Alauddin.

In 2020, the construction project of 4.3 km A.P. Pettarani Elevated Toll Road carried out by MMN and the Regional Government passed the Commissioning Test (ULF) stage. The construction of this first elevated toll road in Makassar aims to reduce traffic congestion and support the realization of more optimum connectivity in the eastern part of Indonesia, which has an impact on achieving the acceleration of economic growth in the wider community.



PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

PT Makassar Metro Network (MMN) dalam bisnisnya memiliki entitas anak, yakni PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan kepemilikan saham MMN pada JTSE adalah sebesar 99,39%. JTSE memegang konsesi ruas Jalan Tol Seksi IV di Makassar dengan jalur sepanjang 11,57 km. Ruas jalan tol milik JTSE terhubung dengan ruas jalan tol yang dioperasikan oleh MMN, mulai dari Jembatan Tallo sampai dengan Simpang Mandai Makassar dan menjadi jalur akses ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

Sektor Penyediaan Air Bersih

PT Tirta Bangun Nusantara (TBN)

PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) didirikan dari kerja sama antara Perseroan dengan PT Enviro Nusantara pada bulan Juli 2012. PT Enviro Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengolahan air bersih dan air limbah di kawasan industri, kompleks perumahan, pelabuhan, fasilitas minyak dan gas, pertambangan, dan kawasan komersial terpadu (*super-block*).

Dengan lingkup usaha tersebut, TBN diharapkan dapat mendukung optimalisasi kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). PT Potum yang merupakan sub-holding sektor penyediaan air bersih sebelumnya hanya memiliki 51% saham TBN, kemudian pada tahun 2018 kepemilikan Potum pada TBN meningkat menjadi sebesar 100% atau keseluruhan saham TBN.

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) merupakan perusahaan pengelola air dengan sahamnya telah diakuisisi oleh Potum sebesar 51% pada bulan Oktober 2012 melalui penandatanganan *Share Subscription Agreement* yang telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 11 April 2013. Kemudian, di tahun 2019, kepemilikan saham DCC oleh Potum telah ditingkatkan menjadi sebesar 74,52%.

DCC memiliki hak eksklusif untuk pengolahan air dengan cakupan hingga termasuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), Sumatera Utara, dengan berada di bawah pengawasan TBN. IPA memiliki sumber air baku yang berasal dari Sungai Deli, yang kemudian air bersihnya disalurkan IPA kepada 154 pabrik yang ada di Kawasan Industri Medan (KIM). Periode kontrak kerja sama adalah 20 tahun dan berada di bawah skema Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*).

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

In its business, PT Makassar Metro Network (MMN) owns a subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), with 99.39% share ownership. JTSE holds the concession of 11.57 km Section IV Toll Road in Makassar. JTSE toll road is connected with the toll road operated by MMN, starting from Tallo Bridge to Simpang Mandai, Makassar, and provides access to the Sultan Hasanuddin International Airport of Makassar.

Clean Water Supply Sector

PT Tirta Bangun Nusantara (TBN)

PT Tirta Bangun Nusantara was established in July 2012 under a cooperation between the Company and PT Enviro Nusantara, a company engages in the field of clean water and waste water treatment service for industrial areas, residential complexes, ports, oil and gas facilities, mining, and integrated commercial estates (*super-block*).

Under this business scope, TBN is expected to be able to support performance optimization of Local Government Owned Water Utilities Company (PDAM). As the subholding company in clean water supply sector, Potum initially held 51% shares of TBN. Then, in 2018, Potum increased its share ownership at TBN to 100%.

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) is a water management company whose shares were acquired by Potum totaling 51% in October 2012 through the signing of a Share Subscription Agreement, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights on April 11, 2013. In 2019, Potum's share ownership of DCC increased to 74.52%.

DCC has exclusive rights for water treatment, covering building, operating, and managing a Water Treatment Plant (WTP) located in the Medan Industrial Estate (KIM) in North Sumatra, under the supervision of TBN. The source of raw water for this WTP comes from the Deli River. The clean water is then distributed by the plant to 154 factories within the Medan Industrial Estate (KIM). The partnership contract period is 20 years, under Build-Operate-Transfer (BOT) scheme.

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) merupakan perusahaan yang berdiri pada 1997 dan telah diakuisisi oleh Perseroan melalui Potum pada Desember 2013 dengan kepemilikan saham sebesar 65%. SCTK merupakan sebuah perusahaan pemegang konsesi pengolahan dan distribusi air bersih yang berfokus pada pelayanan bagi pelanggan industri di area Serang, Banten. SCTK saat ini melakukan pendistribusian air bersih kepada sekitar 171 pabrik yang ada di Kawasan Industri Modern Cikande, Pancatama Industrial Estate dan pabrik-pabrik di luar kawasan industri di wilayah Serang Timur.

Sungai Ciujung yang berada di Serang Timur menjadi sumber air untuk *Water Treatment Plant* (WTP) SCTK. Dalam menjalankan usahanya, SCTK bekerja sama dengan PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang dalam bentuk konsesi penuh yang meliputi sistem penyediaan air minum hingga sambungan akhir ke pelanggan industri khusus di daerah pelayanan Serang Timur. Adanya dukungan dari Potum dan TBN diharapkan dapat menunjang pencapaian target oleh SCTK untuk meningkatkan kapasitas penyerapan hingga 375 liter/detik.

Sektor Energi Terbarukan

PT Inpola Meka energi (IME)

PT Inpola Meka Energi (IME) merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung 2x7,5 MW yang berada di Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2013, Perseroan mengakuisisi saham IME sebesar 55% melalui entitas anak Perseroan, PT Energi Infranasantara (EI).

Pada tahun 2019, kepemilikan saham di IME berubah menjadi 56,23% dan pada bulan Februari 2020, kepemilikan saham EI kembali meningkat menjadi 61,23% dengan mengakuisisi saham milik pemegang saham lainnya. Guna semakin meningkatkan performanya, IME memiliki ikatan kontrak dengan PT PLN (Persero) dalam usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara dengan memanfaatkan jaringan PLN.

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 15 MW. RPSL telah beroperasi sejak *Commercial Operating Date* (COD) pada tanggal 23 April 2018 dan menjadi pembangkit listrik bertenaga biomassa pertama di Kalimantan Barat. Pada 16 Agustus 2018, melalui entitas anak usaha, PT Energi Infranasantara (EI), Perseroan melakukan akuisisi sebesar 80% saham milik RPSL.

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Established in 1997, PT Sarana Catur Tirta Kelola was acquired by the Company through Potum in December 2013 with 65% share ownership. SCTK is the concession holder of clean water treatment and distribution focusing on serving industrial customers at Serang area, Banten. At present, SCTK distributes clean water to 171 factories within the Cikande Modern Industrial Estate, Pancatama Industrial Estate, and other factories outside the industrial estate in East Serang area.

The source of water for SCTK's Water Treatment Plant (WTP) is the Ciujung River located in East Serang. In conducting its business, SCTK builds partnership with PDAM Tirta Albantani of Serang Regency under a full concession, covering from drinking water supply system to final distribution to specific industrial customers in East Serang service area. With the support of Potum and TBN, it is expected that SCTK can meet its target to increase water discharge to 375 liters/second.

Renewable Energy Sector

PT Inpola Meka Energi (IME)

PT Inpola Meka Energi is an Independent Power Producer (IPP) for the 2x7,5 MW Lau Gunung Hydro Power Plant (PLTA), located in Tanah Pinem, Dairi Regency, North Sumatra. In 2013, the Company acquired 55% shares of IME through its subsidiary, PT Energi Infranasantara (EI).

In 2019, share ownership in IME changed to 56.23% and in February 2020, EI's share ownership increased to 61.23% by acquiring shares owned by other shareholders. To further elevate its performance, IME entered into a commitment with PT PLN (Persero) in order to provide electricity for the people of North Sumatra by using PLN network.

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) is an Independent Power Producer (IPP) for the 15 MW Biomass Power Plant (PLTBm) located in Siantan, Mempawah, West Kalimantan. RPSL has been operating since its Commercial Operating Date (COD) on April 23, 2018, and becomes the first biomass power plant in West Kalimantan. Through its subsidiary, PT Energi Infranasantara (EI), the Company acquired 80% shares of RPSL on August 16, 2018.



ENTITAS ASOSIASI Associate Entities

Nama Name	Tahun Penyertaan Year of Investment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operating Status
Melalui PT Margautama Nusantara Through PT Margautama Nusantara				
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	2010	35%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating
Melalui PT Portco Infranasantara Through PT Portco Infranasantara				
PT Intisentosa Alam Bahtera	2012	39%	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Beroperasi Operating
Melalui PT Tirta Bangun Nusantara Through PT Tirta Bangun Nusantara				
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	2012	28%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating

Sektor Pengelolaan Jalan Tol

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) merupakan entitas asosiasi dari MUN yang menjalankan aktivitas usahanya melalui pengoperasian ruas jalan tol penghubung Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan Penjaringan (kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng) dengan jalur sepanjang 9,7 km. Pada 29 Agustus 2018, melalui MUN, Perseroan menambah kepemilikan saham pada JLB menjadi 35%. Karena posisinya yang terhubung langsung dengan 3 (tiga) jalan tol lain yaitu jalan tol Jakarta Tangerang dan jalan tol JORR W-2 Utara di daerah Kebon Jeruk dan dengan jalan tol Bandara Soekarno Hatta (Prof. Sedyatmo) di Penjaringan, jalan tol ini memiliki lokasi yang sangat strategis.

Sektor Pelabuhan

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelabuhan, pergudangan, jasa bongkar muat, dan jasa penyewaan tangki penyimpanan yang berdiri pada tahun 1998 dan mulai beroperasi secara komersial pada November 2000 di Lampung. ISAB memiliki status sebagai entitas asosiasi Perseroan melalui Portco dengan adanya kepemilikan saham sebesar 39%.

ISAB saat ini memiliki ikatan kontrak Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) terkait pembangunan dan pengoperasian terminal kargo kering dan cair di Pelabuhan Panjang, Lampung, berupa Bangun Guna Serah (BOT) dan hak menggunakan dan mengelola lahan tambahan untuk keperluan jasa tangki penyimpanannya.

Wilayah operasi ISAB adalah di area pelabuhan dengan luas 9,1 hektar dan memiliki spesifikasi area kedalaman/*draft* 13,5 m (LWS), 7 *lines liquid bulk* dengan kapasitas

Toll Road Management Sector

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu is an associate entity of MUN and operates the 9.7 km toll road connecting Kebon Jeruk, West Jakarta, with Penjaringan (Soekarno-Hatta International Airport in Cengkareng). On August 29, 2018, the Company through MUN increased its share ownership in JLB to 35%. This toll road has a strategic location as it is directly connected with 3 (three) other toll roads, namely Jakarta-Tangerang Toll Road, North JORR W-2 Toll Road in Kebon Jeruk, and Soekarno-Hatta Airport (Prof. Sedyatmo) Toll Road in Penjaringan.

Port Sector

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) is a company engages in the field of port services, warehousing, stevedoring services, and storage tank rental services. It was established in 1998 and began commercial operations in November 2000 in Lampung. Through Portco, the Company owns 39% shares of ISAB, making it the Company's associate entity.

At present, ISAB enters into an Operational Cooperation Agreement with PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) on construction and operation of dry and liquid cargo terminals in Panjang Port of Lampung, under Build-Operate-Transfer (BOT) scheme and the right to use and manage additional land for storage tank services.

ISAB's operational area covers the 9.1 ha port area with draft area of 13.5 m (LWS), 7 lines of liquid bulk with a capacity of 250 MT/hour/line, and size of vessel capacity

250 MT/jam/line, dan *size of vessel capacity* hingga 70 ribu DWT, serta gudang dengan luas mencapai 11.200 m² berkapasitas *mobile bagging system* 700 MT/hari, dengan kapasitas gudang mencapai 60 ribu MT untuk *dry bulk* dan 40 ribu MT untuk *bags*, kapasitas *stevedoring* (bongkar muat) mencapai 8.000 MT/hari untuk *dry* dan 5.000 MT/hari/line untuk *liquid*. Di samping itu, kapasitas *tank farm*/tangki yang dimiliki adalah 105 ribu MT dan kapasitas produksi *refinery plant* adalah 2.000 MT/hari

Sektor Penyediaan Air Bersih

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) merupakan perusahaan dengan fokus usaha di bidang pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan air bersih atau *Water Treatment Plant* (WTP) di wilayah Cikokol, Tangerang, Banten. Pada tahun 2012, TKCM menjadi entitas asosiasi Perseroan melalui TBN dengan kepemilikan saham sebesar 28%. Melalui kerja sama dengan PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Tangerang, TKCM berperan dalam menyediakan 1.275 liter/detik air curah untuk kemudian oleh PDAM TKR didistribusikan kepada pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial di wilayah Tangerang dan juga oleh PDAM TKR dialokasikan sebagian kapasitas aliran air dari TKCM ke wilayah Jakarta.

Hingga kini, jumlah pelanggan PDAM TKR adalah sebanyak 120.000 sambungan. Kontrak kerja sama antara TKCM dan PDAM TKR adalah dalam bentuk skema Bangun-Guna-Serah atau *Build-Operate-Transfer* (BOT). Masa kontrak TKCM telah diperpanjang menjadi selama 20 tahun (2017-2037) dengan adanya peningkatan pada kapasitas dari sebelumnya 300 liter/ detik menjadi sebanyak 1.575 liter/detik yang saat ini masih berada dalam proses pembangunan.

ALAMAT ENTITAS ANAK, ANAK TIDAK LANGSUNG DAN ASOSIASI

ENTITAS ANAK LANGSUNG Direct Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Margautama Nusantara	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Potum Mundi Infranasantara	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Management and Distribution	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Portco Infranasantara	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Energi Infranasantara	Energi Terbarukan Renewable Energy	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Telekom Infranasantara	Telekomunikasi Telecommunication	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100

of up to 70 thousand DWT; as well as a warehouse with total area reaching 11,200 m² equipped with a mobile bagging system of 700 MT/day. The warehouse capacity reaches 60 thousand MT for dry bulk and 40 thousand MT for bags, while stevedoring (loading and unloading) capacity reaches 8,000 MT/day for dry and 5,000 MT/day/line for liquid. In addition, the capacity of tank farm reaches 105 thousand MT with the refinery plant's production capacity of 2,000 MT/day.

Clean Water Supply Sector

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) focuses on the construction and operation of Water Treatment Plant in Cikokol area in Tangerang, Banten. In 2012, TKCM became the Company's associate entity through TBN with 28% share ownership. Through the cooperation with PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Tangerang, TKCM provides 1,275 liters/second of bulk water to be distributed by PDAM TKR to domestic, industrial, and commercial customers in the Tangerang area. PDAM TKR also allocates a portion of water flow capacity from TKCM to the Jakarta area.

Until present, the number of PDAM TKR customers has reached up to 120,000 connections. The cooperation contract between TKCM and PDAM TKR is under a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme. TKCM contract period has been extended to 20 years (2017-2037) with an increase in capacity from 300 liters/second to 1,575 liters/second, currently under construction.

ADDRESSES OF SUBSIDIARIES, INDIRECT SUBSIDIARIES, AND ASSOCIATE ENTITIES



ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG Indirect Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Bintaro Serpong Damai	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Intermark Associate Tower Lantai 16 Jl. Lingkar Timur, BSD, Rawa Meekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten +62 21 537 3015
PT Makassar Metro Network	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Gedung Menara Bosowa Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia +62 411 368 1035
PT Jalan Tol Seksi Empat	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Gedung Menara Bosowa Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia +62 411 368 1035
PT Tirta Bangun Nusantara	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Management and Distribution	Menara Global Lantai 23 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, Indonesia +62 21 5292 2648
PT Dain Celicani Cemerlang	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Management and Distribution	Komplek Perkantoran Permata Kebayoran Plaza Jl. Raya Kebayoran Lama, No. 225 Blok B10, Jakarta 12220, Indonesia +62 21 722 9045-46
PT Sarana Catur Tirta Kelola	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Management and Distribution	Jl. Yusuf Martadilaga No. 25 Serang, Banten, Indonesia +62 254 206813
PT Inpola Meka Energi	Energi Terbarukan Renewable Energy	Plaza PP Lantai 4 Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, Indonesia +62 21 8778 4135
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	Energi Terbarukan Renewable Energy	Jl. Raya Wajok Hulu Km 7,5 RT 008/ RW 001, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat +62 561 882013

ENTITAS ASOSIASI Associate Entities

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260, Indonesia +62 21 570 9091,
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Pelabuhan Panjang Jl. Yos Sudarso Km. 7 Panjang, Bandar Lampung 35241, Indonesia +62 721 311 04, +62 721 341 262
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Management and Distribution	Instalasi Pengolahan Air Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan III, Cikokol, Tangerang 15118, Indonesia +62 21 553 1891

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young)
Indonesia **Stock Exchange Building**
Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190, Indonesia
Periode Penugasan: 2021
Jasa yang Diberikan: Audit terhadap Laporan Keuangan

Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young)
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190, Indonesia
Period of Assignment: 2021
Services Provided: Audit on Financial Statements

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

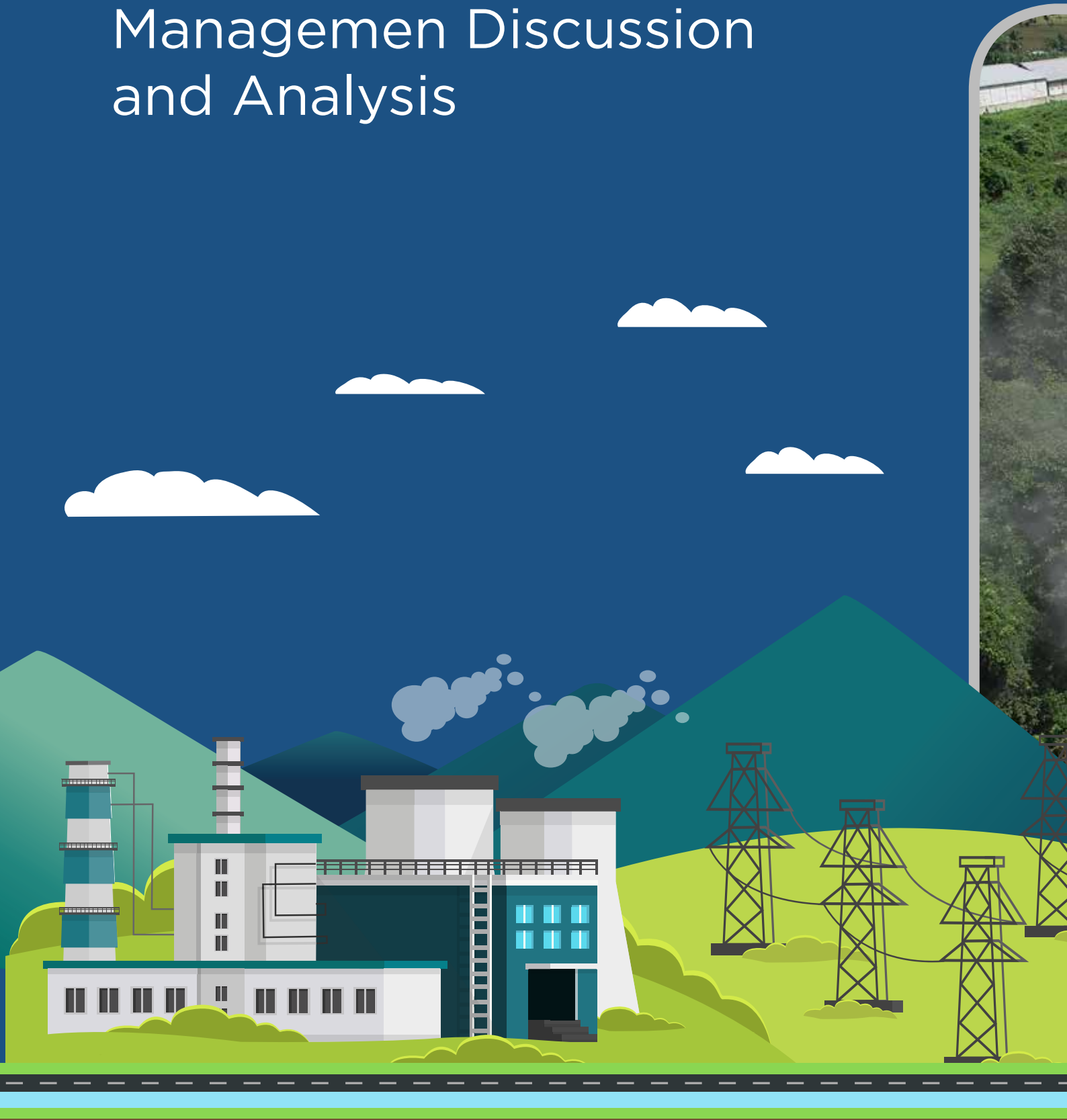
Capital Market Supporting Institutions and Professions

Nama Name	Jenis Lembaga Type of Institutions	Alamat Address
Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham Share Trading and Listing	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 4 Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 4 th Floor
PT Adimitra Jasa Korpora	Biro Administrasi Efek Share Registrar	Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 13250, Indonesia
Agung Purwanto Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)	Akuntan Publik Public Accountant	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Investor Relationship	Informasi Investor Investor Information	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Managemen Discussion
and Analysis





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Dalam situasi yang masih bergerak dinamis pada tahun 2021, Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha dan penjualan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

In a situation that is still moving dynamically in 2021, the Company managed to post better operating revenues and sales compared to the previous year.





TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

PT Nusantara Infrastructure Tbk (Perusahaan) membagi segmen usahanya menjadi 4 (empat) sektor utama: pengelolaan jalan tol, pelabuhan, penyediaan/pengelolaan air bersih, serta energi terbarukan.

Perseroan menanamkan investasi pada entitas anak maupun asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha pada 4 (empat) segmen bisnis Perusahaan. Tujuan utama dari kegiatan usaha tersebut adalah mencapai visi Perusahaan: “Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur”. Selain itu, untuk misi: “Memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan”.

Pada tahun 2021, kegiatan usaha Perseroan diwarnai oleh kondisi perekonomian yang masih bergerak dinamis, baik di tingkat global maupun domestik. Proses pemulihan ekonomi sempat terhambat oleh varian baru Covid-19, yaitu varian Delta.

Tingkat vaksinasi yang kian masif serta respons cepat dari pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia, laju penyebaran pandemi dapat teratasi. Pemulihan terus terjadi. Perekonomian tetap bergerak positif termasuk ekonomi Indonesia yang tumbuh 3,69% dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year/YoY*).

STRATEGI USAHA TAHUN 2021

Di akhir tahun 2020, manajemen melakukan analisa skenario terhadap pemulihan ekonomi atas dampak pandemi. Salah satu skenario yang ditetapkan sebagai target usaha tahun 2021 adalah berpacu terhadap kecepatan vaksinasi masal, khususnya di kota-kota atau wilayah aset Perusahaan berada. Proyeksi pemulihan ekonomi yang ditargetkan oleh Pemerintah adalah untuk mendorong terjadinya mobilitas dan daya beli dari konsumen sebagai penggerak dasar roda perekonomian lokal. Sebagai gambaran, target vaksinasi masal yang dijadikan skenario Perusahaan dalam membuat strategi usaha di tahun 2021 adalah pencapaian lebih dari 80,00% vaksinasi masal di awal kuartal 2 tahun 2021 sehingga sudah terbentuk herd-immunity.

Dalam perjalanannya, target pencapaian vaksinasi terdapat deviasi dan terdapat lonjakan kasus COVID-19 yang didominasi dengan varian Delta terjadi pada bulan Juli 2021 sebagai puncaknya. Di akhir 2021, pencapaian vaksinasi masal adalah $\pm 67\%$ dari total target populasi masyarakat penerima vaksin. Hal ini berdampak kepada proses pemulihan ekonomi secara nasional dan menghasilkan deviasi antara target Perusahaan dengan realisasi usaha di tahun 2021.

BUSINESS SEGMENT OVERVIEW

PT Nusantara Infrastructure Tbk (the Company) allocates its business segments into 4 (four) main sectors: toll road management, ports, clean water supply/management, and renewable energy.

The Company invests in subsidiaries and associates that conduct business activities inside the 4 (four) business segments. The main objective of these business activities is to achieve the Company’s vision: “To be the leading Indonesian private infrastructure investor and developer.” Furthermore, the mission: “Providing services of the highest standard to meet infrastructure needs in order to improve the quality of life and create the best value for all stakeholders.”

In 2021, the Company’s business activities were marked by dynamic economic conditions, both at global and domestic levels. The process of an economic recovery was hampered by a new variant of Covid-19, namely the Delta variant.

The increasingly massive vaccination rate and the fast response from governments in various countries including Indonesia prevent the spread of the coronavirus. As recovery continues, the economy around the globe moves positively, including the Indonesian economy, which grew 3.69% compared to the previous year (*year on year/YoY*).

BUSINESS STRATEGY FOR 2021

At the end of 2020, management analyzed economic recovery scenarios due to the pandemic’s impact. One of the scenarios set as the business target in 2021 was to race against the acceleration of mass vaccination, especially in cities or areas where the Company’s assets are located. The government projects that the economic recovery will encourage increased mobility and purchasing power of consumers as the driving force for the local economy. As an illustration, in making a business strategy in 2021, the Company targets a mass vaccination scenario to reach more than 80.00% at the beginning of the second quarter of 2021 so that herd immunity has been formed.

Along the way, there was a deviation from the vaccination target and a surge in COVID-19 cases, dominated by the Delta variant, whose peak spread of the virus occurred in July 2021. At the end of 2021, the achievement of mass vaccination was around 67% of the total target population of the vaccine recipient. Therefore, this has impacted the national economic recovery process and generated deviations between the Company’s targets and business realization in 2021.

Perusahaan menyadari bahwa dampak deviasi tersebut menyebabkan adanya tantangan internal dan eksternal yang harus dikelola sehingga bisa menghasilkan solusi yang tepat guna dan tepat sasaran pada aspek operasional dan keuangan. Beberapa kebijakan lanjutan dari tahun 2020 dan optimalisasi atas kebijakan yang disesuaikan dengan strategi usaha di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tetap mempertahankan prioritas perlindungan keselamatan dan pengelolaan karyawan di masa pandemi. Karyawan (*human capital*) merupakan salah satu aset Perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada pemangku kepentingan. Kebijakan ini adalah salah satu kebijakan lanjutan yang diterapkan Perusahaan sejak pandemi dimulai.
2. Pengelolaan sumber daya untuk penyelesaian proyek strategis jalan tol layang A.P. Pettarani hingga tahap operasional dan penerapan penyesuaian tarif sesuai dengan rencana usaha.
3. Penekanan terhadap pengelolaan biaya operasional (O&M) dan biaya peningkatan kapasitas (CAPEX) yang berorientasi kepada *cost-initiatives* dengan tetap mempertahankan standar pelayanan minimum.
4. Optimalisasi pendapatan *non-core business* dengan melihat peluang usaha di kondisi *the new normal era* dan tetap proaktif dalam rencana pengembangan usaha di 3 (tiga) sektor utama, yakni jalan tol, pengelolaan air bersih, dan energi terbarukan, untuk optimalisasi model bisnis Perusahaan jangka panjang.

SEGMENT USAHA PENGELOLAAN JALAN TOL

Kegiatan usaha pengelolaan jalan tol dilaksanakan oleh entitas anak, yaitu PT Margautama Nusantara (MUN). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 dengan fokus bisnis pada bidang pengelolaan jalan tol. Di tahun 2013, Perusahaan mengakuisisi saham MUN dengan kepemilikan saham 77%.

MUN memiliki 2 (dua) entitas anak yang bergerak di industri jalan tol, yakni PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan PT Makassar Metro Network (MMN), serta 1 (satu) entitas anak tidak langsung, yakni PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dan 1 (satu). MUN juga memiliki entitas asosiasi, yakni PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB).

Saat ini, BSD memiliki konsesi jalan tol sepanjang 7,25 kilometer (km) yang terbentang antara Serpong dan Pondok Aren yang keduanya berlokasi di Tangerang Selatan, Banten. MMN yang saat didirikan bernama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan berubah menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) pada tahun 2020, memiliki konsesi jalan sepanjang 10,25 km. Konsesi tersebut adalah tol penghubung antara Pelabuhan

The Company realizes that the impact of these deviations becomes an internal and external challenge that must be managed through effective and targeted solutions in operational and financial aspects. Therefore, several follow-up policies from 2020 and optimization of policies adapted to business strategies in 2021 are as follows:

1. Maintaining the priority of protecting the safety and management of employees during the pandemic. Human capital is one of the Company's assets that contribute optimally to stakeholders. This is one of the continued policies implemented by the Company since the beginning of the pandemic.
2. Resource management for the completion of the strategic project of the elevated toll road A.P. Pettarani to the operational stage and the application of tariff adjustments in accordance with the business plan.
3. Emphasis on managing operational costs (O&M) and capacity building costs (CAPEX), oriented to cost initiatives while maintaining minimum service standards.
4. Optimizing non-core business revenue by opening up business opportunities in the new normal era and remaining proactive in business development in 3 (three) main sectors, namely toll roads, clean water management, and renewable energy, to optimize the Company's long-term business model.

TOLL ROAD MANAGEMENT BUSINESS SEGMENT

The toll road management business activity is carried out through a subsidiary, namely PT Margautama Nusantara (MUN). The company was founded in 2007 with a business focus on toll road management. In 2013, the Company acquired MUN shares with 77% share ownership.

MUN has 2 (two) subsidiaries engaged in the toll road industry, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and PT Makassar Metro Network (MMN), as well as 1 (one) indirect subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). MUN also has an associated entity, namely PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB).

Currently, BSD has a toll road concession of 7.25 kilometers (km) stretching between Serpong and Pondok Aren, located in South Tangerang, Banten. On the other hand, PT Makassar Metro Network (MMN), formerly known as PT Bosowa Marga Nusantara and changed its name in 2020, has a road concession of 10.25 km. The concession is the connecting toll road between Soekarno-Hatta Port, Makassar (section 1 and 2), and Jalan A.P.



Soekarno-Hatta, Makassar (Seksi 1 dan 2) dengan Jalan A.P. Pettarani (Seksi 3) yang terhubung dengan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). Pada tanggal 18 Maret 2021, proyek pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani sepanjang 4,3 KM telah diresmikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan mulai memberlakukan penyesuaian tarif per awal bulan Mei 2021. Penyesuaian tarif berlaku untuk MMN Seksi 1, 2, dan 3 seluruhnya sebagai bentuk skema pengembalian investasi dari pembangunan jalan tol tersebut.

JTSE merupakan perusahaan yang memegang konsesi ruas jalan tol seksi IV di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki jalur hingga mencapai 11,57 km. Ruas tersebut terhubung dengan ruas jalan tol yang dikelola dan dioperasikan oleh MMN, mulai dari Jembatan Tallo sampai dengan Simpang Mandai Makassar. Ruas tol ini juga menjadi jalur akses menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Selanjutnya JLB yang merupakan entitas asosiasi. Perusahaan ini mengoperasikan ruas jalan tol penghubung dengan panjang 9,7 km antara Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan Penjaringan (kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng).

Kegiatan Operasional Tahun 2021

Pada tahun 2021, kegiatan operasional di segmen jalan tol memperlihatkan perkembangan positif. Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merestui rekomendasi teknis penggantian *box culvert* menjadi jembatan di atas Sungai Cibenda pada jalan tol BSD KM 8 ruas Pondok Aren-Serpong. Melalui surat tertanggal 22 Februari 2021, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Dirjen Sumber Daya Alam dan Konservasi menyampaikan bahwa rekomendasi teknis tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.

Selain itu, Menteri PUPR melalui surat kepada Direktur Utama PT Margautama Nusantara (MUN) memberikan persetujuan pembangunan jalan tol yang menjadi akses ke Makassar New Port. Pembiayaan proyek dibebankan kepada PT Bintaro Serpong Damai (BSD), sementara pemeliharaannya akan ditangani oleh PT JTSE. Untuk maksud tersebut, BPJT telah menambah lingkup wilayah kerja BSD dengan pembangunan jalan tol akses Makassar New Port.

Kinerja Usaha Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, total rata-rata volume transaksi harian yang tercatat di jalan tol kelompok usaha MUN, yakni BSD, JTSE, dan MMN, masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 14,41%, 14,90%, dan 12,54%, dibandingkan tahun sebelumnya.

Pettarani (section 3), which is also connected to Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). On March 18, 2021, the Government inaugurated the A.P. Pettarani along 4.3 KM through the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) and began to apply tariff adjustments as of early May 2021. Tariff adjustments apply to MMN Sections 1, 2, and 3 entirely as an investment return scheme from toll road construction.

JTSE is the company that holds the concession of the toll road section IV in Makassar, South Sulawesi, which has a track of up to 11.57 km. The section is connected to the toll road section managed and operated by MMN, starting from the Tallo Bridge to the Makassar Mandai Intersection. This toll road is also an access point to Sultan Hasanuddin International Airport, Makassar.

Furthermore, JLB which is an associate entity operates a connecting toll road with a length of 9.7 km between Kebon Jeruk, West Jakarta, and Penjaringan (Soekarno-Hatta International Airport area, Cengkareng).

Operational Activities in 2021

In 2021, operational activities in the toll road segment show positive developments. Among other things, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has approved the technical recommendation to replace the box culvert with a bridge over the Cibenda River on the KM 8 BSD toll road section Pondok Aren-Serpong. In a letter dated February 22, 2021, concerning the Ciliwung Cisadane River Basin Center, the Director-General of Natural Resources and Conservation said the technical recommendation had met the technical requirements.

In addition, the Minister of PUPR, through a letter to the President Director of PT Margautama Nusantara (MUN), gave his approval for the toll road construction that will provide access to the Makassar New Port. The project's financier will be charged to PT Bintaro Serpong Damai (BSD), while the maintenance will be handled by PT JTSE. For this purpose, BPJT has expanded the scope of BSD's work area with the construction of the Makassar New Port access toll road.

Business Performance in 2021

Throughout 2021, the total average daily transaction volume recorded on toll roads of the MUN business group, namely BSD, JTSE, and MMN, showed an increase of 14.41%, 14.90% and 12.54%, respectively. compared to the previous year.

Kenaikan volume transaksi tersebut berpengaruh secara langsung pada pendapatan Perseroan. Sepanjang tahun 2021, nilainya tercatat Rp610,73 miliar, naik 33,84% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp Rp328,3 miliar.

The increase in transaction volume has a direct impact on the Company's revenue. Throughout 2021, the value was posted at Rp610.73 billion, an increase of 33.84% compared to 2020, which amounted to Rp328.3 billion.

Berikut tabel pendapatan jalan tol untuk tiap unit bisnis jalan tol:

The following is the table for the revenue of toll roads for each toll road business unit:

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Ruas Tol Toll Road	2021	2020	Kenaikan	Persentase
Ruas Pondok Aren - Serpong	206.125	179.600	26.525	14,77%
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin	100.239	87.309	12.929	14,81%
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta - Pettarani	132.982	61.356	71.626	116,74%
Total	439.345	328.265	111.080	33,84%

Prospek Usaha

Perbaikan ekonomi global pada 2022 diproyeksikan terus berlanjut di tengah merebaknya varian virus Omicron. Selaras dengan tren pemulihan kondisi perekonomian di tingkat global pada tahun 2022, ekonomi Indonesia juga diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih kuat, yakni berada pada kisaran 5,2%-5,5% (yoy).

Business Prospect

Global economic recovery is projected to continue in 2022 amid the outbreak of the Omicron virus variant. In line with the trend of recovering global economic conditions in 2022, the Indonesian economy is also predicted to record stronger growth, namely in the range of 5.2%-5.5% (yoy).

Di tengah fase pemulihan ekonomi yang sesuai harapan, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan antar-wilayah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2021.

In the midst of the economic recovery phase that is in line with expectations, the Government of Indonesia is also committed to bringing equitable development across regions as stated in the 2022 Government Work Plan (RKP), as stipulated in Presidential Regulation No. 85 of 2021.

Melihat prospek ekonomi dan bisnis yang cukup baik pada 2022 mendatang, Perseroan optimis dapat meningkatkan kinerja yang lebih maksimal ke depan. Apalagi, kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat akan semakin meningkat. Dengan begitu, arus lalu lintas kendaraan di ruas-ruas tol Grup MUN dapat kembali menuju laju lalu lintas normal sebelum pandemi sehingga kinerja Perseroan di segmen jalan tol juga akan membaik.

Seeing the promising economic and business prospects in 2022, the Company is optimistic that it will be able to improve its maximum performance in the future. Moreover, economic activity and community mobility will also increase. Accordingly, traffic flow on the MUN Group toll roads can return to normal traffic rates before the pandemic, subsequently allowing the Company's performance in the toll road segment to also improve.

SEGMENT USAHA PELABUHAN

Kegiatan usaha pada segmen pelabuhan dijalankan oleh entitas anak, yaitu PT Portco Infranasantara (Portco). Perseroan mengakuisisi Portco pada tahun 2011 mengakuisisi Portco dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%.

PORT BUSINESS SEGMENT

Business activities in the port segment are carried out by a subsidiary, namely PT Portco Infranasantara (Portco). The Company acquired Portco in 2011 with 99.99% share ownership.

Portco telah memiliki izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada Oktober 2011 dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan. Kegiatan usaha Portco berupa pengoperasian pelabuhan di Lampung yang berlokasi di samping Terminal Peti Kemas Pelabuhan Panjang melalui entitas asosiasi, yakni PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) dengan kepemilikan saham sebesar 39%.

Portco obtained a Port Business Entity (BUP) permit in October 2011 in the form of a Minister of Transportation Decree. Portco's business activities are in the form of operating a port in Lampung, which is located next to Pelabuhan Panjang Container Terminal, through an associated entity, namely PT Intisentosa Alambahtera (ISAB), with a 39% share ownership.



ISAB menguasai lahan seluas 9,1 hektare serta gudang seluas 11.200 meter persegi dan lahan seluas 2,1 hektare. Di lahan itu tersedia 27 tangki timbun *Crude Palm Oil* (CPO) serta turunannya serta produk biodiesel berikut instalasi pompa dan pipa sepanjang 680 meter hingga ke dermaga yang berlokasi di area Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung.

Kegiatan operasional Tahun 2021

Kegiatan usaha pelabuhan pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan perusahaan adalah melakukan efisiensi penggunaan anggaran, baik untuk operasional maupun belanja modal yang akan dialokasikan untuk tahun berikutnya.

Kendati demikian, kegiatan operasional perusahaan tetap bertahan dengan baik. Perusahaan tidak melakukan perampingan karyawan.

Pada tahun 2021, ISAB juga fokus pada rencana perpanjangan kerja sama usaha jangka panjang dengan PT Pelabuhan Indonesia Regional II (Persero). Kegiatan ini telah berhasil dilakukan yaitu kerja sama dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose Terminal) yang merupakan anak usaha Pelindo II.

Kinerja Usaha Tahun 2021

Kapasitas tangki penyimpanan yang dimiliki oleh ISAB pada tahun 2021 mencapai 105 ribu metrik ton, masih sama dengan kondisi tahun 2020.

KAPASITAS TANGKI PENYIMPANAN (METRIK TON) Storage Tank Capacity (in metric tons)

Keterangan Description	2021	2020	2019
Kapasitas Tangki Penyimpanan Storage Tank Capacity	105.000	105.000	105.000

Pada tahun 2021, kargo yang melakukan *loading* dan *unloading* komoditas mencapai 1,53 juta metrik ton. Komposisinya adalah *dry cargo* 19,20% dan *liquid cargo* 80,80%. Dibandingkan tahun 2020 yang 1,52 juta metrik ton, terjadi 1,27%.

LOADING & UNLOADING KOMODITAS (METRIK TON) Loading & Unloading Comodity (in metric tons)

Jenis Kargo Type of Cargo	2021	2020	2019
Dry Cargo	294.178	385.557	461.917
Liquid Cargo	1.237.899	1.127.285	1.462.007
Total	1.532.077	1.512.842	1.923.924

ISAB controls an area of 9.1 hectares and a warehouse of 11,200 square meters, as well as an area of 2.1 hectares. There are 27 storage tanks for crude palm oil (CPO) and its derivatives as well as biodiesel products along with pump and pipe installations with a length of 680 meters to the pier located in the Panjang Port area, Bandar Lampung.

Operational activities in 2021

In 2021, port business activities experienced a decline due to the Covid-19 pandemic. Therefore, the strategy implemented by the company was to make efficient use of the budget, both for operations and capital expenditures that will be allocated for the following year.

Nevertheless, the company's operational activities have endured soundly and prevented downsizing employees.

In 2021, ISAB also focused on plans to extend long-term business cooperation with PT Pelabuhan Indonesia Regional II (Persero). This activity was successfully carried out, namely in collaboration with PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Multipurpose Terminal), which is a subsidiary of Pelindo II.

Business Performance in 2021

The storage tank capacity owned by ISAB in 2021 reached 105,000 metric tons, still the same as in 2020.

In 2021, commodities loading and unloading cargo reached 1.53 million metric tons, an increase of 1.27% compared to 2020 at 1.52 million metric tons. The composition is 19.20% dry cargo and 80.80% liquid cargo.

Sementara jumlah kapal yang sandar untuk *loading* dan *unloading* sepanjang tahun 2021 mencapai 211 unit, turun 5,80% dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 224 unit kapal. Sebagian besar kapal yang sandar tersebut melakukan *loading* dan *unloading* untuk *liquid cargo* yang mencapai 204 kapal.

Meanwhile, the number of ships docked for loading and unloading throughout 2021 reached 211 units, down 5.80% compared to 2020 at 224 units. Most of the ships that docked were loading and unloading for liquid cargo which reached 204 ships.

JUMLAH KAPAL LOADING & UNLOADING DI PELABUHAN ISAB (UNIT KAPAL) (DALAM UNIT KAPAL) Total loading & unloading Boats at ISAB Port

Jenis Kargo Type of Cargo	2021	2020	2019
Dry Cargo	7	9	12
Liquid Cargo	204	215	221
Total	211	224	233

Prospek Usaha

Sektor pelabuhan sangat penting untuk mendukung kegiatan di sektor logistik. Semakin tinggi lalu lintas perdagangan akan meningkatkan peran pelabuhan sebagai salah satu titik sentral dalam pengiriman barang.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19, fungsi pelabuhan akan semakin besar. Arus barang antarwilayah maupun antarnegara akan semakin marak, sehingga memberikan peluang bagi prospek usaha Perseroan, khususnya di sektor pelabuhan.

Business Prospect

The port sector is the crucial point in logistic operation. The higher the seaborne trade traffic, the more important the role of the port as one of the central points in shipping goods.

In line with the improving economic outlook following the Covid-19 pandemic, ports will play even greater role. Inter-regional and international flow of goods will be further increased, giving the Company greater business prospect, especially in port sector.

SEGMENT USAHA PENYEDIAAN AIR BERSIH

Segmen usaha penyediaan/pengelolaan air bersih dijalankan oleh entitas anak usaha Perseroan, yakni PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2011.

Pada tahun 2012, Potum mengakuisisi saham PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) sebesar 51%, kemudian pada tahun 2018 kepemilikan sahamnya meningkat menjadi 100%. Di tahun yang sama, Potum juga mengakuisisi 51% saham PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), perusahaan yang memiliki kontrak pengelolaan air bersih di Medan, Sumatera Utara. Kepemilikannya ditingkatkan menjadi 74,52% pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2013 Potum mengakuisisi saham PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) sebesar 65%. Perusahaan ini fokus pada pengolahan dan pendistribusian air bersih di Kabupaten Serang, Banten.

CLEAN WATER SUPPLY BUSINESS SEGMENT

The clean water supply/management business segment is run by the Company's subsidiary, namely PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) with 99.99% share ownership. This company was founded in 2011.

In 2012, Potum acquired a 51% stake in PT Tirta Bangun Nusantara (TBN), then in 2018, its share ownership increased to 100%. In the same year, Potum also acquired a 51% stake in PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), a company that has a clean water management contract in Medan, North Sumatra. Its ownership was increased to 74.52% in 2019.

Subsequently, in 2013 Potum acquired a 65% stake in PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK). This company focuses on processing and distributing clean water in Serang Regency, Banten.

Kegiatan Operasional Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan melalui entitas anak usaha, Potum, mengoperasikan tiga instalasi pengolahan air bersih atau Water Treatment Plant (WTP), yaitu Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM WTP) yang berada

Operational Activities in 2021

Throughout 2021, the Company through its subsidiary, Potum, operates three water treatment plants (WTP), namely Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM WTP) located in Cikokol, Tangerang, Banten; with a total of water



di Cikokol, Tangerang, Banten; dengan total air yang didistribusikan ke pelanggan 1.411 Lps Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK WTP) di Serang, Banten, dengan total air yang didistribusikan ke pelanggan 185 Lps dan Dain Celicani Cemerlang (DCC WTP) di Medan, Sumatera Utara dengan total air yang didistribusikan ke pelanggan 93,6 Lps. Dari ketiga WTP tersebut Perusahaan berhasil memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah perkotaan, industri dan perniagaan yang berada di ketiga WTP tersebut berada.

Kinerja Usaha Tahun 2021

Pada tahun total pendapatan yang dibukukan segmen usaha penyediaan air bersih mencapai Rp78,4 miliar. Dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp73,90 miliar, terjadi kenaikan 6,13%.

Kontributor terbesar terhadap pendapatan konsolidasi Potum adalah penjualan air bersih, yang mencapai 64,56% dari total pendapatan.

Prospek Usaha

Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah pada periode 2020-2024 difokuskan pada tiga kerangka utama yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Air bersih yang menjadi kebutuhan dasar menjadi salah satu perhatian pemerintah dan masuk ke dalam infrastruktur pelayanan dasar. Mengingat cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta jiwa, Pemerintah memerlukan peran swasta untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. NI sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang investasi dan infrastruktur hadir untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan air bersih. Melalui segmen usaha Air Bersih, Perusahaan berupaya merealisasikan target Agenda Pembangunan Nasional Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 untuk meningkatkan pertumbuhan produksi air bersih sebesar 7,1 % per tahun hingga tahun 2019. Kebutuhan terhadap air bersih ini tidak hanya didominasi oleh masyarakat, tapi lingkungan bisnis juga memerlukan ketersediaan air bersih yang cukup dan berkelanjutan. Besarnya peluang dalam bisnis penyediaan air bersih ini, menjadikan prospek usaha Perusahaan di Segmen Usaha Air Bersih sangat baik. Perusahaan optimis dapat meningkatkan kinerja Segmen Usaha Air Bersih di tahun 2021 dengan lebih baik lagi. Untuk pengembangan usaha, di tahun 2021, Perusahaan sedang melakukan beberapa kajian pra studi kelayakan maupun uji tuntas dalam beberapa proyek air bersih, dan diharapkan sudah selesai tahun depan serta menambah portfolio perusahaan.

distributed to customers amounting to 1,411 Lps, Sarana Catur Tirta Manajemen (SCTK WTP) in Serang, Banten, with a total of water distributed to customers amounting to 185 Lps, and Dain Celicani Cemerlang (DCC WTP) in Medan, North Sumatra with a total of water supply distributed to customers amounting to 93.6 Lps. Of the three WTPs, the Company has succeeded in fulfilling the need for clean water for urban, industrial, and commercial areas that are located in the three WTPs.

Business Performance in 2021

In 2021, the total revenue recorded by the clean water supply business segment reached Rp.78.4 billion, an increase of 6.13% compared to 2020 at Rp.73.90 billion.

The largest contributor to Potum's consolidated revenue was clean water sales, which accounted for 64.56% of total revenue.

Business Prospect

The infrastructure development launched by the Government in the 2020-2024 period is focused on three main frameworks, namely basic service infrastructure, economic infrastructure, and urban infrastructure. Clean water, which is a basic necessity, is one of the government's concerns and is included in basic service infrastructure. Given the vast territory of Indonesia, with a population reaching 273 million, the Government needs the private sector to be able to meet the needs of clean water for all Indonesians. NI as a business that is engaging in investment and infrastructure supports government programs in the provision of clean water. Through the Clean Water business segment, the Company seeks to realize the target of the Government's National Development Agenda as stated in the 2015 - 2019 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) to increase clean water production growth by 7.1% per year until 2019. The need for clean water is not only dominated by the community, the business environment also requires the availability of sufficient and sustainable clean water. The large opportunity in the clean water supply business makes the Company's business prospects in the Clean Water Business Segment to be encouraging. The company is optimistic that in 2021, it will be able to improve its performance in the Clean Water Business Segment to be even better. In terms of business development, the Company is conducting a number of pre-feasibility studies and due diligence in several clean water projects, and are expected to be completed next year as well as adding to the company's portfolio.

SEGMENT USAHA ENERGI TERBARUKAN

Segmen usaha energi terbarukan dijalankan oleh PT Energi Infranasantara (EI) yang didirikan pada tahun 2012. Hingga akhir tahun 2021, kepemilikan saham Perseroan di EI sebesar 99,99%. Fokus utama EI pada pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), salah satu program penting yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2013, EI melakukan akuisisi saham PT Inpola Meka Energi (IME) dengan kepemilikan saham sebesar 61,23%. IME merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang berlokasi di Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. PLTA dengan kapasitas 2x7,5 MW telah selesai dibangun dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 16 Desember 2020.

Kemudian pada tahun 2018, EI mengakuisisi PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestara (RPSL), perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm) di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat sebesar 80%. PLTBm ini telah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 23 April 2018.

Kegiatan operasional Tahun 2021

Pada tahun 2021, IME menjual 55.613.524 kWh atau setara dengan 6,35 AHMW (*Average Hourly Megawatt*). Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan penjualan tahun 2020, karena pada tahun 2020 IME baru beroperasi selama 2 (dua) minggu.

Jumlah energi yang dijual oleh RPSL pada tahun 2021 adalah 100.929.465 kWh atau setara dengan 11,52 AHMW. Jumlah tersebut lebih tinggi 5,6% jika dibandingkan dengan jumlah energi yang dijual pada tahun 2020.

Kinerja Usaha Tahun 2021

Total pendapatan dari segmen usaha energi terbarukan pada tahun 2021 sebesar Rp155,5 miliar, naik 27% dibandingkan tahun 2020 yang Rp122,7 miliar. Kontributor utamanya berasal dari RPSL, yaitu dengan porsi 78% dari total pendapatan.

Prospek Usaha

Perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) terus menjadi salah satu fokus pemerintah. Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk dapat mencapai “nol emisi karbon” pada tahun 2060, diharapkan jumlah kapasitas pembangkit EBT terus bertambah. Dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Listrik) tahun 2021-2030, PLN menargetkan kontribusi EBT yang saat ini berada di 13% menjadi 23% di tahun 2025.

RENEWABLE ENERGY BUSINESS SEGMENT

The renewable energy business segment is conducted by PT Energi Infranasantara (EI) which was established in 2012. By the end of 2021, the Company's share ownership in EI is 99.99%. EI's main focus is on the development of New and Renewable Energy (EBT), which is one of the most important programs launched by the government.

In 2013, EI acquired shares of PT Inpola Meka Energi (IME) with an ownership of 61.23%. IME is an Independent Power Producer (IPP) company for the Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) located in Tanah Pinem, Dairi Regency, North Sumatra Province. The hydropower plant with a capacity of 2x7.5 MW has been completed and operating (*Commercial Operating Date/COD*) since December 16, 2020.

Then in 2018, EI acquired PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestara (RPSL), an Independent Power Producer (IPP) company for a Biomass Power Plant (PLTBm) in Siantan, Mempawah, West Kalimantan for 80%. The PLTBm has been operating (*Commercial Operating Date/COD*) since April 23, 2018.

Operational Activities in 2021

In 2021, IME sold 55.613.524 kWh or the equivalent of 6.35 AHMW (*Average Hourly Megawatt*). This number is higher than sales in the previous year because, in 2020, IME only operated for 2 (two) weeks.

The amount of energy sold by RPSL in 2021 is 100.929.465 kWh or equivalent to 11.52 AHMW. This amount is 5.6% higher when compared to the number of energy sold in 2020.

Business Performance in 2021

Total revenue from the renewable energy business segment in 2021 was Rp.155.5 billion, an increase of 27% compared to 2020 at Rp.122.7 billion. The main contributor comes from the RPSL, which accounts for 78% of the total revenue.

Business Prospect

The development of New and Renewable Energy (EBT) continues to be one of the government's focuses. As one of the government's efforts to achieve “zero carbon emissions” by 2060, it is hoped that the number of NRE generating capacity will continue to grow. In the RUPTL (Electricity Supply Business Plan) for 2021-2030, PLN targets the contribution of NRE which is currently at 13% to 23% in 2025.



El terus menargetkan untuk dapat mengembangkan bisnisnya di bidang pembangkit listrik, khususnya EBT. Hal ini dilakukan dengan mencari peluang-peluang untuk investasi, baik pada pembangkit yang belum operasi, maupun yang sudah beroperasi.

El continues to target to be able to develop its business in the field of power generation, especially NRE. This is done by looking for investment opportunities, both in plants that are not yet operating, or those that are operational.

PROFITABILITAS PER SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT PROFITABILITY

Pendapatan per Segmen Usaha

Pada tahun 2021, pendapatan konsolidasi Perseroan mencapai Rp844,79 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,6 triliun, terjadi penurunan 46,20% yang disebabkan menurunnya pendapatan konstruksi.

Business Segment Revenue

In 2021, the Company's consolidated revenue reached Rp844.79 billion. Compared to 2020, which amounted to Rp1.6 trillion, there was a decrease of 46.20%, which was due to the decline in construction revenues.

Segmen usaha pengelolaan jalan tol menyumbang terbesar, yaitu 72,29% dari total pendapatan. Selanjutnya segmen energy terbarukan dengan kontribusi 18,42%, dan sector pengelolaan air bersih dengan kontribusi 9,28%.

The toll road management business segment had the largest contribution, namely 72.29% of the total revenue. Next, the renewable energy segment with a contribution of 18.42%, and the clean water management sector, with a contribution of 9.28%.

PENDAPATAN PER SEGMENT USAHA Revenue per Business Segment

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	2019	YoY 2020- 2021
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	610.733	1.373.555	1.361.752	-55,54%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Supply/Management of Clean Water	78.434	73.904	89.634	6,13%
Energi Terbarukan Renewable Energy	155,622	122.660	141.209	26,87%
Pendapatan Konsolidasian Consolidated Income	844.789	1.570.119	1.592.595	46,20%

PERSENTASE KONTRIBUSI PENDAPATAN PER SEGMENT USAHA Percentage of Revenue Contribution per Business Segment

Keterangan Description	2021	2020	2019
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	72,29%	87,48%	85,51%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Supply/Management of Clean Water	9,28%	4,71%	5,63%
Energi Terbarukan Renewable Energy	18,42%	7,81%	8,87%

Laba (Rugi) Tahun Berjalan per Segmen Usaha

Perusahaan membukukan laba tahun berjalan secara konsolidasi sebesar Rp25,76 miliar, lebih rendah 71,13% dibandingkan tahun 2020 yang Rp112,62 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh tingkat kenaikan beban bunga atas peningkatan pinjaman bank yang lebih besar daripada tingkat kenaikan pendapatan usaha dan penjualan.

Profit (Loss) for the Year per Business Segment

The Company posted a consolidated profit for the year in the amount of Rp25.76 billion, 71.13% lower than in 2020, which amounted to Rp112.62 billion. The decrease was due to the increase in interest expense on the increase in bank loans, which was greater than the increase in operating income and sales.

Segmen usaha pengelolaan jalan tol menyumbang laba terbesar, yaitu 247,69% dari total laba tahun berjalan. Selanjutnya segmen pengelolaan air bersih dengan kontribusi 3,16%, sector kepelabuhan dengan kontribusi -19,53% dan sector energy terbarukan dengan kontribusi -21,94%.

Segmen pengelolaan Jalan Tol menjadi kontributor terbesar pada hasil Laba (Rugi) Tahun Berjalan di tahun 2020 dengan persentase mencapai 118,07%, yang kemudian diikuti oleh segmen Energi Terbarukan dengan persentase sebesar 7,65%, dan segmen Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih dengan sumbangan 1,51%.

The toll road management business segment is the largest profit contributor with 247.69% of the total profit for the year. Next, the clean water management segment with a contribution of 3.16%, port sector with a contribution of -19.53%, and the renewable energy sector with a contribution of -21.94%.

The Toll Road management segment is the largest contributor to the Profit (Loss) for the Year 2020 with a percentage reaching 118.07%, which is then followed by the Renewable Energy segment with a percentage of 7.65%, and the Clean Water Supply/Management segment

KINERJA LABA PER SEGMENT USAHA Profit Performance per Business Segment

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	2019	YoY 2020- 2021
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	63.808	132.972	219.310	-52,01%
Pelabuhan Port	(5.030)	(6.112)	2.180	17,70%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Supply/Management of Clean Water	815	1.704	19.151	-52,17%
Energi Terbarukan Renewable Energy	(5.653)	8.618	25.645	-165,60%
Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Consolidated Profit for the Year	25.761	112.622	205.367	-77,13%

PERSENTASE KONTRIBUSI LABA TAHUN BERJALAN SEGMENT USAHA TERHADAP LABA TAHUN BERJALAN KONSOLIDASIAN Percentage Contribution of Business Segment Profit for the Year to Consolidated Profit for the Year

Keterangan Description	2021	2020	2019
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	247,69%	118,07%	118,07%
Pelabuhan Port	-19,53%	-5,43%	-5,43%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Supply/Management of Clean Water	3,16%	1,51%	1,51%
Energi Terbarukan Renewable Energy	-21,94%	7,65%	7,65%



Aset per Segmen Usaha

Hingga akhir tahun 2021, total aset Perseroan secara konsolidasi mencapai Rp6,58 triliun, naik 12,67% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp5,85 triliun. Segmen usaha pengelolaan jalan tol merupakan kontributor terbesar, yaitu 79,23% dari total aset. Selanjutnya segmen energy terbarukan dengan kontribusi 10,76%, sector pengelolaan air bersih dengan kontribusi 6,86%, dan sector kepelabuhan dengan 2,37%.

Assets per Business Segment

Up to the end of 2021, the Company's total assets on a consolidated basis reached Rp6.58 trillion, an increase of 12.67% compared to 2020, which amounted to Rp5.85 trillion. The toll road management business segment was the largest contributor, namely 79.23% of total assets. Furthermore, the renewable energy segment with a contribution of 10.76%, clean water management sector with a contribution of 6.86%, and port sector with 2.37%.

KINERJA ASET PER SEGMENT USAHA Asset Performance per Business Segment

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	2019	YoY 2020- 2021
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	5.219.369	4.443.905	3.498.558	17,45%
Pelabuhan Port	156.204	161.164	167.417	-3,08%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Supply/Management of Clean Water	451.717	413.332	422.107	9,29%
Energi Terbarukan Renewable Energy	708.527	719.867	631.704	-1,58%
Jumlah Aset Konsolidasian Total Consolidated Assets	6.587.329	5.846.683	5.077.400	12,67%

PERSENTASE KONTRIBUSI ASET PER SEGMENT USAHA Percentage of Asset Contribution per Business Segment

Keterangan Description	2021	2020	2019
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	79,23%	76,01%	69,66%
Pelabuhan Port	2,37%	2,76%	3,30%
Penyediaan/Pengelolaan Air Bersih Supply/Management of Clean Water	6,86%	7,07%	8,31%
Energi Terbarukan Renewable Energy	10,76%	12,31%	12,50%

TINJAUAN KEUANGAN

Seluruh informasi yang disajikan dalam sub bab ini dirangkum berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk (Perseroan) dan entitas anak yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Penyusunan Laporan Keuangan telah dilakukan dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi kriteria standar penyajian informasi.

FINANCIAL OVERVIEW

All information presented in this sub-chapter is summarized based on the Consolidated Financial Statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk (Company) and its subsidiaries which have been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Member) for the years ended on 31 December 2021 and 2020. The Financial Statements have been prepared by referring to the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia and have met the standard criteria for presenting information.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIANINCOME STATEMENTS AND OTHER
CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless stated otherwise)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)	Description
Pendapatan Usaha dan Penjualan	661.567	517.204	27,91	Revenues and Sales
Pendapatan Usaha Lainnya	13.543	21.201	-36,12	Other Operating Income
Pendapatan Konstruksi	169.679	1.031.715	-83,55	Construction Revenues
Jumlah	844.789	1.570.119	-46,20	Total
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan				Direct Costs and Cost of Sales
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(268.827)	(200.986)	33,75	Direct Costs and Cost of Sales
Beban Konstruksi	(169.679)	(1.031.715)	-83,55	Construction Costs
Jumlah	(438.506)	(1.232.701)	-64,43	Total
Laba Kotor	406.284	337.418	20,41	Gross Profit
Beban Umum dan Administrasi	(190.133)	(172.698)	10,10	General and Administrative Expenses
Beban Operasional Lainnya	(65.368)	(31.957)	40,04	Other Operating Expenses
Laba Usaha	150.783	132.764	13,57	Operating Profit
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(87.834)	2.880	-3149,79	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	62.949	135.664	-53,59	Profit Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	(37.188)	(23.022)	61,53	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	25.761	112.622	-77,13	Profit for the Year
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain	(9.063)	(17.104)	-47,01	Other Comprehensive (Loss)/ Income
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	16.698	95.518	-82,52	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Profit for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	5.989	69.392	-91,37	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	19.772	43.230	-54,26	Non-Controlling Interests
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	136	57.939	-99,76	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	16.562	37.579	-55,93	Non-Controlling Interests
Laba per Saham Dasar	0,34	3,92	-91,33	Earning per Basic Share

Pendapatan Usaha dan Penjualan

Pada tahun 2021, total pendapatan dan penjualan mencapai Rp844,78 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,57 triliun, terjadi penurunan 46,20%, seiring dengan penurunan pendapatan konstruksi jalan tol Pettarani. Namun, pendapatan usaha dan penjualan Perseroan pada tahun 2021 sebesar Rp661,57 miliar, terjadi peningkatan mencapai 27,91% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp517,20 miliar.

Untuk pendapatan usaha (di luar pendapatan konstruksi) dari segmen usaha pengelolaan jalan tol pada tahun 2021 tercatat Rp439,34 miliar, naik 33,84% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp328,26 miliar. Hal itu disebabkan peningkatan volume pengguna jalan tol terutama telah beroperasinya ruas tol Pettarani di tengah tahun 2021, serta adanya kenaikan tariff tol di sejumlah ruas tol yang dimiliki Perusahaan.

Revenues and Sales

In 2021, total revenue and sales reached Rp844.78 billion. Compared to 2020 which amounted to Rp1.57 trillion, there was a decrease of 46.20%, in line with the decline in the revenues of Pettarani toll road construction. However, the Company's operating revenues and sales in 2021 amounted to Rp.661.57 billion, an increase of 27.91% compared to 2020 which amounted to Rp517.20 billion.

In 2021, operating income (excluding construction revenues) from the toll road management business segment was posted at Rp439.34 billion, an increase of 33.84% compared to, 2020 which amounted to Rp328.26 billion. This was due to the increase in the volume of toll road users, especially since the operation of the Pettarani toll road in the middle of 2021, as well as the increase in toll rates on a number of toll roads owned by the Company.



Dari segmen usaha penyediaan/pengelolaan air bersih (di luar pendapatan konstruksi), hingga akhir tahun 2021 pendapatan yang dibukukan tercatat Rp63,87 miliar, meningkat 0,46% dibandingkan tahun 2020 yang Rp63,57 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan volume pemakaian air bersih.

Sedangkan pendapatan untuk segmen usaha energi terbarukan naik sebesar 26,87%, dari Rp122,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp155,62 miliar di tahun 2021. Kenaikan itu dipengaruhi oleh meningkatnya volume pemakaian tenaga listrik, terutama atas beroperasinya pembangkit listrik minihidro di Lau Gunung pada tahun 2021.

Beban-beban

Total beban langsung dan beban pokok Perseroan (diluar beban konstruksi) pada tahun 2021 mencapai Rp266,82 miliar, naik 33,75% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp200,99 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban langsung dan beban pokok penjualan pada sektor jalan tol, sektor energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan amortisasi atas asset tak berwujud.

Pada sektor pengelolaan jalan tol, jumlah beban pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp148,03 miliar. Dibandingkan tahun 2020 yang Rp100,28 miliar, terjadi kenaikan 47,62%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban amortisasi asset jalan tol seiring dengan beroperasinya jalan tol Pettaran, dan beban pemeliharaan jalan tol.

Untuk sektor penyediaan/pengelolaan air bersih, jumlah beban naik 9,4%, dari Rp27,01 miliar menjadi Rp29,56 miliar pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban material, beban karyawan, dan beban amortisasi seiring dengan penambahan asset pengelolaan air bersih.

Beban pada sektor energi di tahun 2021 mengalami peningkatan 17,54%, yaitu menjadi Rp91,23 miliar. Sementara pada tahun 2020 mencapai Rp73,69 miliar. Penyebabnya adalah peningkatan beban material dan beban suku cadang mesin penghasil tenaga listrik.

Sedangkan untuk beban konstruksi, pada tahun 2021 sebesar Rp169,67 miliar. Dibandingkan tahun 2020 yang Rp1.031,71 miliar, terjadi penurunan 83,55% terutama karena telah selesainya pengerjaan konstruksi jalan tol Pettarani.

Laba Usaha, Laba Sebelum Pajak, dan Laba Tahun Berjalan

Perseroan mencatatkan laba usaha tahun 2021 sebesar Rp150,78 miliar. Dibandingkan tahun 2020 yang Rp132,76 miliar, terjadi kenaikan 13,57%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dan penjualan.

As of the end of 2021, revenues from the clean water supply/ management business segment (excluding construction income) was posted at Rp63.87 billion, an increase of 0.46% compared to 2020, which amounted to Rp63.57 billion. This condition is influenced by the increase in the volume of clean water usage.

Furthermore, revenues for the renewable energy business segment increased by 26.87%, from Rp122.66 billion in 2020 to Rp155.62 billion in 2021. The increase was influenced by the increase in the volume of electricity consumption, especially the operation of the mini-hydro power plant in Lau Gunung in 2021.

Expenses

The Company's total direct costs and principal cost (excluding construction costs) in 2021 reached Rp266.82 billion, an increase of 33.75% compared to 2020, which amounted to Rp200.99 billion. The increase was due to an increase in direct costs and cost of goods sold in the toll road sector, renewable energy sector, clean water management, and amortization of intangible assets.

In the toll road management sector, the total expenses in 2021 was posted at Rp148.03 billion. Compared to 2020, which amounted to Rp100.28 billion, there was an increase of 47.62%. This was mainly due to an increase in toll road asset amortization expenses, which is in line with the operation of the Pettaran toll road, and toll road maintenance expenses.

For the clean water supply/ management sector, total expenses increased by 9.4%, from Rp27.01 billion to Rp29.56 billion in 2021. This was mainly due to an increase in material expenses, employee expenses, and amortization expenses, in line with the addition of clean water management assets.

Expenses in the energy sector in 2021 increased by 17.54%, to Rp91.23 billion. While in 2020, it reached Rp73.69 billion. This was due to an increase in material expenses and the expenses for spare parts of electricity generator machineries.

Construction expenses amounted to Rp169.67 billion in 2021. Compared to 2020, which amounted to Rp1,031.71 billion, there was a decrease of 83.55%, mainly due to the completion of the construction of the Pettarani toll road.

Operating Income, Profit Before Tax, and Profit for the Year

The company posted an operating profit of Rp150.78 billion in 2021. Compared to 2020, which amounted to Rp132.76 billion, there was an increase of 13.57%. This was due to an increase in operating income and sales.

Laba sebelum pajak mencapai Rp62,94 miliar, turun 53,59% dibandingkan tahun 2020 yang Rp135,64 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas peningkatan pinjaman bank. Pada tahun 2021, Perseroan tidak dapat mengkapitalisasi beban bunga pinjaman sehingga terjadi peningkatan signifikan untuk beban bunga tersebut.

Sementara laba bersih tahun berjalan mencapai Rp25,76 miliar, mengalami penurunan 77,13% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp112,62 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak dan kenaikan beban pajak penghasilan yang mencapai Rp 37,18 miliar, naik 61,53% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp23,02 miliar.

(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lainnya

Pada tahun 2021, kerugian komprehensif lainnya turun 47,01%, sehingga menjadi Rp(9,06) miliar. Sedangkan pada tahun 2020 posisinya sebesar Rp(17,10) miliar. Penyebabnya terutama karena membaiknya besaran kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar asset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Hingga 31 Desember 2021, total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mencapai Rp16.69 miliar, mengalami penurunan 85,52% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp95,52 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun 2021 dan kerugian atas perubahan nilai asset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp9,83 miliar.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Aset

Profit before tax reached Rp62.94 billion, a decrease of 53.59% compared to 2020, which amounted to Rp135.64 billion. The decrease was due to an increase in interest expense on an increase in bank loans. In 2021, the Company was not able to capitalize the interest, resulting in a significant increase in interest expense.

Meanwhile net profit for the year reached Rp25.76 billion, a decrease of 77.13% compared to 2020, which amounted to Rp112.62 billion. This was due to a decrease in profit before tax and an increase in income tax expense, which reached Rp 37.18 billion, an increase of 61.53% compared to 2020 which amounted to Rp23.02 billion.

Other Comprehensive (Loss)/ Income

In 2021, other comprehensive losses decreased by 47.01%, to Rp(9.06) billion. Meanwhile, in 2020 the position amounted to Rp(17.10) billion. This was mainly due to the improvement in the number of unrealized losses on changes in the fair value of available-for-sale financial assets.

Total Comprehensive Income for the Year

As of 31 December 2021, the Company's total comprehensive income for the year reached Rp16.69 billion, a decrease of 85.52% compared to 2020 which amounted to Rp95.52 billion. This was mainly due to a decrease in net profit in 2021 and a loss on changes in the value of financial assets available-for-sale in the amount of Rp9.83 billion.

STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

Assets

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Aset Lancar Current Assets	1.264.942	643.801	96,48
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	5.322.387	5.202.882	2,30
Jumlah Aset Total Assets	6.587.329	5.846.683	12,67



Total aset Perseroan pada tahun 2021 mencapai Rp6,58 triliun, naik 12,67% dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar Rp5,85 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, dan asset konsesi.

Aset lancar Perseroan tercatat Rp1,26 triliun. Dibandingkan tahun 2020 yang Rp0,64 triliun, terjadi kenaikan 96,48%. Penyebabnya adalah penerimaan pinjaman bank yang belum digunakan untuk proyek-proyek strategis.

Sementara aset tidak lancar Perseroan mencapai Rp5,32 triliun, terjadi kenaikan 2,30% dibandingkan tahun 2020 yang Rp5,20 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada asset tidak berwujud lainnya atas finalisasi proyek tol Pettarani.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	599.501	499.998	19,90
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	2.626.365	1.991.578	31,87
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.225.865	2.491.576	29,47
Ekuitas Equity			
Jumlah Total	3.361.463	3.355.108	0,19
Jumlah Liabilitas dan ekuitas Total Liabilities and equity	6.587.329	5.846.683	12,67

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2021 sebesar Rp3,22 triliun. Dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp2,49 triliun, terjadi kenaikan 29,47%. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank yang diperoleh pada tahun 2021 yang akan dipergunakan untuk pengeluaran modal pada proyek strategis lainnya.

Sedangkan untuk ekuitas, terjadi kenaikan 0,19% pada tahun 2021, sehingga menjadi Rp3,36 triliun. Pada tahun 2020, posisinya Rp3,35 triliun. Hal ini disebabkan oleh laba yang diperoleh pada tahun 2021.

In 2021, total assets of the Company reached Rp6.58 trillion, an increase of 12.67% compared to the position in 2020, which amounted to Rp5.85 trillion. The increase was mainly due to an increase in cash and cash equivalents, and concession assets.

The Company's current assets were posted at Rp1.26 trillion. Compared to 2020, which amounted to Rp0.64 trillion, there was an increase of 96.48%. This was due to the receipt of bank loans that have not been used for strategic projects.

Moreover, the Company's non-current assets reached Rp5.32 trillion, an increase of 2.30% compared to 2020, which amounted to Rp5.20 trillion. This was due to an increase in other intangible assets due to the finalization of the Pettarani toll road project.

LIABILITIES AND EQUITY

In 2021, total liabilities of the Company amounted to Rp3.22 trillion. Compared to 2020, which amounted to Rp2.49 trillion, there was an increase of 29.47%. This was due to the receipt of bank loans obtained in 2021, which will be used for capital expenditures on other strategic projects.

As for equity, there was an increase of 0.19% in 2021 to Rp3.36 trillion. In 2020, the position was Rp3.35 trillion. This is due to the profit earned in 2021.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp Million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2021	2020	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	106.847	264.870	-59,66
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flows used in Investing Activities	(327.793)	(1.216.773)	73,06
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Used in Financing Activities	840.639	727.835	15,50
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase of Cash and Cash Equivalents	619.694	(224.068)	376,57
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	366.325	590.393	-37,95
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	986.019	366.325	169,17

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp100,84 miliar, mengalami penurunan 59,66% dibandingkan tahun 2020 yang Rp264,87 miliar. Perubahan ini disebabkan oleh meningkatnya pembayaran ke supplier dan pembayaran untuk beban keuangan.

Cash Flow from Operating Activities

In 2021, the Company posted Rp100.84 billion in cash flow from operating activities, a decrease of 59.66% compared to 2020, which amounted to Rp264.87 billion. This change was due to an increase in payments to suppliers and payments for finance costs.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2021, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan tercatat sebesar Rp0,32 triliun, turun 73,06% dari tahun 2020 yang Rp1,22 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran modal untuk proyek jalan tol Pettarani yang mulai beroperasi pada bulan Mei 2021.

Cash Flow from Investing Activities

In 2021, the Company's cash flow from investing activities was posted at Rp0.32 trillion, a decrease of 73.06% compared to 2020, which amounted to Rp1.22 trillion. The decrease was due to the reduction in capital expenditures for the Pettarani toll road project, which commenced operations in May 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Hingga akhir tahun 2021, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai Rp840,63 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp727,84 miliar, sehingga terjadi kenaikan 15,50%. Penyebabnya adalah penerimaan pinjaman bank yang diperoleh pada tahun 2021 yang akan dipergunakan untuk pengeluaran modal pada proyek strategis.

Cash Flow from Financing Activities

As of the end of 2021, cash flow from financing activities reached Rp840.63 billion. Meanwhile, in 2020 it was Rp727.84 billion, which is an increase of 15.50%. this was due to the receipt of bank loans obtained in 2021, which will be used for capital expenditures on strategic projects.

RASIO-RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

Uraian Description	2021	2020
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio		
Modal Kerja Bersih (dalam jutaan Rupiah) Net Working Capital (in million Rupiah)	666.440	143.803
Rasio Lancar Current Ratio	211,00%	128,76%
Rasio Kas Cash Ratio	164,47%	136,49%
Rasio Operasi Operating Ratio		
Rasio Margin Kotor Gross Margin Ratio	48,09%	21,49%
Margin Usaha Operating Margin	17,85%	8,46%



Uraian Description	2021	2020
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	3,05%	7,17%
Margin EBITDA EBITDA Margin	40,43%	15,36%
Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets	0,09%	1,19%
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return on Equity	0,18%	2,07%
Rasio Leverage Leverage Ratio		
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	85,18%	59,96%
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Assets Ratio	43,46%	34,41%
Debt Service Coverage Rasio Debt to Service Coverage Ratio	0,59x	0,73x
Interest Coverage Interest Coverage	41,07%	20,93%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban, antara lain ditunjukkan melalui tingkat solvabilitas yang berlandaskan pada 3 (tiga) indikator utama, yakni rasio *gearing* bersih, rasio liabilitas terhadap jumlah aset, serta rasio EBITDA terhadap utang berbunga. Solvabilitas Perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

ABILITY TO PAY DEBTS

The Company's ability to meet its obligations, among others, is demonstrated by the level of solvency, which is based on 3 (three) main indicators, namely the net gearing ratio, the liabilities to total assets ratio, and the EBITDA to interest-bearing debt ratio. The Company's solvency in 2020 and 2021 is outlined in the following table:

Uraian Description	Perbandingan (dalam kali lipat) Comparison (times)	
	2021	2020
Rasio Gearing Bersih Net Gearing Ratio	0,56	0,49
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Liabilities to Total Assets Ratio	0,49	0,42
Rasio EBITDA terhadap Jumlah Utang Berbunga EBITDA to Interest Bearing Debt Ratio	0,12	0,12

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Pada tahun 2021, perseroan mencatat rata-rata periode kolektibilitas piutang berada di kisaran 13,80 hari. Kondisi tersebut lebih cepat dibandingkan kondisi tahun 2020 yang 19,22 hari. Kondisi ini terjadi karena telah membaiknya kondisi perekonomian global akibat pandemic COVID-19 pada tahun 2020.

COLLECTABILITY OF RECEIVABLES

In 2021, the company recorded an average period of receivable collectability in the range of 13.80 days. This condition is faster than the conditions in 2020, which was 19.22 days. This condition was due to the improvement in global economic conditions due to the COVID-19 pandemic in 2020.

STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan senantiasa memperhatikan kondisi struktur modal untuk menjaga kemampuan kinerja keuangan agar tetap stabil. Untuk itu, komitmen untuk memastikan dan memelihara aspek kesehatan rasio Laba terhadap ekuitas (*Return on Equity*) dan rasio-rasio lain yang ditetapkan oleh pemberian pinjaman, senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh Perseroan.

CAPITAL STRUCTURE

Management Policy on Capital Structure

The Company always takes into account the condition of the capital structure to maintain a stable financial performance capability. To that end, the Company's commitment to ensuring and maintaining the healthy aspect of the Return on Equity ratio and other ratios determined by lending is always upheld and implemented by the Company.

Rasio-rasio tersebut dijadikan sebagai bagian dari pengelolaan modal Perseroan untuk mendukung tercapainya kelancaran dalam aktivitas bisnis yang dilakukan dan berdampak pada terwujudnya nilai tambah bagi seluruh pihak. Dalam hal ini, terutama para pemegang saham.

These ratios are used as part of the Company's capital management to support the smooth running of its business activities and have an impact on the creation of added value for all parties. In this case, Shareholders in particular.

Rincian Struktur Modal

Details of Capital Structure

Uraian Description	Kontribusi (Dalam Miliar Rupiah) Contribution (In Billion Rupiah)		Kontribusi (%) Contribution (%)		Persentase Pertumbuhan Growth Percentage
	2021	2020	2021	2020	
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	2.626	1.992	43,86%	37,25%	31,87%
Ekuitas Equity	3.362	3.355	56,14%	62,75%	0,19%
Jumlah Sumber Dana Jangka Panjang Total Long-Term Source of Funds	5.988	5.347	100,00%	100,00%	11,99%

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

Rincian Ikatan Material Investasi Barang Modal

Details of Material Commitments for Capital Expenditures

Pihak Pertama First Party	Pihak Kedua Second Party	Tujuan Ikatan Objective of commitments	Sumber Dana Source of Funds	Mata Uang Currency
PT DCC	PT UWT	Pembuatan Reservoir	Ekuitas	IDR
PT DCC	PT Lima Wira	Penambahan Pompa Pipa Intake	Ekuitas	IDR
PT SCTK	PT Tirta Bangun Nusantara	Aquadigi Project	Ekuitas	IDR
PT SCTK	PT Delta Optima Abadi	SCADA	Ekuitas	IDR

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mendukung pengembangan bisnis usaha Perusahaan dan mencapai keberlanjutan bisnis di masa mendatang. Investasi yang dilakukan oleh Perusahaan salah satunya merupakan Investasi Barang Modal atau *Capital Expenditure* yang didefinisikan sebagai aktivitas pengeluaran dana dengan tujuan untuk membeli sejumlah Aset atau Investasi dengan harapan dapat menunjang kelangsungan usaha dan menghadirkan nilai tambah yang bermanfaat di masa depan.

REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURES

Investment is one of the steps taken by the Company to support the development of the Company's business and achieve business sustainability in the future. One of the investments made by the Company is Capital Expenditure which is defined as the activity of spending funds with the aim of buying a number of assets or investments with the hope of supporting business continuity and presenting added value that is useful in the future.

Di tahun 2021, Perusahaan melakukan investasi Barang Modal melalui penambahan pada aset konsesi & non konsesi dengan nilai yang terealisasi mencapai Rp320,63 miliar. Rincian terkait investasi barang modal yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In 2021, the Company invested in Capital Expenditures through the addition of concessional & non-concession assets with a realized value of Rp320.63 billion. The details regarding the capital expenditures made by the Company in 2021 are as follows:



Uraian Description	Tujuan Investasi Investment Objectives	Nilai Investasi Investment Value
Aset Konsesi Concession Assets	Belanja Modal Capital Expenditure	311.790
Aset Non Konsesi Non-Concession Assets	Belanja Modal Capital Expenditure	8.840
Total		320.630

INFORMASI FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

INFORMATION ON MATERIAL FACTS SUBSEQUENT TO ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

There was no material facts subsequent to accountant's reporting date.

DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Risiko mata uang merupakan risiko dengan kondisi nilai wajar mengalami fluktuasi akibat adanya perubahan pada nilai tukar mata uang asing dan berpengaruh pada pendapatan dan pengeluaran. Perusahaan hingga akhir tahun 2021 menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan uang asing dan menjadikan pendapatan dan pengeluaran Grup hampir seluruhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak besar pada aktivitas usaha dan Perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus terkait risiko ini.

IMPACT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES

Currency risk is a risk with conditions in which the fair value fluctuates due to changes in foreign currency exchange rates and affects income and expenses. As of the end of 2021, the Company carried out its business activities using foreign currency and made almost all of the Group's revenues and expenditures denominated in Rupiah, subsequently changes in foreign currency exchange rates did not have a major impact on business activities and the Company did not have a specific policy regarding this risk.

Dalam melakukan pengelolaan liabilitas Grup, digunakan instrumen keuangan derivatif terutama *cross currency swaps* oleh Grup sesuai dengan kebijakan keuangan yang telah dimiliki.

In managing the Group's liabilities, derivative financial instruments, especially cross currency swaps, are used by the Group in accordance with the existing financial policies.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

COMPARISON OF TARGETS WITH REALIZATION

Target dan Realisasi

Targets and Realization

Uraian Description	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)
Pendapatan/Penjualan (diluar pendapatan konstruksi) Revenues/Sales (excluding construction revenues)	798.373	675.111	84,56
Laba Bruto Gross Profit	621.998	406.284	65,32
Laba Usaha Operating Profit	286.337	150.783	52,66
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	95.192	25.762	27,06
Aset Assets	7.533.328	6.587.329	87,44
Struktur Modal Capital Structure			
Liabilitas Liabilities	3.325.485	3.225.720	97,01
Aset Assets	7.533.328	6.587.329	87,44

Proyeksi

Projection

Uraian Description	Target 2022 2022 Target
Pendapatan/Penjualan Revenues/Sales	849.152
Laba Bruto Gross Profit	666.913
Laba Usaha Operating Profit	340.553
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	144.789
Aset Assets	7.335.159
Struktur Modal Capital Structure	
Liabilitas Liabilities	3.506.237
Aset Assets	7.027.559
Dividen Dividend	-

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Setelah menganalisis skenario terhadap pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi sepanjang tahun 2020, Perusahaan menetapkan target usaha untuk tahun buku 2021. Dalam upayanya untuk mencapai target yang ditentukan, Perusahaan tetap mempertahankan prioritas keselamatan dan pengelolaan human capital sebagai salah satu aset Perusahaan untuk memberikan kontribusi optimal bagi pemangku kepentingan.

Selain itu, Perusahaan terus mengelola sumber dayanya secara efektif untuk menyelesaikan proyek strategis jalan tol layang A.P. Pettarani hingga tahap operasional dan penerapan penyesuaian tarif sesuai dengan rencana usaha. Dalam situasi pandemi ini, Perusahaan juga menekankan pengelolaan biaya operasional (O&M) dan biaya peningkatan kapasitas (CAPEX) yang berorientasi kepada cost-initiatives dengan tetap mempertahankan standar pelayanan minimum. Di samping itu, Perusahaan mengoptimalkan pendapatan non-core business, di samping melihat peluang usaha baru di era new normal serta proaktif dalam mengelola usaha di 3 (tiga) sektor utama, yakni jalan tol, pengelolaan air bersih, dan energi terbarukan.

Pangsa Pasar Jalan Tol

Berdasarkan panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia per akhir 2021 adalah sepanjang 2,475.84 km. Grup MUN memiliki 4 (empat) ruas jalan tol yang beroperasi sepanjang 39,07 km. Keempat ruas jalan tol tersebut tersebar di area Jabodetabek dan Sulawesi. Sebagai perbandingan, panjang ruas tol di area Jabodetabek dan Sulawesi adalah 346.75 km. Sehingga, perhitungan proporsi panjang jalan tol Perseroan dengan total area Jabodetabek dan Sulawesi adalah sebesar 11,27%.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

After analyzing the economic recovery scenario due to the pandemic's impact throughout 2020, the Company has set a business target for the 2021 financial year. In its efforts to achieve the set targets, the Company maintains the priority of safety and managing human capital as one of the Company's main assets to deliver optimal contributions to stakeholders.

In addition, the Company continues to effectively manage its resources to complete the strategic project of the A.P. Pettarani elevated toll road to the operational stage and the application of tariff adjustments in accordance with the business plan. In this pandemic situation, however, the Company also emphasizes the operational management (O&M) and capacity building costs (CAPEX) that are oriented to cost initiatives while maintaining minimum service standards. In addition, the Company optimizes non-core business revenues and is open to new business opportunities in the new normal era, and is proactive in managing the business in 3 (three) main sectors, namely toll roads, clean water management, and renewable energy.

Toll Road Market Share

Based on the length of toll roads operating in Indonesia as of the end of 2021, which is 2,475.84 km, the MUN Group has 4 (four) toll roads operating along 39.07 km. The four toll roads are spread across the Greater Jakarta (Jabodetabek) and Sulawesi areas. As a comparison, the length of toll roads in the Jabodetabek and Sulawesi areas is 346.75 km. Therefore, the proportion of the length of the Company's toll roads with the total area of Jabodetabek and Sulawesi is 11.27%.



Perhitungan besaran pangsa pasar di sektor jalan tol tidak sepenuhnya dilihat dari jumlah ruas tol dan panjang tol yang beroperasi, namun, memperhatikan juga aspek profitabilitas finansial.

Fokus Grup MUN adalah untuk mengembangkan ruas tol yang memiliki karakteristik strategic access. Ruas tol dengan karakteristik tersebut diyakini oleh Perseroan dapat memberikan imbal hasil investasi yang lebih baik sesuai dengan risk appetite Perseroan, dan diharapkan dapat menghasilkan tingkat profitabilitas yang lebih baik, yang mana pada umumnya lalu lintas harian lebih padat dibanding ruas tol dengan karakteristik lain.

Salah satu indikator tingkat profitabilitas yang Perseroan lihat adalah pendapatan tol per kilometer. Mengacu kepada karakteristik tol strategic access, Perseroan meyakini besaran imbal hasil investasi dapat lebih terukur didorong oleh indikator pendapatan tol per kilometer yang relatif lebih tinggi dibandingkan long-tranches toll road dan/atau inter-urban toll road.

PROSPEK USAHA JALAN TOL 2022

Mengacu kepada hasil pencapaian vaksinasi masal sebagai salah satu indikator pemulihan ekonomi di akhir 2021 yang sudah mencapai $\pm 67\%$, kelompok usaha MUN berharap bahwa terciptanya *herd immunity* dapat berdampak positif pada peningkatan mobilitas; baik penumpang dan logistik. Hal ini memberikan *comfort* bagi MUN untuk menetapkan skenario performa usaha yang lebih optimis pada 2022 mendatang. Dengan demikian, MUN berharap arus lalu lintas kendaraan di ruas-ruas tol Grup MUN dapat kembali menuju laju traffic normal lebih tinggi dari sebelum pandemi sehingga profitabilitas juga akan membaik; ditopang dengan tetap menjalankan kebijakan induk dari Perseroan. Grup MUN menargetkan inisiasi untuk pengembangan usaha melalui entitas anak langsung BSD dapat berjalan sesuai target untuk pembangunan 3 (tiga) proyek tambahan ruang lingkup dari perjanjian jasa konsesi saat ini, yakni proyek penanganan banjir, pembangunan lajur integrasi dengan jaringan jalan tol JORR-2, dan pembangunan jalan akses tol Makassar New Port (MNP), dapat memberikan dampak peningkatan imbal hasil investasi bagi Grup MUN dan Perseroan di masa depan. Peningkatan imbal hasil tersebut diperoleh melalui skema kompensasi dalam bentuk perpanjangan masa konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol.

Menyikapi prospek bisnis yang cukup optimis ke depan, Grup MUN menargetkan kenaikan pendapatan usaha dan laba bersih masing-masing sebesar 25,87% dan 157,74% pada 2022 mendatang. Untuk dapat mencapai target-target tersebut, manajemen dari Grup MUN telah mempersiapkan inisiatif strategis yang tepat, salah satunya dengan berfokus pada implementasi pengelolaan biaya berbasis *cost-initiatives* dan optimalisasi pendapatan usaha tol dan non-tol.

The calculation of the market share in the toll road sector is not fully seen from the number of toll roads and the length of the operating toll road. In addition, the aspect of financial profitability is also considered.

The focus of the MUN Group is to develop toll roads that have strategic access characteristics. The Company believes that toll roads with these characteristics can provide better investment returns in accordance with the Company's risk appetite and are expected to generate a better level of profitability, which is generally more congested daily traffic than toll roads with other characteristics.

One indicator of profitability that the Company sees is toll revenue per kilometer. Referring to the characteristics of strategic access toll roads, the Company believes that the return on investment can be more measurable, driven by the indicator of toll revenue per kilometer, which is relatively higher than long-tranche toll roads and/or inter-urban toll roads.

TOLL ROAD PROSPECTS FOR 2022

Based on the result of mass vaccination progress, one of the indications of economic recovery at the end of 2021 that reached around 67%, the MUN business group hopes that herd immunity happens to positively impact mobility, both passengers and logistics. This provides comfort for MUN to determine a more optimistic business performance scenario in 2022. Therefore, vehicle traffic flow on MUN Group toll roads can continuously increase from before the pandemic, so profitability will also improve, supported by the Company's parent policy. In addition, the MUN Group is targeting the initiation of business development through its direct subsidiary, BSD, which will run according to the target in 3 (three) additional project developments within the scope of the current concession service agreement, namely flood management projects, development of lane integration with the JORR-2 toll road network, and Makassar New Port (MNP) toll road access construction. This development is expected to increase investment returns for the MUN Group and the Company. The increase in yield is obtained from a compensation scheme in the form of an extension of the concession period and/or adjustment of toll rates.

Responding to a reasonably optimistic business prospect, the MUN Group targets an increase in operating revenues and net profit by 25.87% and 157.74%, respectively, in 2022. To that end, the MUN Group management has prepared the right strategic initiatives, focusing on implementing cost-initiatives-based cost management and optimizing toll and non-toll revenues.

Tentunya, semua rencana strategi dan inisiatif-inisiatif yang akan dijalankan di tahun mendatang tetap dilakukan secara prinsip kehati-hatian sesuai tata kelola Perseoran dan adaptif mengingat tantangan kondisi eksternal seperti salah satunya perkembangan kasus varian COVID-19 Omicron dapat berdampak terhadap potensi pemulihan ekonomi dan mobilitas baik penumpang dan logistik.

DIVIDEN

Kebijakan

Terkait dengan kebijakan dan pembayaran dividen, Perusahaan mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan terkait dividen, mencakup ada atau tidaknya serta mekanisme pembagian dividen yang seluruhnya dilakukan dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tahun 2021, tidak terdapat adanya pembagian dividen serta dana digunakan untuk tujuan kepentingan Perusahaan dan karena ekspansi Perusahaan yang sedang berlangsung.

Realisasi

Pada tahun 2021, Perseroan tidak membagikan dividen. Dengan demikian, rincian informasi tidak dapat disampaikan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham, baik untuk karyawan maupun manajemen. Dengan demikian, rincian informasi tidak dapat disampaikan.

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan melakukan aksi korporasi berupa right issue pada tahun 2018. Laporan penggunaan dana dari hasil right issue tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga pada tahun buku 2021 tidak ada lagi.

All strategic plans and initiatives will be carried out by applying the Company's prudent principle of governance. In addition, the Company will continue to be adaptive to external challenges, especially the spreading of the COVID-19 Omicron variant, which will impact economic recovery and mobility, both for passengers and logistics.

DIVIDEN

Policy

Regarding the policies and payments of dividends, the Company refers to the prevailing regulations, namely Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association. Through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors has the authority to determine policies related to dividends, including whether or not there is a dividend distribution mechanism, all of which are carried out with the approval of the Board of Commissioners.

Based on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held in 2021, there was no distribution of dividends and funds were used for the purposes of the Company's interests and due to the Company's ongoing expansion.

Realization

In 2021, the Company will not distribute dividends. Thus, detailed information cannot be conveyed.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

The Company does not have a share ownership program, either for employees or management. Thus, detailed information cannot be conveyed.

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

The company took a corporate action in the form of a rights issue in 2018. The report on the use of funds from the rights issue was carried out in 2020, so that in the 2021 financial year there will be no more.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI

Sifat hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung Associated entity	Piutang non-usaha (modal kerja) Non-trade receivables (working capital)
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung Associated entity	Piutang usaha dan piutang non-usaha Trade and non-trade receivables
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Entitas asosiasi tidak langsung Associated entity	Piutang non-usaha Non-trade receivables

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Nature of Relationship with Related Parties

In the normal course of business, the Group conducts business and financial transactions with certain related parties. The nature of the Group's relationships with related parties is as follows:

The balances arising from transactions with related parties are described in details in the table as follows: (in full Rupiah, unless stated otherwise)

(dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
(in full Rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	Persentase terhadap Total Aset Percentage to Total Assets		Nominal Nominal	
	2021	2020	2021	2020
Piutang Usaha Trade Receivables				
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,001	0,001%	65.734.755	72.000.000
Piutang Non-Usaha Non-Trade Receivables				
PT Intisentosa Alambahtera	0,468	0,521%	30.835.765.608	30.481.356.360
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	0,213	0,360%	14.000.000.000	21.000.000.000
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,090	0,101%	5.933.562.040	5.933.562.040
Direktur Perusahaan Directors of the Company	0,001	0,005%	75.000.000	300.000.000
Sub-jumlah Sub-total	0,772	0,987%	50.844.327.646	57.714.918.400
Jumlah Total	0,773	0,988%	50.910.062.401	57.786.918.400

Penjualan

Sales

Uraian Description	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	2.726.355.790	2.699.954.265

Piutang kepada PT Intisentosa Alambahtera merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai 10 Januari 2020. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit ini, Portco masih dalam proses perpanjangan tanggal jatuh tempo perjanjian pinjaman ini sampai 10 Januari 2023.

Receivables to PT Intisentosa Alambahtera represent working capital receivables based on the Shareholder Loan Agreement dated 3 April 2012 which bears interest in accordance with USD LIBOR plus 3.5% per annum and has a maturity date of 10 January 2020. On the date of issuance of the audited financial statements, Portco is still in the process of extending the maturity date of this loan agreement until 10 January 2023.

Piutang kepada PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri merupakan piutang investasi antara TKCM dan TBN yang digunakan untuk keperluan pembiayaan terkait proyek peningkatan kapasitas produksi IPA. Piutang ini tidak dikenakan bunga dan dapat ditagih sewaktu-waktu sehingga disajikan sebagai piutang jangka pendek pada tanggal pelaporan.

Receivables to PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri represent investment receivables between TKCM and TBN, which are used for financing purposes related to the IPA production capacity increase project. These receivables do not bear interest and can be collected at any time so that they are presented as short-term receivables at the reporting date

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

The management does not provide an allowance for impairment of these receivables because management believes that the receivables will be collectible.

Kompensasi Jangka Pendek Manajemen Kunci

Grup memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp32.561.590.135 dan Rp20.011.369.531 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

Key Management Short Term Compensation

The Group provided short-term compensation to the Board of Commissioners and the Board of Directors amounting to Rp32,561,590,135 and Rp20,011,369,531 for the years ended on 31 December 2021 and 2020,

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hingga akhir tahun 2021, tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan

IMPACT OF CHANGES TO LAWS AND REGULATIONS

Until the end of 2021, there are no laws and regulations that have a significant effect on the Company

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2021, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi di bawah ini yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED IN THE FISCAL YEAR

Information on Changes in Accounting Policies

On 1 January 2021, the Group adopted the statement of financial accounting standards and interpretations of the new and revised financial accounting standards below, which are effective from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.



Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

- Amendemen PSAK 73, PSAK 71, PSAK 60 dan PSAK 55: "Sewa, Instrumen Keuangan, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Tentang Pembaruan IBOR Tahap Dua";
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa"

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis", tentang referensi ke kerangka konseptual;
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan";
- Penyesuaian Tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan"

Perseroan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Alasan Perubahan

Perubahan tersebut bertujuan untuk mensinkronisasi antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan IFRS (International Financial Reporting Standards) dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Perseroan sedang mengevaluasi dampak dari perubahan standar akuntansi yang berlaku setelah tanggal laporan keuangan dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

The adoption of the following new and revised standards and interpretations did not result in major changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior fiscal year.

- Amendment to PSAK 73, PSAK 71, PSAK 60, and PSAK 55: "Leases, Financial Instruments, Financial Instruments: Disclosures, and Financial Instruments: Recognition and Measurement of Phase Two of IBOR Renewal";
- Annual Adjustment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements";
- Amendment to PSAK 73: "Leases"

The following are some of the accounting standards that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) which are deemed relevant to the Group's financial reporting, which must be applied for the fiscal years starting on or after 1 January 2022 and 2023 and have not been implemented early by the Company, are as follows:

- Amendment to PSAK 22: "Business Combinatin", on references to conceptual frameworks;
- Amendment to PSAK 57: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets on Arduous Contracts";
- Annual Adjustment to PSAK 71 "Financial Instruments";
- Annual Adjustment to PSAK 73 "Leases";
- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements";
- Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets";
- Amendment to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Amendment to PSAK 46: "Income Tax"

The Company is currently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on the Company's consolidated financial statements.

Reason for Changes

The changes aim to synchronize the Financial Accounting Standards in Indonesia with the IFRS (International Financial Reporting Standards) as well as other relevant laws and regulations.

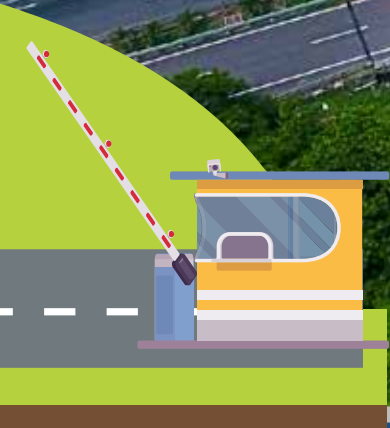
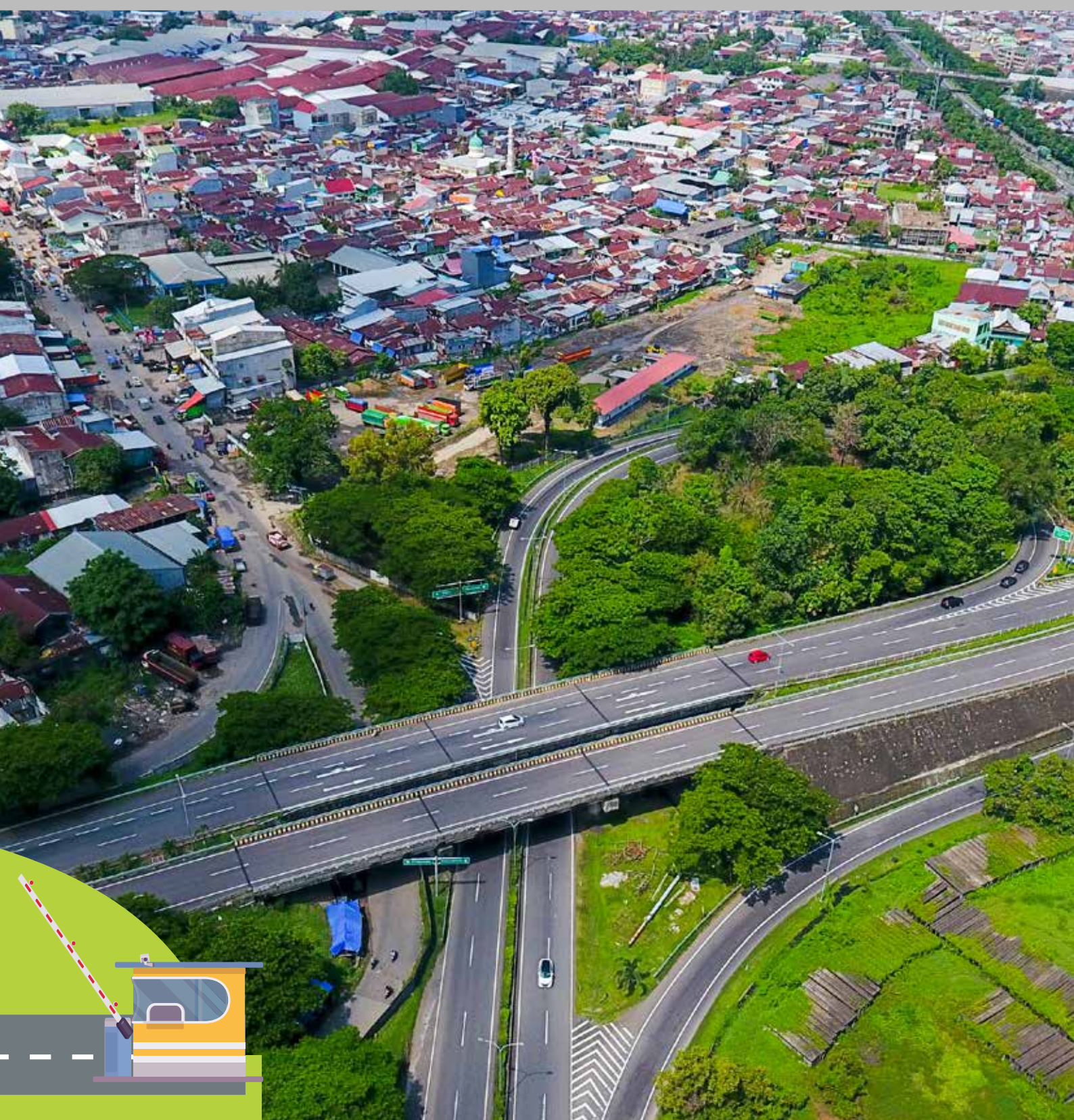
Impacts on the Financial Statements

The Company is currently evaluating the impact of changes in accounting standards that apply after the date of the financial statements and has not determined the impact on the Company's consolidated financial statements.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Perseroan merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan praktik bisnis terbaik, sebagai upaya menjaga kesinambungan usaha.

The implementation of corporate governance within the Company is a form of compliance with the applicable laws and regulations as well as the implementation of best business practices, as an effort to maintain business sustainability.





PT Nusantara Infrastructure Tbk (Perseroan) berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) guna mendukung pencapaian tujuan usaha Perseroan. Dengan begitu, upaya Perseroan menjadi perusahaan terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur dapat tercapai secara efektif dan berkesinambungan.

Melalui penerapan GCG secara konsisten, Perseroan tidak hanya mampu mewujudkan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usaha serta mengelola potensi risiko dengan baik, tetapi juga menjaga dan meningkatkan reputasi Perseroan. Komitmen ini sangat penting, sehingga Perseroan mampu memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aktivitas usaha yang dijalankan guna mencapai kinerja bisnis yang sehat, optimal, dan berkelanjutan. Prinsip GCG dimaksud, antara lain mengacu pada Pedoman Umum Penerapan GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Terdapat 5 (lima) prinsip yang dijadikan pedoman, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi atau kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Perseroan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Mengingat PT Nusantara Infrastructure Tbk merupakan perusahaan terbuka, Perseroan wajib memenuhi pedoman dalam yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

PT Nusantara Infrastructure Tbk is committed to implementing Good Corporate Governance in order to support the achievement of its business objective. That is how the Company can effectively and sustainably bring to life its stated goal of becoming the leading company in the field of investment and infrastructure development.

Through consistent implementation of GCG, the Company is not only able to remain in compliance in running business the effectively managing potential risks, but also to keep and enhance the Company's reputation. This commitment is crucial if the Company wishes to provide maximum added value for shareholders and other stakeholders.

The Company is committed to always implementing GCG principles in all of its business activities in order to achieve healthy, optimal, and sustainable business performance. The GCG principles referred to, among others, are the General Guidelines for the Implementation of GCG issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2006, and other relevant regulations.

There are 5 (five) principles that serve as guidelines, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company implements Good Corporate Governance pursuant to the a number of regulations, namely:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Markets;
3. National Guidelines of Good Corporate Governance Policy (KNKG);
4. Financial Services Authority Regulation (POJK) No.21/POJK.04/2015 on the Implementation of Open Corporate Governance Guidelines, and
5. Indonesia Stock Exchange regulations.

IMPLEMENTATION OF OPEN CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

Considering its status as an issuer, PT Nusantara Infrastructure Tbk shall comply with the internal guidelines issued by the Financial Services Authority as stipulated in the OJK Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for the Governance of Public Companies.

Informasi terkait penerapan pedoman tersebut yang telah dilakukan oleh Perusahaan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Information related how these guidelines have been implemented by the Company is described in the following table:

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perusahaan Implementation at the Company
	No.	Perihal About	
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: The Relation Between Public Company with the Shareholders in Securing Shareholder's Rights			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increase the Value of the General Meeting of Shareholders (GMS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi. An issuer shall have a method or technical procedure of voting, either open or closed, which prioritizes the independence and interest of shareholders.	Pelaksanaan RUPS Perseroan telah memenuhi prinsip dan rekomendasi. The Company has complied with Principle and Recommendation.
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer shall be present at the Annual GMS.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan diundang untuk datang ke setiap RUPS yang dilaksanakan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners are invited to attend every General Meeting of Shareholders held by the Company.
	1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS minutes shall be available on the Company's website for at least 1 (one) year.	Informasi pelaksanaan dan keputusan RUPS telah dipublikasikan di situs web Perseroan yang beralamat di: www.nusantarainfrastructure.com Information about the convention and decisions of the GMS has been published on the Company's website at: www.nusantarainfrastructure.com
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2: Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. An issuer shall have a policy of communication with the shareholders or investors.	Perseroan menyampaikan laporan secara berkala ke pada pemegang saham atau investor; dan lainnya . Media komunikasi yang digunakan, antara lain RUPS, <i>public expose</i> , investor dan <i>analyst meeting</i> . The Company submits periodic reports to shareholders or investors; and other reportss. The communication media used include the GMS, public expose, investors and analyst meetings.
	2.2	Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Ann Issuer shall disclose its communication policy with the shareholders or investors in their Website.	Laporan pelaksanaan tata kelola, informasi kinerja Perseroan, serta informasi penting lainnya untuk pemegang saham yang disyaratkan peraturan perundang-undangan telah dipublikasikan di situs web Perseroan yang beralamat di: www.nusantarainfrastructure.com The report on the implementation of governance, information on the Company's performance, as well as other important information for shareholders as required by laws and regulations have been published on the Company's website at: www.nusantarainfrastructure.com



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perusahaan Implementation at the Company
	No.	Perihal About	
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: The Functions and Roles of the Board of Commissioners			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka. The size of the Board of Commissioners shall be determined after the Issuer's condition is weighed	Prinsip dan rekomendasi ini telah dijalankan, seperti tercermin dalam komposisi Dewan Komisaris saat ini. The principle and recommendation have been implemented, as reflected in the current composition of the Board of Commissioners.
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the members of the Board of Commissioners shall be determined after the required diversity of skills, knowledge, and experience is weighed.	Prinsip dan rekomendasi ini telah dijalankan, seperti tercermin dalam komposisi Dewan Komisaris saat ini. The principle and recommendation have been implemented, as reflected in the current composition of the Board of Commissioners.
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Improving the quality of duties and responsibilities of the Board of Commissioners	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners shall have Self-Assessment policy to assess their own performance	Penilaian terhadap Dewan Komisaris secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The evaluation of the Board of Commissioners is indirectly made during the formulation of remuneration by the Nomination and Remuneration Committee.
	4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. The Self-Assessment policy shall be disclosed through the Annual Report of Issuer.	Laporan Tahunan telah memuat penilaian kinerja Dewan Komisaris yang terdapat dalam bab "Tata Kelola Perusahaan" ini. The Annual Report contains an assessment of the performance of the Board of Commissioners in the "Corporate Governance" chapter.
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners shall have a policy to regulate the resignation of members of the Board of Commissioners when they are involved in financial crimes.	Kebijakan pengunduran diri telah termuat dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. The resignation policy is already governed under the Work Guidelines for the Board of Commissioners.
	4.4	Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee shall formulate succession policy in the Nomination Process of members of the Board of Directors.	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang antara lain melakukan penilaian kepada calon anggota Direksi sebelum ditetapkan oleh RUPS. The Company already has a Nomination and Remuneration Committee which, among other things, evaluates candidates for members of the Board of Directors prior to determination by the GMS.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perusahaan Implementation at the Company
	No.	Perihal About	
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principles 5: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The size of the Board of Directors shall be determined after the Issuer's conditions and the effectiveness of its decision-making process is weighed.	Prinsip dan rekomendasi telah dijalankan, sehingga pengambilan keputusan berjalan efektif di Perseroan. The principles and recommendations have been implemented, meaning that that decision-making runs effectively in the Company.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Directors shall be determined after the diversity of skills, knowledge, and experience is weighed.	Perseroan telah memperhatikan keberagaman dalam penentuan komposisi Direksi. The Company has weighed the diversity aspect in determining the composition of the Board of Directors.
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance shall have expertise and/or knowledge in accounting.	Anggota Direksi yang membawahi bidang keuangan dan akuntansi memiliki keahlian dan pengalaman di bidang keuangan. The member of the Board of Directors in charge of finance and accounting has expertise and experience in finance.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improving the quality of duties and responsibilities of the Board of Directors	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors shall have a Self-Assessment policy to assess its own performance.	Penilaian terhadap Direksi secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The evaluation of the Board of Directors is indirectly made during the formulation of remuneration by the Nomination and Remuneration Committee.
	6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The Self-Assessment policy shall be disclosed through the Annual Report of Issuer	Penilaian terhadap Direksi secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The evaluation of the Board of Directors is indirectly made during the formulation of remuneration by the Nomination and Remuneration Committee.
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors shall have a policy related to the resignation of its members if they are involved in a financial crime.	Kebijakan pengunduran diri Direksi telah tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi. The resignation policy is already governed under the Work Guidelines for the Board of Directors.



Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perusahaan Implementation at the Company
	No.	Perihal About	
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Participation of Stakeholders			
<p>Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Principle 7: Improving aspects of Corporate Governance through stakeholder participation</p>	7.1	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>An Issuer shall have a policy to prevent Insider Trading.</p>	<p>Pereroan telah memiliki kebijakan terkait insider trading, yang terutama ditujukan demi terciptanya integritas dan tanggung jawab Perseroan kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>The Company already has a policy regarding insider trading, which is primarily aimed at creating the integrity and responsibility of the Company to shareholders and other stakeholders.</p>
	7.2	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i>.</p> <p>An Issuer shall have Anti-Corruption and Anti- Fraud policies.</p>	<p>Kebijakan terkait anti korupsi dan anti fraud Perseroan merupakan bagian dari Kode Etik dan Norma Perilaku yang telah diterapkan Perseroan.</p> <p>The Company's anti-corruption and anti-fraud policies are part of its Code of Ethics and Behavioral Norms.</p>
	7.3	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>An Issuer shall have a policy for the selection and development of suppliers and vendors capability.</p>	<p>Perseroan telah memiliki mekanisme seleksi pemasok seperti tertuang dalam kebijakan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh bagian <i>procurement</i>.</p> <p>The Company already has a supplier selection mechanism as stated in the policies and mechanisms for the procurement of goods and services. The procurement activities are carried out by the procurement department.</p>
	7.4	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>An Issuer shall have policy on the fulfillment of creditor's rights.</p>	<p>Perseroan memenuhi segala hak kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan antara Perseroan dengan kreditur.</p> <p>The Company fulfills all rights of creditors in accordance with the agreement between the Company and creditors.</p>
	7.5	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>An Issuer shall have whistleblowing system policy.</p>	<p>Perseroan telah memiliki pedoman <i>whistleblowing system</i> serta menjalankannya sebagai sistem pelaporan pelanggaran.</p> <p>The Company already has a whistleblowing system guideline and runs it as a violation reporting system.</p>
	7.6	<p>Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>An Issuer shall have a policy on long-term incentives to the Board of Directors and the Employees.</p>	<p>Perseroan telah memiliki mekanisme pemberian insentif jangka panjang, antara lain berupa bonus, kesehatan, serta manfaat pensiun.</p> <p>The Company already has a mechanism for providing long-term incentives, including bonuses, health, and pension benefits.</p>
	Aspek 5: Keterbukaan Informasi Aspect 5: Improving Information Transparency		
<p>Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi</p> <p>Principle 8: Improve the Implementation of Information Transparency.</p>	8.1	<p>Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>An Issuer shall utilize information technology more broadly, beyond Website, as the medium of information transparency.</p>	<p>Selain menggunakan situs <i>web</i>, keterbukaan informasi Perseroan juga dilaksanakan melalui <i>investor meeting</i> maupun paparan publik dengan teknologi digital (<i>virtual</i>) serta media sosial: <i>instagram</i>, <i>facebook</i> dan <i>twitter</i>.</p> <p>In addition to its official website, the Company's information is also disclosed through investor meetings and public exposures with digital (<i>virtual</i>) technology and social media: <i>Instagram</i>, <i>Facebook</i> and <i>Twitter</i>.</p>

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perusahaan Implementation at the Company
	No.	Perihal About	
	8.2	<p>Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>An Issuer's Annual Report shall disclose the final beneficiary of at least 5% share ownership, beside the disclosure of the final beneficiary through the Main and Controlling Shareholders.</p>	<p>Laporan tahunan telah mengungkapkan komposisi pemegang saham, baik pemilik manfaat akhir maupun pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan 5% lebih.</p> <p>The annual report discloses the composition of shareholders, both ultimate beneficial owners and community shareholders with ownership of more than 5%.</p>

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA

Struktur GCG

Struktur GCG Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS memegang peranan sebagai organ tertinggi dalam struktur yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan.

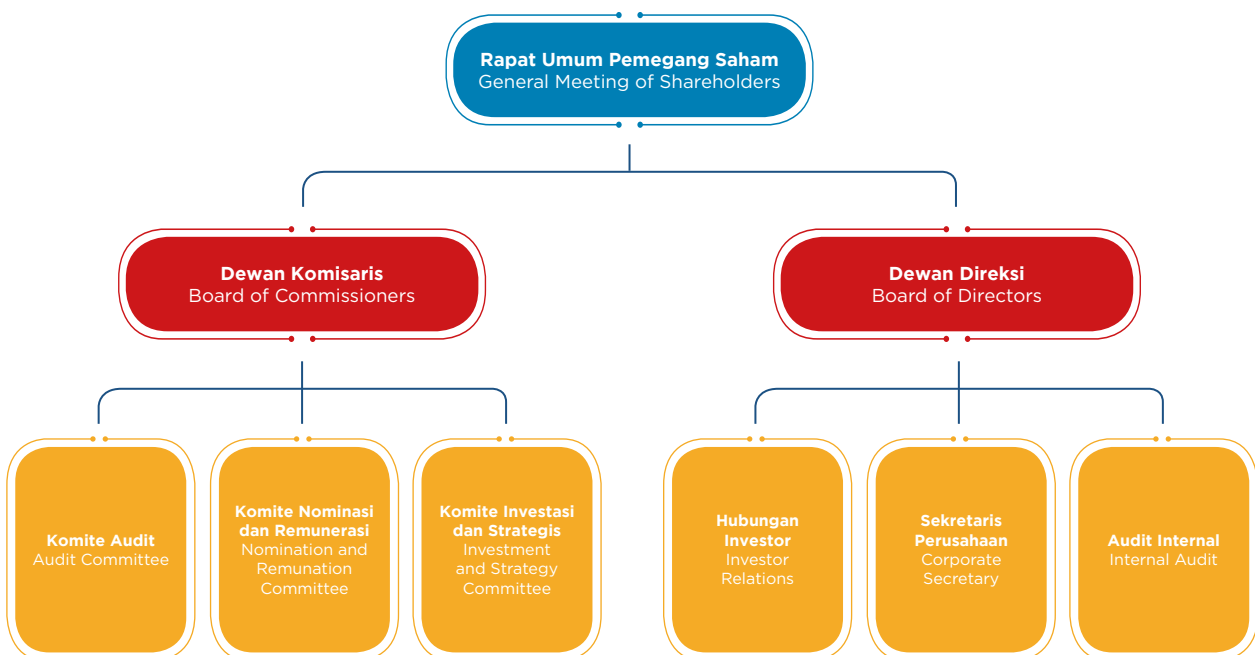
Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berperan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan dan menjadi perwakilan Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND POLICY

GCG Structure

The GCG structure within the Company consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The GMS has a role as the highest instrument in the structure that has special power not owned by the Board of Commissioners or Board of Directors do within the specified limits.

The Board of Commissioners is the Company's instrument that carries out the supervisory function and provides advice to the Board of Directors. The Board of Directors is the Company's instrument that has the duties and responsibilities to manage and administer the Company and serves as the Company's representative inside and outside the court.





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan

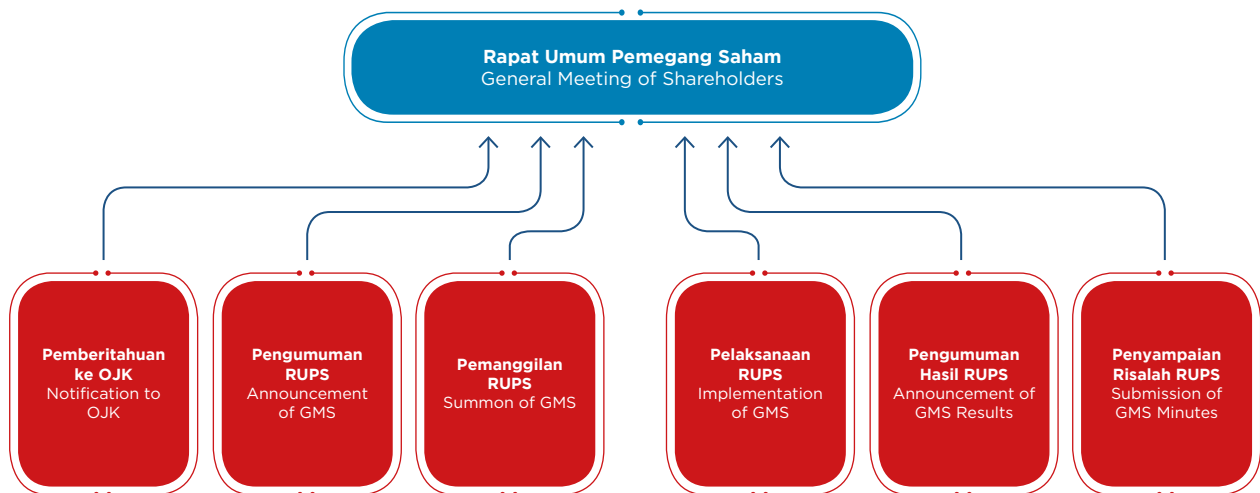
Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2021

Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diperbarui dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 serta sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Keterlibatan Pihak Independen

Perhitungan suara, pencatatan, dan penyusunan berita mata acara dilakukan oleh Notaris.

Rangkaian Pelaksanaan RUPS



GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Convention of 2021 GMS

In 2021, the Company convened 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

Annual GMS

Mechanism for the Holding of Annual GMS 2020

The convention of GMS by the Company complied with the mechanism stated in the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Plans and Organizing of the General Meeting of Shareholders for Public Company and as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017.

Involvement of Independent Party

The calculation of votes, recording, and preparation of the minute of meeting were carried out by the Notary.

Stages of GMS Convention

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2021 **Stages of Implementing the 2021 Annual GMS**

Kegiatan Activities	Pelaksanaan Implementation
Pemberitahuan kepada OJK Notification to OJK	Pemberitahuan melalui surat dengan nomor 020/NI-CORSEC/VII/2021 disampaikan kepada OJK pada 6 Juli 2021.
Pengumuman RUPS GMS Announcement	13 Juli 2021 July 13, 2021
Pemanggilan RUPS GMS Summon	28 Juli 2021 July 28, 2021
Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	19 Agustus 2021 August 19, 2021
Pengumuman Hasil RUPS GMS Result Announcement	23 Agustus 2021 August 23, 2021
Penyampaian Risalah RUPS Submission of GMS Minutes	17 September 2021 September 17, 2021

Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan (RUPST) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

Agenda, Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS

Pada tahun 2021, Persroan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada 19 Agustus 2021 yang telah dihadiri oleh pemegang 14.995.347.081 lembar saham dan telah mewakili 86,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Q and Answer Session

Prior to making a decision, the Chairperson of the Annual GMS (AGM) shall give an opportunity for the Shareholders and/or the proxies of the Shareholders who are present both physically and electronically to ask questions in each discussion on the agenda of the AGMS. There was no question asked by the Shareholders and/or their proxies at each agenda of the AGMS.

Decision Making Mechanism

Decisions are made by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision shall be made by voting.

Before the question and answer session, the Chairman of the AGMS said that to make it easier for the Shareholders of the Company to participate in the discussion of the First Agenda, the question and answer and decision making for the First Agenda will be held right after the discussion of the Second Agenda, considering that the material from these two agenda items are closely related.

Agenda, Resolutions and Realization of GMS Results

In 2021, the Company convened the Annual GMS on August 19, 2021 which was attended by holders of 14,995,347,081 shares and represented 86.55% of all shares with valid voting rights issued by the Company.



Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results:	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1 Agenda 1			
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020	Suara Setuju: 14.995.347.081 = 100% Suara Tidak Setuju: 0 = 0% Suara Abstain: 300.000 = 0%	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; dan	Berlaku saat keputusan diambil.
Approval of the Company's Annual Report, including the Ratification of the Annual Financial Statements and the Oversight Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2020	Agreed: 14,995,347,081 = 100% Disagreed: 0 = 0% Abstain: 300.000 = 0%	Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2020, including the Company's Board of Directors Annual Report, and ratified the Oversight Report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 which had been audited by the Accounting Firm Public Purwantono, Sungkoro & Surja (Members of Ernst & Young Global Limited) in accordance with their report with the opinion: "The consolidated financial statements are present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2020, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards"; and	Valid upon decision.
		Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.	Berlaku saat keputusan diambil.
		Approved the granting of full release and discharge of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and oversight actions during the 2020 financial year to the extent that their actions are reflected in the Company's Annual Report.	Valid upon decision.

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results:	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 2 Agenda 2			
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020	Suara Setuju: 14.995.346.981 = 99,999% Suara Tidak Setuju: 100 = 0,000% Suara Abstain: 1.771.371.131 = 0,001%	Menyetujui penggunaan akumulasi laba hingga akhir tahun 2020 Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp.583.337.925.169 (lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah), yang terdiri dari laba bersih sebesar Rp.69.392.144.520 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh Rupiah) dan saldo laba sebesar Rp.513.945.780.649 (lima ratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut: - sebesar Rp.693.921.445 (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas; - sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.	Manajemen telah merealisasikannya sesuai dengan keputusan RUPS.
Approval of the allocation of the Company's Net Profit for the Financial Year ended December 31, 2020	Agreed: 14,995,346,981 = 99.999% Disagreed: 100 = 0.000% Abstain: 1,771,371,131 = 0.001%	Approved the allocation of accumulated profits until the end of 2020 Attributable to Owners of the Parent Entity to the amount of Rp.583,337,925,169 (five hundred eighty three billion three hundred thirty seven million nine hundred twenty five thousand one hundred sixty nine Rupiah), which consisted of net profit of Rp.69,392,144,520 (sixty-nine billion three hundred ninety-two million one hundred forty-four thousand five hundred and twenty Rupiah) and retained earnings of Rp.513,945,780,649 (five hundred thirteen billion nine hundred forty-five million seven hundred eighty thousand six hundred forty nine Rupiah) as follows: - Rp.693,921,445 (six hundred ninety-three million nine hundred twenty-one thousand four hundred and forty-five Rupiah) would be allocated as a mandatory reserve, in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law; - the remainder would be set aside as other reserves in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law which can be used for the Company's needs including business development, working capital, social and future dividend distribution; and for the purposes of the Company's interests and due to the Company's ongoing expansion, the Company will not distribute dividends to the Company's shareholders.	Management has realized it in accordance with the decision of the GMS.



Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results:	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 3 Agenda 3			
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	Suara Setuju: 14.995.347,081 = 100% Suara Tidak Setuju: 0 = 0% Suara Abstain: 300.100 = 0%	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk; dan	Manajemen telah merealisasikannya sesuai dengan keputusan RUPS.
Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2021	Agreed: 14,995,347,081 = 100% Disagreed: 0 = 0% Abstain: 300,100 = 0%	Delegated authority and power to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm that will audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 and determine the amount of audit fee for the appointed public accountant;	Management has realized it in accordance with the decision of the GMS.
		Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya. Delegated authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Substitute Public Accounting Firm if for whatsoever reason based on the provisions of the Capital Market regulations or other applicable laws and regulations, the appointed Public Accounting Firm fails to complete the audit work.	Manajemen telah merealisasikannya sesuai dengan keputusan RUPS. Management has realized it in accordance with the decision of the GMS.
Mata Acara 4 Agenda 4			
Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021	Suara Setuju: 14.995.341.581 = 99,999% Suara Tidak Setuju: 5.500 = 0,001% Suara Abstain: 300.000 = 0,000%	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	Manajemen telah merealisasikannya sesuai dengan keputusan RUPS.
Determination of duties and authorities as well as salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, and salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year	Agreed: 14,995,341,581 = 99.999% Disagreed: 5,500 = 0.001% Abstain: 300,000 = 0.000%	Approved to give authority to the Nomination and Remuneration Committee, whose function in this case is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the duties and authorities along with honorarium or salary, as well as other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2021 financial year with due regards on the Company's financial condition.	Management has realized it in accordance with the decision of the GMS.

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results:	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 5 Agenda 5			
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("PUT II")	Suara Setuju: - Suara Tidak Setuju: - Suara Abstain: -	Bahwa Mata Acara Rapat Kelima, bersifat pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("PUT II"), maka tidak ada pengambilan keputusan ataupun pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima.	Berlaku saat keputusan diambil.
Accountability Report of Realization of the Use of Funds from the Company's Limited Public Offering II ("PUT II")	Agreed:- Disagreed Votes:- Abstain:-	As the Fifth Meeting Agenda is a report on the Realization of the Use of Funds from the Company's Limited Public Offering II ("PUT II"), there is no decision making or voting in connection with the Fifth Meeting Agenda.	Valid upon decision.
Mata Acara 6 Agenda 6			
Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.	Suara Setuju: 14.995.347.081 = 100% Suara Tidak Setuju: 0 = 0% Suara Abstain: 300.000 = 0%	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut.	Manajemen telah merealisasikannya sesuai dengan keputusan RUPS.
Approval to make adjustments to the Company's Articles of Association in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.	Agreed: 14,995,347,081 = 100% Disagreed: 0 = 0% Abstain: 300,000 = 0%	Approved the proposed changes to the Company's Articles of Association, in order to comply with Financial Services Authority (OJK) Regulation No 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Convention of the GMS of Public Companies and its amendments or renewals or other readings as specified in the Regulation.	Management has realized it in accordance with the decision of the GMS.
		Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Manajemen telah merealisasikannya sesuai dengan keputusan RUPS.
		Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every necessary action pertaining to the decision, including but not limited to stating/writing the decision in deeds made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Articles of Association of the Company and its amendments or updates, and later to deliver notification of the resolutions of this Meeting to the competent authorities, and to take all and every necessary action thereto, in accordance with the prevailing laws and regulations.	Management has realized it in accordance with the decision of the GMS.



Pelaksanaan RUPS Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perseroan melaksanakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali, yakni RUPS Tahunan pada 19 Agustus 2020.

The Convention of The 2020 GMS

Throughout 2020, the Company held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS on August 19, 2020.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda, Resolutions and Realization

Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
Mata Acara 1 Agenda 1		
<p>Persetujuan Tahunan termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019</p> <p>Annual Report including the Ratification of the Annual Financial Report and the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2019</p>	<p>Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"</p> <p>Approved and accepted the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2019, including the annual report of the Company's Board of Directors, and ratified the supervisory duty report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report for the fiscal year ending on December 31, 2019, audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Members of Ernst & Young Global Limited) in accordance with the report with the opinion that stated: "the consolidated Financial Statement gives a fair view, and is free from material misstatements, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure, Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2019, as well as the financial performance and consolidated cash flow for the year then ended is in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards".</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
	<p>Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>Approve to grant full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners over their lawful management and supervising activities during the fiscal year 2019 to the extent that they are reflected in the Company's Annual Report.</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
Mata Acara 2 Agenda 2		
<p>Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>Approval of the use of Net Profit for the Fiscal Year Ending on December 31, 2019</p>	<p>Menyetujui laba hingga akhir tahun 2019 sebesar Rp143.813.665.548 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga belas Juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan dari laba tersebut sebesar Rp1.438.136.556 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan Juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p> <p>Approved the profit until the end of 2019 amounting to Rp143,813,665,548 (one hundred forty three Billion eight hundred thirteen Million six hundred sixty-five Thousand five hundred and forty eight Rupiah) and from that profit amounting to Rp1,438,136,556 (one Billion four one hundred thirty eight Million one hundred thirty six Thousand five hundred and fifty six Rupiah) was allocated as a reserve fund, in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law.</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>

Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
Mata Acara 3 Agenda 3		
<p>Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</p> <p>Appointment of Public Accountant to conduct audit on the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2020</p>	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan menetapkan besaran jasa audit untuk Akuntan Publik yang ditunjuk; dan</p> <p>Grant the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will conduct an audit of the Company's financial statements for the financial year ending on 31 December, 2020 and determine the amount of audit services for the appointed Public Accountant; and</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.</p> <p>Grant the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accounting Firm if, for reasons based on the provisions of the Capital Market regulations or other applicable laws, the appointed Public Accounting Firm cannot carry out its duties.</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
Mata Acara 4 Agenda 4		
<p>Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2020</p> <p>Determination of duties and authority as well as salaries and benefits for members of the Company's Directors and salaries or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners for 2020</p>	<p>Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</p> <p>Approve to grant authority to the Nomination and Remuneration Committee, which in this case is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the honorarium or salary, as well as other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for the fiscal year 2020 with due regard to the Company's financial condition.</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
Mata Acara 5 Agenda 5		
<p>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") Perseroan</p> <p>Accountability Report of Realization of the Use of Funds from the Company's Limited Public Offering II ("PUT II").</p>	<p>Bahwa Mata Acara Rapat Kelima, bersifat pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") Perseroan, maka tidak ada pengambilan keputusan ataupun pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acar Rapat Kelima.</p> <p>As the Fifth Meeting Agenda is a report on the Realization of the Use of Funds from the Company's Limited Public Offering II ("PUT II"), there is no decision making or voting in connection with the Fifth Meeting Agenda.</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>



Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
Mata Acara 6 Agenda 6		
<p>Persetujuan atas perubahan Penggunaan Dana Hasil PUT II Perseroan</p>	<p>Menyetujui perubahan Penggunaan Dana Hasil PUT II Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dana yang diperoleh dari hasil PUT II akan digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekitar 87% akan digunakan oleh Perseroan sebagai setoran modal ke dalam PT Margautama Nusantara (MUN), Entitas Anak Perseroan, dan selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh MUN sebagai setoran modal ke dalam PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), Entitas Anak MUN, yang kemudian akan digunakan oleh BMN sebagai pendanaan untuk pelaksanaan proyek jalan tol di Makassar; - Sisanya, yaitu sekitar 13% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam rangka pengembangan usaha, yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pelaksanaan basic design, studi kelayakan, dan biaya uji tuntas. 	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p>
<p>Approval on the change on the Use of Funds of the Company's PUT II</p>	<p>Approve the change of the Use of Funds of the Company's PUT II as follows:</p> <p>The funds from PUT II results will be used for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Around 87% will be used by the Company as capital deposits for PT Margautama Nusantara (MUN), a Subsidiary of the Company, and subsequently the funds will be used by MUN as capital deposits for PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), a Subsidiary of MUN, which later will be used by BMN as funding for the implementation of toll road projects in Makassar; - The remaining funds, which is around 13%, will be used for the working capital of the Company and/or its Subsidiaries in the context of business development, which includes but not limited to basic design implementation costs, feasibility studies, and due diligence costs. 	<p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
Mata Acara 7 Agenda 7		
<p>Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang menggunakan Standar Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 ("KBLI 2017")</p>	<p>Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan dan untuk mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p>
<p>Approval of the Adjustment to Article 3 (three) of the Company's Articles of Association, in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services, in which the Company is required to have a Business Identification Number ("NIB") which uses the 2017 Indonesian Business Field Clarification Standards ("KBLI 2017")</p>	<p>Approve the adjustment of Article 3 (three) of the Company's Articles of Association, in accordance with and to comply with the Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services;</p>	<p>Approve the adjustment of Article 3 (three) of the Company's Articles of Association, in accordance with and to comply with the Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services;</p>
	<p>Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk, mempersiapkan dan menandatangani akta-akta, dokumen, dan pendaftaran yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>The Company's Board of Directors has the power with substitution rights to take necessary actions in connection with the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association, including preparing and signing deeds, documents, and registration required in accordance with the applicable regulations.</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>

Agenda	Keputusan Decision	Realisasi Realization
Mata Acara 8 Agenda 8		
<p>Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan</p> <p>Approval of the Change of the Company's Management</p>	<p>Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan</p> <p>To honorably discharge all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors and provide payment and discharge of responsibility (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and</p>	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
	<p>Selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Jose Ma. K. Lim sebagai Komisaris Utama; 2. Bapak Rodrigo E. Franco sebagai Komisaris; 3. Bapak Letnan Jenderal (Purn) Johny J. Lumintang sebagai Komisaris Independen; dan 4. Bapak Farid Harianto Sebagai Komisaris. <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak M. Ramdani Basri sebagai Direktur Utama; 2. Bapak Danni Hasan sebagai Direktur; 3. Bapak Benny S. Santoso sebagai Direktur; 4. Bapak Ridwan Irawan sebagai Direktur; 5. Bapak Denn Charly G. Espanola sebagai Direktur; 6. Bapak Amadeo N. Bejec sebagai Direktur; 7. Bapak Christopher Daniel C. Lizo sebagai Direktur; dan 8. Bapak Francis Emmanuel D. Rojas sebagai Direktur. <p>To appoint members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors with the following composition:</p> <p>Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jose Ma. K. Lim as President Director; 2. Rodrigo E. Franco as Commissioner; 3. Lieutenant General (Ret.) Johny J. Lumintang as Independent Commissioner; and 4. Farid Harianto as Commissioner. <p>Board Of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Ramdani Basri as President Director; 2. Danni Hasan as Director; 3. Benny S. Santoso as Director; 4. Ridwan Irawan as Director; 5. Denn Charly G. Espanola as Director; 6. Amadeo N. Bejec as Director; 7. Christopher Daniel C. Lizo as Director; And 8. Francis Emmanuel D. Rojas as Director 	<p>Telah direalisasikan dan dilembagakan secara hukum melalui Akta Notaris.</p> <p>Realized and legally institutionalized through a Notarial Deed.</p>
	<p>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil semua tindakan dan menyetujui hal-hal yang diperlukan, termasuk mempersiapkan dan menandatangani akta-akta, dokumen, dan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan yang diambil atas Mata Acara Rapat Kedelapan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Authorize the Board of Directors to take actions and approve necessary matters, including preparing and signing deeds, documents, and registration required in connection with decisions made on the Eighth Meeting Agenda, in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas menjalankan tanggung jawab secara kolektif dalam bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal dan menyeluruh.

Pembentukan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada berbagai kebijakan dan ketentuan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman Kerja (*Board Charter*)

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja yang acuan dalam memenuhi tanggung jawab, fungsi dan perannya di Perseroan. Penyusunan pedoman kerja dilakukan dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman GCG Perseroan.

Pedoman tersebut memuat sejumlah hal, seperti komposisi serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, persyaratan, hingga tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki Dewan Komisaris.

Persyaratan Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atas pailitnya suatu perusahaan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Salah satu anggota Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's Instruments in charge of carrying out collective responsibility in the field of supervision and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners also ensures that all levels of the Company's organization implement GCG principles optimally and thoroughly.

The Company established the Board of Commissioners by referring to the regulations and provisions, including the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 about Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Board of Commissioners Work Guidelines

The Board of Commissioners has a Work Guidelines as its guides in fulfilling its functions and roles in the Company. The work guidelines are formulated based on the Company's Articles of Association and GCG Guidelines.

The Guidelines contain matters such as the composition and mechanism for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners, requirements, up to the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners.

Criteria for Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners must meet the following criteria:

1. Have good behavior and moral standing;
2. Capable of performing legal actions; and
3. Has never been declared bankrupt or has never been a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five years before the appointment.
4. Has never been convicted of a criminal offense in the financial sector within 5 (five) years prior to his appointment; and
5. One of the Independent Commissioners must have an accounting and financial background.

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Composition and Term of Office of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2021 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Jose Ma. K. Lim	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara	31 Agustus 2018-RUPST 2023
	President Commissioner	Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	August 31, 2018-AGM 2023
Rodrigo Emanuel Franco	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara	31 Agustus 2018-RUPST 2023
	Commissioner	Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	August 31, 2018-AGM 2023
Johny J. Lumintang	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara	31 Agustus 2018-RUPST 2023
	Independent Commissioner	Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	August 31, 2018-AGM 2023
Farid Harianto	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara	19 Agustus 2020-RUPST2023
	Commissioner	Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 94 dated November 18, 2020, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	August 19, 2020-AGM 2023

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas utama yakni:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
- Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan; dan
- Mengawasi efektivitas penerapan GCG, pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal (*Internal Control*) yang diimplementasikan oleh Perseroan.

Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the following main duties:

- Supervise the Company's management policies conducted by the Board of Directors;
- Advise the Board of Directors in carrying out the management of the Company; and
- Monitor the effectiveness of GCG activities, administration of Risk Management, and Internal Control implemented by the Company.



Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab yang dimiliki Dewan Komisaris Perseroan adalah:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan;
3. Baik langsung maupun tidak langsung untuk tidak membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat; dan
4. Secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Wewenang Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh wewenang untuk:

1. Setiap waktu dalam jam kerja kantor, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
2. Memeriksa pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya;
3. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain;
4. Berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; dan
5. Berhak dan dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Landasan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014. Regulasi tersebut mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat paling sedikit satu (1) kali dalam 2 (dua) bulan.

Anggaran Dasar Perseroan juga mengatur tentang ketentuan rapat Dewan Komisaris, yaitu dilaksanakan setiap kali dianggap perlu melalui permintaan tertulis oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang anggota Direksi atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

Responsibilities of the Board of Commissioners

The responsibilities held by the Board of Commissioners in the Company are as follows:

1. Supervise management policies, management processes in general, both regarding the Company and the Company's business, and give advice to the Directors.
2. Maintaining the confidentiality of Company information and monitoring so that confidential information is not disclosed until the announcement of the issue to the public by authorized officials from the Company.
3. Either directly or indirectly does not make untrue statements about material facts or does not disclose material facts so that the statements do not mislead the state of the Company at the time it was made.
4. Individual or joint responsibility for losses of other parties as a result of violation of this provision.

Authorities of the Board of Commissioners

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners is supported with the authorities to:

1. At any time during office hours, to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company;
2. Checking books, letters and other evidence;
3. Check and match the situation of cash and others;
4. Have the right to know all actions taken by the Directors;
5. Have the right and can use independent professional services and/or form committees to assist the Board of Commissioners' duties.

Meeting of the Board of Commissioners

Policy

The basis for the implementation of the Board of Commissioners meeting refers to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014. The regulation requires the Board of Commissioners to hold a meeting at least once (1) in 2 (two) months.

The Company's Articles of Association also regulates the provisions of the Board of Commissioners meeting, which is held whenever deemed necessary by a written request by 1 (one) member of the Board of Commissioners or 1 (one) member of the Board of Directors or 1 (one) or shareholder who jointly represent 10% of the total shares with voting rights issued by the Company.

Agenda

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda	Agenda
28 Januari 2021 January 28, 2021	Pembahasan Kondisi Umum Perseroan	Discussion of the General Condition of the Company
25 Maret 2021 March 25, 2021	Pembahasan peresmian Jalan Tol Layang A. P. Pettarani Makassar	Discussion on the inauguration of the A. P. Pettarani Makassar Elevated Toll Road
24 Mei 2021 May 24, 2021	Pembahasan laporan tahunan dan rencana pelaksanaan RUPS	Discussion of the annual report and the plan GMS convention
26 Juli 2021 July 26, 2021	Pembahasan perkembangan proyek Perusahaan dan Anak Usaha	Discussion on the development of projects of the Company and Subsidiaries
23 September 2021 September 23, 2021	Pembahasan Laporan Keuangan per 30 September 2021	Discussion on Financial Statements as of September 30, 2021
25 November 2021 November 25, 2021	Pembahasan pelaksanaan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2021	Discussion on the implementation of the audit of the Financial Statements December 31, 2021

Agenda

Throughout 2021, the Board of Commissioners held 6 (six) internal meetings with the following details on dates and agenda:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Rincian kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Attendance of Members of the Board of Commissioners in Internal Meeting

Details of the attendance of members of the Board of Commissioners in internal meetings are described in the table below.

Tanggal Date	Jose Ma. K. Lim Komisaris Utama President Commissioner	Rodrigo Emanuel Franco Komisaris Commissioner	Johny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason for not attending
28 Januari 2021 January 28, 2021	✓	✓	✓	✓	-
25 Maret 2021 March 25, 2021	✓	✓	✓	✓	-
24 Mei 2021 May 24, 2021	✓	✓	✓	✓	-
26 Juli 2021 July 26, 2021	✓	✓	✓	✓	-
23 September 2021 September 23, 2021	✓	✓	✓	✓	-
25 November 2021 November 25, 2021	✓	✓	✓	✓	-



Frekuensi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan RUPS

Frequency of Attendance of Members of the Board of Commissioners in Internal Meetings and GMS

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			RUPS GMS		
	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance (%)	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance (%)
Jose Ma. K. Lim	6	6	100	1	1	100
Rodrigo E. Franco	6	6	100	1	1	100
Johny J. Lumintang	6	6	100	1	1	100
Farid Harianto	6	5	83	1	1	100

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Perseroan memastikan komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dapat menunjang Perseroan mencapai kinerja yang optimal. Komitmen dan upaya Penerapan tersebut sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Diversity of the Board of Commissioners

The Company ensures that the composition of the Board of Commissioners has a variety of expertise, knowledge, and experience that can support the Company in achieving optimal performance from various sides. The commitment and efforts are in accordance with the recommendations of the Financial Services Authority, which are contained in the Attachment of the Financial Services Authority Circular Letter No 32/SEOJK.04/2015 on Good Corporate Governance Guidelines for Public Company.

Nama Name	Warga Negara Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Jose Ma. K. Lim	Filipina Phillippines	Sarjana Ilmu Filsafat dan Magister Administrasi Bachelor of Philosophy and Master of Business Administration	Administrasi Bisnis, Filosofi Business Administration, Philosophy	69 tahun 69 years old	Laki-laki Male
Rodrigo E. Franco	Filipina Phillippines	Sarjana Manajemen Bisnis dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Business Management and Master of Business Administration	Manajemen Bisnis, Administrasi Business Management, Business Administration	62 tahun 62 years old	Laki-laki Male
Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Indonesia	Akademi Militer Military Academy	Kemiliteran, Hukum Military, Law	75 tahun 75 years old	Laki-laki Male
Farid Harianto	Indonesia	Sarjana Teknik Elektro, Master of Applied Economics and Managerial Science, dan Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science	Ekonomi, Keuangan Economics, Finance	69 tahun 69 years old	Laki-laki Male

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Informasi terkait hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris di Perseroan lain berupa rangkap jabatan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management at Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As member of Board of Commissioners	Sebagai Direksi As member of Board of Directors
Jose Ma. K. Lim	Komisaris Utama President Commissioner	-	Presiden dan CEO PT Metro Pacific Investment Corporation President and CEO of PT Metro Pacific Investment Corporation
Rodrigo E. Franco	Komisaris Commissioner	Komisaris PT Margautama Nusantara Commissioner of PT Margautama Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan CEO Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) (2016-sekarang) • Presiden & CEO NLEX Corporation (sebelumnya Manila North Tollways Corporation atau MNTC) • President and CEO of Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC) (2016-present) • President & CEO of NLEX Corporation (formerly Manila North Tollways Corporation or MNTC)
Johny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Utama PT Borneo Indobara President Commissioner of PT Borneo Indobara	-
Farid Harianto	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk. • Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk. • Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika. • Komisaris PT Tripatra Engineering. • Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera. • Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk. • Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk. • Independent Commissioner of PT Indika Energy Tbk. • President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika. • Commissioner of PT Tripatra Engineering. • Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera. • Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk. 	-

Independensi Komisaris Independen

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, tidak ada Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, sehingga informasi tidak dapat disampaikan.

Transparency of Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Information about the management relationship of members of the Board of Commissioners in other companies in the form of concurrent positions is described in the table below:

Independency of Independent Commissioner

Until the end of the 2021 financial year, none of the Independent Commissioners has served for more than 2 (two) terms, this information is unavailable.



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2021

Sepanjang tahun buku 2021, telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu melakukan pengawasan dan pemberian arahan hingga masukan kepada Direksi. Berbagai tugas dan tanggung jawab pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 antara lain menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh anggota Dewan Komisaris, menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk memberikan masukan dan saran kepada Direksi, penyampaian rekomendasi dan arahan kepada Direksi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Perseroan senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Perseroan dan menunjang pertumbuhan bisnis yang terus berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan menjalankan upaya peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris melalui pengembangan kompetensi, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2021, tidak ada Dewan Komisaris yang mengikuti pelatihan maupun pengembangan kompetensi, mengingat padatnya penugasan di Perseroan.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Pelaksanaan kegiatan orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru Perseroan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Perseroan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun program orientasi tersebut, antara lain meliputi visi dan misi Perseroan, kode etik, serta anggaran dasar. Pada tahun 2021, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada anggota Direksi baru.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Dewan Komisaris, dilakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui proses evaluasi. Penilaian tersebut dilakukan secara berkala dengan mengkaji hasil pencapaian tugas dan tanggung jawab serta peran serta padanya dalam kinerja Perseroan di sepanjang tahun buku.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2021

Throughout the 2021 fiscal year, the Board has discharged its functions and responsibilities, which was to supervise and provide direction and input to the Board of Directors. The discharged supervisory duties and responsibilities of the Board of Commissioners throughout 2021 included holding coordination meetings with all members of the Board of Commissioners, attending joint meetings with the Board of Directors to provide input and suggestions to the Board of Directors, giving verbal and written recommendations and directions to the Board of Directors.

Competency Development of the Board of Commissioners

Policy

The Company always supports efforts to improve the quality of the performance of the Board of Commissioners in order to improve the quality of the Company's performance and support sustainable business growth. Therefore, the Company makes efforts to improve the performance quality of the Board of Commissioners through competency development, held both by internal and external parties.

Realization of Competency Development

Throughout 2021, none of embers of the Board of Commissioners participated in training or competency development due to heavy load of work.

Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners

The orientation program for new members of the Company's Board of Commissioners aims to give an insight into the Company, which will allow them to do their duties effectively and efficiently. The orientation program covers, among other subjects, the Company's vision and mission, code of ethics, and articles of association. In 2021, the program was not held since the Board of Commissioners did not have any new member.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

In order to improve the quality of the performance of the Board of Commissioners, an assessment of its performance is made through an evaluation process. The assessment is made periodically by reviewing the results of duties and responsibilities and participation in the Company's performance throughout the financial year.

Prosedur Penilaian

Penilaian dalam bentuk evaluasi dilakukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan regulasi dan pedoman kerja, seperti pelaksanaan kegiatan rapat dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Termasuk di dalamnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2021 dinilai telah cukup baik. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta wewenang oleh Dewan Komisaris mampu mendukung Perseroan mempertahankan kinerja yang cukup stabil di tengah kondisi yang bergerak dinamis.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) komite: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi dan Strategi. Setiap tahun, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi komite-komite tersebut sebagai upaya pengembangan yang berkelanjutan.

1. Komite Audit

Berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penerapan pengendalian internal telah berjalan baik, proses audit internal dan eksternal telah sesuai dengan standar yang ada, serta hasil temuan audit telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berperan membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan penetapan terkait nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. Komite Investasi dan Strategi

Berperan membantu Dewan Komisaris untuk memberikan masukan, kajian, serta perencanaan dan pengawasan terhadap inisiatif pengembangan usaha Perseroan dalam upaya penerapan kebijakan investasi Perseroan.

Assessment Procedure

The assessment in the form of evaluation is made by the shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). Furthermore, the results of the assessment are used as one of the considerations in determining the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners.

Assessment Criteria

The evaluation criteria for the Board of Commissioners refer to regulatory provisions and work guidelines, such as meeting implementation and the implementation of their respective duties and responsibilities. This includes the implementation of good corporate governance.

Assessment Result

Based on the evaluation results, the performance of the Board of Commissioners throughout 2021 was considered good. The implementation of duties, responsibilities and authorities by the Board of Commissioners was supportive of the Company in maintaining a fairly stable performance amidst dynamic landscape.

Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In discharging its duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Investment and Strategy Committee. Every year, the Board of Commissioners assesses the implementation of the functions of these committees as a sustainable development effort.

1. Audit Committee

Plays a role in assisting the Board of commissioners to ensure that the preparation of Financial Statements has been carried out fairly and in accordance with the applicable accounting principles, the implementation of internal control runs well, the internal and external audit process is in accordance with the prevailing standards, and the audit findings have been properly followed up.

2. The Nomination and Remuneration Committee

Plays a role in assisting the Board of Commissioners in carrying out decisions related to the nomination and remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

3. Investment and Strategy Committee

Plays a role in assisting the Board of Commissioners in providing inputs, reviews, and planning and supervision of the Company's business development initiatives in an effort to implement the Company's investment policies.



Prosedur Penilaian

Penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan tugas pada tahun buku.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan oleh Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian kepada komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain tingkat kehadiran dalam rapat internal maupun rapat bersama Dewan Komisaris. Selain itu, pelaksanaan tugas serta masukan atau rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Dewan Komisaris, komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Komite-komite tersebut telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, sehingga mendukung pencapaian kinerja Perseroan.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap pengurusan dan pengelolaan Perseroan, memastikan aktivitas bisnis usaha Perseroan dapat berjalan dengan baik, serta bertugas menjadi perwakilan Perseroan.

Pembentukan Direksi Perseroan, mengacu pada berbagai kebijakan dan ketentuan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman Kerja Direksi

Untuk mendukung Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Direksi telah memiliki pedoman kerja yang menjadi acuan dalam memenuhi fungsi dan perannya di Perseroan. Pedoman kerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 POJK No. 33 tahun 2014 dan telah tercantum dalam Manual GCG Perseroan.

Pedoman kerja tersebut mengatur berbagai hal terkait Direksi, antara lain: komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi, persyaratan, tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi, serta rapat Direksi.

Assessment Procedure

The assessment of the committees under the Board of Commissioners is made collegially by the Board of Commissioners, taking into account the realized task implementation in the financial year.

Assessment Criteria

The criteria used by the Board of Commissioners in making assessments of the committees under the Board, include the level of attendance at internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners. Other criteria are the implementation of duties and input or recommendations submitted to the Board of Commissioners.

Assessment Result

Based on the assessment and evaluation results by the Board of Commissioners, the committees under the Board of Commissioners have carried out their functions, duties and responsibilities well and delivered effective and efficient performance. The committees have provided input and recommendations to the Board of Commissioners, supporting the achievement of the Company's performance.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is one of the Company's Instruments with the duties, responsibilities and authority over the management of the Company, ensures the performance of the Company's business activities, and serves as the Company's representative.

The basis for the formation of the Board of Directors refers to the applicable policies and regulations, such as Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Guidelines for the Board of Directors

To support itself in discharging their duties and responsibilities, the Board of Directors has a Work Guidelines which serves as guidelines for the Board of Directors in fulfilling its functions and roles in the Company. The Board of Directors Work Guidelines are formulated as stipulated in the provisions of Article 35 POJK No.33 of 2014 and have been listed in the Company's GCG Manual.

These Work Guidelines regulate matters related to the Board of Directors, including the composition, appointment and dismissal of the Board of Directors, requirements, duties, responsibilities, authority, and the Board of Directors' meeting.

Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Persyaratan Direksi

Terkait komposisi serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Perusahaan mengacu pada beberapa dasar berikut:

1. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan;
2. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi Perusahaan yang sahamnya tercatat di pasar modal BEI, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; dan
4. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan sehari-hari.

Persyaratan Direksi

Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan wajib, yaitu:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atas pailitnya suatu perusahaan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Hingga akhir tahun 2021, susunan Direksi Perseroan terdiri dari 8 (delapan) orang dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang.

Composition, Appointment and Dismissal, and Criteria for the Board of Directors

Regarding the composition, appointment, and dismissal of the Board of Directors, the Company refers to the following basis:

1. The size of the Board of Directors should be adjusted to the complexity of the Company with due consideration to the effectiveness in decision making;
2. Members of the Board of Directors are chosen and terminated by GMS through a transparent process. For a company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), the assessment process of candidates for the Board of Directors is conducted prior to the AGMS by the Nomination and Remuneration Committee;
3. The termination of the members of the Board of Directors by the GMS should be based on reasonable arguments after the person is given the chance to defend him/herself; and
4. All members of Company's Board of Directors should be domiciled in Indonesia, in a location that enables them to conduct daily tasks concerning the Company's management.

Criteria for Board of Directors

There are certain criteria that members of the Board of Directors must meet in terms of appointment, namely:

1. Have good behavior and moral standing;
2. Capable of performing legal actions;
3. Has never been declared bankrupt or has never been a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five years before the appointment.
4. Has never been sentenced for committing a criminal offense in the financial field within five years before the appointment.

Composition of the Board of Directors

Until the end of 2021, the Company's Board of Directors has a composition consisting of 8 (eight) members, one of which is the President Director. This amount has met the provisions stipulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, namely consisting of at least 2 (two) people.



Informasi terkait komposisi Direksi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Information on the Board of Directors' composition as of December 31, 2021, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan End of Tenure
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara	31 Agustus 2018 August 31, 2018	RUPST 2023 AGMS 2023
Danni Hasan	Direktur Director	Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta		
Ridwan Irawan	Direktur Director			
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director			
Amadeo N. Bejec	Direktur Director			
Christopher Daniel C. Lizo	Direktur Director			
Francis Emmanuel D. Rojas	Direktur Director			
Benny S. Santoso	Direktur Director	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara	19 Agustus 2020 August 19, 2020	RUPST 2023 AGMS 2023

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Tugas Direksi

Secara kolektif dan umum, Direksi memiliki tugas yakni:

1. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan serta membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
2. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan, yang meliputi seluruh aspek kegiatan Perusahaan;
4. Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan; dan
5. Membuat perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Duties of the Board of Directors

In collective and general manners, the Board of Directors has the following duties:

1. Develop the Company's vision, mission, and values as well as long-term and short-term programs to be discussed with and approved by the Board of Commissioners or the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association.
2. Manage and apply the Company's resources effectively and efficiently, with regards to the interests of the stakeholders.
3. Prepare and implement the Company's risk management system covering all aspects of the Company's activities.
4. Ensure smooth communications between the Company and stakeholders by empowering the function of the Corporate Secretary.
5. Establish a clear written plan with a focus on carrying out the requirements of corporate social responsibility.

Pembagian Tugas Masing-masing Anggota Direksi

Rincian pembagian tugas anggota Direksi diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Division of Scope of Work of the Board of Directors

Listed below are details of division of duties of members of the Board of Directors:

No.	Jabatan Position	Tugas	Duties
1	<i>CEO & President Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan strategis dari keseluruhan bisnis dengan bekerja sama dengan Dewan dan manajemen lainnya untuk menetapkan tujuan, rencana dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; Memastikan organisasi yang efektif dan efisien dalam hal struktur, tata kelola dan sumber daya manusia serta kemampuan kepemimpinan; dan Mewakili Perseroan kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Responsible for providing strategic leadership of the entire business by working closely with the Board and other management to establish short and long term goals, plans and strategies; Ensuring an effective and efficient organization in terms of structure, governance and human resources and leadership capabilities; and Representing the Company to shareholders, the Board of Commissioners and other stakeholders.
2	<i>Managing Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengelola dan mendorong proses pengambilan keputusan strategi Direksi ke seluruh grup bisnis Perseroan; Bertanggung jawab atas kinerja Perseroan selaras dengan tujuan, rencana, dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; Bertanggung jawab atas hasil keseluruhan pada kapitalisasi pasar, pertumbuhan, profitabilitas, dan keberlanjutan; dan Mengawasi kinerja Direksi secara keseluruhan dalam peran dan tanggung jawabnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Manage and encourage the strategic decision-making process of the Board of Directors throughout the Company's business groups; Be responsible for the Company's performance in line with its short and long term goals, plans and strategies; Responsible for the overall results on market capitalization, growth, profitability and sustainability; and Oversee the overall performance of the Board of Directors in their roles and responsibilities.
3	<i>Operation Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab penuh untuk memimpin keseluruhan operasi dalam seluruh sektor bisnis dan memastikan bisnis berjalan pada tingkat yang optimal dan efisien, berdasarkan kebijakan, sasaran, dan sasaran Perseroan; dan Mendorong pertumbuhan organik bisnis dan produktivitas dalam setiap sektor bisnis selaras dengan tujuan Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Fully responsible for leading the entire operation in all business sectors and ensuring the business runs at an optimal and efficient level, based on the Company's policies, goals and objectives; and Encouraging organic business growth and productivity in every business sector in line with the Company's objectives.
4	<i>Finance Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kepemimpinan pada strategi Keuangan dan Akuntansi kepada Dewan, untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan posisi strategis Perseroan; Mengambil kontrol keseluruhan dari fungsi akuntansi Perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengelolaan kas Perseroan untuk seluruh sektor bisnis; dan Bertanggung jawab untuk mencari sumber pendanaan pada kondisi paling optimal untuk proyek-proyek investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Provide leadership on Financial and Accounting strategies to the Board, to optimize the Company's financial performance and strategic position; Take overall control of the Company's accounting functions and take full responsibility for the Company's cash management policies for all business sectors; and Responsible for finding funding sources at the most optimal conditions for investment projects.
5	<i>Business Development Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mengeksplorasi dan menciptakan peluang bisnis baru yang selaras dengan tujuan dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; dan Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan bisnis melalui <i>merger & acquisitions</i>, serta ekspansi aset. 	<ol style="list-style-type: none"> Explore and create new business opportunities that are aligned with short-term and long-term goals and strategies; and Develop policies and strategies to develop business through Mergers & Acquisitions, as well as asset expansion.

Tanggung Jawab Direksi

- Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan, yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan GCG;
- Meminta persetujuan RUPS atas laporan tahunan dan meminta pengesahan RUPS atas laporan keuangan;

Responsibilities of the Board of Directors

- Arranges the responsibility for managing the Company in the form of Annual Report, which includes, among others, Financial Statements, Company activity reports, and GCG implementation reports;
- Request GMS approval for the Annual Report and GMS validation for the Financial Report;



3. Memastikan tersedianya laporan tahunan sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian;
4. Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan; dan
5. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perseroan yang kompeten dalam rangka menjaga kekayaan dan meningkatkan kinerja Perseroan serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan.

Wewenang Direksi

1. Direktur Utama memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak dan mengatasnamakan Direksi untuk mewakili Perseroan;
2. Direksi berwenang memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan Perseroan untuk melaksanakan tugas tertentu, tanpa pelimpahan tanggung jawab;
3. Apabila Direktur Utama tidak hadir, berhalangan hadir, atau berhalangan karena sebab apapun, dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak dan mengatasnamakan Direksi serta mewakili atau melakukan penyertaan modal ke dalam perusahaan lain. Dalam praktiknya, tindakan anggota Direksi tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Direktur Utama;
4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berwenang untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dengan harus memberikan surat kuasa yang menyatakan bahwa telah terjadi pelimpahan wewenang kepada pemegang kuasa tersebut.

Rapat Direksi

Kebijakan

Rapat Direksi diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling sedikit satu kali dalam dua bulan. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, rapat Direksi dilaksanakan setiap kali dianggap perlu melalui permintaan tertulis oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara yang telah ditempatkan oleh Perusahaan.

3. Ensuring the availability of Annual Report before the GMS is held, in accordance with applicable regulations so as to enable shareholders to make an assessment;
4. Carrying out its duties for the benefit of the Company, to achieve its goals and objectives, by complying with applicable laws and regulations as well as Articles of Association; and
5. Developing and implementing a competent internal control system in order to preserve wealth and improve Company performance and comply with regulations and laws.

Authorities of the Board of Directors

1. The President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors to represent the Company.
2. The Board of Directors has the authority to authorize committees to support his administration or to the Company's employees to conduct certain tasks, although the full responsibility thereof still resides with the Board of Directors.
3. If the President Director is absent for any reason, two members of the Board of Directors have the authority to act on behalf of the Board of Directors and represent or conduct capital participation in other companies. The action of the members of the Board of Directors must be approved in writing by the President Director.
4. Without prejudice to its responsibility, the Board of Directors has the authority to assign one or more proxies to act on behalf of the Board of Directors and for that purpose, the Board of Directors must draw up a power of attorney granting power to the proxy.

Board of Directors' Meeting

Policy

The Board of Directors' Meeting refers to the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 and is held at least once every two months. As stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors' Meeting is held every time it is deemed necessary through the written request from 1 (one) member of the Board of Directors or 1 (one) member of the Board of Commissioners or 1 (one) or more shareholders representing 10% of the Company's shares with voting rights.

Agenda

Sepanjang tahun 2021, Direksi menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Agenda

In 2021, the Board of Directors held 12 internal meetings with the description of the dates and agenda as follows:

Tanggal Date	Agenda	Agenda
28 Januari 2021 January 28, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
25 Februari 2021 February 25, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
25 Maret 2021 March 25, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
25 April 2021 April 25, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
26 April 2021 April 26, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
24 Mei 2021 May 24, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
24 Juni 2021 June 24, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
26 Juli 2021 July 26, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
25 Agustus 2021 August 25, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
23 September 2021 September 23, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
26 Oktober 2021 October 26, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
25 November 2021 November 25, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries
20 Desember 2021 December 20, 2021	Pembahasan kondisi Perseroan, <i>update</i> proyek-proyek, prospek sektor dan anak usaha	Discussion of the Company's condition, updates on current projects, prospects for the sector and its subsidiaries



Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal

Rincian kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Attendance of Members of the Board of Directors in Internal Meetings

Details of the attendance of members of the Board of Directors in internal meetings are described in the table below.

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo N. Bejec Direktur Director	Christopher Daniel C. Lizo Direktur Director	Francis Emanuel Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason for not Attending
28 Januari 2021 January 28, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25 Februari 2021 February 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25 Maret 2021 March 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25 April 2021 April 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
26 April 2021 April 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
24 Mei 2021 May 24, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
24 Juni 2021 June 24, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
26 Juli 2021 July 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25 Agustus 2021 August 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
23 September 2021 September 23, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
26 Oktober 2021 October 26, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25 November 2021 November 25, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
20 Desember 2021 December 20, 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Frekuensi Kehadiran dalam Rapat Internal dan RUPS**Frequency of Attendance at Internal Meetings and GMS**

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			RUPS GMS		
	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance (%)	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance (%)
M. Ramdani Basri	12	12	100	1	1	100
Danni Hasan	12	11	92	1	1	100
Ridwan Irawan	12	12	100	1	1	100
Denn Charly G. Espanola	12	12	100	1	1	100
Amadeo N. Bejec	12	12	100	1	1	100
Christopher Daniel C. Lizo	12	12	100	1	1	100
Francis Emmanuel D. Rojas	12	12	100	1	1	100
Benny S. Santoso	12	12	100	1	1	100

Keberagaman Komposisi Direksi

Perseroan memastikan komposisi Direksi memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dapat menunjang Perseroan mencapai kinerja optimal dari berbagai sisi. Komitmen dan upaya Perseroan tersebut diterapkan sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Diversity of the Board of Directors' Composition

The Company ensures that the Board of Directors' composition has a diversity of expertise, knowledge, and experience that can support the Company in achieving optimal performance from various sides. The Company's commitment and efforts are implemented in accordance with those listed in the recommendations of the Financial Services Authority in the Attachment to the Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Good Corporate Guidelines for Public Company.

Nama Name	Warga Negara Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
M. Ramdani Basri	Indonesia	Magister Kebijakan Publik dan Executive Education bidang Infrastruktur Ekonomi Master of Public Policies and Executive Education in Infrastructure Economy	Ekspansi dan diversifikasi organisasi, restrukturisasi organisasi, industri keuangan, pasar modal, manajerial Organizational expansion and diversification, organizational restructuring, financial industry, capital markets	60 tahun 60 years old	Laki-laki Male
Danni Hasan	Indonesia	Sarjana Teknik Kimia dan Magister Manajemen Industri Bachelor of Chemical Engineering and Master of Industrial Management	Ekspansi dan diversifikasi organisasi, restrukturisasi organisasi, industri keuangan dan perminyakan, pasar modal, manajerial Organizational expansion and diversification, organizational restructuring, financial and oil industry, capital markets, managerial	58 tahun 58 years old	Laki-laki Male
Ridwan Irawan	Indonesia	Sarjana Ekonomi dan Magister Internasional Banking & Finansial Services Bachelor of Economics and Master of International Banking & Financial Services	Akademisi, peneliti, industri keuangan, pasar modal, restrukturisasi organisasi, manajerial Academician, researcher, financial industry, capital market, organizational restructuring, managerial	55 tahun 55 years old	Laki-laki Male



Nama Name	Warga Negara Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Denn Charly G. Espanola	Filipina Phillipines	Sarjana Oseanografi Bachelor of Oceanography	Oseanografi Oceanography	51 tahun 51 years old	Laki-laki Male
Amadeo N. Bejec	Filipina Phillipines	Sarjana Akuntansi dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Accounting and Master of Business Administration	Akuntansi, Administrasi Bisnis Business Accounting, Business Administration	47 tahun 47 years old	Laki-laki Male
Christopher Daniel C. Lizo	Filipina Phillipines	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	Akuntansi Accounting	49 tahun 49 years old	Laki-laki Male
Francis Emmanuel D. Rojas	Filipina Phillipines	Sarjana Manajemen Bisnis dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor of Business Management and Master of Business Administration	Manajemen Bisnis, Administrasi Bisnis Business Management and Master of Business Administration	49 tahun 49 years old	Laki-laki Male
Benny S. Santoso	Indonesia	Pendidikan di Ngee Ann College, Singapura Education at Ngee Ann College, Singapore	Business Studies Business Studies	63 tahun 63 years old	Laki-laki Male

Transparansi Rangkap Jabatan Direksi

Informasi terkait hubungan kepengurusan anggota Direksi di Perseroan lain berupa rangkap jabatan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Transparency of Concurrent Position

Information on the management position of the Board of Directors' members in other companies in the form of concurrent position is described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management at Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As member of Board of Commissioners	Sebagai Direksi As member of Board of Directors
M. Ramdani Basri	Direktur Utama, CEO CEO, President Director	Komisaris di PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) Commissioner of PT Margautama Nusantara (2007-present)	-
Danni Hasan	Direktur Director	-	Direktur Utama di PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) President Director of PT Margautama Nusantara (2007 - present)
Ridwan Irawan	Direktur Director	-	<ul style="list-style-type: none"> Direktur PT Energi Infranasantara (2018-sekarang) Direktur Utama PT Portco Infranasantara (2020-sekarang) President Director of PT Energi Infranasantara (2018- present) President Director of PT Portco Infranasantara (2020-present)
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director	-	<ul style="list-style-type: none"> Country Head di Metro Pacific Tollways Corporation (2018-sekarang) Direktur Utama PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2017-sekarang) Country Head Metro Pacific Tollways Corporation (2018-present) President Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2017-present)

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management at Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As member of Board of Commissioners	Sebagai Direksi As member of Board of Directors
Amadeo N. Bejec	Direktur Director	Komisaris di PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (2021-sekarang) Commissioner of PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (2021-present)	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Keuangan di PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) (2017-sekarang) Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation (2003-sekarang) Finance Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) (2017-present) Vice President of Corporate Finance of NLEX Corporation (2003-present)
Christopher Daniel C. Lizo	Direktur Director	-	<ul style="list-style-type: none"> SVP - Chief Finance Officer di Metro Pacific Tollways Corporation (2009-sekarang) Chief Operating Officer dan Chief Finance Officer di MP Cala Holdings Inc. (2015-sekarang) Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation (2013-sekarang) Treasurer & Director di NLEX Corporation (2009-sekarang) Treasurer & Director di Tollways Management Corporation (2009-sekarang) SVP - Chief Finance Officer of Metro Pacific Tollways Corporation (2009-present) Chief Operating Officer & Chief Finance Officer of MP Cala Holdings Inc. (2015-present) Treasurer & Director of Cavitex Infrastructure Corporation (2013-present) Treasurer & Director of NLEX Corporation (2009 - present) Treasurer & Director of Tollways Management Corporation (2009-present)
Francis Emmanuel D. Rojas	Direktur Director	-	<p>Vice President of Business Development di Metro Pacific Tollways Corporation (2013-sekarang)</p> <p>Vice President of Business Development at Metro Pacific Tollways Corporation (2013-present)</p>
Benny S. Santoso	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-sekarang) Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-sekarang) Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-sekarang) Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-present) President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-present) Commissioner of PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-present) 	<p>Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (1994-sekarang)</p> <p>Director of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (1994-present)</p>



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan berbagai tugas dalam hal pengelolaan dan pengurusan Perseroan secara keseluruhan. Berbagai kebijakan strategis telah Direksi susun dan jalankan secara optimal, terutama dalam menghadapi imbas dari Covid-19 yang masih terasa hingga tahun buku. Kinerja Perseroan tetap stabil pada tahun buku.

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Perseroan terkait dengan pelaporan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Setiap perubahan kepemilikan, laporan disampaikan kepada Perseroan serta OJK.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja Direksi yang hasilnya kemudian akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penetapan remunerasi Direksi. Penilaian dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian Direksi dilaksanakan secara self assessment tanpa melibatkan pihak luar Perseroan. Prosedur penilaian Direksi berawal dari masukan Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Hasil penilaian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan pada RUPS.

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Perusahaan menggunakan sejumlah indikator sebagai kriteria, antara lain:

1. Pengelolaan Sektor Usaha yang Ada

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya mengembangkan kinerja sektor bisnis yang telah berjalan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2021

Throughout 2021, the Board of Directors has fulfilled its responsibilities by carrying out various tasks in terms of overall management and management of the Company. Various strategic policies have been formulated and implemented by the Board of Directors optimally, especially in dealing with the effects of Covid-19 which are still being felt until the financial year. The Company's performance remained stable in the financial year.

Share Ownership Reporting Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company's policies related to the reporting of share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors refer to OJK Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies. Every change of ownership, a report is submitted to the Company and OJK.

Evaluation of the Board of Directors' Performance

Performance evaluation of the Board of Directors is held periodically to evaluate the Board of Directors' performance, the results of which will be used as a consideration for determining the remuneration of the Board of Directors. The assessment is held by the Nomination and Remuneration Committee, which is subsequently carried out by the Board of Commissioners and the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.

Assessment Procedure and Implementation

The Board of Directors is evaluated using self-assessment without involving outside parties. The procedure for evaluating the Board of Directors begins with the input of the Nomination and Remuneration Committee, in accordance with the Financial Services Authority Regulation No 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The results of the assessment are submitted to the Board of Commissioners to be reported at the GMS.

Assessment Criteria

In assessing the Board of Directors' performance, the Company uses several indicators as criteria, namely:

1. Management of Existing Business Sectors

The Board of Directors is assessed based on its capability to develop existing business sectors, both vertically and horizontally.

2. Pengembangan Sektor Usaha Baru

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya melihat peluang pengembangan usaha di sektor usaha yang belum dibidangi oleh Perseroan.

3. Kinerja Bisnis Perusahaan yang Berkelanjutan

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga dan mengembangkan kinerja bisnis Perusahaan yang memiliki proyeksi jangka panjang.

4. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menerapkan pengelolaan organisasi Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan asas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kinerja Saham Perseroan dan Penghargaan atas Kinerja Saham

Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga dan meningkatkan kinerja saham Perusahaan, terutama kinerja yang memungkinkan saham Perusahaan mendapatkan penghargaan.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Direksi di sepanjang tahun 2021 dinilai cukup baik. Direksi telah mampu menjaga kinerja Perseroan yang cukup stabil di tengah kondisi ekonomi dan industri yang bergerak dinamis.

Penilaian Komite Di Bawah Direksi

Hingga berakhirnya tahun buku 2021, Direksi tidak membentuk komite untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, perihal ini tidak dapat disampaikan.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Kebijakan

Perseroan senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Perseroan dan menunjang pertumbuhan bisnis yang terus berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan menjalankan upaya peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris melalui pengembangan kompetensi, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal.

2. New Business Sector Development

The Board of Directors is assessed based on its ability to see opportunities for business development in sectors not covered by the Company.

3. Sustainable Business Performance

The Board of Directors is assessed based on its capability to maintain and enhance the long term performance of the Company's business

4. Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Directors is assessed based on its capability to run Company's operations in accordance with Good Corporate Governance principles and compliance with prevailing laws and regulations.

5. Share Performance and Appreciation for the Share Performance

The Board of Directors is assessed based on its capability to enhance the performance of the Company's shares, especially the performance of shares that allow the Company to garner awards.

Assessment Result

Based on the results, the performance of the Board of Directors throughout 2021 was considered good. The Board of Directors was able to maintain a stable performance amidst dynamic economic and industrial conditions.

Committee Assessment under the Board of Directors

Until the end of the 2021 financial year, the Board of Directors had not established any committee to support the implementation of its duties and responsibilities. Thus, this information is not available.

Board of Directors' Competence Development

Policy

The Company consistently supports the effort to improve the quality of the performance of the Board of Directors to improve the quality of the Company's performance and support sustainable business growth. The does the improvement effort through competency development, both held by internal and external parties.



Realisasi Pengembangan Kompetensi

Pada tahun buku 2021, anggota Direksi yang melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi adalah Ridwan Irawan, yaitu webinar dengan tema: “Diseminasi RUPTL PLN 2021-2030 (Sesuai Kepmen ESDM No.188.K/HK.02/MEM.L/2021)”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) di Jakarta, 5 Oktober 2021.

Orientasi Bagi Direksi Baru

Pelaksanaan kegiatan orientasi bagi anggota Direksi baru Perseroan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Perseroan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun program orientasi tersebut, antara lain meliputi visi dan misi Perseroan, kode etik, serta anggaran dasar.

Pada tahun 2021, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada anggota Direksi baru.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Agenda

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda	Agenda
28 Januari 2021 January 28, 2021	Laporan Manajemen tentang kondisi Perseroan dan portofolio proyek	Management Report on the condition of the Company and project portfolio
25 Maret 2021 March 25, 2021	Laporan Manajemen tentang kondisi Perseroan sejak isu Covid-19 dan pembahasan peresmian Ground Breaking Jalan Tol layang A. P. Pettarani Makassar	Management Report on updated condition of the Company since the Covid-19 issue and discussion of the Ground Breaking of the A. P. Pettarani Makassar Toll Road
24 Mei 2021 May 24, 2021	Pembahasan perkembangan portofolio proyek dan pengembangan bisnis	Discussion on project portfolio development and business development
26 Juli 2021 July 26, 2021	Pembahasan perkembangan proyek di sektor jalan tol Perseroan dan rencana pelaksanaan RUPS	Discussion of project developments in the Company's toll road sector and plans for GMS convention
23 September 2021 September 23, 2021	Pembahasan perkembangan portofolio proyek dan pengembangan bisnis	Discussion on project portfolio development and business development
25 November 2021 November 25, 2021	Pembahasan perkembangan portofolio proyek dan pengembangan bisnis	Discussion on project portfolio development and business development

Realization of Competency Development

In the 2021 financial year, the member of the Board of Directors who took competency development was Ridwan Irawan, in a webinar themed: “Dissemination of PLN RUPTL 2021-2030 (In accordance with ESDM Ministerial Decree No.188.K/ HK.02/ MEM.L/2021)”. The event was organized by the Directorate General of Electricity at the Ministry of Energy and Mineral Resources and PT PLN (Persero) in Jakarta, October 5, 2021.

Orientation for New Directors

Implementation of orientation activities for new members of the Company’s Board of Directors aims to give insight into the Company, so that they can do their duties effectively and efficiently. The orientation program covers, among other subjects, the Company’s vision and mission, code of ethics, and articles of association.

In 2021, the orientation was not held since the Board of Directors did not have any new member.

JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Agenda

Throughout 2021, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 6 (six) joint meetings with details on the dates and agenda as follows:

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Attendance of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Meeting

The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in joint meetings is described in the table below.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tanggal Date	Jose Ma. K. Lim Komisaris Utama President Commissioner	Rodrigo E. Franco Komisaris Commissioner	Johny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason for not Attending	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance (%)
28 Januari 2021 January 28, 2021	√	√	√	√	-	100
25 Maret 2021 March 25, 2021	√	√	√	√	-	100
24 Mei 2021 May 24, 2021	√	√	√	√	-	100
26 Juli 2021 July 26, 2021	√	√	√	√	-	100
23 September 2021 September 23, 2021	√	√	√	√	-	100
25 November 2021 November 25, 2021	√	√	√	√	-	100

Direksi

Board of Directors

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo N. Bejec Direktur Director	Christopher Daniel C. Lizo Direktur Director	Francis Emmanuel D. Rojas Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason for not Attending	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance (%)
28 Januari 2021 January 28, 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	-	100
25 Maret 2021 March 25, 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	-	100
24 Mei 2021 May 24, 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	-	100
26 Juli 2021 July 26, 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	-	100
23 September 2021 September 23, 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	-	100
25 November 2021 November 25, 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	-	100



NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Mekanisme nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, antara lain berlandaskan pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, proses nominasi, Komite tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ikut terlibat dalam pemberian rekomendasi.

Prosedur Penetapan Nominasi

Rangkaian proses penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 adalah:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Penetapan dan Prosedur

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan dan ditetapkan oleh RUPS dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara berkala Perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi pada kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan pada hasil kinerja, beban tugas dan tanggung jawab, kondisi operasional dan keuangan Perusahaan, serta tingkat remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis.

NOMINATION BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Policy

The nomination mechanism for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, among other regulations, is based on OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Having the, the nomination process, the Committee on the Nomination and Remuneration Committee is involved in giving recommendations.

Nomination Procedure

Elaborated below is the process of determining members of the Boards of Commissioners and Directors in accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014:

1. Compile the composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
2. Draft policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
3. Assist in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Develop a capacity development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
5. Review and propose candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Basis of Determination and Procedure

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS with reference to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, periodically evaluates the remuneration policies, amount, and structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors by adjusting its performance results, duties and responsibilities, operational and financial condition, as well as the remuneration level for the Board of Commissioners and the Board of Directors in companies with similar line of business.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dari Direksi

Terkait dengan besaran remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak menjabarkan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Remuneration Structure and Amount of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Regarding the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company has a policy to avoid describing the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Jose Ma. K. Lim Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√
Rodrigo E. Franco Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√
Johny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√
Farid Harianto Komisaris Commissioner		√		√		√		√		√		√
Direksi Board of Directors												
M. Ramdani Basri Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√
Danni Hasan Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Ridwan Irawan Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Denn Charly G. Espanola Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Amadeo N. Bejec Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Christopher Daniel C. Lizo Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Francis Emmanuel D. Rojas Direktur Director		√		√		√		√		√		√
Benny S. Santoso Direktur Director		√		√		√		√		√		√



ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan komite yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugasnya dipertanggung jawabkan kepada Dewan Komisaris. Dalam Perseroan, Komite Audit berperan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan telah memiliki aspek-aspek kewajaran dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, kesesuaian dari pelaksanaan dan tindak lanjut dari audit internal dan eksternal berdasarkan standar yang berlaku. Komite Audit bertanggung jawab dalam pemilihan auditor Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Audit yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Komite Audit menggunakan Piagam Komite Audit sebagai pedoman dan panduan dalam bekerja dengan isi mencakup antara lain struktur dan posisi Komite Audit, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, wewenang Komite Audit, mekanisme rapat, pelaporan, masa tugas, serta rencana tahunan Komite Audit.

Kualifikasi Keanggotaan dan Independensi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 55 tahun 2015 tentang jumlah Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan, komposisi Komite Audit di Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan susunan yang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak independen dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Pernyataan Independensi

Kriteria	Criteria	Johny J. Lumintang	Tavip Santoso	Tufrida Hasyim
Bukan merupakan orang dalam di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not an insider at Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, or other party providing audit services, non-audit services, and/or other consulting services to the Company within the past six months.	√	√	√
Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company's activities in the past six months.	-	√	√

SUPPORTING INSTRUMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee appointed by the Board of Commissioners and the implementation of its duties is accountable to the Board. Within the Company, the Audit Committee plays a role in supporting the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners and is responsible to ensure that the Financial Statements have aspects of fairness and conformity with applicable accounting principles, conformity of the implementation and followup of internal and external audits based on standards. The Audit Committee is responsible for selecting the Company's auditors as governed in POJK No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee.

Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is based on the work guidelines summarized in the Audit Committee Charter, which has been approved and endorsed by the Board of Commissioners. The Audit Committee uses the Audit Committee Charter as guidelines in working with contents covering, among others, the structure and position of the Audit Committee, membership requirements, duties, responsibilities, authority of the Audit Committee, meeting mechanisms, reporting, terms of office, and the Audit Committee's annual plan.

Membership Qualifications and Independence of the Audit Committee

As regulated in Article 4 POJK No. 55 of 2015 on the number of Audit Committee members consisting of at least 3 (three) members from the Independent Commissioners and a party from outside the Company, the composition of the Audit Committee in the Company has met these requirements, with a composition consisting of 1 Independent Commissioner and 2 independent parties with expertise in accounting and/or finance.

Statement of Independency

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Informasi terkait komposisi dan masa jabatan Komite Audit pada tahun 2020 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Periode Jabatan Service Period
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018	20 September 2018	RUPST 2023
Tavip Santoso	Anggota Member	Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018	September 20, 2018	AGMS 2023
Tufrida Hasyim	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 11 Januari 2021	11 Januari 2021	RUPST 2023
Farid Harianto	Anggota Member	Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated January 11, 2021	January 11, 2021	AGMS 2023

Composition and Terms of Office of the Audit Committee

Information on the composition and terms of office of the Audit Committee in 2021 are described in the following table:

Profil Komite Audit

Johny J. Lumintang

Ketua Komite Audit

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Farid Harianto

Anggota Komite Audit

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam laporan Tahunan ini.

Tavip Santoso

Anggota Komite Audit

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi
Usia Age	57 tahun pada tahun buku 2021	57 years old in fiscal 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Deed of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018.	Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Terbuka (1990) Master of Business Administration dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor Degree in Business Administration from Universitas Terbuka (1990) Master of Business Administration from Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Senior Manager, PT DE SUDRADJAT (2015 - sekarang)	Senior Manager, PT DE SUDRADJAT (2015 - present)

Profile of Audit Committee

Johny J. Lumintang

Head of Audit Committee

His full profile can be viewed in the “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter.

Farid Harianto

Member of Audit Committee

His full profile can be viewed in the “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter.

Tavip Santoso

Member of Audit Committee



Tufrida Hasyim

Anggota Komite Audit

Warga Negara Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	64 tahun pada tahun buku 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Deed of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018.
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Statistik dari Institut Pertanian Bogor (1982) • Magister dari Universitas Indonesia (1991) • <i>Certified Financial Planner</i> (CFP) (2013) • Financial Planning Standards Board (FPSB) (2013) • <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) (2009) • <i>Certified Management Accountant</i> (CMA) dari Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia (2006).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Dosen di Perguruan Tinggi Swasta
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Kepala Satuan Pengendalian Internal, PT Medikarya Anugrah Prikasih, 2014- 2020

Tufrida Hasyim

Member of Audit Committee

Warga Negara Nationality	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	64 years old in fiscal 2021
Dasar Hukum Pengangkatan Deed of Appointment	Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor Degree in Statistics from Bogor Agricultural University (1982) • Masters Degree from the University of Indonesia (1991) • <i>Certified Financial Planner</i> (CFP) (2013) • Financial Planning Standards Board (FPSB) (2013) • <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) (2009) • <i>Certified Management Accountant</i> (CMA) from the Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia (2006)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Faculty Member of a Private University
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Head of Internal Control Unit, PT Medikarya Anugrah Prikasih, 2014-2020

Tanggung Jawab dan Wewenang

Sebagai organ pendukung kinerja Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengkaji seluruh informasi keuangan yang disusun dan akan dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya;
2. Mengkaji kepatuhan Perusahaan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengatur aktivitas usaha Perusahaan;
3. Mengkaji hasil pemeriksaan audit internal;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai segala risiko yang mungkin muncul, yang dapat memengaruhi Perusahaan, serta menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi; dan
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, serta informasi lainnya yang merupakan rahasia Perusahaan.

Untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab tersebut, maka Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses arsip dan informasi mengenai staf, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Audit juga memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang telah disetujui untuk melaksanakan audit internal.

The Responsibilities and Authorities of the Audit Committee

As the supporting instrument for the Board of Commissioners' performance, the Audit Committee has the following responsibilities and authorities:

1. Review all financial information prepared by the Company, including Financial Statements, and other financial information;
2. Review the Company's compliance with the applicable rules and regulations and manage the Company's activities as a public Company;
3. Review the implementation of internal audit results;
4. Report all potential risks that may affect the Company to the Board of Commissioners and apply risk management policies and procedures assigned by the Board of Directors; and
5. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and other information.

To ensure the fulfillment of the aforementioned responsibilities, the Audit Committee has the authority to access the files and information regarding the staff, funds, assets and resources of the Company in relation to the implementation of their tasks. In exercising this authority, the Audit Committee cooperates with any party appointed to carry out internal audits.

Pelaksanaan Rapat

Kebijakan

Komite Audit diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara mayoritas anggota Komite Audit yang hadir. Seandainya keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Audit memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

Agenda Rapat dan Kehadiran

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

Convention of Meeting

Policy

The Audit Committee is expected to conduct meetings at least once every three months, or at any time if necessary. All discussions and decision-making process at the Audit Committee meeting are carried out by deliberation to reach consensus, and recorded in the minutes of the meeting which are then signed by all members of the Audit Committee present at the meeting.

If a consensus cannot be reached, a decision will be made by voting by the majority of Audit Committee members present. If this method still cannot produce a decision, the Head of the Audit Committee is authorized to determine the decision to be jointly approved.

Meeting Agenda and Attendance

In 2021, the Audit Committee held 4 meetings with the following dates and agenda:

Tanggal Date	Agenda	Johny J. Lumintang	Tavip Santoso	Tufrida Hasyim	Alasan Ketidakhadiran Reason for not Attending
26 Januari 2021 January 26, 2021	Rapat dengan tim Internal Audit Perusahaan untuk mendapat masukan tentang aspek-aspek penting dalam proses audit internal. Disarankan agar tim Internal Audit mengimplementasikan <i>Risk-based Audit</i> Meeting with the Company's Internal Audit team to obtain input on important aspects of the internal audit process. It is recommended that the Internal Audit team implement a Risk-based Audit	√	√	√	-
6 April 2021 April 6, 2021	Buat perencanaan site visit ke beberapa proyek di lingkup perusahaan, terutama ke Pettarani Elevated Toll Road di Makassar, Port Service, ISAB, Lampung, Biomass Power Plant, RPSL Pontianak, dan BSD Toll Road, Tangerang Plan site visits to several projects within the company, especially to Pettarani Elevated Toll Road in Makassar, Port Service, ISAB, Lampung, Biomass Power Plant, RPSL Pontianak, and BSD Toll Road, Tangerang	√	√	√	-



Tanggal Date	Agenda	Johny J. Lumintang	Tavip Santoso	Tufrida Hasyim	Alasan Ketidakhadiran Reason for not Attending
21 September 2021 September 21, 2021	Bersama tim Internal Audit membahas kemajuan proyek: Pettarani Toll Road dan Hydro Power Plant Lau Gunung yang telah selesai dan sudah beroperasi Together with the Internal Audit team, discuss the progress of the project: Pettarani Toll Road and Lau Gunung Hydro Power Plant which have been completed and are in operation	√	√	√	-
14 Desember 2021 Desember 14, 2021	Bersama tim Internal Audit membahas proyek-proyek Perusahaan yang sedang berjalan dan yang berpotensi untuk dijalankan Together with the Internal Audit team, discuss the Company's ongoing and potential projects	√	√	√	-

Frekuensi Kehadiran

Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage (%)
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	4	4	100
Tavip Santoso	Anggota Member	4	4	100
Tufrida Hasyim	Anggota Member	4	4	100

Pengembangan Kompetensi

Competence Development

Kebijakan

Peningkatan kualitas kinerja Komite Audit dipandang penting karena dapat menunjang peningkatan kinerja Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum.

Policy

Quality improvement for Audit Committee's performance is considered important as it can support the performance improvement of the Audit Committee in supporting the implementation of Board of Commissioners' functions to generate impact on improving the quality of the performance of the Board of Commissioners in particular and the performance of the Company in general.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Sepanjang tahun 2021, seluruh anggota Komite Audit tidak mengikuti program pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan.

Realized Competence Development

In 2021, none of the members of the Audit Committee attended competency development programs in the form of education and training.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit tidak melakukan kunjungan ke lapangan karena kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan melakukan perjalanan. Namun pemantauan tentang proyek-proyek dan koordinasi dengan pihak Internal Audit tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Activity Report

Throughout 2021, the Audit Committee did not make any work visits to the field due to the Covid-19 pandemic that made such visit impossible. However, monitoring of projects and coordination with the Internal Audit party continued to run well without any interruption.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memegang peranan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang pengangkatannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi memiliki tugas utama untuk membantu Dewan Komisaris terkait hal nominasi dan remunerasi di Perusahaan yang mencakup penetapan kriteria dan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, serta evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang kemudian hasil tersebut diserahkan kepada RUPS untuk ditinjau lebih lanjut dan menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk menyampaikan rekomendasi terkait penentuan dan penetapan imbalan remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi menggunakan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman dan panduan dalam bekerja dengan isi mencakup antara lain struktur dan posisi Komite Nominasi dan Remunerasi, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi, mekanisme rapat, pelaporan, masa tugas, serta rencana tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kualifikasi Keanggotaan

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam POJK No. 34 tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang menjabat sebagai Komisaris Independen di Perusahaan dengan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar Perusahaan, maupun pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting instrument for the Board of Commissioners whose appointment is carried out by the Board of Commissioners with reference to the provisions of POJK No.34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The Nomination Committee's main task is assisting the Board of Commissioners with regard to nomination and remuneration in the Company, including determining the criteria and implementing the fit and proper test, as well as evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which are then submitted to the GMS for further reviews and formulated into considerations on the remuneration amount for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Nomination and Remuneration Committee has the authority to submit recommendation on determining the remuneration amount for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is based on the work guidelines summarized in the Nomination and Remuneration Committee Charter, which has been approved and endorsed by the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee uses the Charter as guidelines in working with contents covering, among others, the structure and position of the Nomination and Remuneration Committee, membership requirements, duties, responsibilities, authority of the Nomination and Remuneration Committee, meeting mechanisms, reporting, terms of office, and the Nomination and Remuneration Committee's annual plan.

Membership Qualification

In accordance with the stipulation in POJK No. 34 of 2014, the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, with 1 (one) head concurrently serving as an Independent Commissioner in the Company and other members who can be appointed from members of the Board of Commissioners, parties outside the Company, as well as parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.



Komposisi dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Composition and Terms of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Details of composition and terms of office of Nomination and Remuneration Committee in 2021 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Periode Jabatan Service Period
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018 Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018	20 September 2018	RUPST 2023
Helda M. Manuhutu	Anggota Member			
Sugiarti Zainal	Anggota Member		September 20, 2018	AGMS 2023
Rodrigo E, Franco	Anggota Member			
Farid Harianto	Anggota Member			

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Johny J. Lumintang

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan tahunan ini.

Rodrigo E, Franco

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan tahunan ini.

Farid Harianto

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan tahunan ini.

Helda M. Manuhutu

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil disajikan pada bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Profile of Nomination and Remuneration Committee

Johnny J. Lumintang

Head of the Nomination and Remuneration Committee

His full profile is presented in the discussion on “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this annual report.

Rodrigo E, Franco

Member of the Nomination and Remuneration Committee

His full profile is presented in the discussion on “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this annual report.

Farid Harianto

Member of the Nomination and Remuneration Committee

His full profile is presented in the discussion on “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this annual report.

Helda M. Manuhutu

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Her profile is presented in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Sugiarti Zainal**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Warga Negara Nationality	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Depok	Depok
Usia Age	53 tahun pada tahun buku 2021	53 years old in fiscal 2021
Dasar Hukum Pangkat Deed of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018	Decision Letter of the Board of Commissioners Outside of the Meeting dated September 20, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	D1 Pendidikan Kesekretariatan LPK Saint Mary	D1 Secretariat Education LPK Saint Mary
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Sekretaris PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1991 dan bergabung dengan Divisi SDM sebagai Asisten Manajer sejak 2001, kemudian menjadi Asisten Manajer Remunerasi dan menangani <i>Benefit & Compensation</i> (2005- 2014), selanjutnya Beliau menangani <i>salary survey</i> untuk memastikan daya saing karyawan dibandingkan dengan industri FMCG di Indonesia (2006-2014), dan karier terakhir di PT Unilever Indonesia Tbk sebagai HR Business Partner Supply Chain Cikarang Factory hingga akhir Februari 2020. Saat ini berprofesi sebagai <i>Professional Coach, Trainer</i> , dan Konsultan Bisnis dan HR.	Secretary of PT Unilever Indonesia Tbk in 1991 and joined the HR Division as Assistant Manager in 2001, then became Assistant Manager of Remuneration and handled <i>Benefit & Compensation</i> (2005-2014), she later handled salary surveys to ensure employee competitiveness compared to the FMCG industry in Indonesia (2006-2014), and her last career at PT Unilever Indonesia Tbk as HR Business Partner Supply Chain Cikarang Factory until the end of February 2020. Currently, she works as a <i>Professional Coach, Trainer</i> , and Business and HR Consultant.

Sugiarti Zainal**Member of the Nomination and Remuneration Committee****Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Nominasi dan Remunerasi berperan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berikut kebijakan dan sistem remunerasinya; dan
2. Membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasinya.

Pernyataan Independensi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan senantiasa mengutamakan penerapan prinsip independensi dan objektivitas serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya guna mencegah terjadinya benturan kepentingan akibat intervensi dari pihak lain.

Pelaksanaan Rapat**Kebijakan**

Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee serve as the Board of Commissioners' supporting instrument with the following duties and responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners in determining the criteria for selecting candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the remuneration system; and
2. Assisting the Board of Commissioners to prepare candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors and propose their remuneration.

Statement of Independency

The Nomination and Remuneration Committee carries out its duties and responsibilities by prioritizing the application of the principles of independence and objectivity and the Company's interests. All members of the Nomination and Remuneration Committee are required to maintain their independence in order to prevent conflicts of interest due to intervention from other parties.

Convention of Meeting**Policy**

The Nomination and Remuneration Committee is expected to conduct meetings at least once every three months, or at any time if necessary. All discussions and decision-making process at the Nomination and Remuneration Committee meeting are carried out by deliberation to



mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.

Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Seandainya keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

reach consensus, and recorded in the minutes of the meeting which are then signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee present at the meeting.

If a consensus cannot be reached, a decision will be made by voting by the majority of Nomination and Remuneration Committee members present. If this method still cannot produce a decision, the Head of the Nomination and Remuneration Committee is authorized to determine the decision to be jointly approved.

Agenda Rapat dan Kehadiran

Meeting Agenda and Attendance

Tanggal Date	Agenda	Johny J. Lumintang	Helda M. Manuhutu	Sugiarti Zainal	Alasan Ketidakhadiran Reason for not Attending
5 Juli 2021 July 5, 2021	Review Remunerasi Dewan Direksi Review of Board of Directors Remuneration	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
16 Juli 2021 July 16, 2021	Keikutsertaan Nusantara dalam Market Survey Global yang diinisiasi MPTC bersama Konsultan Nusantara's participation in the Global Market Survey initiated by MPTC with Consultants	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
4 November 2021 November 4, 2021	Diskusi Struktur Organisasi Dewan Direksi dan Komisaris Discussion of the Organizational Structure of the Board of Directors and Commissioners	Hadir Present	Hadir Present	Tidak Hadir Absent	Sakit (Covid-19) Covid-19 Diseased
3 Desember 2021 December 3, 2021	Membahas Hasil Market Survey WTW terkait Peta Remunerasi Eksekutif di Indonesia Discussing WTW Market Survey Results related to Executive Remuneration Map in Indonesia	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-

Frekuensi Kehadiran

Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage (%)
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	4	4	100%
Helda M. Manuhutu	Anggota Member	4	4	100%
Sugiarti Zainal	Anggota Member	4	3	75%

Pengembangan Kompetensi

Competence Development

Kebijakan

Perusahaan turut menaruh perhatian pada peningkatan kualitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal tersebut dikarenakan kinerja yang berkualitas dapat menunjang peningkatan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum.

Policy

The Company also pays attention to the improvement of performance quality for the Nomination and Remuneration Committee. This attention is due to quality performance that can support the improvement of the Nomination and Remuneration Committee to support the implementation of the Board of Commissioners' function, which in turn improves the Board of Commissioners' performance specifically and the Company's performance in general.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Di sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Realized Competence Development

In 2021, the Nomination and Remuneration Committee participated in education and training with the following details:

No.	Nama Peserta Name of Participant	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
1.	Sugiarti Zainal	Business Accumen	Business Coaching Certification Program	Zoom 22 Jan - 5 Feb 2021	Coaching Indonesia
		Leadership	Executive Coaching Certification Program	Zoom 19 Feb - 5 Mar 2021	Coaching Indonesia
		Business	Master Practitioner Neuro Linguistic Programme	Hotel Pullman Thamrin - Jakarta 11-17 Oct 2021	Inspirasi Indonesia

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, melalui serangkaian kegiatan. Segala aktivitas yang direalisasikan bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mengkaji skema remunerasi di Perseroan.

Activity Report

The Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities as an instrument under the Board of Commissioners, through a series of activities. All realized activities aim to assist the implementation of the duties of the Board of Commissioners in reviewing the remuneration scheme in the Company.

Salah satu tugas utama komite adalah melakukan assessment terhadap kebijakan remunerasi. Berdasarkan penilaian Komite Nominasi dan Remunerasi, skema remunerasi Perseroan sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

One of the main tasks of the committee is to make assessment of the remuneration policy. Based on the assessment of the Nomination and Remuneration Committee, the Company's remuneration scheme throughout 2021 has been implemented in accordance with the applicable laws and regulations.

KOMITE INVESTASI DAN STRATEGI

Komite Investasi dan Strategi (KIS) merupakan komite khusus yang pembentukan dan pengangkatannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk menjalankan peran pengawasan pada aspek pengembangan bisnis usaha Perusahaan melalui pelaksanaan aktivitas investasi serta penyusunan dan penerapan strategi bisnis Perusahaan.

INVESTMENT AND STRATEGY COMMITTEE

The Investment and Strategy Committee (KIS) is a special committee whose formation and appointment is carried out by the Board of Commissioners with the aim of carrying out a supervisory role in the aspects of developing the Company's business through the implementation of investment activities as well as the formulation and implementation of the Company's business strategies.

Di dalam Perusahaan, KIS memiliki tugas utama, yakni menyampaikan usulan, meninjau, merencanakan, mengumpulkan, hingga mengawasi setiap inisiatif terkait pengembangan bisnis usaha Perusahaan dalam proses penerapan kebijakan investasi Perusahaan. Masukan dan usulan tersebut selanjutnya disampaikan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memastikan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki Perusahaan dalam upayanya mencapai target dan tujuan utama.

Within the Company, KIS has the main task of submitting suggestions, reviewing, planning, collecting, and monitoring every initiative related to the development of the Company's business in the process of implementing the Company's investment policies. The inputs and suggestions are then submitted to the Board of Commissioners to ensure the Company's capabilities in its efforts to achieve its main targets and objectives.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Investasi dan Strategi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris.

Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is based on the work guidelines summarized in the Investment and Strategy Committee Charter, which has been approved and endorsed by the Board of Commissioners.



Komposisi Komite Investasi dan Strategi

Komposisi dan masa jabatan KIS pada tahun 2021 terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Periode Jabatan Service Period
M. Ramdani Basri	Ketua Chairman			
Danni Hasan	Anggota Member			
Ridwan Irawan	Anggota Member			
Benny S. Santoso	Anggota Member	Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk	11 Januari 2021	RUPST 2023
Amadeo N. Bejec	Anggota Member	Decision Letter of the Board of Directors of PT Nusantara Infrastructure Tbk	January 11, 2021	AGMS 2023
Francis Emmanuel D. Rojas	Anggota Member			
Christopher Daniel C. Lizo	Anggota Member			

Composition of the Investment and Strategy

The composition and terms of office of KIS in 2021 are summarized in the following table:

Profil Komite Investasi dan Strategi

Profil Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Strategi disajikan pada pembahasan “Profil Direksi” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Investment and Strategy Committee Profile

The profile of the Head and Members of KIS can be viewed in the “Board of Directors’ Profile” discussion in the “Company Profile” chapter.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang diemban KIS antara lain sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan Kebijakan Investasi dan Petunjuk Investasi Tahunan;
2. Membantu pengkajian dan analisis usulan investasi/divestasi tertentu baik dari aspek finansial, legal, maupun aspek lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang pada saat usulan tersebut diajukan;
3. Memberikan rekomendasi atas hasil analisis yang dilakukan terhadap usulan investasi/divestasi dimaksud, dengan disertai latar belakang dan alasan-alasan yang jelas tentang diterima atau ditolaknya usulan suatu investasi/divestasi; dan
4. Memberikan pertimbangan dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi/divestasi sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of KIS are as follows:

1. Assisting in preparing the Investment Policy and Annual Investment Technical Instructions;
2. Assisting to assess and analyze the proposed investments/divestments to ensure financial viability, legality and due regard for social, political, economic and environmental development factors at the time the investment/divestments are proposed;
3. Providing recommendations based on the analysis carried out on the proposed investments/divestments referred to above, along with the background and clear reasons for the approval or rejection of the investments/ divestments proposals; and
4. Providing considerations for implementation of investments /divestments decision referred to in points 1 and 2.

Pernyataan Independensi

Komite Investasi dan Strategi memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dengan berkomitmen penuh pada penerapan prinsip-prinsip independensi untuk menjaga independensi dan objektivitas KIS di Perseroan. Independensi tersebut diterapkan guna menghindari potensi benturan kepentingan dan dapat tetap mengutamakan kepentingan Perseroan.

Statement of Independency

The Investment and Strategy Committee ensures that all of its duties and responsibilities are carried out with a full commitment to the application of the principles of independence to maintain the independence and objectivity of KIS in the Company. This independence is implemented in order to avoid potential conflicts of interest and to continue to prioritize the interests of the Company.

Pelaksanaan Rapat

Kebijakan

Komite Investasi dan Strategi diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Investasi dan Strategi yang hadir.

Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara mayoritas anggota Komite Investasi dan Strategi yang hadir. Seandainya keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Investasi dan Strategi memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

Frekuensi dan Kehadiran

Hingga akhir tahun 2021, Komite Investasi dan Strategi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali yang dilaksanakan secara virtual. Agenda pembahasan mengenai hal-hal terkaitusulan/rencana investasi atau divestasi dari keseluruhan proyek yang dijalankan oleh Perseroan.

Frekuensi Kehadiran

Frekuensi Kehadiran		Attendance Frequency		
Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage (%)
M. Ramdani Basri	Ketua Chairman	6	6	100
Danni Hasan	Anggota Member	6	6	100
Ridwan Irawan	Anggota Member	6	6	100
Benny S. Santoso	Anggota Member	6	6	100
Amadeo N. Bejec	Anggota Member	6	6	100
Francis D. Rojas	Anggota Member	6	6	100
Christopher Daniel C. Lizo	Anggota Member	6	6	100

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Strategi telah diuraikan pada bagian "Pengembangan Kompetensi Direksi" yang terdapat dalam bab "Tata Kelola Perusahaan" ini.

Convention of Meeting

Policy

The Investment and Strategy Committee is expected to conduct meetings at least once every three months, or at any time if necessary. All discussions and decision-making process at the Investment and Strategy Committee meeting are carried out by deliberation to reach consensus, and recorded in the minutes of the meeting which are then signed by all members of the Investment and Strategy Committee present at the meeting.

If a consensus cannot be reached, a decision will be made by voting by the majority of Investment and Strategy Committee members present. If this method still cannot produce a decision, the Head of the Investment and Strategy Committee is authorized to determine the decision to be jointly approved.

Frequency and Attendance

Until the end of 2021, the Investment and Strategy Committee had held 6 (six) virtual meetings. The Agenda of discussion were on matters related to proposals/plans for investment or divestment of all projects carried out by the Company.

Attendance Frequency

Competency Development

The competency development of the Investment and Strategy Committee has been described in the "Competency Development of the Board of Directors" section of this "Corporate Governance" chapter.



Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang tahun 2021, Komite Investasi dan Strategi telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya serta rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menganalisis kebijakan dan petunjuk investasi tahunan Perusahaan. Rekomendasi kebijakan dan petunjuk investasi tahunan yang diberikan oleh Komite Investasi dan Strategi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi di dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengurusan Perusahaan dibantu oleh organ pendukung Direksi, yakni Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas untuk menjadi pihak yang menghubungkan Perseroan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari otoritas terkait hingga masyarakat luas.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam menghadirkan citra Perseroan yang baik di mata masyarakat luas yang salah satunya diwujudkan melalui pengelolaan program komunikasi yang baik, tepat, efektif, dan efisien dengan berbagai pihak berkepentingan. Sekretaris Perusahaan berhak untuk memperoleh akses pada informasi-informasi terkait Perusahaan yang material dan relevan. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat menguasai berbagai peraturan dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama terkait dengan aspek keterbukaan informasi.

Mekanisme Penunjukan

Mekanisme penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi yang mencakup:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar Perusahaan seperti para pemegang saham, lembaga otoritas pasar modal dan keuangan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Activity Report

Throughout 2021, the Investment and Strategy Committee has carried out various duties and responsibilities as well as a series of activities aimed at assisting the duties of the Board of Commissioners in analyzing the Company's annual investment policies and guidelines. The policy recommendations and annual investment guidelines provided by the Investment and Strategy Committee have been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

BOARD OF DIRECTOR'S SUPPORTING INSTRUMENTS

In performing its Company management function, the Board of Directors is supported by the Board of Director's supporting instruments, namely Corporate Secretary and Internal Audit.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a supporting instrument for the Board of Directors who reports directly to the President Director. The Corporate Secretary has a duty to be the party that connects the Company with stakeholders, ranging from relevant authorities to the wider community.

The Corporate Secretary is also responsible for presenting a good image of the Company in the eyes of the wider community, one of which is manifested through the management of a good, precise, effective, and efficient communication program with various interested parties. The Corporate Secretary has the right to gain access to material and relevant information related to the Company. It is hoped that the Corporate Secretary will be able to master various laws and regulations in the capital market sector, especially those related to the aspect of information disclosure.

Appointment Mechanism

The mechanism for the appointment of Corporate Secretary is carried out by referring to the provisions stipulated in POJK No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. Based on these provisions, the Corporate Secretary has functions that include:

1. Ensuring that the Company adheres to the rules on disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
2. Providing information needed by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and/or at any time as requested;
3. Acting as a liaison officer with the Company's stakeholders such as shareholders, capital market institutions and financial authorities and other concerned parties; and

- Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS; dan
- Menjadi juru bicara Perusahaan untuk media.

- Administering and archiving the Company's documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register and minutes of the Board of Directors' Meeting, the Board of Commissioners' meeting and the GMS.
- Acting as the spokesperson of the Company to the media.

Profil Sekretaris Perusahaan

Dahlia Evawani

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Nationality	Indonesia	Warga Negara Nationality	Indonesian
Domisili Domicile	Depok	Domisili Domicile	Depok
Usia Age	45 tahun pada tahun buku 2021	Usia Age	45 years old in fiscal 2021
Dasar Penunjukan Deed of Appointment	Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan pada 30 Juli 2013 berdasarkan Surat keputusan Direksi.	Dasar Penunjukan Deed of Appointment	Appointed as Corporate Secretary on July 30, 2013 based on Decision Letter of the Board of Directors.
Riwayat Pendidikan Educational Background	Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 2000.	Riwayat Pendidikan Educational Background	Earned Bachelor Degree in Economics from STIE Perbanas Jakarta in 2020
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	Rangkap Jabatan Concurrent Position	None
Riwayat Pekerjaan Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Accounting Officer di PT Daruma Investama (2004-2006) Accounting Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2004) Fund Admin di ABN Amro Bank N.V (2000) 	Riwayat Pekerjaan Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> Accounting Officer at PT Daruma Investama (2004-2006) Accounting Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (2000-2004) Fund Admin at ABN Amro Bank N.V (2000)

Profile of Corporate Secretary

Dahlia Evawani

Corporate Secretary

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang diemban Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Menjadi koordinator untuk semua kegiatan aksi perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
- Menjadi narahubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan masyarakat;
- Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
- Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% saham atau lebih; dan
- Mengoordinasikan pelaksanaan RUPS.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

As a Board of Directors' supporting instrument, Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

- Following developments in the capital market, especially of regulations related to capital markets;
- Acting as a coordinator for all corporate actions carried out by the Company;
- Providing the public with any information needed by the investors in relation to the Company's condition;
- Providing input to the Board of Directors of the Company on compliance with the provisions of Law No. 8 of 1995 on Capital Market and the implementing regulations;
- Acting as a liaison officer for the Company with the Capital Market Authority and the public;
- Setting up a Special Register related to the Board of Directors, the Board of Commissioners and their families both in the Company and its affiliates including on share ownership, business relations and other roles that could result in conflict of interest with the Company;
- Maintaining a Shareholder's Register including those with share ownership of 5% or more; and
- Coordinating the convening of the GMS.



Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan pengembangan kompetensi bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi dan menunjang pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan, kinerja Direksi secara khusus dan kinerja Perseroan secara umum dengan lebih optimal. Sepanjang tahun 2021, kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti adalah:

Competence Development

Competence development aims to support the achievement of the performance of the Corporate Secretary, the performance of the Board of Directors in particular and the performance of the Company in general optimally. Throughout 2021, competence development attended are listed below:

Waktu Time	Materi Subject	Penyelenggara Organizer
30 April 2021 April 30, 2021	Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan Duties and Functions of the Board of Directors, Board of Commissioners, Nomination Committee, Remuneration, Audit Committee and Corporate Secretary	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
27 Mei 2021 May 27, 2021	Pendalaman POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & POJK NO. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik In-depth review of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of Public Company GMS & POJK NO. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of Public Company GMS	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9 Juli 2021 July 9, 2021	Pendalaman atas POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha In-depth review of POJK No 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
19 Agustus 2021 August 19, 2021	Stock Split, Dividen Saham Saham Bonus dan Buyback Saham Stock Split, Bonus Stock Stock Dividend and Stock Buyback	ICSA
9 September 2021 September 9, 2021	"Tata Kelola Komunikasi Corporate Secretary di tengah Direksi dan Dewan Komisaris" "Corporate Secretary Communication Governance in the midst of the Board of Directors and the Board of Commissioners"	ICSA
22 Oktober 2021 October 22, 2021	Corporate Action : HMETD, Non HMETD & Initial Public Offering Corporate Action : HMETD, Non HMETD & Initial Public Offering	ICSA
11 November 2021 November 11, 2021	How to Create A Solid Business Contingency Plan	Boston Consulting Group & ICSA
19 November 2021 November 19, 2021	Pengenalan Aspek ESG sebagai Salah Satu Penunjang Bisnis Keberlanjutan Introduction of ESG Aspects as One of the Drivers of Business Sustainability	ICSA
1 Desember 2021 December 1, 2021	IDX-GRI-CDP- Capital Market Webinar : TCFD in Finance	IDX, GRI& CDP
20 Desember 2021 December 20, 2021	Peluncuran dan Talkshow Virtual Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI dan Indeks ESG Quality 45 IDX KEHATI Launch and Virtual Talkshow IDX KEHATI ESG Sector Leaders Index and IDX KEHATI ESG Quality Index 45	BEI
22 Desember 2021 December 22, 2021	Capital Market Women Empowerment Forum 2021	BEI

Pelaksanaan Kegiatan Tahun Buku

Hingga akhir tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan perannya yang seluruhnya telah disampaikan dalam Laporan Sekretaris Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Berbagai kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Perusahaan melalui E-RUPS;
2. Menyelenggarakan pelaksanaan Paparan Publik Tahunan;

Activity Implementation Report of Corporate Secretary

Until the end of 2021, Corporate Secretary has carried out various activities in the context of carrying out its functions and roles, all of which have been stated in the Corporate Secretary's Report and reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners. Such activities are as follows:

1. Organizing the Company's Annual General Meeting of Shareholders;
2. Organizing the implementation of the Annual Public Expose;

3. Menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI);
4. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sekaligus membuat risalah hasil rapat;
5. Menjadi koordinator untuk semua kegiatan Komite Audit;
6. Melakukan pelaporan kepatuhan kepada regulator;
7. Melakukan keterbukaan informasi atas setiap aksi korporasi yang dilakukan entitas anak Perusahaan; dan
8. Menjalinkan komunikasi dengan OJK, *Self Regulatory Organization* (SRO), BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan pihak terkait lainnya.

AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki fungsi dan peran menjalankan kegiatan *assurance* dan *consulting* secara independen. Tujuannya adalah menghadirkan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dari operasional Perseroan.

Audit Internal ikut mendukung Perseroan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara optimal. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal melakukannya dengan pendekatan yang sistematis dan teratur pada proses evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko serta pengendalian internal dalam proses tata kelola

Pedoman Kerja Audit Internal

Audit Internal telah memiliki pedoman kerja berupa Piagam Audit Internal sebagai panduan untuk Audit Internal menjalankan fungsinya, yakni pelaksanaan proses audit terhadap pelaksanaan sistem operasional di Perseroan. Piagam tersebut disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56.POJK.04/2015 dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Januari 2020.

Piagam Audit Internal memuat berbagai hal terkait Audit Internal, seperti: tujuan Audit Internal, lingkup pekerjaan, independensi, kedudukan dan struktur, akuntabilitas, tanggung jawab, kewenangan, kualifikasi, serta kode etik dan standar pelaksanaan audit.

Selain Piagam Audit Internal, terdapat dasar atau acuan lain yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Audit Internal, yaitu kode etik dan *Internasional Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors.

3. Submitting the audited Annual Report and Financial Report to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX);
4. Attending Board of Commissioners' Meetings and Joint Meetings of the Directors and Board of Commissioners as well as making minutes of the results of the meeting;
5. Become a coordinator for all Audit Committee activities
6. Reporting compliance with regulators;
7. Disclose information on every corporate action taken by a subsidiary; and
8. Establish communication with OJK, Self Regulatory Organization (SRO), IDX, Indonesian Central Securities Depository (KSEI), Indonesian Securities Clearing Guarantee (KPEI), and other related parties.

INTERNAL AUDIT

Internal Audit is one of the Company's instruments that has the function and role of independently carrying out assurance and consulting activities. The objective s to provide added value and improve the quality of the Company's operations.

Internal Audit also assists the Company in achieving its predetermined targets and objectives and in realizing optimum implementation of good corporate governance. To achieve this purpose, Internal Audit uses a systematic and regular approach to the evaluation process and improving the effectiveness of risk management and internal control in the governance process.

Internal Audit Work Guidelines

Internal Audit already has a work guideline in the form of an Internal Audit Charter as a guide for Internal Audit in fulfilling its functions, namely the implementation of the audit process in the implementation of Company's operational systems. The charter was prepared based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No 56.POJK.04/2015 and was last updated on January 17, 2020.

The Internal Audit Charter contains matters pertaining to Internal Audit, such as: Internal Audit Objectives, Scope of Work, Independence, Position and Structure, Accountability, Responsibility, Authority, Qualification, Code of Conduct and Standards of Audit Implementation.

In addition to this Charter, other basis or references used by the Internal Audit Department are the code of conduct, professional standards, and framework issued by the Internal Audit Association and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing of The Institute of Internal Auditors.



Independensi, Kedudukan, dan Struktur Audit Internal

Audit Internal merupakan pihak yang bekerja secara independen dengan kedudukan berada di bawah Direktur Utama. Dengan demikian, Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Audit Internal memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit serta memiliki akses yang tidak terbatas namun tetap dalam batas kewajaran pada seluruh kegiatan Perseroan. Audit Internal memegang peranan penting sebagai mitra manajemen dalam upaya pencapaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun 2021, unit Audit Internal Perusahaan memiliki komposisi dengan jumlah 3 (tiga) orang dengan salah satunya menjabat sebagai General Manager Audit Internal.

Profil Kepala Unit Audit Internal

Junianto T. Prijono

General Manager Audit Internal

Profil Junianto T. Prijono dapat dilihat pada pembahasan “Profil Pejabat Eksekutif” dalam bab “Profil Perusahaan”.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama Audit Internal Perseroan secara kolektif mencakup penilaian dari efektivitas dan kecukupan pada proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan. Pelaksanaan tugas utama tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen atau Komite Audit;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Bekerja sama dengan Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

Independency, Position, and Structure of Internal Audit

Internal Audit is a party that works independently under the President Director, thus Internal Audit must report directly to the President Director.

In order to support the implementation of its duties, Internal Audit has a direct line of communication with the Board of Commissioners and the Audit Committee and has unlimited but reasonable access to all Company activities. Internal Audit plays an important role as a management partner in the effort to achieve the implementation of Good Corporate Governance.

In 2021, the Company’s Internal Audit unit had a composition of 3 (three) members with one of them being the General Manager of Internal Audit.

Profile of Internal Audit General Manager

Junianto T. Prijono

General Manager of Internal Audit

Junianto T. Prijono’s profile can be viewed in the “Executive Officers’ Profile” discussion in the “Company Profile” chapter.

Duties and Responsibilities

The collective main task that the Company’s Internal Audit has includes assessing the effectiveness and adequacy of the risk management, internal control, and governance processes implemented by the Company’s management. The implementation of these main tasks is carried out to ensure :

1. The development and implementation of the approved annual internal audit plan, including special assignments or projects requested by the management or the Audit Committee;
2. The examination and evaluation of the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Company’s policies;
3. The examination and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
4. The provision of recommendations for improvements and objective information about the activities audited at all levels of management;
5. The preparation of an audit report and submit the report to the Board of Directors and the Board of Commissioners;
6. Close work with the Audit Committee;
7. The monitoring, analysis and reporting of the implementation of any suggested improvements;

8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

8. The development of a program to evaluate the quality of internal audit activities; and
9. The holding of special inspections as necessary.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dilaporkan kepada OJK.

The Body that Appoints and Dismisses Internal Audit

The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after approval from the Board of Commissioners. In accordance with OJK Regulation No 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Drafting an Internal Audit Unit Charter, every appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit shall be reported to OJK.

Rapat Unit Audit Internal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal di Pasal 8 poin c menyebutkan kewenangan Audit Internal untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

Internal Audit Unit Meeting

The Financial Services Authority Regulation No 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Drafting the Internal Audit Unit Charter, Article 8 point c states t the authority of Internal Audit to hold periodic and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.

Sepanjang tahun 2021, Internal Audit telah mengadakan rapat beberapa kali dengan Direksi dan Komite Audit terkait dengan penugasan dan hasil audit.

Throughout 2021, Internal Audit held several meetings with the Board of Directors and the Audit Committee related to audit assignments and results.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Guna menghadirkan pelaksanaan fungsinya di Perusahaan dengan efektif dan efisien serta menunjang pencapaian kinerja Audit Internal, kinerja Direksi secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum dengan lebih optimal, Audit Internal mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2021, Audit Internal telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Realization of Competency Development

In order to have effective and efficient implementation of its functions in the Company while supporting optimum achievement of Internal Audit performance, the performance of the Board of Directors in particular and the Company's performance in general, Internal Audit participates in various education and training. Throughout 2021, Internal Audit attended education and training with the following details:

No.	Nama Peserta Name of Participant	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Training and Education	Nama Pelatihan Name of Training	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Time and Venue	Penyelenggara Organizer
1	Adhitya Suwanda	Internal Audit	Mengenal Audit Forensik Getting to Know Forensics Audit	12 Maret 2021 March 12, 2021	Indonesia Audit Community

Pelaksanaan Kegiatan Tahun Buku

Sepanjang tahun 2021, Internal Audit telah melaksanakan serangkaian kegiatan evaluasi atas pengendalian internal di berbagai entitas perusahaan anak dan melaksanakan audit operasional pada proses operasi, pemeliharaan jalan tol, pengadaan barang dan jasa, keuangan, IT, dan logistik di unit-unit bisnis.

Implementation of Fiscal Year Activities

Throughout 2021, Internal Audit made a series of evaluations on internal control in various subsidiaries and did operational audits on the operation process, toll road maintenance, procurement of goods and services, finance, IT, and logistics in business units.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain tercermin melalui pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif di seluruh lini Perseroan. SPI bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sejumlah aspek, seperti laporan dan informasi keuangan yang andal, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan operasional yang telah berlangsung baik dan optimal.

Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan Perseroan diterapkan dengan melibatkan peran serta jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga pejabat eksekutif. Penerapannya mengacu pada kerangka Sistem Pengendalian Internal yang diakui secara global, yakni yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)*.

Menurut COSO, penerapan pengendalian internal terdiri dari tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi; tujuan pelaporan yang berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, memenuhi kriteria, serta persyaratan lain yang ditetapkan; dan tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Terdapat beberapa komponen yang ada dalam unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO. Di antaranya, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan mengatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Setiap transaksi keuangan yang dicatat dan disajikan pada laporan keuangan Perseroan harus sesuai dengan prinsip Pedoman Standar Keuangan (PSAK) yang berlaku;
2. Perseroan akan selalu mengumumkan setiap transaksi material dengan nilai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kepada masyarakat pada setidaknya melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK; dan
3. Dalam rangka menerapkan pengendalian internal yang baik dan kompeten, setiap transaksi yang dicatat harus selalu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan otoritas yang berlaku.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's commitment to implement good corporate governance is reflected, among other things, through the implementation and application of an effective Internal Control System (SPI) in all lines of the Company. SPI aims to ensure that the Company has a number of aspects, such as reliable financial reports and information, compliance with applicable laws and regulations, as well as operational activities that are running optimally.

Internal Control System Policy

The Internal Control System (SPI) within the Company is implemented by involving the participation of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and executive officers. Its implementation refers to the globally recognized Internal Control System framework, which is published by The Committee of Sponsoring Organization (COSO).

According to COSO, the implementation of internal control consists of operational objectives related to the effectiveness and efficiency of operations; reporting objectives related to the importance of reliable, timely, and transparent financial reporting, meeting the criteria, as well as other stipulated requirements; and compliance objectives related to the Company's compliance with applicable regulations and provisions.

There are several components that exist as elements of internal control according to COSO. These include control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

The Company's Internal Control System regulates several provisions, including:

1. Every financial transaction recorded and presented in the Company's financial statements must comply with the applicable Financial Standards Guidelines (PSAK);
2. The Company will always announce every material transaction with a value of more than 20% of the Company's equity to the public at least through one Indonesian language daily newspaper with national circulation and submit proof of the announcement to the OJK; and
3. In order to implement good and competent internal control, every recorded transaction must always get approval from the authorized official in accordance with the applicable authority.

Melalui pengendalian internal yang diterapkan dengan tepat dan baik, diharapkan dapat menunjang jalannya aktivitas operasional Perseroan dengan lebih efektif dan efisien, pengamanan aset Perseroan lebih optimal, meningkatnya kepercayaan terhadap laporan keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat lebih baik dalam aspek pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi Pengendalian Internal

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan Perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Tinjauan dan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal di seluruh lini Perseroan dilakukan oleh Audit Internal. Organ tersebut juga berperan dalam melakukan pengawasan untuk mendukung Direksi terkait efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen Perseroan agar dapat ditindaklanjuti dan pelaksanaannya dapat terus dimonitor. Dengan demikian, s SPI dapat berjalan efektif dan sesuai yang diharapkan.

Untuk tahun 2021, Perseroan melalui Audit Internal telah melakukan evaluasi dan memperoleh hasil bahwa SPI telah berjalan dengan baik. Hal itu, antara lain tergambar dari opini "Wajar Tanpa Pengecualian" pada Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya

Properly implemented internal control is expected to support the Company's operational activities more effectively and efficiently, to secure more optimal Company assets, and to enhance trust in the Company's financial statements. In addition, the Company can better comply with with applicable laws and regulations.

Implementation of Internal Control

Finance

The implementation of internal control in finance focuses on accounting and reporting of financial transactions, including commitments, authorizations, and receipts and disbursements of money.

Operational Field

The implementation of internal control in the operational field focuses on examining the use of unit resources to evaluate whether these resources are used in the most effective and efficient way to fulfill the mission and objectives of the Company.

Compliance with Legislation

The implementation of internal control in the compliance sector focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies and procedures.

Overview of the Effectiveness of the Internal Control System

The effectiveness of the implementation of the Internal Control System in all lines of the Company is reviewed and evaluated by Internal Audit. This instrument also plays a role in oversight function to support the Board of Directors pertaining to the effectiveness of the Company's internal control system.

The evaluation results are submitted to the Company's management to be followed up and its implementation continuously monitored. This is to ensure that SPI runs effectively and as expected.

For 2021, the Company through Internal Audit evaluated and the results showed that SPI has been running well. This was reflected, among other indicators, in the "Unqualified" opinion given to the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP).

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors considers that the work units under the Board of Directors have performed their functions



dengan baik dan memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan di sepanjang tahun 2021.

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko merupakan bagian penting dalam upaya dan komitmen Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan manajemen risiko yang tepat dan komprehensif mampu mendukung Perseroan mencapai kinerja yang optimal dengan menekan potensi risiko dan meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut.

Perseroan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di seluruh proses operasional dan seluruh lini Perseroan. Untuk itu, Perseroan menetapkan kebijakan manajemen risiko sebagai salah satu upaya Perseroan mengimplementasikan manajemen risiko yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Perseroan secara berkala mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan dievaluasi tingkat efektivitasnya.

Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko berfungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan risiko di setiap unit kerja yang ada di Perseroan. Kebijakan tersebut, antara lain meliputi:

1. Mendeteksi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas;
2. Melakukan pengukuran tingkat dan besaran setiap risiko dengan memperhitungkan skala dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko sebagai dasar pemetaan dan pengendalian risiko yang signifikan;
4. Menyusun rencana strategi pengendalian terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi;
5. Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha Perseroan; dan
6. Melakukan pemantauan risiko secara berkesinambungan, khususnya yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi usaha Perseroan.

Jenis dan Mitigasi Risiko Perusahaan

Dalam proses menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menghadapi beragam risiko. Untuk mencegah potensi dampak buruk yang ditimbulkan dari risiko yang dihadapi, Perseroan melakukan peninjauan secara rutin pada kebijakan *hedge and control* yang berlaku untuk setiap jenis risiko.

and roles well and delivered effective and efficient performance. The Corporate Secretary and Internal Audit have carried out their duties well as supporting units of the Board of Directors and have assisted the Board of in discharging its responsibilities in managing the Company throughout 2021.

RISK MANAGEMENT

Risk management is an important part of the Company's efforts and commitment to implement Good Corporate Governance. The implementation of appropriate and comprehensive risk management can support the Company in achieving optimal performance by reducing potential risks and minimizing the impact that may occur due to these risks.

The Company ensures that risk management has been implemented throughout the Company's operational processes and all lines. To that end, the Company established a Risk Management Policy as one of the Company's efforts to implement integrated risk management effectively and efficiently. The Company periodically communicates this policy to all stakeholders to be understood and evaluated for its effectiveness.

Risk Management Policy

The Company has policies related to Risk Management, which serve to optimize the implementation of risk management in every work unit in the Company. The policy includes, among others, the following:

1. Detecting risks as early as possible on each activity.
2. Measuring the level and magnitude of each risk, by taking into account the magnitude of the impact and the likelihood of the risk potential to occur.
3. Evaluating the source of risks and causes of risks, as the basis in mapping and controlling significant risks.
4. Preparing a strategic risk control plan for high priority risks.
5. Carrying out control activities for risks that endanger the Company's business survival.
6. Continuously monitoring risks, especially those that have a significant impact on the condition of the Company.

Company Risk Types and Mitigation

The various risks that the Company faces in the process of carrying out its business activities are of a material nature. To prevent potential adverse impacts arising from these risks, the Company conducts regular reviews of the hedge and control policies that apply to each type of risk.

Dengan adanya peninjauan tersebut, Perseroan dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat untuk menekan dampak negatif dari risiko-risiko tersebut. Berikut, rincian jenis risiko dan mitigasi Perseroan.

With this review, the Company can determine the appropriate mitigation steps to minimize the negative impact of these risks on the Company's business as a whole.

Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p>Risiko Suku Bunga bagi Nilai Wajar dan Arus Kas Interest Rate Risk For Reasonable Value and Cash Flow</p> <p>Risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda dapat memengaruhi arus kas Perseroan. Hal ini juga didorong oleh dana tunai yang disimpan pada berbagai tingkat suku bunga.</p> <p>Interest rate risk arising from bank loans with different interest rates may affect Company's cash flow. This risk factor is also driven by cash held at various interest rates.</p>	<p>Perseroan melakukan evaluasi terhadap tren tingkat suku bunga pasar dan mengkaji tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya agar memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan.</p> <p>The Company evaluates market trends and examines interest rates offered by various banks and other financial institutions in order to obtain the most profitable rates.</p>
<p>Risiko Mata Uang Currency Risk</p> <p>Risiko mata uang adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran untuk perusahaan yang kegiatan usahanya menggunakan mata uang asing.</p> <p>Currency risk is caused by fluctuations in foreign currency exchange rates that may affect income and expenses for companies whose business activities are carried out in foreign currencies.</p>	<p>Perseroan belum menerapkan kebijakan mengenai risiko mata uang karena pendapatan dan pengeluaran Perseroan dan entitas anak hampir seluruhnya dalam rupiah.</p> <p>The Company has not implemented a currency risk policy since the Company and its subsidiaries' revenue and expenses are almost entirely in Rupiah.</p>
<p>Risiko Kredit Credit Risk</p> <p>Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.</p> <p>Credit risk is the risk where one of the parties to a financial instrument fails to meet its liability and causes the other party to suffer financial loss.</p>	<p>Perseroan hanya memberikan pembayaran secara kredit dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel serta melakukan pemantauan terhadap saldo piutang secara berkelanjutan agar eksposur Perseroan terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.</p> <p>The Company only provides credit payments with recognized and credible third parties and monitors continuous balance of receivables to ensure that the Company's exposure to non-performing receivables is insignificant.</p>
<p>Risiko Likuiditas Liquidity Risk</p> <p>Risiko likuiditas muncul terutama dari perbedaan jatuh tempo aset keuangan dan kewajiban, sehingga suatu pihak mengalami keterlambatan pemenuhan kewajiban keuangan karena kekurangan dana jangka pendek.</p> <p>Liquidity risk mainly arises from differences in the maturity of financial assets and liabilities, resulting in a party experiencing delays in the fulfillment of financial obligations due to short-term cash shortages.</p>	<p>Perseroan secara menyeluruh memantau kebutuhan likuiditas dan terus menelaah kondisi pasar uang untuk memberi peluang bagi optimalisasi biaya-biaya pendanaan.</p> <p>The Company closely monitors liquidity needs and continues to examine money market conditions to identify opportunities to optimize financing costs.</p>
<p>Risiko Pemodalan Capital Risk</p> <p>permodalan disebabkan oleh penurunan kualitas aset baik sebagai dampak kredit macet atau hal lainnya yang memaksa suatu perusahaan untuk menambah setoran modal dan/atau menerbitkan saham baru.</p> <p>Capital risk is caused by a decrease in asset quality either as a result of bad debt or other matters that compel a company to increase its capital deposits and/or issue new shares.</p>	<p>Manajemen Perseroan memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman.</p> <p>The Company's management is concerned with maintaining a sound capital ratio between liabilities and equity. In maintaining and adjusting its capital structure, the Company may issue new shares, seek financing through loans, restructure existing debt or sell assets to reduce loans.</p>



Tinjauan Efektivitas Manajemen Risiko

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi terkini dari Perseroan serta regulasi yang berlaku. Sementara peninjauan efektivitas sistem manajemen risiko dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi bersama Unit Audit Internal.

Berdasarkan hasil audit internal yang telah dilakukan selama tahun 2021, Unit Audit Internal percaya bahwa sistem manajemen risiko yang ada cukup efektif dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko usaha, operasional dan keuangan yang relevan dengan kondisi usaha Perseroan. Sistem manajemen risiko yang dijalankan saat ini juga dirasa cukup efektif dalam mengidentifikasi dan menyiapkan rencana mitigasi untuk potensi risiko-risiko baru yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha perseroan.

Pernyataan Direksi dan/atau Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi maupun Dewan Komisaris/Komite Audit meyakini bahwa sistem manajemen risiko Perseroan yang diterapkan saat ini sudah cukup efektif dalam mereduksi risiko-risiko usaha, operasional dan keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Begitu juga dengan potensi risiko-risiko baru yang mungkin akan timbul dan berdampak signifikan di masa mendatang.

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIHADAPI

Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak memiliki perkara penting, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, serta entitas anak Perseroan. Selain itu, sanksi administrasi dari regulator juga tidak ada.

ETIKA DAN NORMA PERILAKU

Perseroan mengutamakan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan yang dibangun dan dipelihara sesuai dengan standar etika bisnis dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Untuk itu, Perseroan memiliki kode etik yang diturunkan ke dalam etika dan norma perilaku sebagai bentuk komitmen Perseroan menjalankan aktivitas usaha yang positif dan memberi nilai tambah.

Etika dan norma perilaku ini terangkum dalam GCG Manual Perseroan dan diterapkan ke seluruh lini. Seluruh individu Perseroan diwajibkan untuk menerapkan etika dan norma perilaku ke dalam aktivitas operasional sehari-hari sebagai dasar pembentukan sikap dan perilaku yang beretika secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Review of Risk Management Effectiveness

The Company always evaluates risk management to adjust it to the latest conditions of the Company and applicable regulations. Meanwhile, the effectiveness of the risk management system is reviewed by the Board of Commissioners and the Board of Directors together with the Internal Audit Unit.

Based on the results of the internal audit conducted during 2021, the Internal Audit Unit believes that the existing risk management system is quite effective in identifying and mitigating business, operational and financial risks that are relevant to the Company's business conditions. The current risk management system is also considered quite effective in identifying and preparing mitigation plans for potential new risks that may affect the company's business activities.

Statement of the Board of Directors and/ or Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Directors and the Board of Commissioners/ Audit Committee believe that the Company's risk management system currently run is quite effective in reducing the previously identified business, operational and financial risks. The system also reduced the potential new risks that may arise and have a significant impact in the future.

LEGAL CASE AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS FACED

Throughout 2021, the Company did not have any important cases, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and subsidiaries. Neither did it receive any administrative sanctions from the regulator.

ETHICS AND CONDUCTS

The Company prioritizes good relations with the stakeholders that are established and nurtured in accordance with business ethical standards and do not deviate from the prevailing regulations. Therefore, the Company has a Code of Ethics which is divided into Ethics and Codes of Conduct as the Company's commitment to running positive and value-adding business activities.

These Ethics and Conducts are summarized in the Company's GCG Manual and are applied to all lines. All Company individuals are required to apply these Ethics and Conducts into their daily operational activities as the basis for forming ethical attitudes and behaviors consistently in accordance with the applicable regulations.

Pokok-Pokok Etika dan Norma Perilaku

Perseroan menyusun pokok-pokok yang terkandung dalam etika dan norma perilaku dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan Perseroan serta regulasi berupa perundang-undangan yang berlaku. Etika dan norma perilaku tersebut mencakup:

1. Kepatuhan terhadap Hukum
2. Beradaptasi secara Gesit dan Unggul terhadap Perubahan Lingkungan
3. Menjaga Kerahasiaan Informasi
4. Benturan Kepentingan
5. Pernyataan Palsu
6. Perlindungan terhadap Privasi Individu
7. Pengembangan Masyarakat dan Lingkungan
8. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah
9. Hadiah
10. Donasi
11. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

Sosialisasi dan Internalisasi

Sosialisasi dan internalisasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan penerapan etika dan norma perilaku secara optimal dan menyeluruh ke semua lini Perseroan. Perseroan menginformasikan kepada seluruh individu Perseroan terkait etika dan norma perilaku dengan memanfaatkan berbagai media internal yang dapat diakses setiap saat dengan mudah oleh seluruh individu.

Beragam media internal yang dimaksud, antara lain memo internal, surel, buletin internal, situs web, hingga berbagai pelatihan yang diadakan internal. Melalui proses ini, setiap individu yang bekerja di Perseroan dapat menjalankan perannya dengan memahami dan menerapkan etika dan norma dalam berperilaku dan bersikap dengan patuh.

Pemberlakuan Etika dan Norma Perilaku

Perseroan memastikan bahwa komitmen penerapan etika dan norma perilaku sebagai kode etik berlaku bagi seluruh individu dalam organisasi Perseroan, dari jajaran manajemen hingga karyawan. Seluruh organisasi diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dan kebijakan yang terangkum dalam etika dan norma perilaku tanpa terkecuali.

Pemberlakuan etika dan norma perilaku ini merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum serta etika yang berlaku. Tujuannya adalah menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif, sehat, dan nyaman bagi seluruh pihak di dalamnya.

Principles of Ethics and Conducts

The Company compiled the principles of Code of Ethics into Ethics and Conducts by with reference to the provisions and policies of the Company as well as regulations in the form of applicable laws. The Ethics and Conducts applied by the Company include:

1. Compliance with the Law
2. Agilely and Excellent Adaptation to Environmental Changes
3. Maintenance of Information Confidentiality
4. Conflict of Interest
5. False Statement
6. Protection of Individual Privacy
7. Environment and Community Development
8. Relations with Employees and Government Officials
9. Rewards
10. Donation
11. Involvement in Political Activities

Socialization and Internalization

Socialization and internalization are important steps taken by the Company to achieve optimal and comprehensive implementation of Ethics and Conduct in all lines of the Company. The Company informs all Company individuals regarding Ethics and Conduct by utilizing various internal media that can be accessed easily at any time by all Company individuals

The referred media include internal memos, e-mails, internal newsletters, website, to various internal trainings. It is hoped that, through this process, every individual who works in the Company can carry out their role by understanding and applying ethics and norms in behaving and behaving in an obedient manner.

Enforcement of Ethics and Conduct

The Company ensures that the commitment to the application of Ethics and Conduct as a Code of Ethics is always upheld by ensuring that the Ethics and Conduct apply to all individuals in the Company, from the management to the employees. All elements of the Company are required to comply with the provisions and policies summarized in the Ethics and Conduct without exception.

The enforcement of Ethics and Conduct is a form of the Company's responsibility to always comply with applicable legal and ethical provisions in order to provide a conducive, healthy and comfortable work environment for all parties in it.



Unit Audit Internal menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hingga penerapan etika dan norma perilaku Perseroan dengan senantiasa mendapat dukungan dari seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, serta jajaran manajemen terkait lainnya.

The Internal Audit Unit is the party responsible for the implementation up to the implementation of the Company's Ethics and Conduct by always receiving support from all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and other related management ranks.

Jumlah Pelanggaran Kode etik Tahun 2021

Hingga akhir tahun 2021, Perseroan menemukan adanya pelanggaran pada kode etik sebanyak 5 (lima) pelanggaran. Rinciannya diuraikan dalam tabel berikut:

Total Codes of Conduct Violation in 2021

By the end of 2021, the Company found 5 (five) violations on Codes of Conduct. Information on the violations and sanctions given is summarized in the following table.

Jenis Sanksi Type of Sanction	Jumlah Total	
	2021	2020
Teguran Reprimand	1	0
Peringatan 1 First Warning	-	1
Peringatan 2 Second Warning	-	0
Peringatan 3 Third Warning	-	0
Pengunduran Diri Resignation	4	8
Pemutusan Hubungan Kerja Employment Termination	-	0

PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Perseroan tidak memberikan kompensasi jangka panjang dalam bentuk *share option* kepada manajemen maupun karyawan.

PROVISION OF PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION

The Company does not provide long-term compensation in the form of share options to management or employees.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Komitmen Perseroan untuk menghadirkan kondisi dan lingkungan kerja yang kondusif, bersih, dan sehat diwujudkan melalui penyediaan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Penerapan WBS ini bertujuan untuk mendukung penegakan prinsip-prinsip GCG secara optimal di seluruh lini Perseroan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Company's commitment to provide a conducive, clean and healthy working condition and environment is realized through the provision of a Whistleblowing System (WBS). The WBS is run to support the optimal enforcement of GCG principles in all lines of the Company.

Melalui WBS, seluruh pihak berkesempatan untuk dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik, budaya perusahaan, peraturan Perseroan, hingga perundang-undangan yang dilakukan oleh individu Perseroan. Laporan tersebut harus berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan berlandaskan fitnah, serta disampaikan untuk mendukung kepentingan Perseroan.

Through WBS, everyone has the opportunity to submit reports of alleged violations of the code of ethics, corporate culture, Company regulations, and laws and regulations committed by any of the Company's individuals. The report must be based on evidence that can be justified, not based on slander, and submitted to support the interests of the Company.

Perseroan diwajibkan untuk menindaklanjuti laporan dengan pelanggaran dalam bentuk apa pun dan dilakukan oleh siapa pun, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Laporan dugaan atau kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh individu Perseroan dapat disampaikan menggunakan berbagai jalur komunikasi yang disediakan oleh Perseroan. Laporan tersebut kemudian akan disampaikan dan ditangani oleh Kepala Unit Bisnis terkait dan diteruskan ke Audit Internal dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk ditindaklanjuti.

Perlindungan bagi Pelapor

Perseroan memastikan bahwa pelapor memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan merugikan seperti ancaman, intimidasi, maupun tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan dari pihak mana pun. Perseroan juga merahasiakan identitas pelapor juga sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan yang diberikan Perseroan kepada pelapor.

Jumlah Pengaduan Tahun 2021

Sepanjang tahun buku 2021 tidak ada pengaduan yang diterima oleh Perseroan.

The Company is required to follow up reports with violations in any form and carried out by anyone, which is proven to have violated the stipulated provisions.

Report Submission Mechanism

Reports of allegations or incidents of violations committed by individuals of the Company can be submitted through various communication channels provided by the Company. The report will then be submitted and handled by the Head of the relevant Business Unit and forwarded to the Internal Audit and Human Resources Department for follow-up.

Protection for Whistleblowers

The Company ensures that the whistleblower is protected from all forms of harmful actions such as threats, intimidation, or unpleasant actions from any party. The Company also keeps the identity of the reporter confidential as a form of protection provided by the Company to the reporter.

Total Complaints in 2021

Throughout the 2021 financial year there were no complaints received by the Company.



KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Program dan Prosedur Mengatasi Praktik Korupsi

Sebagai bagian dari upaya menghindari terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Perseroan, seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal diinformasikan tentang Kode Etik yang berlaku di Perseroan. Begitu juga dengan setiap ada pemutakhirannya selalu disosialisasikan, sehingga diharapkan mampu mencegah kemungkinan terjadinya praktik yang mengarah pada kegiatan korupsi.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi kepada Karyawan

Perseroan melakukan sosialisasi secara berkala tentang kebijakan anti korupsi dan gratifikasi bersamaan dengan penyampaian Kode Etik.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION POLICY

Programs and Procedures for Overcoming Corrupt Practices

As part of the effort to prevent acts of corruption within the Company, all stakeholders, both internal and external, are informed about the Code of Ethics that are applicable in the Company. Every update made to the Code is socialized so it is hoped that it will be able to prevent the possibility of practices that lead to corrupt activities.

Anti-Corruption Training/Socialization to Employees

The Company periodically disseminates the anti-corruption and gratification policies along with the submission of the Code of Ethics.



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility



Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 2021 PT Nusantara Infrastructure Tbk secara komprehensif telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan terpisah dari Laporan Tahunan.

Comprehensive information on The Company's social and environmental responsibility is presented in a Sustainability Report published separately from this Annual Report



Kinerja Ekonomi [B.1]

Economic Performance [B.1]

Financial | Financial



Laba Perseroan
Profitability of the Company

Rp 25,76
miliar | billion



Pendapatan Perseroan
Revenue of the Company

Rp 844,78
miliar | billion

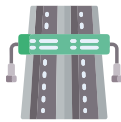


Kontribusi terhadap pembangunan negeri melalui pembayaran pajak

Rp50.2 billion in contributions to the growth of the country through taxation.

Rp 50,2
miliar | billion

Pendapatan Usaha Per Segmen | Revenue Per Segment



Jalan Tol
Toll Road

Rp 610,73
miliar | billion



Air Bersih
Clean Water

Rp 78,4
miliar | billion



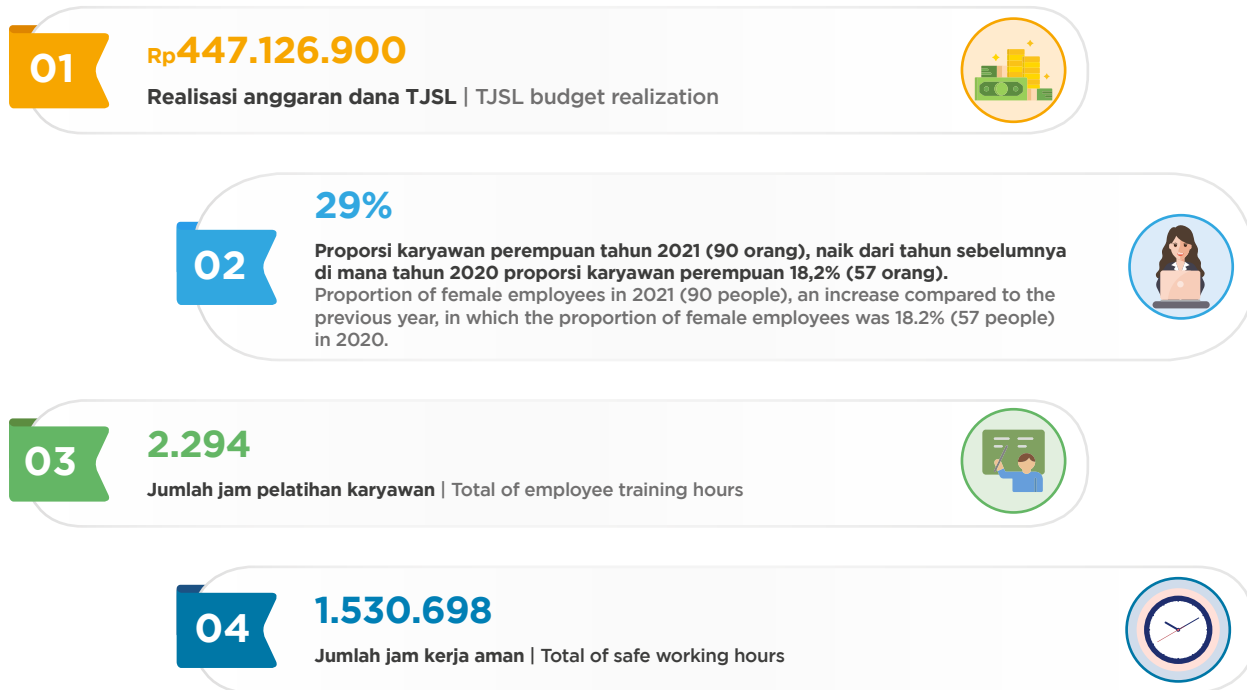
Energi Baru Terbarukan
Renewable Energy

Rp 155,5
miliar | billion



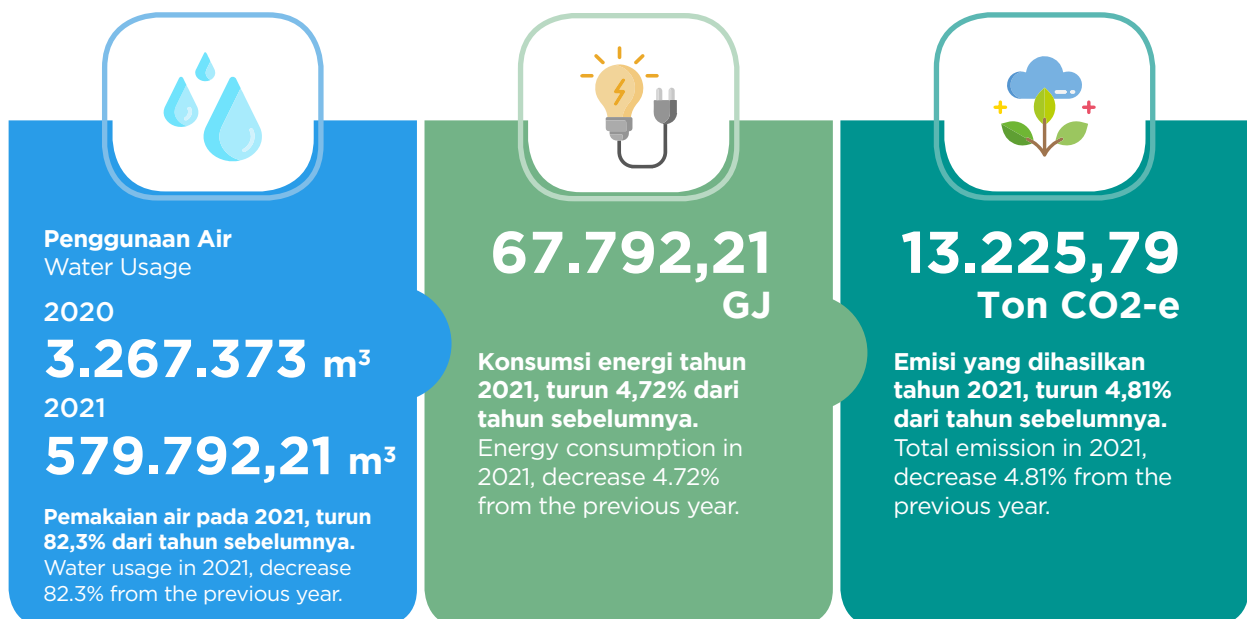
Kinerja Sosial [B.3]

Social Performance [B.3]



Kinerja Lingkungan [B.2]

Environmental Performance [B.2]





PENDIDIKAN



KESEHATAN





LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Statement Letter Board of Commissioners and the Board of Directors about the Responsibility of Annual Report 2021 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Nusantara Infrastructure Tbk 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby confirm that all the information in the Annual Report of PT Nusantara Infrastructure Tbk for the year 2021 has been presented in full, and the Company accepts full responsibility for all contents.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement letter is made truthfully.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners



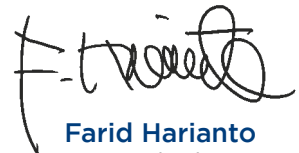
Jose Ma. K. Lim
Komisaris Utama
President Commissioner



Rodrigo E. Franco
Komisaris
Commissioner



Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Farid Harianto
Komisaris
Commissioner

DIREKSI Board of Directors



M. Ramdani Basri
Direktur Utama
President Director/Chief Executive Officer



Danni Hasan
Direktur
Director



Ridwan Irawan
Direktur
Director



Benny S. Santoso
Direktur
Director



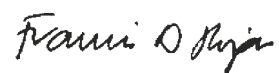
Denn Charly G. Espanola
Direktur
Director



Amadeo N. Bejec
Direktur
Director



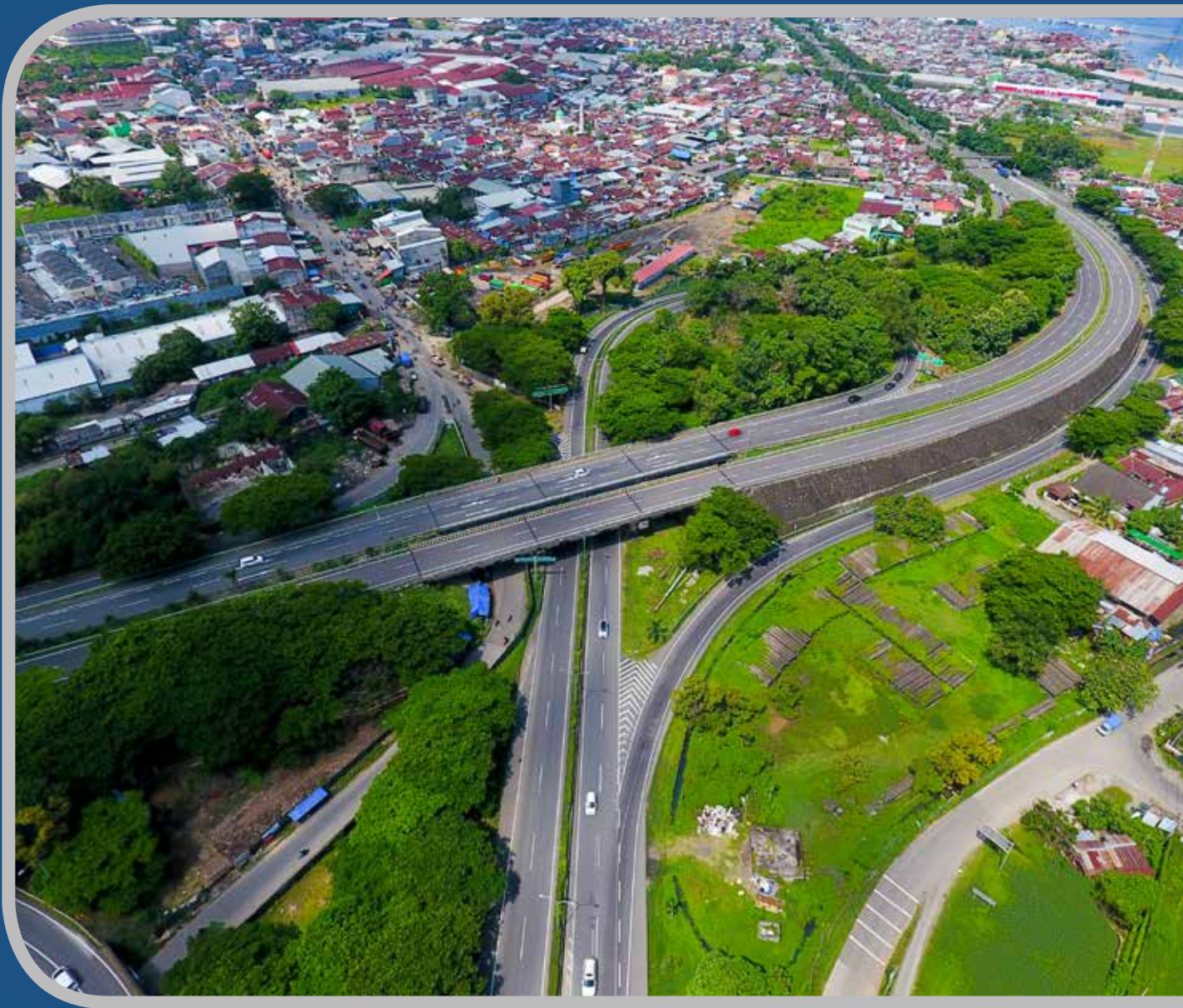
Christopher Daniel C. Lizo
Direktur
Director



Francis Emmanuel D. Rojas
Direktur
Director

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial
Statement



**PT Nusantara Infrastructure Tbk
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of December 31, 2021 and
for the year then ended with independent auditors' report*

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-133	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADATANGGAL TERSEBUT**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
 DAN ENTITAS ANAKNYA**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
 REGARDING THE RESPONSIBILITY
 THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF DECEMBER 31, 2021
 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Nama : Muhammad Ramdani Basri
 Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 38
 Sudirman Central Business District (SCBD)
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190
 Alamat Domisili : Jl. Mendut No. 3, Menteng, Jakarta Pusat
 Nomor Telepon : +6221-515 0100
 Jabatan : Direktur Utama/ <i>President Director</i></p> | <p>Name : Muhammad Ramdani Basri
 Office Address : Equity Tower Lantai 38
 Sudirman Central Business District (SCBD)
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190
 Residential Address : Jl. Mendut No. 3, Menteng, Jakarta Pusat
 Telephone Number : +6221-515 0100
 Position : <i>President Director</i></p> |
| <p>2. Nama : Amadeo N. Bejec
 Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 38
 Sudirman Central Business District (SCBD)
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190
 Alamat Domisili : Kemang Village Residence Unit 2202
 Jl. Pangeran Antasari No.36
 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
 Nomor Telepon : +6221-515 0100
 Jabatan : Direktur/ <i>Director</i></p> | <p>Name : Amadeo N. Bejec
 Office Address : Equity Tower Lantai 38
 Sudirman Central Business District (SCBD)
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190
 Residential Address : Kemang Village Residence Unit 2202
 Jl. Pangeran Antasari No.36
 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
 Telephone Number : +6221-515 0100
 Position : <i>Director</i></p> |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk;</p> | <p>1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk.</i></p> |
| <p>2. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</p> | <p>2. <i>The consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk. have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i></p> |
| <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> | <p>3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk; and</i>
 b. <i>The consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or material facts;</i></p> |
| <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk.</p> | <p>4. <i>We are responsible for internal control system of PT Nusantara Infrastructure Tbk.</i></p> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 18 April 2022/ *Jakarta, April 18, 2022*



Muhammad Ramdani Basri
 Direktur Utama/ *President Director*

Amadeo N. Bejec
 Direktur/ *Director*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00638/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/IV/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Nusantara Infrastructure Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00638/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/IV/2022

*The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Nusantara Infrastructure Tbk*

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk ("the Company") and its subsidiaries (collectively referred to as "the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00638/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/IV/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00638/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/IV/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Said Amru

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294/Public Accountant Registration No. AP.1294

18 April 2022/April 18, 2022



**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	986.018.533.965	4	366.324.551.448	Cash and cash equivalents
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	34.015.068.632	5	43.850.751.128	Financial assets designated at fair value through other comprehensive income
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	25.463.783.159	6a	28.669.489.858	Third parties
Pihak berelasi	65.734.755	35	72.000.000	Related party
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak ketiga	64.658.149.509	6b	69.041.624.556	Third parties
Pihak berelasi	50.844.327.646	35	57.714.918.400	Related parties
Piutang atas perjanjian konsesi jasa jangka pendek	4.733.679.649	13a	4.622.595.229	Short-term service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan jangka pendek	15.681.461.938	12	14.405.217.420	Short-term finance lease receivables
Pajak dibayar di muka	6.123.068.001	19a	10.920.713.900	Prepaid tax
Persediaan	9.516.203.443	8	8.372.811.173	Inventories
Uang muka dan beban dibayar di muka	12.970.781.996	7	10.632.493.458	Advances and prepaid expenses
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	54.851.111.827	9	29.173.932.000	Restricted cash in banks
Jumlah Aset Lancar	1.264.941.904.520		643.801.098.570	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	310.961.506.122	13a	306.600.808.109	Service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan	374.990.251.619	12	386.703.358.022	Finance lease receivables
Klaim pengembalian pajak penghasilan	6.306.621.586	19a	7.734.851.128	Refundable corporate income taxes
Aset pajak tangguhan - neto	9.877.083.286	19e	5.761.762.613	Deferred tax assets - net
Investasi pada entitas asosiasi	885.388.406.850	10	851.442.477.438	Investment in associates
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp136.186.328.993 pada 31 Desember 2021 dan Rp118.506.949.388 pada 31 Desember 2020	117.641.781.367	11	126.481.334.438	Property, plant, and equipment - net of accumulated depreciation of Rp136,186,328,993 as of December 31, 2021 and Rp118,506,949,388 as of December 31, 2020
Aset takberwujud atas perjanjian konsesi - neto	3.458.117.483.690	13b	3.343.417.531.148	Intangible assets of service concession arrangement - net
Aset hak guna - neto	2.735.423.779	14	3.360.524.535	Right of use assets - net
Uang muka proyek dan pembelian aset tetap	100.839.729.478	7	108.275.495.241	Advances for projects and purchase of property, plant, and equipment
Goodwill	52.361.306.745	15	58.995.370.933	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya	3.167.506.795		4.108.780.574	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.322.387.101.317		5.202.882.294.179	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	6.587.329.005.837		5.846.683.392.749	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	74.713.370.590	16	102.299.576.629	Trade payables - Third parties
Utang non-usaha - Pihak ketiga	38.215.578.662	17	38.553.579.392	Non-trade payables - Third parties
Beban akrual	38.727.542.893	18	161.019.708.427	Accrued expenses
Utang pajak	37.419.461.684	19b	22.637.018.105	Taxes payables
Pendapatan diterima di muka	2.995.270.455	20	3.583.830.237	Unearned revenues
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	2.787.581.761	14	2.777.692.120	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	1.470.450.443	21	2.680.932.702	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	403.171.862.184	22	166.445.524.606	Long-term loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	599.501.118.672		499.997.862.218	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	-	14	17.080.715	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	591.548.297	21	1.326.971.616	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	2.455.155.467.015	22	1.838.418.598.811	Long-term loans
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	961.040.058	20	842.576.679	Long-term unearned revenues
Utang non-usaha - Pihak ketiga	10.964.102.484	17	10.964.082.597	Non-trade payables - Third parties
Jaminan pelanggan	3.076.977.999		3.265.983.571	Customer deposits
Liabilitas pajak tangguhan	78.464.391.811	19e	67.352.088.060	Deferred tax liabilities
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang	9.550.112.376	2t	8.842.719.995	Long-term toll road maintenance provision
Liabilitas imbalan pasca-kerja	67.601.077.890	36	60.547.539.716	Post-employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.626.364.717.930		1.991.577.641.760	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	3.225.865.836.602		2.491.575.503.978	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to the Owners of Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp35 per saham Seri A dan Rp70 per saham Seri B				Share capital - par value of Rp35 per share Series A and Rp70 per share Series B
Modal dasar - 2 saham Seri A dan 80.999.999.999 saham Seri B				Authorized - 2 shares of Series A and 80,999,999,999 shares Series B
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 17.710.708.193 saham Seri B	1.239.749.573.545	23	1.239.749.573.545	Issued and fully paid capital - 1 share Series A and 17,710,708,193 shares Series B
Tambahan modal disetor - neto	469.155.766.335	24	469.155.766.335	Additional paid-in capital - net
Modal saham yang diperoleh kembali	(84.522.927.500)	23	(84.522.927.500)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain	(17.160.109.254)		(10.467.838.264)	Other comprehensive income
Komponen ekuitas lainnya	469.420.386.634	25	469.420.386.634	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Sudah ditentukan penggunaannya	17.000.693.559	25	16.306.772.114	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	503.773.538.626		497.639.008.535	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.597.416.921.945		2.597.280.741.399	Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity
Kepentingan nonpengendali	764.046.247.290	26	757.827.147.372	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas	3.361.463.169.235		3.355.107.888.771	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.587.329.005.837		5.846.683.392.749	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN DAN PENJUALAN				REVENUES AND SALES
Pendapatan usaha dan penjualan	661.567.864.878	28	517.203.734.662	Revenues and sales
Pendapatan konstruksi	169.678.605.062	29	1.031.715.055.184	Construction revenues
Pendapatan usaha lainnya	13.543.014.655	28	21.200.516.115	Other operating revenues
Jumlah	844.789.484.595		1.570.119.305.961	Total
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN				DIRECT COSTS AND COST OF SALES
Beban langsung dan beban pokok penjualan	(268.827.083.449)	30	(200.985.987.479)	Direct costs and cost of sales
Beban konstruksi	(169.678.605.062)	29	(1.031.715.055.184)	Construction costs
Jumlah	(438.505.688.511)		(1.232.701.042.663)	Total
LABA BRUTO	406.283.796.084		337.418.263.298	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(190.132.860.072)	31	(172.697.679.322)	General and administrative expenses
Beban operasional lainnya	(65.368.196.572)	32	(31.956.569.280)	Other operating expenses
LABA USAHA	150.782.739.440		132.764.014.696	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan keuangan	7.977.204.923	33	23.397.762.152	Financial income
Beban keuangan	(143.848.656.664)	34	(61.632.049.506)	Financial cost
Bagian laba bersih entitas asosiasi	48.037.695.833	10	41.114.557.804	Share in net profit of associates
LABA SEBELUM PAJAK	62.948.983.532		135.644.285.146	PROFIT BEFORE TAX
(BEBAN)/PENGHASILAN PAJAK				TAX (EXPENSES)/BENEFIT
Kini	(30.380.562.952)	19c	(25.789.021.172)	Current
Tangguhan	(6.807.471.353)	19c, 19e	2.766.621.630	Deferred
JUMLAH BEBAN PAJAK	(37.188.034.305)		(23.022.399.542)	TOTAL TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN	25.760.949.227		112.621.885.604	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	(91.766.421)	10	13.495.102	Share in other comprehensive income of associates
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(9.835.682.496)	5	(15.982.984.056)	Unrealized loss on changes in fair value financial asset available-for-sale
Laba/(rugi) aktuarial dari program imbalan pasca kerja	1.054.124.518	36	(1.101.504.038)	Actuarial gain/(loss) from defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait	(189.511.725)		(32.680.608)	Related income tax
RUGI KOMPREHENSIF LAIN	(9.062.836.124)		(17.103.673.600)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	16.698.113.103		95.518.212.004	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	5.989.245.890		69.392.144.520	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	19.771.703.337	26	43.229.741.084	Non-controlling interests
	25.760.949.227		112.621.885.604	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	136.180.546		57.939.481.847	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali	16.561.932.557	26	37.578.730.157	Non-controlling interests
	16.698.113.103		95.518.212.004	
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	0,34	27	3,92	Basic profit per share attributable to the owners of the parent (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk/
 Equity attributable to the owners of the parent

Saldo 31 Desember 2019	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disor penuh/ issued and fully paid capital	Tambahan modal disor/ Additional paid-in capital	Modal saham yang diperoleh kembali/ Treasury stock	Penghasilan/(rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income/(loss)	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo Laba/Retained Earnings		Kepentingan non-pengendal/ Non-controlling interests	Jumlah/ Total	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as of December 31, 2019
							Sudah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
1.239.746.573.545		(84.522.927.500)	469.155.766.335	(84.522.927.500)	(83.500.089)	497.379.919.488	14.868.635.558	466.184.741.427	591.064.614.454	2.602.722.205.794	3.193.766.823.248	
Selish nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	25, 26	-	-	-	-	(27.959.532.854)	-	-	20.925.802.761	(27.959.532.854)	(7.033.730.093)	
Cadangan umum	25	-	-	-	-	-	1.438.136.556	(1.438.136.556)	-	-	-	
Pembagian dividen interim oleh Perusahaan kepada pemilik entitas induk	25	-	-	-	-	-	-	(35.421.416.388)	-	(35.421.416.388)	(35.421.416.388)	
Penambahan modal di entitas anak	1d, 2b	-	-	-	-	-	-	-	108.258.000.000	-	108.258.000.000	
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(10.374.338.205)	-	-	(1.078.324.468)	(5.651.010.927)	(11.452.662.673)	(17.103.673.600)	
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	69.392.144.520	43.229.741.084	69.392.144.520	112.621.885.604	
Saldo 31 Desember 2020		1.239.746.573.545	469.155.766.335	(84.522.927.500)	(10.467.838.264)	469.420.386.634	16.306.772.114	497.639.008.535	757.827.147.372	2.597.280.741.399	3.355.107.888.771	Balance as of December 31, 2020
Cadangan umum	25	-	-	-	-	-	693.921.445	(693.921.445)	-	-	-	
Pembagian dividen oleh entitas anak kepada kepemilikan non-pengendali	26	-	-	-	-	-	-	-	(10.342.832.639)	-	(10.342.832.639)	
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(6.682.270.950)	-	-	839.205.646	(3.209.770.780)	(5.853.065.344)	(9.062.836.124)	
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	5.989.245.890	19.771.703.337	5.989.245.890	25.760.949.227	
Saldo 31 Desember 2021		1.239.746.573.545	469.155.766.335	(84.522.927.500)	(17.160.109.254)	469.420.386.634	17.000.693.559	503.773.538.626	764.046.247.290	2.597.416.921.945	3.361.463.169.235	Balance as of December 31, 2021
												Change in value of transaction with non-controlling interests
												General reserves
												Interim dividend distribution from the Company to the owners of the parent
												Addition of capital in the subsidiaries
												Other comprehensive income
												Profit for the year
												Balance as of December 31, 2021
												Dividend distribution from the subsidiaries to non-controlling ownership
												Other comprehensive income
												Profit for the year
												Balance as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	Catatan/ Notes	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	676.084.129.190		Cash received from customers
Pembayaran ke pemasok dan karyawan	(348.474.047.013)		Cash paid to suppliers and employees
Pembayaran beban keuangan	(141.944.883.011)		Payment of financial cost
Pembayaran pajak penghasilan	(17.585.299.121)		Payment of income tax
Penerimaan pendapatan keuangan	8.466.287.135		Receipt of financial income
Kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya	(25.677.179.827)		Increase in restricted cash
Penerimaan/(pembayaran) atas beban dan pendapatan operasi lainnya	(31.905.319.546)		Cash receipt/(payment) from other operating income and expenses
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	118.963.687.807		Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset takberwujud	(1.930.037.606)		Acquisition of intangible assets
Perolehan aset perjanjian konsesi	(322.232.444.758)		Acquisition of service concession assets
Perolehan aset tetap	(8.504.894.540)	11	Acquisition of property, plant and equipment
Peningkatan investasi saham pada entitas anak	-	1d	Increase in investment in shares of a subsidiary
Penerimaan dividen tunai	21.000.000.000	10	Receipt of cash dividend
Peningkatan uang muka	(17.709.913.562)	7	Increase in advances
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(329.377.290.466)		Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman jangka panjang	1.276.048.785.335	22	Drawdowns of long-term loans
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(433.463.395.848)	22	Payments of long-term loans
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(2.280.817.578)	21	Payments of consumer financing liabilities
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(10.196.986.733)		Payment of dividend to non-controlling interest
Setoran modal di muka kepentingan nonpengendali di entitas anak	-		Advance for capital contributions of non-controlling interest in subsidiaries
Setoran modal kepentingan nonpengendali di entitas anak	-	26	Capital contributions of non-controlling interest in subsidiaries
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	-	25	Payment of dividend to parent of the entity
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	830.107.585.176		Net Cash Received in Financing Activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	619.693.982.517		NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	366.324.551.448		CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	986.018.533.965		CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian perusahaan

PT Nusantara Infrastructure Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 1995 dari Abdullah Ashal, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375. HT.01.01.Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 15, Tambahan No. 1140 tanggal 20 Februari 2001.

Pada tanggal 13 Maret 2018 telah dibuat Akta Notaris No. 69 dari Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penambahan ketentuan dividen. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0111765 tanggal 15 Maret 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 119 tanggal 31 Agustus 2018 dari Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0240614 tanggal 7 September 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas bumi. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol (Tangerang dan Makassar), jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan. Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial pada tanggal 2 Januari 2000.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Menara Equity Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

1. GENERAL

a. The Company’s establishment

PT Nusantara Infrastructure Tbk (the “Company”) was established under the name of PT Sawitia Bersama Darma in Jakarta based on Notarial Deed No. 3 dated September 1, 1995 of Abdullah Ashal S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-17.375. HT.01.01.Tahun 1995 dated December 28, 1995 and published in State Gazette No. 15, Supplement No. 1140 dated February 20, 2001.

On March 13, 2018, Notarial Deed No. 69 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notary in Jakarta has been released, regarding the changes in the Company’s Articles of Association concerning addition of dividend policy. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0111765 dated March 15, 2018.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 119 dated August 31, 2018 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notary in Jakarta, regarding the changes of composition of Company’s Boards of Commissioners and Directors. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0240614 dated September 7, 2018.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the Company’s scope of activities is to engage in services, trading and development related to infrastructure, mining, oil and natural gas. Currently the Company’s main activity is investing in shares of companies engaged in management of toll roads (Tangerang and Makassar), port services, telecommunication services, water treatment, trading and construction. The Company started its commercial activities on January 2, 2000.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office’s address is at Equity Tower 38th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham perusahaan

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Surat No. S-1609/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum perdana 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran Rp200 per saham. Pada tanggal 18 Juli 2001, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I

Pada tanggal 14 Juli 2010, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan suratnya No. S-6435/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 26 Juli 2010. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 3 Agustus 2010, para pemegang saham dapat membeli 8.508.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp70 per saham dengan harga penawaran Rp88 per saham. Pada tahun 2010, 8.476.500.000 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

Seiring dengan penerbitan HMETD, untuk setiap 5 HMETD, Perusahaan menerbitkan 1 (satu) Waran Seri I diberikan secara gratis. Pemegang Waran Seri I bisa membeli saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dengan harga pelaksanaan Rp88 per saham, yang dapat dilaksanakan mulai 7 Februari 2011 sampai dengan 26 Juli 2013. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan berjumlah 1.695.300.000, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp149.186.400.000. Pada tahun 2012, 4.044.336 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan Waran Seri I. Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Waran Seri I tanggal 26 Juli 2013, jumlah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.694.886.165 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh. Sisa jumlah Waran Seri I yang tidak dilaksanakan adalah sebanyak 413.835 saham Seri B.

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the company's shares

On June 29, 2001, the Company obtained an Effective Statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) in his Letter No. S-1609/PM/2001 to conduct initial public offering of 60,000,000 shares with par value of Rp100 per share, at an offering price of Rp200 per share. On July 18, 2001, all of these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

Limited public offering by issuing pre-emptive rights I

On July 14, 2010, the Company obtained an Effective Statement from Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM-LK) in his letter No. S-6435/BL/2010 to conduct a limited public offering by issuing pre-emptive rights to shareholders registered on or before July 26, 2010. Through the pre-emptive rights, which is applicable until August 3, 2010, the shareholders can purchase 8,508,000,000 Series B shares with par value of Rp70 per share, at an offering- price of Rp88 per share. In 2010, 8,476,500,000 Series B shares have been issued and fully paid in relation to the pre-emptive rights.

In line with the issuance of pre-emptive rights, for every 5 rights issue, the Company issue 1 (one) Series I Warrant for free. The holders of Series I Warrants could purchase Series B share with par value of Rp70 per share with exercise price of Rp88 per share, which can be exercised from February 7, 2011 to July 26, 2013. Number of Series I Warrants issued totaled to 1,695,300,000, with total amount of Rp149,186,400,000. In 2012, the 4,044,336 shares Series B have been issued and fully paid in relation to Series I Warrants. Until the end of Series I Warrants exercise period on July 26, 2013, total Series I Warrant exercised are 1,694,886,165 Series B shares have been issued and fully paid. Total unexercised Series I Warrant are 413,835 shares Series B.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham perusahaan (lanjutan)

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II

Pada tanggal 3 Desember 2018, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-174/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 21 Desember 2018. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 21 Desember 2018, para pemegang saham dapat membeli 2.475.036.314 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp70 per saham dengan harga penawaran Rp200 per saham. Pada tahun 2018, 2.475.036.314 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

Seiring dengan penerbitan HMETD, setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 13 Desember 2018 berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada Harga Pelaksanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh saham Perusahaan sejumlah 17.710.708.194 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Perubahan pencatatan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Tanggal/ Date	Aksi Korporasi/ Corporate Action	Jumlah Saham/ Total Shares	Jumlah Setelah Pencatatan Saham/ Total Shares After Shares Listing	Modal Disetor/ Paid Capital
18 Juli 2001/ July 18, 2001	Penawaran Umum Pedana/ Initial Public Offering	60.000.000	60.000.000	6.000.000.000
18 Juli 2001/ July 18, 2001	Penambahan Pencatatan/ Listing Addition	375.000.000	435.000.000	43.500.000.000
8 November 2006/ November 8, 2006	Penggabungan Usaha/ Merger	9.693.571.429	10.128.571.429	354.500.000.015

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the company's shares (continued)

Limited public offering by issuing pre-emptive rights II

On December 3, 2018, the Company obtained an Effective Statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) in his letter No. S-174/D.04/2018 to conduct a limited public offering by issuing pre-emptive rights to shareholders registered on or before December 21, 2018. Through the pre-emptive rights, which is applicable until December 21, 2018, the shareholders can purchase 2,475,036,314 Series B shares with par value of Rp70 per share, at an offering-price of Rp200 per share. In 2018, 2,475,036,314 Series B shares have been issued and fully paid in relation to the pre-emptive rights.

In line with the issuance of Rights, each holder of 6 (six) existing shares whose names are registered in the Registered Holders of the Company's shares on December 13, 2018 entitled to obtain 1 (one) Rights, whereby every 1 (one) Rights gives the holder the right to buy 1 (one) new share on the Implementation Price.

As of December 31, 2021 and 2020, all of the Company's outstanding shares of 17,710,708,194 shares have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

Changes in Company's share listing are as follow:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham perusahaan (lanjutan)

Perubahan pencatatan saham Perusahaan adalah sebagai berikut (lanjutan):

Tanggal/ Date	Aksi Korporasi/ Corporate Action	Jumlah Saham/ Total Shares	Jumlah Setelah Pencatatan Saham/ Total Shares After Shares Listing	Modal Disetor/ Paid Capital
20 Juli 2010/ July 20, 2010	Penggabungan Nilai Nominal/ Merger of Nominal Value	(5.064.285.714)	5.064.285.715	354.500.000.050
12 Agustus 2010/ August 12, 2010	Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD I / Limited Public Offering with Preemptive Rights I	8.476.500.000	13.540.785.715	947.855.000.050
7 Februari 2011-26 Juli 2013/ February 7, 2011- July 26, 2013	Konversi Waran Seri 1/ Warrant Series 1	1.694.886.165	15.235.671.880	1.066.497.031.565
28 Desember 2018/ December 28, 2018	Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD II/ Limited Public Offering with Preemptive Rights II	2.475.036.314	17.710.708.194	1.239.749.573.545

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Jose Ma. Kamantigue Lim	:	President Commissioner
Komisaris	:	Rodrigo Emmanuel Franco	:	Commissioner
Komisaris	:	Farid Harianto	:	Commissioner
Komisaris Independen	:	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	:	Independent Commissioner
Direktur Utama	:	Muhammad Ramdani Basri	:	President Director
Direktur	:	Omar Danni Hasan	:	Director
Direktur	:	Benny Setiawan Santoso	:	Director
Direktur	:	Ridwan Abdul Chalif Irawan	:	Director
Direktur	:	Denn Charly Gonzales Espanola	:	Director
Direktur	:	Amadeo Navalta Bejec	:	Director
Direktur	:	Christopher Daniel Cabrera Lizo	:	Director
Direktur	:	Francis Emmanuel Dalupas Rojas	:	Director
Ketua Komite Audit	:	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	:	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	:	Tavip Santoso	:	Member of Audit Committee
Anggota Komite Audit	:	Tufrida Murniati Hasyim	:	Member of Audit Committee
Sekretaris Perusahaan	:	Dahlia Evawani	:	Corporate Secretary
Pelaksana Tugas Ketua Internal Audit dan Governance	:	Junianto Tri Priyono	:	Acting Chairman of Internal Audit and Governance

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the company's shares (continued)

Changes in Company's share listing are as follow (continued):

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

The Company's Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah keseluruhan karyawan tetap yang dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebanyak 273 (2020: 270) orang (tidak diaudit).

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anaknya disebut sebagai "Grup".

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini:

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees (continued)

As of December 31, 2021, the Company and its Subsidiaries' total permanent employees are 273 (2020: 270) employees (unaudited).

d. The Company's Consolidated Subsidiaries

The Company and its Subsidiaries will be referred as the "Group".

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Entitas anak/Subsidiaries	Kegiatan usaha/ Business activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Tahun Awal kegiatan komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in million Rupiah)	
				31 Des./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020	31 Des./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
<u>Pemilikan Langsung/ Direct ownership:</u>							
PT Telekom Infranasantara (TI)	Perdagangan, perlengkapan dan telekomunikasi lain/ Trading, supplies and other telecommunications	Jakarta	2014	100,00%	100,00%	85.192	86.258
PT Margautama Nusantara (MUN)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan sub-holding untuk jalan tol/ Construction, trading, services, and sub-holding for toll road	Jakarta	2011	76,51%	76,51%	5.179.172	4.443.905
PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ Water and waste management services	Jakarta	2012	99,99%	99,99%	230.119	413.332
PT Energi Infranasantara (EI)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan sub-holding untuk energi/ Construction, trading, services, and sub-holding for energy	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	708.527	719.867
PT Portco Infranasantara (Portco)	Manajemen pelabuhan/ Port management	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	156.204	161.164
PT Marga Metro Nusantara (Marga)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ Construction, trading and services	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	70,00%	70,00%	73.039	73.168
<u>Pemilikan Tidak Langsung/ Indirect ownership:</u>							
PT Makassar Metro Network (MMN) (melalui/through MUN)	Pengelola jalan tol/Toll road operator	Makassar	1998	76,10%	76,10%	3.081.551	2.976.577
PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (melalui/through MUN)	Pengelola jalan tol/Toll road operator	Tangerang	1999	66,68%	66,68%	1.481.295	718.432
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (melalui/through MMN dan/and MUN)	Pengelola jalan tol/Toll road operator	Makassar	2008	75,66%	75,66%	660.364	676.881
PT Metro Jakarta Ekspresway (MJE) (melalui/through JTSE, MMN dan/and MUN)	Pengelola jalan tol/Toll road operator	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	64,31%	64,31%	51	51
PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih/ Water management services	Serang	1997	65,00%	65,00%	217.211	213.686

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini:

Entitas anak/Subsidiaries	Kegiatan usaha/ Business activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Tahun Awal kegiatan komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in million Rupiah)	
				31 Des./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020	31 Des./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
<u>Pemilikan Tidak Langsung (lanjutan)/ Indirect ownership (continued):</u>							
PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ Water and waste management services	Medan	2014	74,52%	74,52%	119.319	114.530
PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ Water and waste management services	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	51.312	45.202
PT Sarana Tirta Rezeki (STR) (melalui/through Potum dan/and SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih/ Water management services	Serang	1997	52,00%	52,00%	29.796	28.370
PT Jasa Sarana Nusa Makmur (JSNM) (melalui/through Potum dan/and SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih/ Water management services	Serang	2007	64,97%	64,97%	7.235	6.460
PT Inpol Meka Energi (IME) (melalui/through EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik/ Power supply services	Jakarta	2020	61,22%	61,22%	420.308	427.492
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) (melalui/through EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik/ Power supply services	Pontianak	2018	79,99%	79,99%	233.767	244.195
PT Auriga Energi (Auriga) (melalui/through EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ Construction, trading and services	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	100%	100%	100	100
PT Energi Parindu Nusantara (EPN) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ Construction, trading and services	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	100%	100%	100	100
PT Centara Energi (CE) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ Construction, trading and services	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	100%	100%	100	100
PT Eris Serra Energi (ESE) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ Construction, trading and services	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	100%	100%	100	100
PT Eridanusa Energi Nusantara (EEN) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ Construction, trading and services	Jakarta	Belum beroperasi/ Pre-operating	100%	100%	100	100

PT Margautama Nusantara (MUN)

Berdasarkan akta notaris No. 45 tanggal 29 April 2020 dari Karin Christiana Basoeki, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penambahan modal pada MUN senilai Rp40.600.000.000 atau setara dengan 580 saham. Atas transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan di MUN meningkat menjadi 76,51%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0207753 tanggal 2 Mei 2020. Dari transaksi tersebut, Perusahaan mencatat selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebesar Rp33.626.588.810 di akun Komponen Ekuitas Lainnya (Catatan 25).

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Entitas anak/Subsidiaries	Kegiatan usaha/ Business activity	Tempat kedudukan/ Domicile	Tahun Awal kegiatan komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in million Rupiah)	
				31 Des./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020	31 Des./ Dec. 31, 2021	31 Des./ Dec. 31, 2020
<u>PT Margautama Nusantara (MUN)</u>							
Based on notarial deed No. 45 dated April 29, 2020 of Karin Christiana Basoeki, SH, notary in Jakarta, the Company made capital injection to MUN amounting to Rp40,600,000,000 or equivalent to 580 shares. From such transaction, the Company's shares interest in MUN increased to 76.51%. The deed was received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0207753 dated May 2, 2020. From these transactions, the Company recognized difference transactions with non-controlling interest amounting to Rp33,626,588,810 in Other Equity Component (Notes 25).							

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Makassar Metro Network (MMN)

Pada 2 November 2020, nama entitas anak, PT Bosowa Marga Nusantara, telah diubah menjadi PT Makassar Metro Network berdasarkan akta Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 02 tanggal 2 November 2020, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0185421.AH.01.11. tanggal 5 November 2020.

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 30 Desember 2019 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp389.900.000.000 atau setara dengan 389.900 saham. MMN meningkatkan kepemilikannya di JTSE melalui konversi hutang sebesar Rp17.000.000.000 atau setara dengan 17.000 saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0001892 tanggal 3 Januari 2020.

PT Energi Infranusantara (EI)

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 30 Juni 2020 dari Citra Buana Tungga S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan melakukan penyeteroran modal tambahan ke EI sebesar Rp22.740.000.000 untuk 22.740 saham, setara dengan 9,77% kepemilikan saham, sehingga modal dasar di EI meningkat dari Rp209.933.000.000 menjadi Rp232.672.000.000. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0315170 tanggal 29 Juli 2020.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Makassar Metro Network (MMN)

On November 2, 2020, the name of a subsidiary, PT Bosowa Marga Nusantara, was changed to PT Makassar Metro Network based on notarial deed No. 02 of Karin Christiana Basoeki, S.H., dated November 2, 2020 which was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0185421.AH.01.11. dated November 5, 2020.

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Based on notarial deed No. 16 dated December 30, 2019 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") increased its issued and fully paid capital amounting to Rp389,900,000,000 or equivalent to 389,900 shares. MMN increased its ownership interest in JTSE through conversion of payables amounting to Rp17,000,000,000 or equivalent to 17,000 shares. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0001892 dated January 3, 2020.

PT Energi Infranusantara (EI)

Based on notarial deed No. 26 dated June 30, 2020 by Citra Buana Tungga S.H., notary in Jakarta, The Company makes additional paid up capital to EI of Rp22,740,000,000 for 22,740 shares, representing 9.77% share ownership, so authorized capital in EI has increase from Rp209,933,000,000 to Rp232,672,000,000. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0315170 dated July 29, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Inpola Meka Energi (IME)

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 24 Februari 2020 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI, entitas anak, melakukan pengambilalihan saham ditempatkan dan disetor milik PT Tagora Green Energy ("TGE") pada IME sebesar Rp6.400.000.000 atau setara dengan 6.400 saham. EI meningkatkan kepemilikannya di IME melalui *set-off* utang TGE pada EI dan pembayaran sebesar Rp1.500.000.000 kepada TGE. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0105995 tanggal 25 Februari 2020. Dari transaksi tersebut, IME mencatat selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebesar Rp5.667.055.956 di akun Komponen Ekuitas Lainnya (Catatan 25).

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Berdasarkan akta notaris No. 24 tanggal 30 Juni 2020 oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, RPSL, entitas anak tidak langsung, melakukan penambahan modal dasar dan modal ditempatkan masing-masing menjadi sebesar Rp105.595.000.000 atau masing-masing setara dengan 105.595.000 lembar saham. Atas penambahan modal ditempatkan tersebut, EI telah mengambil bagian sebesar Rp476.000.000 atau setara dengan 476.000 lembar saham, sementara PT Tridarma Energi Barata Nusantara mengambil bagian penambahan sebesar Rp119.000.000 atau setara dengan 119.000 lembar saham. Setelah transaksi tersebut, kepemilikan EI dan PT Tridarma Energi Barata Nusantara pada RPSL tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham yaitu masing-masing tetap memiliki 80% dan 20% kepemilikan saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0401948 tanggal 26 Oktober 2020.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Inpola Meka Energi (IME)

Based on notarial deed No. 19 dated February 24, 2020 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI, a subsidiary, took over the PT Tagora Green Energy ("TGE") issued and paid shares of IME amounting to Rp6,400,000,000 or equivalent to 6,400 shares. EI increased its ownership interest in IME through set-off payables of TGE to EI and payment amounted by Rp1,500,000,000. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0105995 dated February 25, 2020. From these transactions, the Company recognized difference transactions with non-controlling interest amounting to Rp5,667,055,956 in Other Equity Component (Notes 25).

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Based on the notary deed No. 24 dated June 30, 2020 by Citra Buana Tungga, SH, M.Kn., notary in Jakarta, RPSL, an indirect subsidiary, increased the authorized capital to Rp105,595,000,000 or equivalent to 105,595 shares, respectively. For such additional issued capital, EI took part in amount of Rp476,000,000 or 476,000 shares, meanwhile PT Tridarma Energi Barata Nusantara took part in amount of Rp119,000,000 or 119,000. After this transaction, the ownership composition of EI and PT Tridarma Energi Barata Nusantara in the RPSL is not change, EI and PT Tridarma Energi Barata Nusantara owned 80% and 20% ownership interest, respectively. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0401948 dated October 26, 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi
(lanjutan)**

PT Telekom Infranasantara

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekom Infranasantara yang diaktakan dengan Akta No.5 tanggal 11 Desember 2019 oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang, menyetujui penurunan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp138.100.000.000, atau setara dengan 138.100 saham, menjadi sebesar Rp58.100.000.000, atau setara dengan 58.100 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0012351.AH.01.02 tanggal 12 Februari 2020.

PT Energi Parindu Nusantara (EPN)

Berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 14 September 2020 dari Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI dan Portco melakukan pengalihan kepemilikan saham EPN kepada PT Auriga Energi, entitas anak EI, sebesar Rp99,900,000 untuk 999 saham, setara dengan 99,9% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan PT Auriga Energi menjadi 99,9% dan EI menjadi 0,1%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0387399 tanggal 17 September 2020.

PT Eris Serra Energi

Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 14 September 2020 dari Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, EI dan Portco melakukan pengalihan kepemilikan saham di PT Eris Serra Energi kepada PT Auriga Energi, entitas anak EI, sebesar Rp99,900,000 untuk 999 saham, setara dengan 99,9% kepemilikan saham, sehingga kepemilikan PT Auriga Energi menjadi 99,9% dan EI menjadi 0,1%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0387398 tanggal 17 September 2020.

1. GENERAL (continued)

**d. The Company's Consolidated Subsidiaries
(continued)**

PT Telekom Infranasantara

Based on the Decision of the Shareholders of PT Telekom Infranasantara which was notarized by Deed No.5 dated December 11, 2019 by Citra Buana Tungga, SH, M.Kn., a notary in Tangerang, approved the reduction of issued and paid-up capital from Rp138,100,000,000, or equivalent to 138,100 shares into Rp58,100,000,000, or equivalent to 58,100 shares. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0012351.AH.01.02 dated February 12, 2020.

PT Energi Parindu Nusantara (EPN)

Based on notarial deed No. 21 dated September 14, 2020 from Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI and Portco transferred the ownership interest in EPN to PT Auriga Energi, a subsidiary of EI, in amount of Rp99,900,000 for 999 shares, representing 99.9% share ownership, so PT Auriga Energi's share ownership become 99.99% and EI become 0.1%. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0387399 dated September 17, 2020.

PT Eris Serra Energi

Based on notarial deed No. 5 dated September 14, 2020 from Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, EI and Portco transferred the ownership interest in of PT Eris Serra Energi to PT Auriga Energi, a direct subsidiary of EI, in amount of Rp99,900,000 for 999 shares, representing 99.9% share ownership, so PT Auriga Energi's share ownership become 99.99% and EI become 0.1%. The deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0387398 dated 17 September 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Eridanusa Energi Nusantara

Berdasarkan akta notaris No. 1 tanggal 4 Agustus 2020, oleh Karin Christiana Basoeki, S.H, M.KN, notaris di Tangerang, El dan Auriga membentuk PT Eridanusa Energi Nusantara yang bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, dan aktivitas konsultasi manajemen. Jumlah kepemilikan saham El dan Auriga pada PT Eridanusa Energi Nusantara adalah sebanyak masing-masing 99 saham atau setara dengan 99% kepemilikan dan 1 saham atau setara dengan 1% kepemilikan. Akta Pendirian PT Eridanusa Energi Nusantara telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0129591.AH.01.11. tanggal 7 Agustus 2020.

PT Marga Metro Nusantara (Marga)

Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 24 Juli 2020 oleh Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Marga melakukan penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp248.520.000.000 atau setara dengan 248.520 lembar saham. Atas penambahan modal dasar tersebut, Perusahaan telah melakukan penyetoran sebesar Rp43.491.000.000 untuk 43.491 saham, dan PT Marga Bangun Semesta (MBS) melakukan penyetoran sebesar Rp18.639.000.000 atau setara dengan 18.639 saham. Sehingga kepemilikan Perusahaan dan MBS pada Marga masing-masing menjadi 70% dan 30%. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0342113 tanggal 11 Agustus 2020. Dari transaksi tersebut, Marga mencatat jumlah selisih transaksi dengan pihak nonpengendali sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan pada tanggal 18 April 2022.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Eridanusa Energi Nusantara

Based on the notary deed No. 1 dated August 4, 2020, by Karin Christiana Basoeki, S.H, M.KN, notary in Tangerang, El and Auriga established PT Eridanusa Energi Nusantara, which is engaged in power plants, electricity support activities, and management consulting activities. The amount of El and Auriga's share ownership in PT Eridanusa Energi Nusantara are 99 shares or equal to 99% ownership and 1 share or equal to 1% ownership, respectively. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0129591.AH.01.11. dated 7 Agustus 2020.

PT Marga Metro Nusantara (Marga)

Based on the notary deed No. 19 dated July 24, 2020 by Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, Marga increase the authorized capital to Rp248,520,000,000 or equivalent to 248,520 shares. For such additional authorized capital, the Company made deposits of Rp43,491,000,000 or equivalent to 43,491 shares, and PT Marga Bangun Semesta (MBS) made deposits of Rp18,639,000,000 or equivalent to 18,639 shares. Thus, the ownership of the Company and MBS on the Marga became 70% and 30%, respectively. The deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0342113 dated August 11, 2020. From such transaction, Marga records the amount of difference in transactions with non-controlling parties as disclosed in Note 26.

e. Completion of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Management on April 18, 2022.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants and Rule No. VIII.G.7 Attachment of Chairman of OJK's decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1: "Presentation of Financial Statements". The consolidated financial statements, except consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities.

b. Changes in accounting principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2021, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- Amandemen PSAK 22: "Definisi Bisnis";
- Amandemen PSAK 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran";
- Amandemen PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengukuran";
- Amandemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- Amandement PSAK 73: "Sewa".

Penyesuaian Tahunan 2021

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian amandemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).
- PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Amendment PSAK 22: "Definition of a Business";
- Amendment PSAK 55: "Financial Instrument: Recognition";
- Amendment PSAK 60: "Financial Instrument: Disclosure";
- Amendment PSAK 71: "Financial Instruments";
- Amendment PSAK 73: "Lease".

2021 Annual Improvements

The following summary provides information on the annual improvements of PSAKs that are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021. The annual improvements of PSAK are basically a set of narrow scope amendments that provide clarification so that there are no significant changes to existing principles or new principles.

- PSAK 1: Presentation of Financial Statements, some changes regarding consideration made by management in the process of applying accounting policies that significantly affect the amounts they recognize in the financial statements.
- PSAK 13: Investment Property, regarding disclosure of applying fair value model has been deleted.
- PSAK 48: Impairment of Assets, regarding the scope of impairment of assets and deletion of the difference with IFRS in IAS 36 paragraph 04(a).
- PSAK 66: Joint Arrangement, Regarding adjustments in paragraphs 25, PP11, PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 regarding reference to PSAK 71: Financial instruments.
- ISAK 16: Service concession arrangement, regarding adjustment in several paragraphs in illustrative example to be consistent with PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on the Group's consolidated financial statements.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 35.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Basis of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 35.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Rp14.269 dan Rp14.105 per 1 Dolar Amerika Serikat (USD).

f. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Foreign Currency Transactions and
Translations**

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the consolidated statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2021 and 2020 were Rp14,269 and Rp14,105 per 1 United States Dollar (USD), respectively.

f. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**f. Current and non-current classification
(continued)**

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

g. Fair Value Measurement

The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or*
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1* - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) *Level 2* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) *Level 3* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

h. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas penuh dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang ditempatkan pada rekening penampungan (*escrow account*) selama periode tertentu, sesuai dengan persyaratan restrukturisasi pinjaman bank, disajikan sebagai "Kas di bank yang Dibatasi Penggunaannya".

i. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa dalam kegiatan usaha normal.

j. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Fair Value Measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and cash in banks. Cash equivalents are liquid short term investments which can be converted immediately into cash with an original maturity of 3 (three) months or less from the date of placement, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings nor restricted to use.

Cash and cash equivalents which are placed in an escrow account for a certain period, in accordance with the requirements of the bank debt restructuring, is presented as the "Restricted Cash in Banks".

i. Trade Receivables

Trade receivables represents amounts due from customers for the sale of goods or services in the business' normal activities.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

k. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Persediaan (lanjutan)

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

- i) Bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;
- ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban overhead berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman.

Sehubungan dengan pembelian bahan baku, biaya perolehan awal persediaan termasuk pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas kualifikasian, diakui dalam PKL.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

l. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Inventories (continued)

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follow:

- i) Raw materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;
- ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity but excluding borrowing costs.

Initial cost of inventories includes the transfer of gains and losses on qualifying cash flow hedges, recognized in OCI, in respect of the purchases of raw materials.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

l. Property, Plant, and Equipment

Property, plant, and equipment, except land, are stated at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment value, if any. Land is stated at cost and is not depreciated.

The initial cost of property, plant, and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property, plant, and equipment to its working condition and location for its intended use.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Aset Tetap (lanjutan)

Pemilikan Langsung

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan untuk operasi, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut dengan jelas menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah, dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa manfaat (tahun)/Useful lives
Bangunan	20
Mesin dan peralatan	5
Peralatan kantor	4 - 5
Kendaraan	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Property, Plant, and Equipment (continued)

Direct Acquisition

Expenditures incurred after the property, plant, and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to the operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property, plant, and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property, plant, and equipment.

Depreciation of property, plant, and equipment, except land, is computed on a straight-line basis over the property, plant, and equipment's useful lives as follows:

Persentase Depresiasi/ Percentage of Depreciation	Type of property, plant, and equipment
5%	Buildings
20%	Machinery and equipment
25% - 20%	Office equipment
20%	Vehicles

An item of property, plant, and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of property, plant, and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceed, if any, with the carrying amount of the item) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dinyatakan berdasarkan biaya perolehan termasuk biaya perolehan tanah dan akumulasi biaya pembangunan. Pada saat pembangunan tersebut selesai dan siap untuk digunakan, jumlah biaya yang terjadi diklasifikasikan ke akun "Aset Tetap" atau "Aset Takberwujud" sesuai peruntukannya.

m. Sewa

Grup menilai pada saat insepisi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Property, Plant, and Equipment (continued)

The carrying value of property, plant, and equipment, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if not appropriate, at each financial year end.

Construction in Progress

Construction in progress is stated at cost. Costs include acquisition cost of land and accumulated construction costs. When the construction is completed and ready for its intended use, the total cost incurred is reclassified to the related "Property, Plant, and Equipment" or "Intangible Assets" account.

m. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Aset hak-guna (lanjutan)

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2r).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Right-of-use assets (continued)

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2r).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset dasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Lease liabilities (continued)

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (NWPKL), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2u.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income (FVOCI), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- FVTPL.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha dan lain-lain, piutang plasma, dan pinjaman kepada pihak berelasi yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes trade and other receivables, plasma receivables, and loans to related parties under other non-current financial assets.

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)
(lanjutan)

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi
keuntungan dan kerugian kumulatif setelah
pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba
rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments)
(continued)

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no
recycling of cumulative gains and losses upon
derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or
loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR") (lanjutan)

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif, dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") (continued)

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired; or
- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan KKE untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan risiko kredit rendah yang disederhanakan. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 30 hari dari tanggal jatuh tempo.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit baik untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk mengestimasi KKE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Because its trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Good Credit Rating Agency and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Good Credit Rating Agency both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECLs.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank dan utang pihak berelasi.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued expense, short-term employee benefits liability, bank loans and due to related parties.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

(ii) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (lanjutan)

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(iii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

(ii) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(iii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

o. Investasi pada entitas asosiasi

Jika Perusahaan memiliki pengaruh signifikan (namun bukan mengendalikan) terhadap kebijakan keuangan dan kebijakan operasi suatu entitas, entitas tersebut diklasifikasikan sebagai entitas asosiasi. *Investee* dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity-accounted investees*) dan diakui sebesar harga perolehan pada saat awal perolehan. Perusahaan anaknya mengakui bagian dari laba dan rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika kerugian melebihi investasi pada entitas asosiasi kecuali jika terdapat jaminan tertentu. Pengaruh signifikan diasumsikan terjadi ketika Grup memiliki antara 20% sampai dengan 50% hak suara entitas lain. Biaya investasi termasuk biaya transaksi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi antara Grup dengan perusahaan asosiasi diakui hanya sebatas kepentingan investor terkait dalam asosiasi. Bagian keuntungan dan kerugian penanam modal yang timbul dari transaksi asosiasi itu dihilangkan terhadap nilai tercatat asosiasi.

Laporan keuangan konsolidasian mencakup bagian laba rugi Grup dan penghasilan komprehensif lain dari *investee* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, setelah dilakukan penyesuaian untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi *investee* yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan kebijakan Grup, sejak tanggal dimulainya pengaruh signifikan sampai dengan pengaruh signifikan berakhir.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

o. Investments in associates

Where the Company has the power to participate in (but not control) the financial and operating policy decisions of another entity, it is classified as an associate. Associates are recorded by equity-accounted investees method and initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost. The Company's share of post-acquisition profits and losses is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except that losses in excess of the Group's investment in the associate are not recognized unless there is an obligation to make good those losses. The Group has the power to participate when it owned the entity's voting rights between 20% to 50%. Cost of investment include transaction cost.

Profits and losses arising on transactions between the Group and its associates are recognized only to the extent of unrelated investors' interests in the associate. The investor's share in the associate's profits and losses resulting from these transactions is eliminated against the carrying value of the associate.

The consolidated financial statements include equity in profit or loss of the Group and other comprehensive income from investee under equity method, therefore adjustment shall be made to adjust accounting policies on investee which has been record using the equity method with the Group's policies started from the date of significant control until its ended.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi.

Apabila terdapat bukti obyektif penurunan nilai, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

p. Perjanjian konsesi jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Investments in associates (continued)

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that its investments in the associates are impaired. The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investments in its associates.

If there is objective evidence of impairment, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates and their carrying value, and recognizes the impairment in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

p. Service concession arrangements

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Aset takberwujud

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Grup mengakui aset takberwujud yang berasal dari perjanjian jasa konsesi sejauh menerima hak untuk membebankan pengguna sarana konsesi. Aset takberwujud yang diperoleh dari penyediaan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan dalam perjanjian jasa konsesi diukur pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal.

Pengakuan setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur pada nilai perolehannya, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai.

Estimasi umur manfaat dari aset takberwujud pada perjanjian jasa konsesi adalah periode ketika Grup mampu membebankan kepada pengguna jasa publik atas pemanfaatan sarannya hingga berakhirnya masa konsesi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Service concession arrangements
(continued)**

Intangible assets

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Indonesia Toll Road Authority ("BPJT") for no consideration.

The Group recognized an intangible assets arising from a service concession arrangement when it has a right to charge for usage of the concession infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction or upgrade services in a service concession arrangement is measured at fair value on initial recognition.

Subsequent to initial recognition, the intangible asset is measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The estimated useful life of an intangible asset in a service concession arrangement is the period from when the Group is able to charge the public for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Aset takberwujud (lanjutan)

Jenis	Tahun/Years	
	2021	2020
Hak Pengusahaan Jalan Tol		
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin ("JTSE")	35 *)	35 *)
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta- Pettarani ("MMN")	45 *)	45 *)
Ruas Pondok Aren - Serpong ("BSD")	28	28
Hak Pengusahaan Pengolahan Air Bersih	30	30

*) maksimum

Aset keuangan non-derivatif

Grup mengakui aset keuangan yang terjadi akibat adanya perjanjian konsesi jasa ketika memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau atas diskresi pemberi konsesi untuk jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan.

Pada pengakuan awalnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajarnya dan diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang. Pengakuan setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan berdasarkan perjanjian jasa konsesi diakui berdasarkan persentase penyelesaian dari pekerjaan yang dilakukan, konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup dalam mengakui pendapatan atas jasa konstruksi. Pendapatan operasi atau jasa diakui pada periode dimana jasa telah diberikan oleh Grup.

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan berdasarkan perjanjian konsesi jasa sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi jasa konsesi menggunakan model aset keuangan. Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan diakui sebagai pendapatan penjualan pada saat penyerahan tenaga listrik ke pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Service concession arrangements
(continued)**

Intangible assets (continued)

Types
Toll Road Concession Rights
Section Tallo-Hasanuddin Airport ("JTSE")
Section Soekarno Hatta Harbor - Pettarani ("MMN")
Section Pondok Aren - Serpong ("BSD")
Water-Treatment Concession Rights.

*) maximum

Non-derivative financial assets

The Group recognizes a financial asset arising from a service concession arrangement when it has an unconditional contractual right to receive cash or other financial assets from or at the direction of the grantor for the construction or upgrade services provided.

Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as loan and receivables. Subsequent to initial recognition, the financial assets are measured at amortized cost.

Revenue

Revenue related to construction or upgrade services under a service concession arrangement is recognized based on the percentage of completion of the project, consistent with the Group's accounting policy on revenue recognition on construction services. Operation or services revenue is recognized in the period in which the services are provided by the Group.

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as service concession transaction using financial assets model. Revenue related to the other components of the price of electric power delivered is recognized as sales revenue upon delivery of electric power to customer.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Perjanjian Jasa Konsesi (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya, kecuali jika besar kemungkinan akan meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara handal.

q. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa

Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa merupakan jumlah piutang dari pemberi jasa untuk jasa yang diberikan oleh Grup sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari pemberi jasa. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, yaitu jumlah awal yang diakui ditambah dengan bunga kumulatif atas jumlah yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi pembayaran. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, mereka diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**p. Service Concession Arrangements
(continued)**

Maintenance and repair expense

The cost of maintenance and repair services in connection with the concession agreement is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, except when it is likely to increase in the future economic benefits and can be measured reliably.

q. Financial assets arising from service concession arrangement

Financial assets arising from service concession arrangements represent the amounts due from the grantor for services provided by the Company in connection with service concession arrangements where the Group has an unconditional contractual right to receive cash from the grantor. Financial assets arising from service concession arrangements are measured initially at fair value and subsequently measured at amortized cost, i.e. the amount initially recognised plus the cumulative interest on that amount calculated using the effective interest method minus repayments. Financial assets arising from service concession arrangements are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

r. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the end of each reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
(lanjutan)**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**r. Impairment of Non-financial Assets
(continued)**

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
(lanjutan)**

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**r. Impairment of Non-financial Assets
(continued)**

For assets excluding *goodwill*, an assessment is made at the end of each reporting year as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset other than *goodwill* is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for *goodwill* by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the *goodwill* relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to *goodwill* cannot be reversed in future years.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non financial assets at financial statement date.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

s. Pinjaman

Pinjaman merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2n untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

t. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

Provisi pemeliharaan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga standar kualitas jalan tol sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala akan diprovisi berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Loans

Loans are funds received from banks or other parties with the obligation to repay the loan in accordance with the terms of the agreement.

Loans are classified as financial liabilities measured by amortized cost. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of loan are deducted from the loan amount received. See Note 2n for the accounting policy for financial liabilities measured at amortized cost.

t. Provision

Provisions are recognized when the Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability.

When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

Provision for toll road maintenance

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain the quality in accordance with the Minimum Service Standards that have been established by the Ministry of Public Works that is by performing overlay regularly. The cost of this overlay will periodically be recognized based on estimation with the utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**u. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban**

Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Harga transaksi merupakan angka yang ditagihkan kepada pelanggan setelah mengeluarkan pajak pertambahan nilai.

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses**

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promises in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

The transaction price is based on the amount billed to customer excluding value added taxes

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**u. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Grup diakui pada suatu titik waktu saat penjualan karcis tol. Imbalan kas yang diterima sehubungan dengan pengalihan hak atas pendapatan tol masa datang dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada suatu periode waktu berdasarkan aktual jumlah traffic selama masa jangka waktu pengalihan hak atas pendapatan tol tersebut.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang muka sewa yang diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan Diterima di Muka" dan diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya.

Pendapatan dari usaha kelistrikan

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi sewa pembiayaan dimana Perusahaan adalah lessor.

Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan (biaya tenaga listrik *non-take or pay*) diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan risiko dan manfaat ekonomik dari tenaga listrik diterima oleh pelanggan. Pendapatan dari operasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan konstruksi

Grup mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Toll revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized point in time upon the sale of toll tickets. Cash consideration received in connection with the transfer of the rights on future toll revenue are recorded as deferred revenue and recognized as revenue over time based on actual traffic volume over the term of transfer of the rights on future toll revenues.

Rent revenues

Rental income from operating lease is recognized as revenue when earned. Rental received in advance are presented as "Deferred Income" and recognized as income on straight-line basis over the lease term.

Revenue from power business

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as finance lease transaction whereby the Company are the lessors.

Revenue related to the other components of the price of electric power delivered (cost of non-take or pay electricity power) is recognized as revenue upon delivery the risk and benefit economic of electric power is received by the customer. Revenue from operations and maintenance is recognized when services are rendered.

Construction revenues

The Group recognizes intangible assets of construction services and increased capacity in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**u. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Pendapatan konstruksi (lanjutan)

Pendapatan konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Penjualan air bersih

Pendapatan dari penjualan penyediaan air bersih diakui berdasarkan volume yang diserahkan kepada pelanggan, baik yang secara khusus dibaca dan ditagih maupun yang diestimasi berdasarkan *output* dari jaringan penyediaan air bersih dan kemungkinan besar Grup akan menerima pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu tingkat suku bunga digunakan mendiskontokan secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan arus kas di masa yang akan datang selama umur ekpektasian dari instrumen keuangan, atau jika lebih sesuai, selama periode yang lebih singkat, untuk jumlah tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan diakui sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan diterima di muka untuk periode yang belum berjalan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Construction revenues (continued)

Construction revenues are recorded simultaneously with the recognition of an intangible asset during the construction phase.

Sales of water

Revenue from sales of water is recognized based on the provision of clean water volume delivered to the customers, either specifically read and billed or estimated based on the output of the network of water supply and most likely the Group will receive payments previously agreed.

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Other operating revenues

Revenues from advertisement, space and rest area rental are recognized when earned. Advances received not yet earned are recognized as unearned revenue and are presented in the consolidated statement of financial position as a liability.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**u. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Beban konstruksi

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol dan pembangunan sarana pengelolaan air bersih. Konstruksi pembangunan jalan tol termasuk peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Beban konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

v. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan undang-undang pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau dibayar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**u. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Construction costs

Construction cost represents the entire cost of construction of toll road and construction of water management facilities. Construction of toll road includes the increasing of capacity toll roads which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the construction of toll roads, including the cost of construction of access roads to toll roads, alternative roads and public roads required plus other borrowing costs which are directly used to fund the construction of the asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Construction costs are recorded simultaneously with the recognition of an intangible asset during the construction phase.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

v. Taxation

Income tax expenses comprises current and deferred income tax. Tax are recognized in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to item recognized in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year, using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted at the reporting tax. Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered or paid.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

v. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: *Pajak Penghasilan*.

w. Imbalan Pasca-kerja

Grup mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Taxation

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a future period tax consequences resulting from differences of carrying value between assets and liabilities based on the consolidated financial statements with tax base of assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible differences, when it is probable to be used against future taxable income.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited to the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except deferred tax which is charged or credited directly to equity.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

w. Post-employment Benefits

The Group have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and Job Creation Law No. 11/2020 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

w. Imbalan Pasca-kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

x. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan.

Grup tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilusi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Post-employment Benefits (continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and*
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

x. Basic Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

The Group has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2021 and 2020, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

y. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 38, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Segment Information

For management purposes, the Group is organized into two operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 38, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgement

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan atas penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu yang mana diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak-pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang, guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

Penentuan mata uang fungsional

Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan mendasar yang relevan terhadap Grup, mata uang fungsional ditetapkan adalah Rupiah. Mata uang tersebut adalah terutama mempengaruhi sebagian besar penjualan, harga pokok penjualan dan biaya operasi Grup.

Mengevaluasi dampak periode opsi pada masa sewa - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika opsi cukup pasti untuk dieksekusi, atau periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika opsi cukup pasti untuk tidak dieksekusi.

Untuk kontrak sewa apapun yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian, Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau penghentian sewa. Dengan kata lain, Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomik untuk mengeksekusi perpanjangan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai ulang masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian Perusahaan dan mempengaruhi kemampuan untuk mengeksekusi atau untuk tidak mengeksekusi opsi perpanjangan atau penghentian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgement (continued)

Allowance for impairment of accounts receivable

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowances for customers against amounts due, to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivable.

Determination of functional currency

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rupiah. It is the currency that mainly influences majority of the Group sales, cost of sales and operating expense.

Evaluating the impact of option periods on lease terms - Company as a lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

For any contracts with include extension and termination options, the Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. That is, it considers all relevant factors that create an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Sewa pembiayaan

Perusahaan menetapkan bahwa kesepakatan mengenai komponen A (“*Capital Cost Recovery*”) penjualan listrik sesuai dengan *Power Purchase Agreement* (Catatan 37d) memenuhi kriteria untuk mengakui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (“PLTMH”) sebagai aset sewa. Dengan demikian, setelah dimulainya produksi listrik berdasarkan *Commercial Date*, Perusahaan mengakui piutang sewa pembiayaan atas nilai investasi bersih untuk membangun PLTMH tersebut.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Grup mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2p).

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Grup berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, “Aset Takberwujud”.

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun/periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp169.678.605.062 dan Rp1.031.715.055.184.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgement (continued)

Finance lease

The Company determined that the arrangement concerning component A (“*Capital Cost Recovery*”) the electricity sales in accordance with the *Power Purchase Agreement* (Note 37d) fulfilled the criteria to recognize the Mini-Hydro Electric Power Plant (“MHEPP”) as leased assets. Accordingly, upon commencing of the electricity production based on the *Commercial Date*, the Company recognized a finance lease receivable over the net investment to construct the MHEPP.

Service concession agreement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

The Group entered into Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) with BPJT granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construction, operate and maintain the toll roads (Note 2p).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities.

The Group has made judgment that the PPJT met the criteria under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, “Intangible Assets”.

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year/period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, the Group recognized construction revenue amounting to Rp169,678,605,062 and Rp1,031,715,055,184, respectively.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 72. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 30 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diungkapkan dalam Catatan 11.

Aset takberwujud

Nilai wajar dari perolehan aset takberwujud atas penyediaan jasa konstruksi pada perjanjian jasa konsesi diestimasi berdasarkan referensi nilai wajar dari pengadaan jasa konstruksi tersebut. Nilai tercatat aset takberwujud diungkapkan pada Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgement (continued)

Service concession agreement (continued)

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 72. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management estimation calculated in certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Depreciation of property, plant, and equipment

The costs of property, plant, and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant, and equipment to be within 4 to 30 years.

These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Group's property, plant, and equipment as of December 31, 2021 and 2020 are disclosed in Note 11.

Intangible assets

The fair value of intangible assets received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is estimated by reference to the fair value of the construction service provided. The carrying value of the Group's intangible assets is disclosed in Note 15 to the consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Grup menggunakan penilaian mereka untuk memilih berbagai metode dan membuat asumsi yang terutama didasarkan pada kondisi pasar yang ada pada setiap tanggal laporan posisi keuangan tanggal. Grup telah menggunakan analisis *discounted cash flow* untuk berbagai aset keuangan dan liabilitas yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Perbandingan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 39.

Estimasi volume lalu lintas dan amortisasi hak perusahaan jalan tol

Dalam menentukan amortisasi hak perusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif dan volume kendaraan.

Manajemen melakukan penilaian secara berkala terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

Grup menunjuk konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen pada jalan tol pada tahun 2019.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS**

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value of financial assets and liabilities

The fair value of financial assets and liabilities that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. The Group use their judgment to select a variety of methods and make assumptions that are mainly based on market conditions existing at each statement of financial position date. The Group has used discounted cash flow analysis for various financial assets and liabilities that were not traded in active markets. The comparison between the fair value and carrying amount of the Group's financial assets and liabilities as at consolidated statement of financial position date is disclosed in Note 39.

Estimation of traffic volume and amortization of toll road concession rights

In determining amortization of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume. However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate depending upon changes in external factor that may affect toll rates and vehicle volume.

The management performs periodic assessment on the total projected traffic volume. The Company will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual volume.

The Group appoints an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies on its toll roads in 2019.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja

Biaya program pensiun imbalan pasti dan imbalan pasca kerja lainnya dan nilai kini liabilitas pensiun ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktual melibatkan pembuatan berbagai asumsi yang mungkin berbeda dari perkembangan aktual di masa depan. Ini termasuk penentuan tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan kenaikan pensiun di masa depan. Karena kompleksitas yang terlibat dalam penilaian dan sifat jangka panjangnya, liabilitas imbalan pasti sangat peka terhadap perubahan asumsi ini. Semua asumsi ditelaah setiap tanggal pelaporan.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja neto.

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2021 dan Desember 2020 adalah sebesar Rp67.601.007.890 (2020: Rp60.547.539.716). Penjelasan lebih rinci atas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 36.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Piutang sewa pembiayaan

Penentuan nilai wajar dari piutang sewa pembiayaan tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang antara lain meliputi, tingkat suku bunga diskonto dan periode sewa. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan yang signifikan dalam hasil aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi Grup mungkin dapat mempengaruhi nilai wajar secara material dari piutang sewa pembiayaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS**

Estimates and Assumptions (continued)

Post-employment benefit

The cost of the defined benefit pension plan and other post-employment benefits and the present value of the pension obligation are determined using actuarial valuations. An actual valuation involves in making various assumptions that may differ from actual developments in the future. These include the determination of the discount rate, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the complexities involved in the valuation and its long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in these assumptions. All assumptions are reviewed at each reporting date.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and post-employment benefit and net post-employment benefit expense.

The net carrying amount of the Group's post-employment benefit liability as of December 31, 2021 and 2020 was Rp67,601,007,890 (2020: Rp60,547,539,716). Further details on post-employment benefit are disclosed in Note 36.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Finance lease receivable

The determination of the fair value of finance lease receivable is dependent on its selection of certain assumptions which include among others, discount rates and lease periods. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect the fair value of the finance lease receivable. Further details are disclosed in Note 12.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Menentukan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan sebagai tingkat diskonto

Dalam menentukan liabilitas sewa Grup, suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan sebagai tingkat diskonto dalam mendiskontokan pembayaran sewa telah ditetapkan berdasarkan pendekatan konsisten yang mencerminkan tingkat pinjaman yang relevan dengan bisnis perusahaan atau jenis aset sewa, mata uang liabilitas, panjang masa sewa, dan spread kredit untuk badan hukum yang bersepakat dalam kontrak sewa.

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kas - Rupiah	466.988.324	378.928.020	Cash on hand - Rupiah
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	92.887.233.203	171.147.763.527	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	7.778.924.067	1.000.000	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.055.509.246	2.124.146.640	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.971.188.220	1.297.727.506	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	1.293.844.679	1.720.290.242	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Sulselbar	1.104.166.325	1.091.437.574	PT Bank Sulselbar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	467.789.568	145.521.751	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Commonwealth	335.864.914	334.623.137	PT Bank Commonwealth
PT Bank Pan Indonesia Tbk	240.225.447	226.758.422	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	91.164.782	90.967.810	PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	80.278.543	343.582.348	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank UOB Indonesia	48.465.552	47.153.650	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank DKI	26.954.000	3.948.000	PT Bank DKI
PT Bank KEB Hana Indonesia	17.671.308	17.743.308	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	12.109.133	12.397.182	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	2.950.341	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah	109.411.388.987	178.608.011.438	Sub-total
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	217.680.368	219.997.153	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia	17.819.646	17.614.837	PT Bank ICBC Indonesia
Sub-jumlah	235.500.014	237.611.990	Sub-total
Jumlah Bank	109.646.889.001	178.845.623.428	Total Cash in Banks
Deposito berjangka - Rupiah			Time deposits - Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	845.904.656.640	80.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	13.000.000.000	13.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	4.000.000.000	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank BTPN Tbk	17.000.000.000	90.100.000.000	PT Bank BTPN Tbk
Jumlah Deposito berjangka	875.904.656.640	187.100.000.000	Total Time Deposits
Jumlah	986.018.533.965	366.324.551.448	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat bunga deposito berjangka pada tahun 2021 dan 2020 berkisar antara 2,00% - 6,75% dan 3,25% - 6,00% per tahun. Deposito berjangka termasuk kelompok "Kas dan setara kas" dengan jangka waktu penempatan tiga bulan atau kurang.

5. ASET KEUANGAN YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari:

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Biaya perolehan	60.000.000.000
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar	(25.984.931.368)
Jumlah	34.015.068.632

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan investasi BSD, entitas anak tidak langsung, dalam bentuk saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

Seluruh investasi digolongkan sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan nilai efek ekuitas ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Annual interest rates of time deposits for the year 2021 and 2020 ranged between 2.00% - 6.75% and 3.25% - 6.00% per annum, respectively. The time deposits included as part of "Cash and cash equivalents" with original maturities of three months or less.

5. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account consists of:

31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	Financial assets securities designated at fair value through other comprehensive income
		Acquisition cost
		Unrealized loss on changes in fair value
Jumlah	43.850.751.128	Total

As of December 31, 2021 and 2020, financial assets designated at fair value through other comprehensive income represents an indirect subsidiary, BSD's investments in shares of PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

All investments are classified as financial assets designated at fair value through other comprehensive income with the fair value determined based on market value issued by the Indonesia Stock Exchange at the date of statement of financial position.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG

a. Piutang usaha

Berdasarkan pelanggan

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pihak ketiga		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	15.855.533.623	12.807.850.207
PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani	3.333.452.174	2.260.667.588
Kartu tol elektronik	1.724.352.362	1.010.135.817
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	957.000.000	9.138.185.795
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	526.810.000	449.711.400
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	349.455.000	339.291.000
PT Berkah Manis Makmur	102.935.000	10.141.000
PT Nikomas Gemilang	63.615.000	62.751.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp300.000.000)	2.550.630.000	2.590.756.051
Sub-jumlah	25.463.783.159	28.669.489.858
Pihak berelasi (Catatan 35)	65.734.755	72.000.000
Jumlah	25.529.517.914	28.741.489.858

Berdasarkan umur

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Belum jatuh tempo	15.855.533.623	12.807.850.207
1 - 30 hari	6.685.342.813	5.483.242.334
31 - 60 hari	517.265.032	1.184.215.668
Lebih dari 60 hari	2.471.376.446	9.266.181.649
Neto	25.529.517.914	28.741.489.858

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah, tidak dijaminan dan tidak dikenakan bunga.

Kartu tol elektronik terdiri dari tagihan atas pendapatan tol BSD, MMN dan JTSE, entitas anak tidak langsung, dari kartu tol elektronik Flazz BCA, kartu tol elektronik Mandiri, kartu tol elektronik Brizzi BRI, kartu tol elektronik BNI TapCash dan kartu tol elektronik Mega Card pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

6. RECEIVABLES

a. Trade receivables

By customers

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Third parties		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	15.855.533.623	12.807.850.207
PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani	3.333.452.174	2.260.667.588
E-toll cards	1.724.352.362	1.010.135.817
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	957.000.000	9.138.185.795
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	526.810.000	449.711.400
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	349.455.000	339.291.000
PT Berkah Manis Makmur	102.935.000	10.141.000
PT Nikomas Gemilang	63.615.000	62.751.000
Others (each below Rp300,000,000)	2.550.630.000	2.590.756.051
Sub-total	25.463.783.159	28.669.489.858
Related party (Note 35)	65.734.755	72.000.000
Total	25.529.517.914	28.741.489.858

By aging

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Belum jatuh tempo	15.855.533.623	12.807.850.207
1 - 30 hari	6.685.342.813	5.483.242.334
31 - 60 hari	517.265.032	1.184.215.668
Lebih dari 60 hari	2.471.376.446	9.266.181.649
Net	25.529.517.914	28.741.489.858

All trade receivables are denominated in Rupiah, unsecured and non-interest bearing.

E-Toll cards receivables represents revenue billings of BSD, MMN and JTSE, indirect Subsidiaries, from e-toll Flazz BCA, e-toll Mandiri, e-toll Brizzi BRI, e-toll BNI TapCash and e-toll Mega Card, as of December 31, 2021 and 2020.

Based on the review of the status of each of the accounts receivable at the end of the year, the Group management believes that the allowance for impairment losses for trade receivables is not considered necessary to cover possible losses from uncollectible accounts.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha tersebut.

b. Piutang non-usaha

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Pihak ketiga		
PT Niscala Utama Cemerlang (Catatan 37)	32.008.961.275	-
Piutang iklan dan sewa lahan	16.226.523.195	17.710.803.655
PT Dahan Karya Bertunas	8.000.000.000	5.000.000.000
Piutang bunga	5.300.596.791	5.789.679.002
PT Langgeng Sukses Mandiri	2.001.466.126	3.411.680.292
PT Tagora Green Energy	1.957.905.708	2.610.540.948
PT Jaka Tingkir Ekspres (Catatan 37)	-	32.008.961.275
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	20.372.033.849	13.633.268.395
	85.867.486.944	80.164.933.567
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(21.209.337.435)	(7.028.342.703)
Piutang non-usaha, neto	64.658.149.509	73.136.590.864
Dikurangi: Bagian lancar	(64.658.149.509)	(69.041.624.556)
Bagian tidak lancar lainnya	-	4.094.966.308

6. RECEIVABLES (continued)

a. Trade receivables (continued)

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk on the trade receivables.

b. Non-trade receivables

Third parties
PT Niscala Utama Cemerlang (Note 37)
Advertisement income and land rent receivables
PT Dahan Karya Bertunas
Interest receivables
PT Langgeng Sukses Mandiri
PT Tagora Green Energy
PT Jaka Tingkir Ekspres (Note 37)
Others (each below Rp1,000,000,000)
Less allowance for impairment
Non-trade receivables, net
Less: Current portion
Other non-current portion

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Uang muka		
Proyek	100.839.729.478	108.275.495.241
Jaminan	1.518.786.442	1.440.520.734
Lain-lain	8.234.017.280	7.866.577.829
Beban dibayar di muka		
Pemeliharaan dan keamanan	1.701.190.060	627.943.885
Asuransi	1.251.281.758	647.229.716
Sewa	265.506.456	50.221.294
Jumlah	113.810.511.474	118.907.988.699
Bagian jangka panjang Uang muka proyek	(100.839.729.478)	(108.275.495.241)
Bagian jangka pendek	12.970.781.996	10.632.493.458

7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances
Projects
Deposits
Others
Prepaid expenses
Maintenance and security
Insurances
Rent
Total
Long-term portion Advances for projects
Current portion

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, uang muka proyek sebagian besar merupakan uang muka dan biaya-biaya yang dibayarkan terkait proyek jalan tol di Marga, BSD dan MMN.

As of December 31, 2021 and 2020, advances on projects mostly represents advances and costs paid in relation to toll road project Marga, BSD, and MMN.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

8. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, akun ini merupakan persediaan atas bahan-bahan untuk perbaikan, pemeliharaan dan penggantian pengelolaan air bersih milik SCKT dan DCC, serta pembangkit listrik tenaga *biomass* yang dimiliki oleh RPSL, masing-masing merupakan entitas anak tidak langsung (Catatan 1d).

8. INVENTORIES

As of December 31, 2021 and 2020, this account represents supplies of materials for repair, maintenance and replacement of the water treatment plant owned by SCKT and DCC, and biomass power plant owned by RPSL, an indirect subsidiary, each (Note 1d).

9. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Bank Central Asia Tbk	53.238.364.870	24.260.769.638
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.612.746.957	-
PT Bank ICBC Indonesia	-	4.913.162.362
Jumlah	54.851.111.827	29.173.932.000

9. RESTRICTED CASH IN BANKS

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia

Total

Saldo pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan:

- rekening *escrow* milik BSD, MMN, JTSE, dan SCKT entitas anak tidak langsung, dan MUN dan EI, entitas anak langsung, yang ditempatkan pada BCA sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh. Rekening ini ditujukan untuk menampung pendapatan jalan tol harian serta penerimaan penjualan air bersih dan digunakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian restrukturisasi pinjaman antara entitas-entitas anak langsung dan tidak langsung dengan BCA (Catatan 22);
- rekening milik SCKT, entitas anak tidak langsung, sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari IIF. Rekening ini diperuntukkan dalam ketentuan dalam perjanjian restrukturisasi pinjaman antara entitas tidak langsung dan IIF (Catatan 20); dan
- rekening milik Marga sehubungan dengan biaya pra-operasional yang disetorkan oleh PT Adhi Karya Persero Tbk dan PT Acset Indonusa Tbk dengan jumlah Rp10.964.102.484 dalam proyek konsorsium jalan tol Cikunir - Ulujami.

Pada tanggal 31 Desember 2021, IME, entitas anak tidak langsung, memiliki rekening *escrow* yang ditempatkan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh IME (Catatan 22c).

Pada tanggal 31 Desember 2020, SCKT, entitas anak tidak langsung, yang memiliki rekening *escrow* yang ditempatkan pada PT Bank ICBC Indonesia telah dipindahkan ke PT Bank Central Asia. Pada tahun 2021, sehubungan dengan pelunasan PT Bank ICBC Indonesia, dan pinjaman yang diperoleh pada PT Indonesia Infrastructure Finance.

Balance in PT Bank Central Asia Tbk (BCA) represents:

- escrow accounts of BSD, MMN, JTSE and SCKT, indirect subsidiaries, and MUN and EI, direct subsidiaries that are placed pertinent with acquired loans. These escrow accounts are escrow the daily toll road revenue and receipt of water sales and shall be used under the terms of loan agreements between those direct and indirect subsidiaries and BCA (Note 22);*
- escrow accounts of SCKT, an indirect subsidiary, in connection with a loan obtained from IIF. This account is designated in the terms of the loan restructuring agreement between indirect subsidiary and IIF (Note 20); and*
- balance of Marga represents pra-operational deposited by PT Adhi Karya Persero Tbk and PT Acset Indonusa Tbk amounting to Rp10,964,102,484 in the Cikunir – Ulujami toll road consortium project.*

As of December 31, 2021, IME, an indirect subsidiary, has escrow accounts that are placed with PT Bank Syariah Indonesia pertinent with loans acquired by IME (Note 22c).

As of December 31, 2020, an indirect subsidiary, has an escrow account that are placed on PT Bank ICBC Indonesia has been transferred to PT Bank Central Asia. In 2021, in connection with the repayment of PT Bank ICBC Indonesia, and the loan obtained to PT Indonesia Infrastructure Finance.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Penyertaan saham pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021/ December 31, 2021	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba/(rugi)/ Equity in net profit/(loss)	Pengakuan atas Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi/ Recognition of share in other comprehensive income of an associates company	Saldo akhir/ Ending balance
Metode ekuitas/ Equity method								
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	35.00%	744.015.465.795	-	(14.000.000.000)	47.229.395.779	(91.766.421)	777.153.095.153
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan/ Port services	39.00%	83.135.509.604	-	-	(4.186.582.779)	-	78.948.926.825
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih/ Water installation	28.00%	24.291.502.039	-	-	4.994.882.833	-	29.286.384.872
Jumlah/Total			851.442.477.438	-	(14.000.000.000)	48.037.695.833	(91.766.421)	885.388.406.850

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

Investment in associates entities as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

31 Desember 2020/ December 31, 2020	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase pemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba (rugi)/ Equity in net profit/(loss)	Pengakuan atas Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi/ Recognition of share in other comprehensive income of an associates company	Saldo akhir/ Ending balance
Metode ekuitas/ Equity method								
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	35.00%	721.812.021.165	-	(21.000.000.000)	43.189.949.528	13.495.102	744.015.465.795
PT Intisentosa Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan/ Port services	39.00%	86.460.446.920	-	-	(3.324.937.316)	-	83.135.509.604
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih/ Water installation	28.00%	23.041.956.447	-	-	1.249.545.592	-	24.291.502.039
Jumlah/Total			831.314.424.532	-	(21.000.000.000)	41.114.557.804	13.495.102	851.442.477.438

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2020, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 21 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., pada tanggal yang sama antara lain pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2019 sebesar Rp60.000.000.000. Pada 31 Desember 2020, MUN mencatat piutang dividen sebesar Rp21.000.000.000. Pada tanggal 3 Desember 2021 MUN telah menerima dividen tunai sebesar Rp21.000.000.000.

In the Shareholders' Annual General Meeting held on June 24, 2020, which was notarized in Notarial Deed No. 21 of Karin Christiana Basoeki, S.H., of the same date, the shareholders of PT Jakarta Lingkar Baratsatu approved the distribution of cash dividends for 2019 of Rp60,000,000,000. As of December 31, 2020, MUN recorded dividend receivable amounting to Rp21,000,000,000. On December 3, 2021, MUN has received cash dividend amounting to Rp21,000,000,000.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 19 Agustus 2021, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 101 dari Kartono, S.H., pada tanggal yang sama antara lain pemegang saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000. Pada 31 Desember 2021, MUN mencatat piutang dividen sebesar Rp14.000.000.000.

In the Shareholders' Annual General Meeting held on August 19, 2021, which was notarized in Notarial Deed No. 101 of Kartono, S.H., of the same date, the shareholders of PT Jakarta Lingkar Baratsatu approved the distribution of cash dividends for 2020 of Rp40,000,000,000. As of December 31, 2021, MUN recorded dividend receivable amounting to Rp14,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan Perusahaan asosiasi yang material:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)

Summary of financial information on material associated companies as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021					
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Laba bersih/ Net income	Laba komprehensif lain/Other comprehensive loss
JLB	2.428.539.585.965	832.325.137.169	432.640.349.898	139.289.619.903	(262.189.775)
					JLB
31 Desember 2020/December 31, 2020					
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Laba bersih/ Net income	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss
JLB	3.042.737.973.866	1.545.621.652.016	404.016.283.682	143.043.533.472	(262.189.776)
					JLB

Perubahan penyertaan saham berdasarkan metode ekuitas pada perusahaan asosiasi adalah sebagai berikut:

The changes in the investment in shares based on equity method in an associated company is as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	744.017.465.795	721.814.021.164	Beginning balances
Pengakuan atas bagian laba neto perusahaan asosiasi	47.229.395.779	43.189.949.528	Recognition of share in net earning of an associated company
Distribusi dividen	(14.000.000.000)	(21.000.000.000)	Dividend distribution
Pengakuan atas bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi	(91.766.421)	13.495.102	Recognition of share in other comprehensive income of an associated company
Saldo akhir	777.155.095.153	744.015.465.794	Ending balance

Pada tanggal 31 Juli 2009, MUN mengakuisisi 25% kepemilikan saham di PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dengan nilai perolehan sebesar Rp218.080.000.000. Penyertaan saham tersebut efektif pada tanggal 31 Juli 2009.

On July 31, 2009, MUN acquired 25% shares ownership in PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) with acquisition cost of Rp218,080,000,000. The acquisition was effective on July 31, 2009.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLB yang diaktakan dengan Akta No. 72 oleh Notaris Kartono S.H., tanggal 26 Oktober 2011, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor JLB. MUN menyeter penuh sebesar Rp40.500.000.000 atau setara dengan 40.500 saham. Kenaikan investasi pada JLB tidak merubah persentase kepemilikan Perusahaan di JLB.

Based on Extraordinary Stockholders' General Meeting of JLB as notarized by Deed No. 72 of Kartono S.H., dated October 26, 2011, the stockholders approved to increase issued and fully paid-in capital of JLB. MUN made a subscription of Rp40,500,000,000 or equivalent to 40,500 shares. The additional investment in JLB did not change the Company ownership interest in JLB.

Berdasarkan akta notaris No. 502 tanggal 29 Agustus 2018 oleh Kartono, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan disetujui untuk mengakuisisi 94.800 lembar saham PT Jalan Lingkar Baratsatu (JLB) milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp338.284.320.000. Saham yang diperoleh mewakili 10% dari total modal saham JLB. Dengan demikian, setelah proses akuisisi, kepemilikan MUN di JLB menjadi 35%.

Based on notarial deed No. 502 dated August 29, 2018 by Kartono, S.H., notary in Jakarta, the Company agreed to acquired 94,800 shares of PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk amounted Rp338,284,320,000. Such shares acquired represents 10% of total JLB share capital. Thus, after the acquisition, the ownership of MUN in JLB becoming 35%.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

11. ASET TETAP

11. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2021
Biaya perolehan						Cost
Pemilik langsung						Direct acquisition
Tanah dan hak atas tanah	14.943.673.093	200.000.000	-	-	15.143.673.093	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	108.628.929.341	70.970.000	-	-	108.699.899.341	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	39.880.590.037	3.401.972.690	-	-	43.282.562.727	Machinery and equipment
Peralatan kantor	52.457.645.181	200.445.143	-	-	52.658.090.324	Office equipment
Kendaraan	26.376.169.076	2.744.871.994	-	-	29.121.041.070	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	2.701.277.098	2.221.566.707	-	-	4.922.843.805	Construction in progress
	244.988.283.826	8.839.826.534			253.828.110.360	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilik langsung						Direct acquisition
Bangunan dan prasarana	32.899.219.291	5.564.269.580	-	-	38.463.488.871	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	25.143.606.067	8.183.563.011	-	-	33.327.169.078	Machinery and equipment
Peralatan kantor	45.558.301.991	242.533.778	-	-	45.800.835.769	Office equipment
Kendaraan	14.905.822.039	3.689.013.236	-	-	18.594.835.275	Vehicles
	118.506.949.388	17.679.379.605			136.186.328.993	
Neto	126.481.334.438				117.641.781.367	Net

31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi*/ reclassification*)	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2020
Biaya perolehan						Cost
Pemilik langsung						Direct acquisition
Tanah dan hak atas tanah	14.943.673.093	-	-	-	14.943.673.093	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	108.407.968.675	24.000.000	-	196.960.666	108.628.929.341	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	39.705.617.237	174.972.800	-	-	39.880.590.037	Machinery and equipment
Peralatan kantor	51.380.669.581	996.225.600	-	80.750.000	52.457.645.181	Office equipment
Kendaraan	24.920.800.076	1.455.369.000	-	-	26.376.169.076	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	310.813.307.599	94.604.569.743	-	(402.716.600.244)	2.701.277.098	Construction in progress
	550.172.036.261	97.255.137.143		(402.438.889.578)	244.988.283.826	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilik langsung						Direct acquisition
Bangunan dan prasarana	27.101.290.276	5.797.929.015	-	-	32.899.219.291	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	17.032.058.138	8.111.547.929	-	-	25.143.606.067	Machinery and equipment
Peralatan kantor	42.822.549.016	2.735.752.975	-	-	45.558.301.991	Office equipment
Kendaraan	11.757.830.433	3.147.991.606	-	-	14.905.822.039	Vehicles
	98.713.727.863	19.793.221.525			118.506.949.388	
Neto	451.458.308.398				126.481.334.438	Net

*Reklasifikasi aset dalam penyelesaian sebesar Rp402.438.889.578 merupakan penyelesaian atas Proyek Lau Gunung pada 17 Desember 2020 yang diklasifikasikan sebagai Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 12)/Reclassification of Construction in Progress amounting to Rp402.438.889.578 was due to the completion of Lau Gunung project on December 17, 2020 which classified as Finance Lease Receivable (Note 12)

Aset dalam penyelesaian merupakan aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress represents property, plant, and equipment in construction progress at the consolidated statement of financial position date with details as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pembangunan gudang dan dermaga	3.107.572.572	1.133.842.236	Warehouse and jetty construction
Pembangunan papan reklame	1.815.271.233	1.567.434.862	Billboard construction
Jumlah	4.922.843.805	2.701.277.098	Total

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut.

Management has no reason to believe that any events may occur that would prevent completion of the construction in progress.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Proyek	Akumulasi biaya/ Accumulated cost
Pembangunan gudang dan dermaga di Pontianak	3.107.572.572
Pembangunan papan reklame di Serpong	1.815.271.233
Total	4.922.843.805

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan potensial atas nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada 31 Desember 2021, aset tetap berupa tanah, kendaraan, dan peralatan (alat berat) sejumlah masing-masing Rp9.153.695.389, Rp11.181.431.568, dan Rp3.206.000.000 dijaminkan untuk utang pembiayaan konsumen (Catatan 21) dan pinjaman bank (Catatan 22).

Selama tahun 2020, terdapat kapitalisasi atas bunga pinjaman ke aset dalam penyelesaian sebesar Rp16.765.970.332. Tarif kapitalisasi pinjaman selama tahun 2020 adalah 8,75% per tahun. Tidak ada kapitalisasi atas bunga pinjaman ke aset dalam penyelesaian selama tahun 2021.

Nilai penyusutan aset tetap yang dibebankan pada operasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	10.595.934.351	10.797.705.989
Pengumpul pendapatan tol (Catatan 30a)	3.895.290.323	5.165.448.992
Pelayanan pemakai jalan tol (Catatan 30c)	2.982.276.911	3.830.066.544
Pemeliharaan jalan tol (Catatan 30b)	205.878.020	-
Jumlah	17.679.379.605	19.793.221.525

12. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Piutang sewa pembiayaan merupakan nilai kini piutang dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), Badan Usaha Milik Negara, sebagai pembeli tunggal penjualan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air IME, entitas anak tidak langsung (Catatan 37d).

11. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (continued)

The details of construction in progress as of December 31, 2021 are as follows:

Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	Project
Agustus 2022/ August 2022	Construction of warehouses and jetty in Pontianak
Mei 2022/ May 2022	Construction of Billboard in Serpong
Total	Total

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of fixed assets as of December 31, 2021 and 2020.

As of December 31, 2021, fixed assets in the form of land, vehicles and equipment (heavy equipment) amounting to Rp9,153,695,389, Rp 11,181,431,568, and Rp3,206,000,000, respectively, were pledged as collateral for consumer financing liabilities (Note 21) and bank loans (Note 22).

During 2020, there was a capitalization of loan interest to construction in progress amounting to Rp16,765,970,332. The loan capitalization rate for 2020 is 8.75% per annum. There is no capitalization of loan interest to construction in progress during 2021.

Depreciation of fixed assets was charged to operations as follows:

12. FINANCE LEASE RECEIVABLE

Finance lease receivable represents the present value of receivables from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), a state-owned company, as the single off-taker of the electricity sales generated by the IME's, an indirect subsidiary, hydro electric power plant (Note 37d).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

12. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Penerimaan sewa minimum masa depan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Berdasarkan tanggal jatuh tempo:		
Kurang dari 1 tahun	45.950.580.000	45.950.580.000
Antara 1-2 tahun	45.950.580.000	45.950.580.000
Lebih dari 2 tahun	679.652.922.000	683.482.137.000
Jumlah penerimaan sewa pembiayaan masa depan	771.554.082.000	775.383.297.000
Dikurangi: pembayaran bunga masa depan	(380.882.368.443)	(374.274.721.558)
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	390.671.713.557	401.108.575.442
Dikurangi: Bagian lancar	(15.681.461.938)	(14.405.217.420)
Bagian jangka panjang	374.990.251.619	386.703.358.022

Berdasarkan penelaahan status akun piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang sewa pembiayaan dapat direalisasikan dan tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang dibutuhkan.

Piutang sewa pembiayaan dikenakan tingkat diskonto 8,04% per tahun. Jangka waktu sewa adalah selama 20 tahun sampai dengan tahun 2040.

12. FINANCE LEASE RECEIVABLE (continued)

The future minimum lease payments are as follows:

Based on due date:
Less than 1 year
Between 1-2 years
More than 2 years
Total future financial lease payments
Less: future interest payments
Present value of finance lease receivable
Less: Current portion
Non-current portion

Based on the review of finance lease receivables as of December 31, 2021, management is of the opinion that all finance lease receivables are realizable and no provision for expected credit losses is necessary to be provided.

The finance lease receivable is subject to a discount rate of 8.04% per annum. The lease term is for 20 years until 2040.

13. KONSESI JASA

a. Piutang atas Perjanjian Konsepsi Jasa

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	203.253.890.844	207.011.848.808
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	112.441.294.927	104.211.554.530
Jumlah	315.695.185.771	311.223.403.338
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	4.733.679.649	4.622.595.229
Piutang konsepsi jangka panjang	310.961.506.122	306.600.808.109

13. SERVICE CONCESSIONS

a. Service Concession Arrangement Receivables

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Kawasan Industri Medan (Persero)
Total
Current maturities
Long-term portion of concession receivables

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. KONSESI JASA (lanjutan)

a. Piutang atas Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Piutang dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL"), entitas anak tidak langsung, yang dicatat sebagai jasa konsesi. Pergerakan dari aset konsesi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo awal	207.011.848.808	210.340.546.667
Penambahan		
Pendapatan bunga		
dari jasa konsesi (Catatan 28)	25.031.353.688	25.460.613.793
Penerimaan dari PLN	(28.789.311.652)	(28.789.311.652)
Saldo akhir	203.253.890.844	207.011.848.808
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3.869.042.385	3.757.957.965
Piutang konsesi jangka panjang	199.384.848.459	203.253.890.843

Aset keuangan konsesi digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh RPSL untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Pontianak (Catatan 2n).

PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM)

	2021	2020
Saldo awal	104.211.554.530	95.422.815.893
Penambahan:		
Pendapatan bunga		
dari jasa konsesi	8.131.612.528	14.370.263.458
Pendapatan jasa konsesi	5.104.751.671	3.013.765.212
Pendapatan konstruksi	6.477.376.198	2.888.709.967
Ditagihkan ke KIM (pindah ke piutang usaha)	(11.484.000.000)	(11.484.000.000)
Saldo akhir	112.441.294.927	104.211.554.530
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	864.637.264	864.637.264
Piutang konsesi jangka panjang	111.576.657.663	103.346.917.266

13. SERVICE CONCESSIONS (continued)

a. Service Concession Arrangement Receivables (continued)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Receivable from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") related to the Power Purchase Agreement with PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL"), an indirect subsidiary, that is accounted for as service concession arrangement. The movements in the concession financial assets are as follows:

	2021	2020
Saldo awal	207.011.848.808	210.340.546.667
Penambahan		
Pendapatan bunga		
dari jasa konsesi (Catatan 28)	25.031.353.688	25.460.613.793
Penerimaan dari PLN	(28.789.311.652)	(28.789.311.652)
Saldo akhir	203.253.890.844	207.011.848.808
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3.869.042.385	3.757.957.965
Piutang konsesi jangka panjang	199.384.848.459	203.253.890.843

Concession financial assets are used as collateral to the loan obtained by RPSL for construction of Biomass Powerplant in Pontianak (Note 2n).

PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM)

	2021	2020
Saldo awal	104.211.554.530	95.422.815.893
Penambahan:		
Pendapatan bunga		
dari jasa konsesi	8.131.612.528	14.370.263.458
Pendapatan jasa konsesi	5.104.751.671	3.013.765.212
Pendapatan konstruksi	6.477.376.198	2.888.709.967
Ditagihkan ke KIM (transfer to Trade receivables)	(11.484.000.000)	(11.484.000.000)
Saldo akhir	112.441.294.927	104.211.554.530
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	864.637.264	864.637.264
Piutang konsesi jangka panjang	111.576.657.663	103.346.917.266

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. KONSESI JASA (lanjutan)

a. Piutang atas Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

DCC mengakui piutang konsesi, yang diukur pada nilai wajar sebesar Rp112.441.294.927 dan Rp104.211.554.530 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang mencerminkan nilai kini dari jaminan pembayaran minimum yang akan diperoleh DCC dari PT Kawasan Industri Medan (Persero).

Saat ini DCC telah mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Tahap I dengan kapasitas 100 liter/detik. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, DCC telah mengakui penjualan air berdasarkan perjanjian jasa konsesi masing-masing sebesar Rp13.236.364.199 dan Rp17.384.028.670.

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2021
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 37)						Toll road concession rights (Note 37)
Biaya perolehan	4.009.533.446.376	204.752.235.480	-	-	4.214.285.681.856	Cost
Akumulasi amortisasi	851.570.087.430	83.179.332.816	-	-	934.749.420.246	Accumulated amortization
Neto	3.157.963.358.946				3.279.536.261.610	Net
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 37)						Water treatment concession rights (Note 37)
Biaya perolehan	229.815.832.668	5.357.497.847	-	-	235.173.330.515	Cost
Akumulasi amortisasi	44.361.660.466	12.230.447.969	-	-	56.592.108.435	Accumulated amortization
Neto	185.454.172.202				178.581.222.080	Net
Jumlah	3.343.417.531.148				3.458.117.483.690	Total

31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2020
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 37)						Toll road concession rights (Note 37)
Biaya perolehan	2.909.083.806.823	1.100.449.639.553	-	-	4.009.533.446.376	Cost
Akumulasi amortisasi	811.000.586.252	40.569.501.178	-	-	851.570.087.430	Accumulated amortization
Neto	2.098.083.220.571				3.157.963.358.946	Net
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 37)						Water treatment concession rights (Note 37)
Biaya perolehan	225.079.769.191	4.736.063.477	-	-	229.815.832.668	Cost
Akumulasi amortisasi	32.684.953.055	11.676.707.411	-	-	44.361.660.466	Accumulated amortization
Neto	192.394.816.136				185.454.172.202	Net
Jumlah	2.290.478.036.707				3.343.417.531.148	Total

13. SERVICE CONCESSIONS (continued)

a. Service Concession Arrangement Receivables (continued)

DCC recognizes the concession receivables, which are measured at fair value amounting to Rp112,441,294,927 and Rp104,211,554,530 on December 31, 2021 and 2020, respectively, which reflects the present value of the minimum payment that will be received by DCC from PT Kawasan Industri Medan (Persero).

Currently, DCC operates a Phase I Water Treatment Plant with a capacity of 100 liters/sec. For the year ended December 31, 2021 and 2020, DCC has recognized sale of treated water under service concession arrangement amounting to Rp13,236,364,199 and Rp17,384,028,670, respectively.

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. KONSESI JASA (lanjutan)

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi (lanjutan)

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol dan hak pengusahaan pengolahan air yang dibebankan kepada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp95.409.780.785 dan Rp52.246.208.589.

Penjabaran lebih lanjut dari nilai buku neto aset takberwujud setiap perjanjian konsesi jalan tol dan perjanjian konsesi pengolahan air adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Hak pengusahaan jalan tol		
Pelabuhan Soekarno-Hatta		
- Pettarani	2.352.692.099.352	2.192.006.025.100
Tallo - Bandara Hasanuddin	614.816.129.348	626.504.422.718
Pondok Aren - Serpong	312.028.032.910	339.452.911.128
	<u>3.279.536.261.610</u>	<u>3.157.963.358.946</u>
Hak pengelolaan air bersih		
Serang, Banten	178.581.222.080	185.454.172.202
Jumlah	<u>3.458.117.483.690</u>	<u>3.343.417.531.148</u>

Aset-aset hak pengusahaan jalan tol, pada tanggal 31 Desember 2021 and 2020 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp2.266.499.358.099 dan Rp545.537.125.584. Manajemen entitas anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset hak pengusahaan jalan tol digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank oleh entitas anak.

Berdasarkan penelaahan manajemen entitas anak, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

13. SERVICE CONCESSIONS (continued)

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement (continued)

Amortization expenses of toll road concession rights and water treatment concession rights that were charged to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year then ended December 31, 2021 and 2020 amounted Rp95,409,780,785 and Rp52,246,208,589 respectively.

Further breakdown of intangible assets' net book value per toll road concession rights' toll area and water treatment concession rights are as follows:

	Toll road concession rights
Soekarno-Hatta Harbor - Pettarani	
Tallo - Airport Hasanuddin	
Pondok Aren - Serpong	
	Total
	Water treatment concession rights
Serang, Banten	
	Total

Toll road concession rights assets as of December 31, 2021 and 2020 were insured against fire, theft, and other possible risks under insurance policies amounting to Rp2.266.499.358.099 and Rp545,537,125,584, respectively. The subsidiaries' managements believe that insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

As of December 31, 2021 and 2020, toll road concession rights were pledged as collateral for the subsidiaries' loans.

Based on review of the subsidiaries' management, there were no events or changes in circumstances which indicate an impairment of intangible assets as of December 31, 2021 and 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

14. ASET HAK GUNA – NETO

Akun ini terdiri dari:

14. RIGHT OF USE ASSETS - NET

This account consists of:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ For the Year Ended December 31, 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
Tanah	1.465.034.920	131.701.705	(1.596.736.625)	-	-
Ruang kantor	8.904.198.411	6.627.457.578	(6.570.611.821)	-	8.961.044.168
Kendaraan	481.739.497	137.639.856	-	-	619.379.353
Total biaya perolehan	10.850.972.828	6.896.799.139	(8.167.348.446)	-	9.580.423.521
Akumulasi penyusutan					
Tanah	799.109.956	797.626.669	(1.596.736.625)	-	-
Ruang kantor	6.450.468.589	6.428.383.504	(6.550.001.811)	-	6.328.850.282
Kendaraan	240.869.748	275.279.712	-	-	516.149.460
Total akumulasi penyusutan	7.490.448.293	7.501.289.885	(8.146.738.436)	-	6.844.999.742
Neto	3.360.524.535				2.735.423.779

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ For the Year Ended December 31, 2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
Tanah	1.465.034.920	-	-	-	1.465.034.920
Ruang kantor	8.119.537.615	784.660.796	-	-	8.904.198.411
Kendaraan	-	481.739.497	-	-	481.739.497
Total biaya perolehan	9.584.572.535	1.266.400.293	-	-	10.850.972.828
Akumulasi penyusutan					
Tanah	-	799.109.956	-	-	799.109.956
Ruang kantor	-	6.450.468.589	-	-	6.450.468.589
Kendaraan	-	240.869.748	-	-	240.869.748
Total akumulasi penyusutan	-	7.490.448.293	-	-	7.490.448.293
Neto	9.584.572.535				3.360.524.535

Penyusutan

Beban penyusutan yang dibebankan ke operasi sebagai bagian dari berikut ini:

Depreciation

Depreciation expenses were charged to operations as part of the following:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	7.501.289.885	7.490.448.293

General and administrative expenses
(Note 31)

Liabilitas Sewa

Mutasi liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak guna adalah sebagai berikut:

Lease Liabilities

The movement of lease liabilities in relation to the right of use assets are as follows:

	1 Januari 2021 January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Pembayaran/ Payments	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Kelas aset pendasar					
Ruang kantor	2.548.644.478	6.627.457.578	302.676.395	(6.794.802.483)	2.683.975.968
Kendaraan	246.128.357	-	7.837.580	(150.360.144)	103.605.793
Total	2.794.772.835	6.627.457.578	310.513.975	(6.945.162.627)	2.787.581.761

Underlying assets
Office spaces
Vehicles
Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

14. ASET HAK GUNA – NETO (lanjutan)

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Mutasi liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2020 January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Pembayaran/ Payments	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Kelas aset pendasar						Underlying assets
Tanah	1.465.034.920	-	91.349.582	(1.556.384.502)	-	Land
Ruang kantor	8.119.537.615	784.660.796	491.483.515	(6.847.037.448)	2.548.644.478	Office spaces
Kendaraan	-	481.739.497	16.388.860	(252.000.000)	246.128.357	Vehicles
Total	9.584.572.535	1.266.400.293	599.221.957	(8.655.421.950)	2.794.772.835	Total

Utang sewa berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Jangka pendek	2.787.581.761	2.777.692.120	Current portion
Jangka panjang	-	17.080.715	Non-current portion
Total	2.787.581.761	2.794.772.835	Total

14. RIGHT OF USE ASSETS – NET (continued)

Lease Liabilities (continued)

The movement of lease liabilities in relation to the right of use assets are as follows: (continued)

Lease payables based on time basis:

15. GOODWILL

Goodwill dialokasikan ke masing-masing entitas anak tidak langsung berikut pada tanggal akuisisi:

	2021	2020
Goodwill dari akuisisi :		
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ('RPSL') (Catatan 1d)	38.099.655.530	44.733.719.718
PT Sarana Catur Tirta Kelola ('SCTK')	6.217.234.883	6.217.234.883
PT Jasa Sarana Nusa Makmur ('JSNM')	6.032.065.491	6.032.065.491
PT Dain Celicani Cemerlang ('DCC')	1.419.338.247	1.419.338.247
PT Inpola Meka Energi ('IME')	593.012.594	593.012.594
Saldo akhir	52.361.306.745	58.995.370.933

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan semua UPK di atas ditentukan berdasarkan "nilai wajar dikurangi biaya pelepasan" dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan, kecuali bagi RPSL yang pengujian penurunan nilainya menggunakan "nilai pakai".

Asumsi signifikan yang digunakan adalah tingkat diskonto sebesar antara 9,2%-10,67% dan tingkat pertumbuhan sebesar antara 4,49% sampai 15,5%.

15. GOODWILL

Goodwill was allocated to the following individual indirect subsidiaries as at the acquisition dates:

	Goodwill from acquisition :
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ('RPSL') (Note 1d)	44.733.719.718
PT Sarana Catur Tirta Kelola ('SCTK')	6.217.234.883
PT Jasa Sarana Nusa Makmur ('JSNM')	6.032.065.491
PT Dain Celicani Cemerlang ('DCC')	1.419.338.247
PT Inpola Meka Energi ('IME')	593.012.594
Ending balance	58.995.370.933

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of all the CGU above were determined based on FVLCD using discounted cash flows method, except RPSL which the goodwill impairment testing used "value-in-use" calculation.

Significant assumptions used were the discount rates ranging from 9,2%-10,67% and growth rates ranging from 4,49% to 15,5%.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

15. GOODWILL (lanjutan)

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto, harga dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat *goodwill* masing-masing entitas menjadi lebih tinggi dari nilai terpulihkannya secara signifikan.

15. GOODWILL (continued)

The changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable value, in particular the discount rate, prices and terminal growth rates, can have significant impact on the results of the assessment.

Management believes that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to each of the entity to significantly exceed their respective recoverable value.

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	47.948.311.812	81.970.752.920
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.132.889.387	2.723.625.175
Nippon Koei Co. Ltd	1.706.002.889	332.048.144
PT Indokoei International	1.694.533.954	1.057.804.330
PT Multi Bhakti Makmur Jaya	587.964.706	3.192.336.241
CV Mitra Kita	374.213.680	1.097.631.127
CV Anugrah Mitra Perkasa	117.579.064	1.416.055.035
PT Perkasa Adiguna Sembada	14.704.741	844.391.809
PT Sarma Raya Cipta	3.948.100	68.225.000
PT Cipta Usaha Sejati	-	632.940.000
PT DCT Total Solutions	-	105.036.955
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	18.133.222.257	8.858.729.893
Jumlah	74.713.370.590	102.299.576.629

Berdasarkan umur

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
1 - 30 hari	15.809.904.018	13.283.149.226
31 - 60 hari	1.098.431.245	4.195.919.390
Lebih dari 60 hari	57.805.035.327	84.820.508.013
Jumlah	74.713.370.590	102.299.576.629

16. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

By suppliers

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Nippon Koei Co. Ltd
PT Indokoei International
PT Multi Bhakti Makmur Jaya
CV Mitra Kita
CV Anugrah Mitra Perkasa
PT Perkasa Adiguna Sembada
PT Sarma Raya Cipta
PT Cipta Usaha Sejati
PT DCT Total Solutions
Others (each below Rp500,000,000)

Total

By ages

1 - 30 days
31 - 60 days
Over 60 days

Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

17. UTANG NON-USAHA - PIHAK KETIGA

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PT Pembangunan Perumahan Energi	29.396.516.118	26.960.000.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.309.401.656	7.309.381.769
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.809.319.924	5.929.038.624
PT Acset Indonusa Tbk	3.654.700.828	3.654.700.828
PT Gapura Fajar Langgeng	10.289.842	838.165.049
PT Sullindo Putra Timur	-	1.505.739.158
PT Global Hydro Indonesia	-	612.302.353
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	4.999.452.778	2.708.334.208
Jumlah	49.179.681.146	49.517.661.989
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(38.215.578.662)	(38.553.579.392)
Bagian jangka panjang	10.964.102.484	10.964.082.597

Pada tanggal 10 November 2017, IME menandatangani perjanjian hutang piutang dengan PT Ilyas Pratama Abadi ("Ilyas") yang mana IME menerima dana pinjaman sebesar Rp18.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas bunga kredit dari PT Bank Central Asia Tbk per tahun dan jatuh tempo pada 9 November 2018. Perjanjian tersebut diamandemen pada tanggal 9 November 2018 dengan jatuh tempo diperpanjang hingga 10 November 2019. Pada tanggal 12 Maret 2019, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Hutang Piutang, Ilyas mengalihkan hutang IME kepada PT Pembangunan Perumahan Energi ("PPE") (Catatan 26).

Utang kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP") dan PT Gapura Fajar Langgeng merupakan utang konstruksi masing-masing untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung di Sumatera Utara oleh IME dan instalasi pengolahan air (IPA) bersih di Serang oleh SCTK.

Utang kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Acset Indonusa Tbk merupakan utang atas uang muka investasi pada konsorsium MMN - ADHI - ACSET untuk proyek Jalan Tol JORR Elevated ruas Cikunir - Ulujami.

17. NON-TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

*PT Pembangunan Perumahan Energi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk
PT Acset Indonusa Tbk
PT Gapura Fajar Langgeng
PT Sullindo Putra Timur
PT Global Hydro Indonesia
Others (each below
Rp500,000,000)*

Total

Current maturities

Long-term portion

On November 10, 2017, IME signed a loan agreement with PT Ilyas Pratama Abadi ("Ilyas") whereas IME obtained loan amounting to Rp18,000,000,000 with interest rate 1% above the credit interest rate from PT Bank Central Asia Tbk per annum and will be due on November 9, 2018. The agreement was amended on November 9, 2018 with the due date has been extended to November 10, 2019. On March 12, 2019, in accordance with a Novation Agreement on the Loan Agreement, Ilyas transferred IME's loan to PT Pembangunan Perumahan Energi ("PPE") (Note 26).

Loan to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP") and PT Gapura Fajar Langgeng represents construction loan, each pertaining to the construction of the Minihidro Power Plant (PLTM) in Lau Gunung, North Sumatra by IME and clean water treatment plants (WTP) in Serang by SCTK.

Payable to PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Acset Indonusa Tbk represents advances in investment to MMN - ADHI - ACSET Consortium for the JORR Elevated Toll Road Project Cikunir - Ulujami.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

18. BEBAN AKRUAL

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
Beban bunga	6.654.590.174	4.750.816.520
Jasa pengoperasian tol bersama	5.196.090.930	1.615.976.138
Retensi	3.652.549.527	3.652.549.527
Jasa professional	887.491.837	460.518.145
Gaji dan tunjangan	62.722.196	99.870.324
Proyek	-	137.316.004.468
Lain-lain	22.274.098.229	13.123.973.305
Jumlah	<u>38.727.542.893</u>	<u>161.019.708.427</u>

18. ACCRUED EXPENSES

<i>Interest expenses</i>
<i>Joint operation toll fees</i>
<i>Retention</i>
<i>Professional fees</i>
<i>Salaries and allowances</i>
<i>Project</i>
<i>Others</i>
Total

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Tax

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
Entitas anak: Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	6.123.068.001	10.920.713.900
<u>Aset tidak lancar</u> Entitas anak: Klaim pengembalian pajak penghasilan	<u>6.306.621.586</u>	<u>7.734.851.128</u>

*Subsidiaries:
Value Added Tax - Input*

Non-current assets
Subsidiaries:

Refundable corporate income taxes

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
<u>Perusahaan</u> Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 4 (2) Pasal 23	6.392.700.212	3.783.551.944
Sub jumlah	<u>7.733.229.345</u>	<u>5.011.253.925</u>
<u>Entitas anak</u> Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Pasal 23 Pasal 21 Pasal 25 Pasal 4 (2) Pajak lainnya	6.808.968.490	6.249.149.428
Sub jumlah	<u>29.686.232.339</u>	<u>17.625.764.180</u>
Jumlah	<u>37.419.461.684</u>	<u>22.637.018.105</u>

The Company
Value Added Tax - Out
Income Taxes
Article 21
Article 4 (2)
Article 23

Sub total

Subsidiaries
Value Added Tax - Out
Income Taxes
Article 29
Article 23
Article 21
Article 25
Article 4 (2)
Other taxes

Sub total

Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

c. (Penghasilan)/Beban Pajak

c. Taxes (Income)/Expenses

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Beban pajak kini			Current tax
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	26.155.162.927	25.789.021.172	- Current year
- Kekurangan pajak penghasilan tahun sebelumnya	4.225.400.025	-	- Under provision for prior year corporate income tax
	30.380.562.952	25.789.021.172	
Beban/(manfaat) pajak tangguhan			Deferred tax expense/(benefit)
Perusahaan	-	-	Company
Entitas anak	6.807.471.353	(2.766.621.630)	Subsidiaries
	6.807.471.353	(2.766.621.630)	
Jumlah	37.188.034.305	23.022.399.542	Total

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap kembali menjadi 22% di tahun 2022.

On October 29, 2021, the Government issued Law no. 7 Year 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations which stipulates that the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments will return to 22% in 2022.

Tarif pajak yang baru tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengukuran beban pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 29 Oktober 2021. Sehingga, pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengakui penyesuaian atas pajak tangguhan sebagai dampak perubahan tarif pajak tersebut melalui laba rugi.

The new tax rate is used as reference to measure the current and deferred tax starting from the enactment date of the new regulation on October 29, 2021. Therefore, the Company recognise adjustment on deferred tax as effect of changes in the tax rate through profit or loss.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan estimasi rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	62.948.983.532	135.644.285.146	<i>Profit before tax as stated in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(90.524.011.643)	(151.749.953.833)	<i>Profit before tax of subsidiaries</i>
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(27.575.028.111)	(16.105.668.687)	<i>Loss before tax of the Company</i>
Beda temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Beban imbalan pasca kerja	2.723.113.766	2.787.570.628	<i>Post-employment benefits expenses</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	14.018.781.732	3.227.768.666	<i>Provision for impairment loss of receivables</i>
Penyusutan aset tetap	(364.810.721)	(282.678.417)	<i>Depreciation of property, plant, and equipments</i>
Penyusutan aset hak guna	4.549.615.434	4.375.116.123	<i>Depreciation of right of use asset</i>
Beban sewa	(4.180.538.601)	(4.673.833.248)	<i>Rent expenses</i>
Beban bunga atas liabilitas sewa	286.291.744	363.866.456	<i>Interest expenses of lease liabilities</i>
Jumlah beda temporer	17.032.453.354	5.797.810.208	<i>Total temporary differences</i>
Beda tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Pegawai	14.834.989.100	13.249.723.623	<i>Employees</i>
Denda pajak	-	1.660.738.509	<i>Tax penalty</i>
Jamuan dan sumbangan	1.338.080.073	306.129.546	<i>Entertainments and donations</i>
Provisi atas biaya yang ditangguhkan	-	4.735.716.107	<i>Provision for deferred charges</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(298.364.796)	(6.474.880.010)	<i>Income already subjected to final tax</i>
Lain-lain	673.797.615	589.490.150	<i>Others</i>
Jumlah beda tetap	16.548.501.992	14.066.917.925	<i>Total permanent differences</i>
Taksiran laba fiskal tahun berjalan	6.005.927.235	3.759.059.446	<i>Estimated fiscal profit - current year</i>
Kompensasi kerugian fiskal	(6.005.927.235)	(3.759.059.446)	<i>Compensation of fiscal loss</i>
Taksiran rugi fiskal setelah kompensasi kerugian fiskal	-	-	<i>Estimated fiscal loss after compensated current period</i>
Akumulasi kerugian fiskal terdiri atas:			<i>Accumulated fiscal loss carried forward consists of:</i>
2017 *)	(85.190.857.587)	(85.190.857.587)	<i>2017 *)</i>
2016 *)	-	(61.883.854.601)	<i>2016 *)</i>
Akumulasi rugi fiskal	(85.190.857.587)	(147.074.712.188)	<i>Accumulated fiscal losses</i>

*) Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan Perusahaan

*) As stated in the Company's Corporate Income Tax return

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Fiskal (lanjutan)

Taksiran laba fiskal selama tahun berjalan, sebagaimana disebutkan di atas, akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT PPh Badan") tahun 2021 yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Perusahaan telah melaporkan taksiran laba fiskal untuk tahun 2020, sebagaimana disebutkan di atas, dalam SPT PPh Badan tahun 2020.

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp36.279.328.363 yang berasal dari rugi fiskal karena tidak memenuhi syarat pengakuan.

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

d. Fiscal Computation (continued)

Estimated taxable profit the year, as stated above, will be reported in the Corporate Income Tax Returns ("SPT PPh Badan") reported to the tax office in 2021. The Company has reported taxable profit for 2020, as stated above, in 2020 SPT PPh Badan.

e. Deferred Taxes

As of December 31, 2021, the Group did not recognize deferred tax assets amounting to Rp36,279,328,363 which came from fiscal losses that do not fulfill recognition criteria.

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and tax purpose for the year ended December 31, 2021 and 2020, are as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021

31 Desember 2021	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian*/ Adjustments*	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2021
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	2.993.282.091	2.794.897.336	-	581.842.767	6.370.022.194	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	2.493.611.423	489.631.694	(99.335.862)	290.923.126	3.174.830.381	Post-employment benefits
Provisi pinjaman bank	-	808.062.335	-	-	808.062.335	Bank loan provision
Aset tetap dan aset takberwujud	274.869.099	(908.130.167)	-	157.429.444	(475.831.624)	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	5.761.762.613	3.184.461.198	(99.335.862)	1.030.195.337	9.877.083.286	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	-	15.027.856.374	-	-	15.027.856.374	Fiscal loss
Imbalan pasca-kerja	4.946.759.003	801.823.520	(90.175.863)	492.976.427	6.151.383.087	Post-employment benefits
Provisi pemeliharaan jalan tol	1.768.543.999	155.626.324	-	176.854.399	2.101.024.722	Toll road maintenance provision
Beban akrual	114.026.640	-	-	11.402.664	125.429.304	Accrued expenses
Penyisihan penurunan nilai piutang	134.369.916	-	-	(116.100.000)	18.269.916	Allowance for impairment receivables
Provisi pinjaman bank	(319.146.244)	320.494.573	-	(31.914.624)	(30.566.295)	Bank loan provision
Aset tetap dan aset takberwujud	(73.996.641.374)	(20.375.076.036)	-	(7.486.071.509)	(101.857.788.919)	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	(67.352.088.060)	(4.069.275.245)	(90.175.863)	(6.952.852.643)	(78.464.391.811)	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. Deferred Taxes (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

31 Desember 2020	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian*/ Adjustments*	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2020
Aset pajak tangguhan Entitas Anak						Deferred tax assets The Subsidiaries
Rugi fiskal	2.575.136.640	1.024.084.580	-	(605.939.129)	2.993.282.091	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	3.606.957.281	(744.221.727)	1.508.592	(370.632.723)	2.493.611.423	Post-employment benefits
Aset tetap dan aset takberwujud	174.231.520	149.377.203	-	(48.739.624)	274.869.099	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	6.356.325.441	429.240.056	1.508.592	(1.025.311.476)	5.761.762.613	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan Entitas Anak						Deferred Tax Liabilities The Subsidiaries
Imbalan pasca kerja	4.854.523.975	1.068.343.214	(34.189.200)	(941.918.986)	4.946.759.003	Post-employment benefits
Provisi pemeliharaan jalan tol	1.227.851.281	966.067.128	-	(425.374.410)	1.768.543.999	Toll road maintenance provision
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	147.806.908	-	(13.436.992)	134.369.916	Allowance for impairment of receivables
Beban akrual	348.284.621	(205.751.321)	-	(28.506.660)	114.026.640	Accrued expenses
Beban keuangan	65.310.360	(471.410.455)	-	86.953.851	(319.146.244)	Finance cost
Aset tetap dan aset takberwujud	(77.176.562.147)	(13.474.645.610)	-	16.654.566.383	(73.996.641.374)	Property, plant, and equipment and intangible assets
Jumlah	(70.680.591.910)	(11.969.590.136)	(34.189.200)	15.332.283.186	(67.352.088.060)	Total

*Penyesuaian akibat penambahan tarif pajak ke laba rugi/Adjustment due to change of tax rate to profit or loss

f. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Badan

f. Reconciliation of Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan badan dengan beban pajak penghasilan badan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between corporate income tax expense as computed with the applicable tax rates from profit before corporate income tax and corporate income tax expense as shown in the consolidated financial statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	62.948.983.532	135.644.285.146	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	13.848.776.377	29.841.742.732	Income tax expense at the applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap: Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(8.974.785.996)	(2.227.228.409)	Tax effects of permanent differences: Income already subjected to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak-neto	16.193.805.264	(36.368.859)	Non-deductible expenses-net
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	4.225.400.025	-	Adjustments in respect of corporate income tax of the previous years
Penyesuaian atas tarif pajak	5.922.657.304	(14.306.971.710)	Adjustments on tax rate
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan penyesuaian	5.972.181.331	9.751.225.788	Unrecognized deferred tax assets and adjustments
Beban pajak penghasilan	37.188.034.305	23.022.399.542	Income tax expense

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain

PT Jalan Tol Seksi Empat (“JTSE”)

Kurang Bayar PPN Juni 2012

Pada tanggal 26 April 2017, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Juni 2012 dan denda terkait sebesar Rp20.036.035.966. JTSE mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 19 Juli 2017. Pada tanggal 14 Desember 2017, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan dari JTSE. Atas keputusan tersebut, JTSE tidak melakukan pembayaran atas jumlah kurang bayar tersebut.

Pada tanggal 26 Januari 2018, JTSE mengajukan surat banding atas keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada 19 September 2019, Pengadilan Pajak menerima banding JTSE tersebut. Atas keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 26 Desember 2019. Untuk menanggapi peninjauan kembali tersebut, JTSE mengajukan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung pada 5 Februari 2020.

Pada tanggal 16 Agustus 2021, JTSE menerima Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Juni 2012. Berdasarkan surat putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan banding JTSE, sehingga pajak dan denda yang masih harus dibayar JTSE sebesar Rp20.036.035.966. JTSE telah membayar kekurangan bayar pajak dan denda terkait tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021.

Kurang Bayar PPN Januari-November 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Januari-November 2016 dan denda terkait sebesar Rp19.122.737.388. JTSE tidak melakukan pembayaran atas pokok ataupun denda. JTSE mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 8 Maret 2019. Pada tanggal 24 Juli 2019 Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan JTSE. Pada tanggal 8 Agustus 2019, JTSE mengajukan surat banding atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut ke Pengadilan Pajak.

19. TAXATION (continued)

g. Others

PT Jalan Tol Seksi Empat (“JTSE”)

June 2012 VAT Underpayments

On April 26, 2017, JTSE received a tax assessment of VAT for period June 2012 reflecting underpayment and penalty of Rp20,036,035,966. JTSE filed an objection letter to the tax office on July 19, 2017. On December 14, 2017, Director General of Taxation rejected the objection from JTSE. Upon the decisions, JTSE did not make any payment of the assessed underpayment.

On January 26, 2018, JTSE filed an appeal letter on Director General of Taxation’s decision to the Tax Court. On September 19, 2019, the Tax Court accepted the JTSE’s appeals. Upon the decision, the Director General of Taxation submitted a judicial review to the Supreme Court on December 26, 2019. To counter the judicial review, JTSE filed a contra memory letter to the Supreme Court on February 5, 2020.

On August 16, 2021, JTSE received the Decision Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the appeal of the Tax Underpayment Assessment Letter for the June 2012 VAT period. Based on the decision letter, the Supreme Court rejected JTSE’s appeal, so that the tax and penalties should be paid by JTSE amounted to Rp20,036,035,966. JTSE has paid the tax and related penalty underpayment on October 25, 2021.

January-November 2016 VAT Underpayments

On December 21, 2018, JTSE received a tax assessment of VAT for period January-November 2016 reflecting underpayment and penalty of Rp19,122,737,388. JTSE did not make any payment of principal or penalty. JTSE filed an objection letter against the tax assessment to the tax office on March 8, 2019. On July 24, 2019, Director General of Taxation rejected JTSE’s objection. On August 8, 2019, JTSE filed appeal letters on the Director General of Taxation’s decisions to the Tax Court.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Kurang Bayar PPN Januari-November 2016
(lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan menerima banding tersebut. Atas keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 18 Maret 2021. Untuk menanggapi peninjauan kembali tersebut, JTSE mengajukan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung pada 20 April 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum ada hasil atas peninjauan kembali tersebut.

Lebih Bayar PPh Badan 2020

Pada tanggal 28 Oktober 2021, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Badan untuk tahun 2020 sebesar Rp1.681.552.403. JTSE menerima SKPLB tersebut. Selisih atas jumlah yang disetujui berdasarkan SKPLB dan jumlah klaim sebesar Rp4.225.400.025 dicatat sebagai beban pajak penghasilan tahun 2020. Pada tanggal 31 Desember 2021, JTSE belum menerima pengembalian kelebihan bayar pajak tersebut dan masih mencatat Rp1.681.552.403 dalam akun Klaim Tagihan Pajak Penghasilan.

20. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Iklan	3.956.310.513	4.426.406.916
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	(2.995.270.455)	(3.583.830.237)
Bagian jangka panjang	961.040.058	842.576.679

Pendapatan iklan diterima di muka merupakan penyewaan papan iklan di ruas jalan tol milik BSD, MMN, dan JTSE.

19. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

**PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
(continued)**

January-November 2016 VAT Underpayments
(continued)

On December 21, 2020, the Tax Court accepted JTSE's appeals. Upon the decision, the Director General of Taxation submitted a judicial review to the Supreme Court on March 18, 2021. To counter the judicial review, JTSE filed a contra memory letter to the Supreme Court on April 20, 2021. No result of such judicial review has been communicated to the Company until the completion date of the consolidated financial statements.

2020 Corporate income tax Overpayment

On October 28, 2021, JTSE received an overpayment of corporate tax assessment letter for 2020 amounting to Rp1,681,552,403. JTSE accepted the SKPLB. The difference between the approved amount based on the SKPLB and the total claim amounting to Rp4,225,400,025 is recorded as income tax expense for 2020. As of December 31, 2021, JTSE has not yet received the refund of the tax overpayment and still recorded Rp1,681,552,403 in the Refundable Corporate Income Tax.

20. UNEARNED REVENUES

Unearned advertising revenue represents billboard rentals on toll roads owned by BSD, MMN, and JTSE.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

21. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
PT BCA Finance	1.028.458.307	1.970.693.362
PT Candra Sakti Utama Leasing	538.681.555	1.684.535.822
PT Astra Sedaya Finance	341.221.000	5.645.548
PT Toyota Astra Financial Service	73.312.000	-
PT Clipan Finance	59.336.668	242.793.818
PT Mandiri Tunas Finance	20.989.210	104.235.768
Jumlah	<u>2.061.998.740</u>	<u>4.007.904.318</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(1.470.450.443)</u>	<u>(2.680.932.702)</u>
Bagian jangka panjang	<u>591.548.297</u>	<u>1.326.971.616</u>

Perusahaan dan entitas anaknya mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance, PT Candra Sakti Utama Leasing, PT Clipan Finance, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Astra Sedaya Finance untuk membiayai pembelian kendaraan.

Utang pembiayaan konsumen dikenakan suku bunga tetap untuk masing-masing perjanjian dengan kisaran tingkat suku bunga mulai 4,75%-23,00% (2020: 4,90%-23,00%) dengan jangka waktu pembayaran selama 3-4 tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang dibeli.

21. CONSUMER FINANCING LIABILITIES

<i>PT BCA Finance</i>	<i>PT Candra Sakti Utama Leasing</i>	<i>PT Astra Sedaya Finance</i>	<i>PT Toyota Astra Financial Service</i>	<i>PT Clipan Finance</i>	<i>PT Mandiri Tunas Finance</i>
Total					
Current maturities					
Long-term portion					

The Company and its subsidiaries entered into consumer financing agreements with PT BCA Finance, PT Candra Sakti Utama Leasing, PT Clipan Finance, PT Mandiri Tunas Finance, and PT Astra Sedaya Finance to finance purchase of vehicle.

Consumer financing liabilities are subject to fixed interest rate for each agreement with interest rates ranging from 4,75%-23,00% (2020: 4.90%-23.00%) with a payment term of 3-4 years.

This facility is guaranteed with the vehicles purchased.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
Pinjaman bank		
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")		
<i>Time Loan Revolving</i>		
PT Margautama Nusantara ("MUN")		
- Fasilitas 1 (TLR)	<u>157.370.874.240</u>	<u>239.370.874.240</u>
Kredit Investasi		
PT Makassar Metro Nusantara ("MMN")		
- Fasilitas 2 (KI 2)	31.610.837.194	42.012.235.359
PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")		
- Fasilitas 3 (KI 3)	47.489.288.206	66.485.003.489
PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")		
- Fasilitas 3 (KI 3)	4.330.614.558	5.735.138.206
PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")		
- Fasilitas 3 (KI 4)	750.000.000.000	-
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")		
- Fasilitas (KI)	63.613.492.537	73.400.183.697
PT Inpola Meka Energi ("IME")		
- Fasilitas (KI)	-	227.544.215.935
Total BCA	<u>1.054.415.106.735</u>	<u>654.547.650.926</u>

22. LONG-TERM LOANS

Bank loans
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")
<i>Time Loan Revolving</i>
<i>PT Margautama Nusantara ("MUN")</i>
<i>Facility 1 (TLR)</i>
<i>Investment Credit</i>
<i>PT Makassar Metro Network ("MMN")</i>
<i>Facility 2 (KI 2)</i>
<i>PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")</i>
<i>Facility 3 (KI 3)</i>
<i>PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")</i>
<i>Facility 3 (KI 3)</i>
<i>PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")</i>
<i>Facility 3 (KI 4)</i>
<i>PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari</i>
<i>("RPSL")</i>
<i>Facility (KI)</i>
<i>PT Inpola Meka Energi ("IME")</i>
<i>Facility (KI)</i>
BCA Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

22. LONG-TERM LOANS (continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")			PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC")
Kredit Investasi			Investment Credit
PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")			PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")
- Fasilitas (KI)	-	59.002.848.433	Facility (KI)
PT Bank Pan Indonesia Tbk			PT Bank Pan Indonesia Tbk
Kredit Investasi			Investment Credit
Perusahaan			The Company
- Fasilitas (KI)	22.101.166.363	29.423.375.629	Facility (KI)
Pinjaman bank, neto	1.076.516.273.098	742.973.874.988	Bank loans, net
Pinjaman sindikasi (Catatan 22b)	1.481.853.054.142	1.276.059.789.462	Syndicated loan (Note 22b)
Lembaga keuangan (Catatan 22c)	315.455.067.280	-	Financial institution (Note 22c)
	2.873.824.394.520	2.019.033.664.450	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(15.497.065.321)	(14.169.541.033)	Unamortized transaction costs
Jumlah	2.858.327.329.199	2.004.864.123.417	Total
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(403.171.862.184)	(166.445.524.606)	Less: Current maturities
Pinjaman bank jangka panjang	2.455.155.467.015	1.838.418.598.811	Long-term portion of bank loans

Kreditur/ Creditor	Peminjam/ Debtor	Fasilitas/ Facilities	Jatuh tempo pinjaman/ Maturity date	Tingkat suku bunga efektif/ Effective rate		Jumlah fasilitas/ Total facilities
				2021	2020	
BCA	MUN	TLR	Oct 2022/ Okt 2022	8,50%	8,85%	650.000.000.000
BCA	MMN	KI 2	Jul 2024/ Jul 2024	8,50%	8,75%	69.640.000.000
BCA dan Sulselbar	MMN	KI Sindikasi	Agu 2030/ Aug 2030	7,28%	8,52%	1.547.487.000.000
BCA	JTSE	KI 3	Nov 2023/ Nov 2023	8,75%	8,75%	120.558.000.000
BCA	BSD	KI 3	Mei 2024/ May 2024	8,75%	8,75%	9.384.000.000
BCA	BSD	KI 4	Mei 2024/ May 2024	8,75%	-	750.000.000.000
BCA	RPSL	KI	Nov 2023/ Nov 2023	8,75%	8,75%	138.600.000.000
BCA	IME	KI	Des 2028/ Dec 2028	8,75%	8,75%	297.000.000.000
SMI	IME	KI	Des 2030/ Dec 2030	8,00%	-	375.000.000.000
ICBC	SCTK	KI	Apr 2023/ Apr 2023	12,5%	12,5%	102.000.000.000
IIF	SCTK	KI	Apr 2023/ Apr 2023	8,85%	-	95.000.000.000
Panin	NI	KI	Jun 2024/ Jun 2024	9,75%	11,00%	61.000.000.000

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. PT Margautama Nusantara (MUN) dan entitas anaknya

Sejak tanggal 20 Oktober 2017, MUN, entitas anak langsung, memperoleh fasilitas kredit *Time Loan Revolving* dari BCA sebesar Rp500.000.000.000 untuk pembelian saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), pembiayaan proyek jalan tol milik PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan pembiayaan proyek jalan tol Pettarani. Pada 1 Agustus 2018, fasilitas tersebut ditambahkan sebesar Rp150.000.000.000 sehingga total fasilitas menjadi Rp650.000.000.000.

Pinjaman ini dijamin oleh seluruh saham JLB, pernyataan kesanggupan dari PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), dan PT Makassar Metro Network (MMN), dan *escrow account*, *Operating Account*, *Debt Service Account*, Rekening Penampungan Dividen, dan Rekening Penampungan Pendapatan Sementara JTSE dan MMN.

Pada tanggal 17 April 2017, MMN memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan plafon maksimal sebesar Rp69.640.000.000 untuk membiayai pelapisan jalan tol dan pengadaan *Traffic Information System* (TIS).

Berdasarkan perubahan pertama Perjanjian Kredit dalam Akta No. 10 tanggal 10 Februari 2012, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 dari BCA sebesar Rp25.474.000.000 yang digunakan untuk membiayai perbaikan jalan tol berupa pelapisan, *construction change order* dan rekonstruksi *slab* beton. Pada tanggal 21 Desember 2015, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi 3 dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp120.558.000.000 untuk membiayai pembangunan Jembatan Tallo, perbaikan *frontage* dan investasi lainnya.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. Margautama Nusantara (MUN) and its subsidiaries

On October 20, 2017, MUN, a direct subsidiary, obtained *Time Loan Revolving credit facility* from BCA amounting to Rp500,000,000,000 to purchase of shares of PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), the financing of the toll road project owned by PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and the financing of the Pettarani toll road project. On August 1, 2018, the facility was increased by Rp150,000,000,000 so the total facility became Rp650,000,000,000.

The loan is secured by all JLB shares, letter of undertaking from PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), and PT Makassar Metro Network (MMN), and *escrow accounts*, *Operating Accounts*, *Debt Service Accounts*, *Dividend Settlement Accounts*, and *Temporary JTSE and MMN Revenue Shelter Account*.

On April 17, 2017, MMN obtained an *Investment Credit Facility 1* from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") with a maximum amount of Rp69,640,000,000 to refinance the overlay of toll road and the construction of *Traffic Information System* (TIS).

Based on the first Amendment of Credit Agreement in Notarial Deed No. 10 dated February 10, 2012, JTSE obtained an *Investment Credit Facility 2* from BCA amounting to Rp25,474,000,000 for financing the refinement of toll road consisting of overlay, construction change order and reconstruction of concrete slab. On December 21, 2015, JTSE obtained an *Additional Investment Credit Facility 3* from BCA with a maximum amount of Rp120,558,000,000 to refinance the construction of Tallo Bridge, *frontage* repairment and other investments.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Pinjaman Bank

a. Bank Loans

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. PT Margautama Nusantara (MUN) dan entitas anaknya

i. Margautama Nusantara (MUN) and its subsidiaries

Selanjutnya, berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Kredit yang dinyatakan dalam Akta No. 11 tanggal 17 September 2012, BSD memperoleh Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp22.125.000.000. Pada tanggal 17 April 2017, BSD memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp9.384.000.000 untuk membiayai pembelian ruang kantor di Associate Tower Intermark, Serpong.

Furthermore, based on the second Amendment of Credit Agreement in Notarial Deed No. 11 dated September 17, 2012, BSD obtained Investment Credit from BCA amounting to Rp22,125,000,000. On April 17, 2017, BSD obtained Investment Credit facility from BCA with a maximum amount Rp9,384,000,000 to finance purchase of office room at Associate Tower Intermark, Serpong.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan amandemen Akta Perjanjian Kredit No. 69, BSD, memperoleh Fasilitas Kredit Investasi 4 dari BCA sebesar tidak lebih dari Rp750.000.000.000 untuk pembiayaan pengembangan bisnis proyek jalan tol milik BSD.

On August 30, 2021, based on Amendment of Credit Agreement Notarial Deed No. 69, BSD, obtained an extension of Credit Facility from BCA amounting to no more than Rp750,000,000,000 to finance the development of BSD's toll road project business.

Keseluruhan pinjaman entitas anak dari MUN dijamin oleh hak perusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol, saham entitas anak yang dimiliki oleh MMN, JTSE penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow, Rekening Operasi dan Debt Service Account, dan Letter of Undertaking (LoU) entitas anak.

All of the MUN's subsidiaries' loans are secured by the concession rights, all revenues from toll road, the subsidiary shares owned by MMN, JTSE receipt of indemnity insurance from Government or new Toll Road in accordance with PPJT, Escrow Account, the Operating Account, Debt Service Account and a Letter of Undertaking (LoU) of the subsidiaries.

Perjanjian hutang antara Grup MUN dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Grup MUN memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

The loan agreement between MUN Group and BCA contains several restrictive covenants which require the MUN Group to obtain prior written consent from BCA, mainly to:

- a. Mendapatkan pinjaman baru;
- b. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
- c. Menjaminkan hutang, harta kekayaan atau Corporate Guarantee ke pihak lain.

- a. Obtain new loan;
- b. Divest or merge and give guarantees;
- d. Secure debt, property or Corporate Guarantee to other parties.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

i. PT Margautama Nusantara (MUN) dan entitas anaknya (lanjutan)

Selama masa berlaku perjanjian tersebut, Grup harus mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimum sebesar 2 kali untuk MUN, JTSE dan BSD, 4 kali untuk MMN, dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah mematuhi persyaratan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tersebut.

Jumlah beban bunga pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp105.516.720.166 dan Rp35.584.860.502.

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

Pada tanggal 19 Juni 2013, DCC, entitas anak tidak langsung, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Bank Garansi dari BCA dengan jumlah pokok masing-masing tidak lebih dari Rp45.000.000.000 dan Rp3.685.000.000.

Fasilitas pinjaman ini dipergunakan oleh DCC untuk membiayai instalasi pengolahan air (IPA) bersih, membeli peralatan IPA dan jaminan pelaksanaan serta jaminan penyediaan air bersih ke PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM), Medan, Sumatera Utara.

Pinjaman ini dijamin dengan perjanjian konsesi dari KIM, piutang DCC kepada KIM, seluruh saham DCC, seluruh aset atas proyek yang dibiayai oleh BCA, rekening *escrow*, rekening *operating* dan *debt service*, LoU dari DCC.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

i. Margautama Nusantara (MUN) and its subsidiaries (continued)

During the effective period of the agreement, the subsidiaries shall maintain debt to equity ratio at a maximum of 2 times for MUN, JTSE, and BSD, and 4 times for MMN, and a minimum debt service coverage ratio of 1 time. As of December 31, 2020 the Group has complied with covenants as stated in the credit facilities agreements.

Total interest expenses in December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp105,516,720,166 and Rp35,584,860,502.

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

On June 19, 2013, DCC, an indirect subsidiary, obtained Credit Investment and Bank Guarantee facilities from BCA with principal amount not exceeding of Rp45,000,000,000 and Rp3,685,000,000, respectively.

DCC used this loan facility to finance their water treatment plant (WTP), purchase WTP equipments and guarantee operational and water supplies to PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM), Medan, North Sumatera.

The loan is secured by concession agreement of KIM, DCC receivable to KIM, all the DCC shares owned by shareholder, all assets of project financed by BCA, escrow account, operating and debt service account, and LoU from the Company.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (lanjutan)

Perjanjian pinjaman antara DCC dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan DCC memperoleh persetujuan dari BCA, di antaranya untuk:

1. Merubah pemegang saham kecuali pengalihan saham ke TBN, entitas anak tidak langsung, sebesar 20%;
2. Penggantian DCC sebagai operator IPA di KIM kecuali ke TBN;
3. Penggantian TBN sebagai supervisi DCC;
4. Mendapatkan pinjaman baru;
5. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
6. Perubahan bisnis utama;
7. Pembayaran dividen; dan
8. Menjamin utang, harta kekayaan atau memberikan *Corporate Guarantee* ke pihak lain.

Beban bunga selama tahun 2020 sebesar Rp78.846.763. Pada tanggal 19 Juni 2020, DCC telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman.

iii. PT Inpola Meka Energi (IME)

Pada tanggal 21 Desember 2018, IME, entitas anak tidak langsung, mendapat Fasilitas Kredit dari PT Bank Central Asia yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek PLTA dan PLTMH Lau Gunung, melunasi pinjaman debitor kepada Landesbank Baden Wutternberg "LBBW" dan pemegang saham, serta menjamin keikutsertaan tender atas pengajuan PPA PLTMH/PLTA ke PLN, dengan plafon sebesar Rp297.000.000.000.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

ii. PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (continued)

The loan agreement between DCC and BCA contains several restrictive covenants which require DCC to obtain approval from BCA, mainly to:

1. Shareholders change except for TBN of 20%, an indirect subsidiary;
2. Replace DCC role as WTP operator in KIM except to TBN;
3. Replace TBN role as supervisor of DCC;
4. Obtain new loan;
5. Divest or merge and provide guarantees;
6. Major business changes;
7. Dividend payment; and
8. Secure debt, property or provide *Corporate Guarantee* to other parties.

Interest expenses for 2020 amounted to Rp78,846,763. On June 19, 2020, DCC has settled all of loan facilities.

iii. PT Inpola Meka Energi (IME)

On December 21, 2018, IME, an indirect subsidiary obtained Loan Facility from PT Bank Central Asia to build PLTA & PLTMH Lau Gunung Project, settle loan to Landesbank Baden Wutternberg "LBBW" and shareholder, and guaranteeing tender participation for the submission of PLTMH/PLTA PPAs to PLN, with a maximum amount of Rp297,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

iii. PT Inpola Meka Energi (IME) (lanjutan)

Selama 2019, Fasilitas Kredit yang telah dicairkan sebesar Rp129.918.103.453, yang akan mulai dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2021. Jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut adalah aset tetap yang dibiayai oleh pinjaman, segala bentuk piutang yang menjadi hak IME, kas dan setara kas serta escrow account milik IME, serta saham IME milik EI dan PT Pembangunan Perumahan Energi.

Beban bunga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.194.563.098 dan Rp773.892.890.

Pinjaman ini telah dilunasi pada oleh IME pada bulan Desember 2021.

iv. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 28 November 2016, RPSL, entitas anak, mendapat Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp138.600.000.000 yang digunakan untuk proyek PLTBm Pontianak dan modal kerja.

Pada tanggal 3 Juli 2020, RPSL mendapat perpanjangan jatuh tempo pembayaran hingga 27 Maret 2028 dan suku bunga berubah menjadi 8,75%.

Agunan pinjaman berupa tanah dan bangunan PLTBM x 15 MW, termasuk mesin dan peralatan, seluruh saham debitor, piutang dan persediaan.

Total beban bunga RPSL pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 6.344.168.425 dan Rp8.438.280.639.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

iii. PT Inpola Meka Energi (IME) (continued)

During 2019, outstanding balance of the credit facility is amounted to Rp129,918,103,453, which will be repaid starting January 27, 2021. The loan is secured by the fixed assets financed by the loan, all forms of receivables entitled by IME, cash and cash equivalents and escrow accounts of IME, and IME's shares owned by EI and PT Pembangunan Perumahan Energi.

Interest expenses in December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 22,194,563,098 and Rp773,892,890, respectively.

The loans have been fully repaid by IME in December 2021.

iv. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Long-Term Bank Loan

On November 28, 2016, RPSL, a subsidiary, received an Investment Credit Facility from PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp138,600,000,000 which was used to PLTBm Pontianak's project and working capital.

On July 3, 2020, RPSL received extension of the maturity date to March 27, 2028 and interest rate has changed to 8.75%.

Loan collateral represents of PLTBM x 15 MW land and building, including machinery and equipment, all RPSL's shares, receivables and inventories.

Interest expenses in December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp 6,344,168,425 and Rp8,438,280,639, respectively.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 15 April 2015, SCTK memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari ICBC dengan plafon sebesar Rp102.000.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai investasi SCTK.

Pinjaman ini dijamin dengan fidusia atas penjualan air bersih dan piutang usaha terkait, aset terkait, *Corporate Guarantee* dari Potum dan *Letter of Undertaking* dari SCTK.

Perjanjian pinjaman antara SCTK dan ICBC memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan SCTK memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICBC, di antaranya untuk:

- (i) Mendapatkan pinjaman baru dari pihak ketiga lainnya;
- (ii) Menjamin utang, harta kekayaan atau memberikan *Corporate Guarantee* ke pihak lain;
- (iii) Melakukan investasi, merger, akuisisi atau penempatan kepemilikan pada perusahaan lainnya;
- (iv) Menjual aset terkait;
- (v) Membagikan dividen;
- (vi) Mengubah bisnis utama; dan
- (vii) Melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, perubahan Dewan Direksi atau Komisaris.

Beban bunga selama tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.240.813.222 dan Rp8.261.662.867. Pada bulan Januari 2021, SCTK telah melunasi seluruh pinjaman ini.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang dari Panin dengan maksimum pinjaman sebesar Rp61.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit ruang kantor dengan total luas 674,6 m² yang terletak di Equity Tower Lantai 38, Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan ruang kantor yang dibeli melalui pinjaman ini.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Based on Deed No. 66 dated April 15, 2015, SCTK obtained investment loan facility from ICBC with a maximum amount of Rp102,000,000,000 which is used to finance SCTK investment.

The facility is secured by the fiduciary of sale of fresh water and its accounts receivable, related assets, *Corporate Guarantee* from Potum and *Letter of Undertaking* from the SCTK.

The facility agreement between SCTK and ICBC imposes several restrictions, which requires SCTK to obtain prior written approval from ICBC, including for:

- (i) Obtaining a new loan from other third parties;
- (ii) Ensuring debt, property or provide *Corporate Guarantee* to the other party;
- (iii) Investment, merger, acquisition or placement of ownership in other companies;
- (iv) Selling related assets;
- (v) Distribution of dividends;
- (vi) Major business changes; and
- (vii) Changes to the Articles of Association, changes in the Board of Directors or Commissioners.

Interest expenses for 2021 and 2020 amounted to Rp1,240,813,222 and Rp8,261,662,867, respectively. In January 2021, SCTK has settled all of loan facilities.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

On June 13, 2014, the Company obtained a long-term loan facility from Panin with a maximum loan of Rp61,000,000,000. The loan was used to finance the purchase of 3 (three) units of office space with a total area of 674.6 m² located in Equity Tower 38th floor, Jakarta. The loan is secured by office space purchased through this loan.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

**PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)
(lanjutan)**

Perjanjian utang antara Perusahaan dan Panin memuat beberapa pembatasan yang mengharuskan Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin untuk:

- Menggunakan fasilitas kredit selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya;
- Melakukan perluasan atau penyempitan usaha.

Beban bunga selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.804.298.364 dan Rp3.698.854.847.

b. Pinjaman Sindikasi

**PT Makassar Metro Network (MMN)
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
(BMN)**

**Pinjaman Bank Sindikasi PT Bank Central Asia
Tbk (BCA) dengan PT Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(Sulselbar)**

Pada tanggal 30 Juli 2018, MMN, entitas anak tidak langsung, memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari sindikasi BCA dan Sulselbar (Kreditur) dengan jumlah plafon sebesar Rp1.547.487.000.000 dengan komponen KI pokok sebesar maksimum Rp1.451.378.000.000 dan KI-Interest During Construction sebesar maksimum Rp96.109.000.000.

Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembangunan proyek jalan tol layang Pettarani yang merupakan perpanjangan jalan tol MMN yang sudah ada. Fasilitas ini berjangka waktu maksimal 12 (dua belas) tahun, dengan suku bunga pinjaman yang dihitung berdasarkan suku bunga deposito tertimbang periode 1 bulanan ditambah margin per tahun sebesar masing-masing 5,051% selama masa konstruksi dan 4,901% ketika sudah beroperasi. Pembayaran Fasilitas Kredit dilakukan secara bulanan setelah masa tenggang sampai dengan 3 tahun, dengan persentase pembayaran pokok Fasilitas Kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

**PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)
(continued)**

Loan agreement between the Company and Panin imposes several restrictions that require the Company to obtain prior written approval from Panin for:

- Using the credit facility not in accordance with the agreed loan purpose;*
- Make a business expansion or reduction.*

Interest expense for 2021 and 2020 amounted to Rp2,804,298,364 and Rp3,698,854,847, respectively.

b. Syndicated Loan

**PT Makassar Metro Network (MMN) formerly
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)**

**Syndicated Bank Loan PT Bank Central Asia
Tbk (BCA) with PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(Sulselbar)**

On July 30, 2018, MMN, an indirect subsidiary, obtained Credit Investment from syndication BCA and Sulselbar (Creditor) with a maximum amount of Rp1,547,487,000,000 with component of principal Investment Credit with a maximum amount of Rp1,451,378,000,000 and Investment Credit-Interest During Construction with a maximum of Rp96,109,000,000.

This facility aims to finance the construction of elevated toll road Pettarani which is an extension of existing MMN toll road. This facility has a maximum period of 12 (twelve) years, with loan interest rates calculated based on the one-month weighted average of time deposit added with margin rate per year of 5.051% during construction and 4.901% when already in operation. Payment of Credit Facilities is carried out every month after a grace period of up to 3 years, with the percentage of payment of the Credit Facility principal in accordance with the agreed installment schedule.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

**PT Makassar Metro Network (MMN)
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
(BMN) (lanjutan)**

Pinjaman Bank Sindikasi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) (lanjutan)

Pinjaman ini dijamin oleh hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol seksi I, II, dan III saham entitas anak yang dimiliki oleh MMN, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow, Rekening Operasi dan *Debt Service Account* dan *Letter of Undertaking (LoU)* MMN.

Perjanjian pinjaman antara MMN dan Kreditur memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan entitas anak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

1. Mendapatkan pinjaman baru;
2. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
3. Pembayaran dividen kas; dan
4. Menjaminkan utang, harta kekayaan atau *Corporate Guarantee*.

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, MMN harus mempertahankan *debts to equity ratio* maksimum sebesar 2 kali dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali.

c. Lembaga Keuangan

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Pada tanggal 29 Desember 2020, Potum, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penjamin dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp95.000.000.000.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

b. Syndicated Loan (continued)

**PT Makassar Metro Network (MMN) formerly
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
(continued)**

Syndicated Bank Loan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) with PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) (continued)

The loan is secured by the toll road concession rights, all revenues from toll road section I and II, subsidiary shares owned by MMN, receipt of indemnity insurance from Government or new Toll Road in accordance with PPJT, Escrow Account, the Operating Account and Debt Service Account and a Letter of Undertaking (LoU) of MMN.

The loan agreement between MMN and Creditor contains several restrictive covenants which require subsidiary to obtain prior written consent from BCA, mainly to:

1. Obtain new loan;
2. Divest or merge and give guarantees;
3. Cash dividend payment; and
4. Secure debt, property or Corporate Guarantee to other parties.

During the effective period of the agreement, MMN shall maintain *debts to equity ratio* at a maximum of 2 times and a minimum *debt service coverage ratio* of 1 time.

c. Financial Institution

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

On December 29, 2020, Potum, a subsidiary, obtained a loan facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) through PT Bank Central Asia Tbk as the Guarantor Agent with a principal amount of no more than Rp95,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Lembaga Keuangan (lanjutan)

**PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
(lanjutan)**

Fasilitas tersebut terdiri dari :

- Tranche A Rp67.500.000.000 untuk melunasi sisa fasilitas kredit ICBC termasuk pembayaran bunga, penalti, dan biaya lain terkait pelunasan Fasilitas Kredit ICBC
- Tranche B Rp22.750.000.000 untuk melunasi sebagian pinjaman pemegang saham SCTK kepada Potum.
- Tranche C Rp3.000.000.000 untuk mendanai sebagian jumlah minimal *debt service reserve account*.
- Tranche D Rp1.750.000.000 untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran terkait pemberian Fasilitas.

Perjanjian pinjaman antara Potum dan IIF memiliki tingkat bunga sebesar 8,85% (JIBOR 3 bulan dan margin 5,1%) dan dengan jaminan sebagai berikut:

- Gadai saham
- Surat Kesanggupan
- Jaminan perusahaan
- Jaminan gadai rekening atas rekening transaksi
- Hak Tanggungan
- Dokumen Jaminan Fidusia
- Perjanjian Pengalihan

Pada tanggal 6 Januari 2021, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Pinjaman, Potum mengalihkan pinjaman tersebut kepada SCTK, entitas anak tidak langsung. Maka segala hak dan kewajiban beralih secara hukum kepada SCTK sejak tanggal efektif sampai dengan 10 tahun ke depan. Tanggal efektif tersebut diartikan saat setelah syarat-syarat perjanjian novasi terpenuhi dan tidak boleh lebih dari 12 bulan setelah tanggal perjanjian tersebut.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

c. Financial Institution (continued)

**PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
(continued)**

The facility consists of:

- Tranche A Rp67,500,000,000 to repay the remaining ICBC credit facilities including interest payments, penalties, and other costs related to the repayment of ICBC Credit Facility
- Tranche B Rp22,750,000,000 to repay a portion of SCTK shareholders' loans to Potum
- Tranche C Rp3,000,000,000 to fund a portion of the minimum amount of debt service reserve account.
- Tranche D Rp1,750,000,000 to pay all costs and expenses related to the provision of facilities

The loan agreement between Potum and IIF has bear interest at 8.85% (3-month JIBOR and a margin of 5.1%) with the following guarantees:

- Mortgage shares
- Letter of Ability
- Company guarantee
- Mortgage guarantee of account on transaction account
- Dependent Rights
- Fiduciary Guarantee Document
- Transfer Agreement

On January 6, 2021, in accordance with the Novation Loan Agreement, Potum transferred the loan to SCTK, an indirect subsidiary. Therefore, all rights and obligations are legally transferred to SCTK from the effective date up to the next 10 years. The effective date shall be defined as after the terms of the novation agreement are fulfilled and no longer than 12 months after the date of such agreement.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Lembaga Keuangan (lanjutan)

**PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
(lanjutan)**

Perjanjian ini berlaku efektif dalam hal syarat-syarat di bawah ini telah terpenuhi :

- i. Penyerahan semua persetujuan korporasi SCTK,
- ii. Penyerahan SIPA (Izin Pengusahaan SDA berdasarkan keputusan menteri Pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 364/KPTS/M/2019) yang telah diperbarui mengambil air baku minimal 350 liter/sec dari sungai Ciujung
- iii. Penyerahan semua persetujuan korporasi dari Pemilik Kewajiban
- iv. Pemberi Pinjaman telah menerima pendapat hukum
- v. Pembukaan rekening-rekening BCA oleh SCTK yang akan menggantikan rekening pembayaran kewajiban dan rekening cadangan pembayaran kewajiban setelah terjadinya novasi pinjaman

Beban bunga selama tahun 2021 adalah sebesar Rp9.396.965.421.

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman SCTK adalah sebesar Rp93.416.666.667.

PT Inpola Meka Energi (IME)

Pada tanggal 22 November 2021, IME, entitas anak tidak langsung, memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dengan jumlah pokok pembiayaan tidak lebih dari Rp375.000.000.000.

Fasilitas tersebut terdiri dari :

- Tranche A Rp222.049.000.000 untuk refinancing fasilitas pembiayaan eksisting di Bank BCA;
- Tranche B Rp19.581.000.000 untuk pelunasan biaya konstruksi proyek dan pembangunan sarana dan prasarana proyek;
- Tranche C Rp67.370.000.000 untuk refinancing utang kepada pemegang saham sebagai komposisi pembiayaan maksimum 77% dari RAB Proyek atau realisasi biaya proyek.
- Tranche D Rp66.000.000.000 untuk pembangunan jalur transmisi menuju GI 150 kV.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

c. Financial Institution (continued)

**PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
(continued)**

The agreement is effective in the event that the following conditions have been fulfilled:

- i. Submission of all SCTK corporate approvals,
- ii. Submission of SIPA (SDA Business License based on the decree of the Minister of Public Works and Public Housing no. 364/KPTS/M/2019) which has been updated to take raw water at least 350 litre/sec from Ciujung river
- iii. Submission of all corporate approvals from the Liability Owner
- iv. The Lender has received a legal opinion
- v. Opening of BCA accounts by SCTK that will replace the payment account obligations and reserve account payment obligations after the occurrence of loan novation

Interest expense for 2021 amounted to Rp9,396,965,421.

As of December 31, 2021, SCTK's outstanding loan is amounted Rp93,416,666,667.

PT Inpola Meka Energi (IME)

On November 22, 2021, IME, an indirect subsidiary, obtained a loan facility from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) based on Musyarakah Mutanaqisah Principle with a principal amount of no more than Rp375,000,000,000.

These facilities consist of:

- Tranche A Rp222,049,000,000 for refinancing existing financing facilities at Bank BCA;
- Tranche B Rp19,581,000,000 for the settlement of project construction costs and the construction of project facilities and infrastructure;
- Tranche C Rp67,370,000,000 for refinancing debt to shareholders as a maximum financing composition of 77% of the Project RAB or project cost realization.
- Tranche D Rp66,000,000,000 for the construction of a transmission line to the GI 150 kV.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Lembaga Keuangan (lanjutan)

PT Inpola Meka Energi (IME) (lanjutan)

Perjanjian pinjaman antara IME dan SMI memiliki jangka waktu 9 tahun dan nilai bagi hasil yang dihitung sebesar JIBOR 3 bulan plus margin sebesar 8,0%, dan dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan berikut mesin dan perlengkapannya yang tertanam di atas lahan proyek.
- Seluruh tagihan dan pendapatan usaha yang dimiliki nasabah dari PT PLN (persero)
- Hasil klaim asuransi
- Seluruh saham IME yang dimiliki oleh pemegang saham.
- Sejumlah dana pada rekening pengumpulan.
- Akta Pernyataan Kesanggupan dari PT Nusantara Infrastructure Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Imbalan bagi hasil selama tahun 2021 adalah sebesar Rp394.753.043.

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman IME adalah sebesar Rp 222.048.586.350

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait.

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo (Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut:

31 Desember 2021/December 31, 2021

Pemegang saham	Seri/ Series	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35	PT Bosowa Utama
	B	2.727.291	0,01%	190.910.370	
		2.727.292	0,01%	190.910.405	
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	B	13.220.263.850	74,65%	925.418.469.500	PT Metro Pacific Tollways Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	B	1.771.071.131	10,00%	123.974.979.170	PT Indonesia Infrastructure Finance
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	2.716.645.921	15,34%	190.165.214.470	Others (each below 5%, including public)
Jumlah		17.710.708.194	100,00%	1.239.749.573.545	Total

22. LONG-TERM LOANS (continued)

c. Financial Institution (continued)

PT Inpola Meka Energi (IME) (continued)

The loan agreement between IME and SMI has a term of 9 years and the value for profit sharing is calculated at 3 months JIBOR plus a margin of 8.0%, and with the following guarantees:

- Land and buildings along with machinery and equipment embedded on the project land.
- All bills and operating income owned by customers from PT PLN (Persero)
- Insurance claim results
- All IME shares owned by shareholders.
- Amount of funds in the collection account.
- Deed of Commitment Statement from PT Nusantara Infrastructure Tbk and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Profit sharing for 2021 amounted to Rp394.753.043.

As of December 31, 2021, IME's outstanding loan is amounted Rp222.048.586.350.

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2021 and 2020, the Group has complied with all required covenants of the above-mentioned long-term loan agreements.

23. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholders as of December 31, 2021 and 2020 based on the Shareholders List provided by PT Adimitra Transferindo (Securities Administration Agency) is as follows:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo (Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. SHARE CAPITAL (continued)

The composition of Company's shareholders as of December 31, 2021 and 2020 based on the Shareholders List provided by PT Adimitra Transferindo (Securities Administration Agency) is as follows: (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020

Pemegang saham	Seri/ Series	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35	PT Bosowa Utama
	B	2.727.291	0,01%	190.910.370	
		2.727.292	0,01%	190.910.405	
PT Metro Pacific Tollways Indonesia	B	13.220.263.850	74,65%	925.418.469.500	PT Metro Pacific Tollways Indonesia
PT Indonesia Infrastructure Finance	B	1.771.071.131	10,00%	123.974.979.170	PT Indonesia Infrastructure Finance
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	2.716.645.921	15,34%	190.165.214.470	Others (each below 5%, including public)
Jumlah		17.710.708.194	100,00%	1.239.749.573.545	Total

Pada tahun 2013, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham biasa sebanyak 385.454.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia senilai Rp84.522.927.500. Pembelian kembali saham ini ditujukan untuk menstabilkan harga saham Perusahaan akibat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1-2/SEOJK.04/ 2013. Perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan kembali saham-saham tersebut di masa mendatang. Seluruh saham yang diterbitkan Perusahaan telah disetor penuh. Pembelian ini dicatat pada akun "Saham yang diperoleh kembali".

In 2013, the Company repurchased its common shares totaling to 385,454,000 shares through Indonesia Stock Exchange amounting to Rp84,522,927,500. The transaction has a purpose to stabilize the Company's shares price which was caused by a significant fluctuation of market condition according to the Command Letter of Financial Service Authority (OJK) No. 1-2/SEOJK.04/2013. The Company has rights to reissue the treasury stock in the future. All shares are issued and fully paid by the Company. This transaction has recorded in account "Treasury stock".

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Agio saham	1.958.166.045	1.958.166.045
Agio saham dari penawaran umum perdana pada tahun 2001	6.000.000.000	6.000.000.000
Biaya emisi efek dari penawaran umum perdana tahun 2001	(1.298.793.524)	(1.298.793.524)
Agio saham dengan HMETD sebesar 8.476.500.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dan harga pelaksanaan Rp88 per saham pada tahun 2010	183.084.950.970	183.084.950.970
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2010	(1.306.306.218)	(1.306.306.218)
Agio saham dengan HMETD sebesar 2.475.036.314 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dan harga pelaksanaan Rp200 per saham pada tahun 2018	321.754.720.820	321.754.720.820
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2018	(8.237.236.338)	(8.237.236.338)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(32.799.735.420)	(32.799.735.420)
Jumlah	469.155.766.335	469.155.766.335

24. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL - NET

Additional paid-in capital
Additional paid-in capital from the initial public offering in 2001
Shares issuance costs on initial public offering in 2001
Additional paid-in capital 8,476,500,000 series B shares through issue shares with pre-emptive rights with par value of Rp70 per share at offering price of Rp88 per share in 2010
Shares issuance costs on initial public offering in 2010
Additional paid-in capital 2,475,036,314 series B shares through issue shares with pre-emptive rights with par value of Rp70 per share at offering price of Rp200 per share in 2018
Shares issuance costs on the limited public offering in 2018
Difference in transaction value with entities under common control
Total

25. DIVIDEN, PENCADANGAN SALDO LABA, DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Dividen dan pencadangan saldo laba

Berdasarkan keputusan Direksi tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen interim kepada para pemegang saham sebesar Rp2 per saham atau senilai Rp35.421.416.388. Dividen interim telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2020.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 49 tanggal 19 Agustus 2021, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp693.921.445 sebagai dana cadangan wajib dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 122 tanggal 19 Agustus 2020, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp1.438.136.556 sebagai dana cadangan wajib dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan.

25. DIVIDEND, OTHER EQUITY COMPONENT, AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Dividend and appropriation of retained earnings

Based on the decision of the Board of Directors dated December 14, 2020, the Company agreed to distribute interim dividends to shareholders amounting to Rp2 per share or equivalent to Rp35,421,416,388. The interim dividend has been paid on December 30, 2020.

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2020 which has been legalized by Notarial Deed No.49 of Humberg Lie,S.H., S.E., M.Kn., dated August 19, 2021, the shareholders approved the appropriation of retained earnings to general reserve amounting to Rp693,921,445 and no distribution of dividends to the Company's shareholders.

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2019 which has been legalized by Notarial Deed No.122 of Humberg Lie,S.H., S.E., M.Kn., dated August 19, 2020, the shareholders approved the appropriation of retained earnings to general reserve amounting to Rp1,438,136,556 and no distribution of dividends to the Company's shareholders.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

25. DIVIDEN, PENCADANGAN SALDO LABA, DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

Komponen ekuitas lainnya

Komponen ekuitas lainnya merupakan selisih atas nilai transaksi dengan entitas nonpengendali sebesar Rp469.420.386.634 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Perubahan nilai transaksi dengan entitas nonpengendali selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Saldo awal	469.420.386.634	497.379.919.488
Mutasi tahun berjalan :		
Efek perubahan komposisi ekuitas di MUN (Catatan 1d)	-	(33.626.588.810)
Efek perubahan komposisi ekuitas di EI (Catatan 1d)	-	5.667.055.956
Total mutasi	-	(27.959.532.854)
Saldo akhir	469.420.386.634	469.420.386.634

25. DIVIDEND, OTHER EQUITY COMPONENT, AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS (continued)

Other equity components

Other equity component represents difference in value transactions with non-controlling interests amounting to Rp469,420,386,634 as of December 31, 2021 and 2020.

Changes in value transactions with non-controlling interests on 2021 and 2020 are as follow:

Beginning balance
Movement for the year :
Effect from changes in equity composition in MUN (Notes 1d)
Effect from changes in equity composition in EI (Notes 1d)
Total movement
Ending balance

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

26. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember 2021/December 31, 2021

	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan modal disetor dari kepentingan pengendali/ Additional paid in capital from controlling interest	Dampak perubahan komposisi ekuitas/ Effect from changes in equity composition	Dividen/ Dividend	Bagian laba (rugi) entitas anak/ Equity in net income (loss) of subsidiaries	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
<i>Penyerahan langsung</i>							
PT Margautama Nusantara	636.813.770.028	-	-	(10.342.832.639)	22.301.072.658	(3.227.375.265)	645.544.634.782
PT Potum Mundi Infranasantara	39.122.042.609	-	-	-	427.867.539	62.979.860	39.812.889.908
PT Energi Infranasantara	63.230.520.005	-	-	-	(2.940.471.816)	(45.375.175)	60.244.673.014
PT Marga Metro Nusantara	18.660.814.730	-	-	-	(16.765.044)	-	18.644.049.686
Jumlah	757.827.147.372	-	-	(10.342.832.639)	19.771.703.337	(3.209.770.780)	764.046.247.290

Direct ownership
PT Margautama Nusantara
PT Potum Mundi Infranasantara
PT Energi Infranasantara
PT Marga Metro Nusantara

Total

31 Desember 2021/December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan modal disetor dari kepentingan pengendali/ Additional paid in capital from controlling interest	Dampak perubahan komposisi ekuitas/ Effect from changes in equity composition	Dividen/ Dividend	Bagian laba (rugi) entitas anak/ Equity in net income (loss) of subsidiaries	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
<i>Penyerahan langsung</i>							
PT Margautama Nusantara	473.290.756.313	97.000.000.000	33.626.588.699	-	38.607.934.947	(5.711.509.931)	636.813.770.028
PT Potum Mundi Infranasantara	36.853.624.266	-	-	-	2.426.415.341	(157.996.898)	39.122.042.609
PT Energi Infranasantara	73.410.148.942	119.000.000	(12.700.785.938)	-	2.183.682.989	218.496.002	63.230.520.005
PT Marga Metro Nusantara	7.510.086.933	11.139.000.000	-	-	11.727.797	-	18.660.814.730
Jumlah	591.064.614.454	108.258.000.000	20.925.802.761	-	43.229.741.084	(5.651.010.927)	757.827.147.372

Direct ownership
PT Margautama Nusantara
PT Potum Mundi Infranasantara
PT Energi Infranasantara
PT Marga Metro Nusantara

Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Hak kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang material terutama berasal dari MUN dan entitas anaknya

Hak kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak terutama berasal dari MUN dan entitas anaknya

Kepemilikan saham Perusahaan atas MUN dan entitas anaknya

26. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

Material non-controlling interests in net assets of Subsidiaries mainly represent those of MUN and its subsidiaries

Non-controlling interests in net assets of Subsidiaries mainly represent those of MUN and its subsidiaries

Equity ownership held by the Company in MUN and its subsidiaries

Nama Entitas Anak/ Name of the Subsidiary	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership		
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Margautama Nusantara	76,51%	76,51%	
Entitas anak dari PT Margautama Nusantara Subsidiaries of PT Margautama Nusantara	64.31% - 76.10%	64.31% - 76.10%	
	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Saldo akumulasi kepentingan non-pengendali terdiri dari:		<i>Accumulated balances of non-controlling interest are consists of:</i>	
Porsi atas ekuitas yang dapat diatribusikan kepada		<i>Equity portion attributable to</i>	
- pemilik entitas induk	564.774.412.183	553.909.921.920	<i>- equity holders of parent entity</i>
- kepentingan non-pengendali dari entitas anak MUN	80.770.222.599	82.903.848.108	<i>- non-controlling interests from MUN subsidiaries</i>
Jumlah	<u>645.544.634.782</u>	<u>636.813.770.028</u>	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan dari MUN dan Entitas Anak tersebut disajikan sebagai berikut ini, berdasarkan jumlah sebelum eliminasi antar-perusahaan:

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian:

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>
Aset lancar	1.075.267.916.049	433.580.788.044
Aset tak berwujud atas perjanjian konsesi	3.279.536.261.633	3.162.703.358.967
Aset tidak lancar (selain aset tak berwujud atas perjanjian konsesi)	860.242.886.044	847.620.942.310
Liabilitas jangka pendek	537.827.552.839	405.072.135.047
Liabilitas jangka panjang	2.193.555.474.150	1.598.479.451.368
Total ekuitas	<u>2.483.664.036.737</u>	<u>2.440.353.502.906</u>
Dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	2.402.893.814.138	2.357.449.654.798
Kepentingan nonpengendali	80.770.222.599	82.903.848.108

Ringkasan laporan laba rugi konsolidasian:

	<u>Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Penjualan	610.731.996.194	1.373.555.585.855
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	54.571.674.141	124.021.319.298

27. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba tahun berjalan per saham adalah sebagai berikut:

	<u>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Profit for the year attributable to the owner of the parent</u>	<u>Jumlah rata-rata tertimbang saham/ Weighted average number of shares</u>	<u>Laba per saham/ Earning per share</u>
Tahun yang berakhir			
31 Desember 2021	5.989.245.890	17.710.708.194	0,34
31 Desember 2020	69.392.144.520	17.710.708.194	3,92

26. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

The summarized financial information of MUN and its subsidiaries is provided below, based on amounts before intercompany eliminations:

Summarized consolidated statement of financial position:

Current assets
Intangible assets of service concession arrangements
Non-current assets (net of Intangible assets of service concession arrangements)
Current liabilities
Non-current liabilities
Total equity
Attributable to :
Owners of the parent
Non-controlling interest

Summarized consolidated statement of profit or loss:

Sales
Income for the period attributable to equity holders of parent entity

27. NET EARNING PER SHARE

Details of profit for the year per share computation are as follows:

*For the year ended
Desember 31, 2021
December 31, 2020*

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

27. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (lanjutan)

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal-tanggal pelaporan. Oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

27. NET EARNING PER SHARE (continued)

The Company has no outstanding potential dilutive ordinary shares at reporting dates. Accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the consolidated statement of profit of loss and other comprehensive income.

28. PENDAPATAN USAHA, PENJUALAN, DAN LAINNYA

28. REVENUES, SALES, AND OTHER OPERATING REVENUE

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
<u>Pendapatan usaha dan penjualan</u>			<u>Revenues and sales</u>
Pendapatan jalan tol			Toll road revenues
Ruas Pondok Aren - Serpong	206.125.156.000	179.599.949.500	Section Pondok Aren - Serpong
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin	100.238.581.000	87.309.325.000	Section Tallo - Hasanuddin Airport
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta - Pettarani	132.981.513.500	61.355.513.500	Section Soekarno Hatta Port-Pettarani
Penjualan listrik	155.622.606.897	122.659.689.751	Electricity sales
Penjualan air bersih	63.873.651.691	63.579.302.646	Treated water sales
Pendapatan jasa manajemen	2.726.355.790	2.699.954.265	Management fee income
Jumlah	661.567.864.878	517.203.734.662	Total
<u>Pendapatan usaha lainnya:</u>			<u>Other operating revenue:</u>
Pendapatan iklan dan sewa lahan	13.543.014.655	21.200.516.115	Advertisement and land rent income

Pendapatan Jalan Tol

Pendapatan jalan tol dihitung dari jumlah kendaraan yang lewat dikalikan dengan tarif menurut golongan kendaraan. Tarif tol yang ditetapkan didasarkan pada:

- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 1990 dan PP No. 40 Tahun 2001.

Undang-undang dan PP tersebut merupakan landasan hukum perhitungan/penyesuaian tarif tol yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Toll Road Revenues

Toll road revenue is calculated from total passing vehicles multiply with the vehicles group tariff. Toll tariff is set based on:

- Law No. 38 Year 2004 which superseded Law No. 13 Year 1980 concerning on Roads.
- The Government Regulation (PP) No. 15 Year 2005 which superseded PP No. 8 Year 1990 and PP No. 40 Year 2001.

The above Law and PP are the legal basis for calculation/adjustment of the toll tariff which then issued by the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

28. PENDAPATAN USAHA, PENJUALAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

Pendapatan Jalan Tol (lanjutan)

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005, Pasal 66 Ayat (1) dinyatakan: "Tarif dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi unsur-unsur kelayakan investasi" dan Pasal 66 Ayat (2): "Besar keuntungan biaya operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan pada selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dengan lintas alternatif jalan umum yang ada".

Rincian tarif tol terjauh pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2021 Golongan/Class					
Ruas Jalan Tol/Toll Road Section	I	II	III	IV	V
Biringkanaya (Makassar)	10.000	17.000	17.000	25.000	25.000
Ujung Pandang Seksi I dan II	10.000	14.000	14.000	19.000	19.000
Pondok Ranji dan Pondok Aren	7.000	13.500	13.500	16.000	16.000

31 Desember/December 31, 2020 Golongan/Class					
Ruas Jalan Tol/Toll Road Section	I	II	III	IV	V
Biringkanaya (Makassar)	10.000	16.500	16.500	24.500	24.500
Ujung Pandang Seksi I dan II	4.000	5.500	5.500	9.000	9.000
Pondok Ranji dan Pondok Aren	7.000	13.500	13.500	16.000	16.000

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Pada 15 Desember 2021, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1485/KPTS/M/2021 tentang "Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Seksi IV", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol JTSE, entitas anak tidak langsung.

PT Makassar Metro Network (MMN)

Pada 6 Mei 2021, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 552/KPTS/M/2021 tentang "Tarif Tol Pada Jalan Tol Layang Pettarani", menetapkan tarif tol pada ruas tol layang Pettarani milik MMN, entitas anak tidak langsung.

Pada 31 Januari 2020, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1232/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Makassar Ujung Pandang", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol MMN, entitas anak tidak langsung.

28. REVENUES, SALES, AND OTHER OPERATING REVENUE (continued)

Toll Road Revenues (continued)

Under PP No. 15 year 2005, Article 66 Paragraph (1) stated: "The tariff is calculated based on the ability to pay by the toll road users, gains in vehicle operating costs, and feasibility of investment elements of the feasibility of investment" and Article 66 Paragraph (2): "Gain in vehicles operating costs referred to in Paragraph (1) shall be calculated based on the difference in vehicle operating costs and the value of time on the toll road with an alternative cross existing public road".

The details of the farthest toll tariffs as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

On December 15, 2021, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1485/KPTS/M/2021, on "Adjustment Rate Toll Road in Section IV", set the adjustment of toll rates on toll roads of JTSE, an indirect subsidiary.

PT Makassar Metro Network (MMN)

On May 6, 2021, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 552/KPTS/M/2021, on "Toll Rates on Elevated Toll Road Pettarani", set the toll rates on elevated toll roads Pettarani of MMN, an indirect subsidiary.

On January 31, 2020, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1232/KPTS/M/2019, on "Adjustment Rates Toll Road Makassar in Ujung Pandang", set the adjustment of toll rates on toll roads of MMN, an indirect subsidiary.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

28. PENDAPATAN USAHA, PENJUALAN, DAN LAINNYA (lanjutan)

Pendapatan Jalan Tol (lanjutan)

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (lanjutan)

Pada 31 Januari 2020, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1233/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Pondok Aren dan Pondok Ranji", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol BSD, entitas anak tidak langsung.

Pendapatan Air Bersih

Penjualan air bersih merupakan penjualan air bersih dari SCTK dan DCC, entitas-entitas anak tidak langsung.

Penjualan Listrik

Penjualan listrik merupakan penjualan listrik dari RPSL dan IME.

Pendapatan Jasa Manajemen

Pendapatan jasa manajemen merupakan pendapatan atas jasa manajemen yang diberikan oleh TBN, entitas anak tidak langsung, kepada TKCM, entitas asosiasi.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rincian penjualan dari pelanggan dengan total penjualan kumulatif individual melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2021		2020	
	Total/ Total	Persentase terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ Percentage to Total Consolidated Sales	Total/ Total	Persentase terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ Percentage to Total Consolidated Sales
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	155.622.606.897	18,42%	122.659.689.751	7,81%

Penjualan di atas dilakukan oleh RPSL dan IME.

28. REVENUES, SALES, AND OTHER OPERATING REVENUE (continued)

Toll Road Revenues (continued)

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (continued)

On January 31, 2020, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1233/KPTS/M/2019, on "Adjustment Rate Toll Road Pondok Aren and Pondok Ranji", set the adjustment of toll rates on toll roads of BSD, an indirect subsidiary.

Treated Water Sales

Treated water sales represent the sale of treated water from SCTK and DCC, indirect subsidiaries.

Electricity Sales

Electricity sales represent the sale of electricity from RPSL and IME.

Revenue from Management Fee

Revenue from management fee represents fee for management services provided by TBN, an indirect subsidiary, to TKCM, an associated entity.

During the year ended December 31, 2021, the details of sales from customers with individual cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated sales are as follows:

The sales above were made by RPSL and IME.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

29. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh entitas anak dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol serta untuk peningkatan kapasitas produksi air bersih. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

29. CONSTRUCTION REVENUES AND COSTS

Construction revenues are the compensation of the service recognized by the subsidiaries for building new toll roads and to upgrade toll roads capacity and upgrade production capacity of clean water. Construction revenues measured using cost method, which added up to all costs directly attributable to the acquiring costs of the assets.

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Pendapatan konstruksi			Construction revenues
Penyelenggara jalan tol	157.843.731.040	1.024.090.281.740	Toll road operator
Hak penyediaan air bersih	11.834.874.022	7.624.773.444	Water supply concession rights
Sub-jumlah	169.678.605.062	1.031.715.055.184	Sub-total
Beban konstruksi			Construction costs
Penyelenggara jalan tol	(157.843.731.040)	(1.024.090.281.740)	Toll road operator
Hak penyediaan air bersih	(11.834.874.022)	(7.624.773.444)	Water supply concession rights
Sub-jumlah	(169.678.605.062)	(1.031.715.055.184)	Sub-total
Jumlah	-	-	Total

**30. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK
PENJUALAN**

30. DIRECT COSTS AND COST OF SALES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Beban langsung jalan tol			Direct costs of toll road
Beban pengumpul pendapatan jalan tol	33.602.565.247	32.073.184.000	Toll road revenue collector cost
Beban pemeliharaan jalan tol	17.815.792.508	14.893.604.781	Toll road maintenance cost
Beban pelayanan pemakai jalan tol	13.425.449.395	12.742.644.638	Toll road user services cost
Sub-jumlah	64.843.807.150	59.709.433.419	Sub-total
Amortisasi aset takberwujud	95.409.780.785	52.246.208.589	Amortization of intangible assets
Beban pokok penjualan tenaga listrik	91.235.909.000	73.694.642.133	Cost of sales of electricity
Beban pokok pengolahan air	17.337.586.514	15.335.703.338	Cost of water treatment
Jumlah	268.827.083.449	200.985.987.479	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

30. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian beban langsung dan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

a. Beban pengumpul pendapatan tol

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Upah pengumpul tol	11.164.602.799	9.339.944.104
Gaji dan tunjangan	10.851.943.583	10.037.129.923
Penyusutan (Catatan 11)	3.895.290.323	5.165.448.992
Bahan bakar, listrik dan air	2.856.949.218	2.656.675.629
Pengamanan	1.732.898.682	1.678.084.867
Perbaikan dan pemeliharaan	610.786.001	687.170.756
Imbalan pasca-kerja	411.637.765	508.877.664
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	2.078.456.876	1.999.852.065
Jumlah	33.602.565.247	32.073.184.000

b. Beban pemeliharaan jalan tol

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Perbaikan dan pemeliharaan	8.782.855.463	8.132.440.107
Pajak bumi dan bangunan	5.889.903.799	5.512.007.983
Asuransi	1.793.562.574	549.750.329
Gaji dan tunjangan	698.040.788	558.500.347
Penyusutan (Catatan 11)	205.878.020	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	445.551.864	140.906.015
Jumlah	17.815.792.508	14.893.604.781

c. Beban pelayanan pemakai jalan tol

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2021	2020
Gaji dan tunjangan	4.951.553.524	4.712.035.834
Beban pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Catatan 37c ii)	3.418.470.182	2.210.467.584
Penyusutan (Catatan 11)	2.982.276.911	3.830.066.544
Perbaikan dan pemeliharaan	1.280.115.162	1.192.611.586
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	793.033.616	797.463.090
Jumlah	13.425.449.395	12.742.644.638

30. DIRECT COSTS AND COST OF SALES (continued)

Detail of direct costs and cost of sales are as follow:

a. Toll road revenue collector expenses

Toll collector fee
Salaries and allowance
Depreciation (Note 11)
Fuel, electricity and water
Security
Repair and maintenance
Post-employment benefit
Others (each below Rp500,000,000)

Total

b. Toll road maintenance expenses

Repair and maintenance
Land and property tax
Insurance
Salaries and allowance
Depreciation (Note 11)
Others (each below Rp500,000,000)

Total

c. Toll road user services cost

Salaries and allowances
Operating expenses of Pondok Ranji toll gate (Note 37c ii)
Depreciation (Note 11)
Repair and maintenance
Others (each below Rp500,000,000)

Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

30. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

30. DIRECT COSTS AND COST OF SALES (continued)

d. Beban pokok penjualan tenaga listrik

d. Cost of sales of electricity

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Material energi biomassa	74.712.329.308	65.474.725.996	Material biomass energy
Gaji dan tunjangan	5.490.567.628	4.950.436.984	Salaries and allowances
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	11.033.012.064	3.269.479.153	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	91.235.909.000	73.694.642.133	Total

e. Beban pokok pengolahan air

e. Cost of water treatment

Akun ini merupakan beban untuk pengolahan air yang berasal dari PT SCKT dan PT DCC.

This account represents direct costs of water treatment from PT SCKT and PT DCC.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada transaksi dengan pemasok yang berjumlah lebih dari 10% dari jumlah beban usaha langsung dan beban pokok penjualan.

For the year ended December 31, 2021 and 2020, there were no transactions with suppliers that constituted more than 10% of the total direct costs and cost of sales.

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Gaji dan tunjangan	114.352.848.866	101.379.681.214	Salaries and allowances
Jasa profesional	11.718.976.412	16.209.242.539	Professional fees
Penyusutan (Catatan 11)	10.595.934.351	10.797.705.989	Depreciation (Note 11)
Imbalan pasca kerja	9.753.201.691	11.940.268.797	Post-employment benefit
Penyusutan aset hak guna (Catatan 14)	7.501.289.885	7.490.448.293	Depreciation of right of use assets (Note 14)
Beban rumah tangga	5.248.982.945	4.067.067.701	Household expenses
Jamuan dan sumbangan	4.032.198.825	1.494.138.590	Entertainments and donations
Perbaikan dan pemeliharaan	2.589.418.259	2.230.405.206	Repair and maintenance
Promosi dan iklan	2.426.862.666	2.321.204.532	Promotions and advertising
Listrik, air dan telekomunikasi	1.395.233.778	1.548.175.318	Electricity, water and telecommunication
Transportasi dan perjalanan dinas	1.175.401.841	1.557.330.868	Transportation and travelling
Akomodasi, rapat dan keanggotaan	963.900.125	805.152.746	Accommodation, meeting and membership
Sewa	533.740.400	593.127.521	Rent
Alat tulis kantor	449.443.787	409.814.792	Stationeries
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	17.395.426.241	9.853.915.216	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	190.132.860.072	172.697.679.322	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**32. PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL
LAINNYA**

32. OTHER OPERATING INCOME/(EXPENSES)

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Penghasilan usaha lainnya			Other operating income
Jasa konsultasi	209.800.747	379.901.217	Consultation fees
Laba dari selisih perubahan kurs mata uang asing, neto	357.645.657	571.416.103	Profit from foreign exchange, net
	567.446.404	951.317.320	
Beban usaha lainnya			Other operating expenses
Denda pajak	(37.489.864.443)	(8.771.621.484)	Tax penalties
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(14.180.994.732)	(7.028.342.703)	Provision for impairment loss of receivables
Provisi atas biaya yang ditangguhkan	-	(4.735.716.107)	Provision for deferred charges
Penurunan nilai <i>goodwill</i>	(6.634.064.188)	-	Impairment of goodwill
Iklan dan sewa lahan	(686.819.738)	(3.980.033.656)	Advertisement and land rent
Lain-lain	(6.943.899.875)	(8.392.172.650)	Others
	(65.935.642.976)	(32.907.886.600)	
Jumlah	(65.368.196.572)	(31.956.569.280)	Total

33. PENGHASILAN KEUANGAN

33. FINANCIAL INCOME

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Bunga deposito dan jasa giro	6.095.246.438	16.232.984.078	Interest on time deposits and current account service
Bunga piutang non-usaha dan investasi	1.881.958.485	7.164.778.074	Interest on non-trade receivables and investments
Jumlah	7.977.204.923	23.397.762.152	Total

34. BEBAN KEUANGAN

34. FINANCIAL COST

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2021	2020	
Bunga pinjaman bank dan lembaga keuangan	139.594.129.318	59.499.588.580	Interest on bank loans and financial institution
Bunga utang pembiayaan konsumen	368.688.378	667.980.409	Interest on consumer financing liabilities
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 14)	310.513.975	599.221.957	Interest expenses on lease liabilities (Note 14)
Beban administrasi bank	1.503.436.519	498.848.877	Bank charges
Provisi pinjaman	2.071.888.474	366.409.683	Loan provision
Jumlah	143.848.656.664	61.632.049.506	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung/ <i>Indirect associate entity</i>	Piutang non-usaha (modal kerja/ <i>Non-trade receivables (working capital)</i>)
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung/ <i>Indirect associate entity</i>	Piutang usaha dan piutang non-usaha/ <i>Trade receivables and non-trade receivables</i>
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Entitas asosiasi tidak langsung/ <i>Indirect associate entity</i>	Piutang non-usaha/ <i>Non-trade receivables</i>

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of transactions with related parties

In the normal course of business, the Group made business and financial transactions with certain related parties. The nature of the relationships of the Group with its related parties are as follows:

The details of the balance of transactions with related parties are as follows:

	Persentase terhadap total aset/ Percentage from total assets				
	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Piutang usaha					<i>Trade receivables</i>
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,001%	0,001%	65.734.755	72.000.000	<i>PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri</i>
Piutang non-usaha					<i>Non-trade receivables</i>
PT Intisentosa Alambahtera	0,468%	0,521%	30.835.765.608	30.481.356.360	<i>PT Intisentosa Alambahtera</i>
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	0,213%	0,360%	14.000.000.000	21.000.000.000	<i>PT Jakarta Lingkar Baratsatu</i>
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	0,090%	0,101%	5.933.562.038	5.933.562.040	<i>PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri</i>
Direktur Perusahaan	0,001%	0,005%	75.000.000	300.000.000	<i>The Company's directors</i>
Sub-jumlah	0,772%	0,987%	50.844.327.646	57.714.918.400	Sub-total
Jumlah	0,773%	0,988%	50.910.062.401	57.786.918.400	Total

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Penjualan			<i>Sales</i>
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	2.726.355.790	2.699.954.265	<i>PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri</i>

Piutang kepada PT Intisentosa Alambahtera merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai 10 Januari 2020. Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Portco masih dalam proses perpanjangan tanggal jatuh tempo perjanjian pinjaman ini sampai 10 Januari 2023.

Due from PT Intisentosa Alambahtera represents working capital receivable based on Shareholder Loan Agreement dated April 3, 2012, bears interest at USD LIBOR plus 3.5% per annum and have maturity date until January 10, 2020. As of the issuance date of consolidated financial statements, Portco is still in the process of extending the maturity date of these loan agreements until January 10, 2023.

Piutang kepada PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) merupakan piutang investasi antara TKCM dan TBN (entitas anak) yang digunakan untuk keperluan pembiayaan terkait proyek peningkatan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA). Piutang ini tidak dikenakan bunga dan dapat ditagih sewaktu-waktu sehingga disajikan sebagai piutang jangka pendek pada tanggal pelaporan.

Due from PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) represents investment receivables between TKCM and TBN (a subsidiary) used in financing the project of uprating production capacity of Water Treatment Plant (WTP). This receivable is not subject to interest and repayable on demand so that it was presented as current receivable as at the reporting dates.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

35. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

Kompensasi jangka pendek manajemen kunci

Grup memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp32.561.590.135 dan Rp29.783.058.340 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

36. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Grup menghitung dan mengakui cadangan imbalan pasca-kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Cadangan imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	67.601.077.890	60.547.539.716

Present value of defined benefit obligation

Beban imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban langsung dan beban umum dan administrasi adalah:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Biaya jasa kini	7.292.104.029	7.077.293.278
Biaya bunga	3.523.673.107	3.452.652.587
Kelebihan pembayaran	80.968.785	21.538.929
Penyesuaian kewajiban akibat pengakuan masa kerja lalu	(244.321.349)	2.324.488.996
Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang diakui	(227.112.139)	242.790.454
Jumlah	10.425.312.433	13.118.764.244

35. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Nature of transactions with related parties (continued)

Management does not provide any allowance for impairment of this receivable due to the management believes that such receivable is collectible.

Key management's short-term compensation

The Group provided compensation short-term benefits for the Boards of Commissioners and Directors amounting to Rp32,561,590,135 and Rp29,783,058,340 for the year ended December 31, 2021 and 2020, respectively.

36. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Group calculated and recognized post-employment benefit liabilities in accordance with The Company Regulation and applicable Labour Law.

Post-employment benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the post-employment benefit expenses as direct cost and general and administrative expense are as follows:

*Current service costs
Interest costs
Excess payment
Adjustment due to past service
Actuarial (gain)/loss recognized*

Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

36. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Saldo awal	60.547.539.716	48.203.142.503	Beginning balance
Beban tahun berjalan dicatat ke laba rugi	10.425.312.433	13.118.764.244	Expenses during the year to profit or loss
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	(1.054.124.518)	1.101.504.038	Other comprehensive income/(loss)
Pembayaran tahun berjalan	(2.236.680.956)	(1.854.332.139)	Payment during the year
Kelebihan pembayaran	(80.968.785)	(21.538.930)	Excess payment
Saldo akhir	67.601.077.890	60.547.539.716	Ending balance

Dampak akibat dari setiap satu persen perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan kenaikan gaji terhadap nilai kini kewajiban pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	Kenaikan 1%/ Increase 1%	Penurunan 1%/ Decrease 1%	
Tingkat diskonto	(3.725.739.305)	4.210.687.213	Discount rate
Kenaikan gaji	4.240.777.445	(3.822.866.766)	Wages and salary increase

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan dari nilai kini dari liabilitas program imbalan pasti di tahun-tahun mendatang:

	2021	
Dalam waktu 12 bulan mendatang	13.371.010.660	Within the next 12 months
Antara 2 hingga 5 tahun	19.439.376.126	Between 2 and 5 years
Antara 5 hingga 10 tahun	30.056.282.580	Between 5 and 10 years
Lebih dari 10 tahun	54.476.071.307	Beyond 10 years

Pada 31 Desember 2021, rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan adalah 11,69 tahun.

As of December 31, 2021 the weighted average duration of the post-employment benefit liabilities is 11.69 years.

Imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dihitung oleh KKA Steven & Mourits (2020: PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), aktuaris independen. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial sebagai berikut:

The post-employment benefit for the year ended December 31, 2021 were calculated by an independent actuary, KKA Steven & Mourits (2020: PT Dayamandiri Dharmakonsilindo). The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	6,55%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10,00%	6,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI - 2019	TMI - 2019	Mortality rate
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	Normal retirement age
Pensiun dini/pengunduran diri	5% pada usia 40 tahun ke bawah dan berkurang secara proporsional menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 5% below 40 years and will linearly decrease until 0% at 55 years of age	5% pada usia 40 tahun ke bawah dan berkurang secara proporsional menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 10% below 40 years of age will linearly decrease until 0% at 55 years of age	Early retirement/resignation
Tingkat cacat	5% dari tingkat kematian	5% of mortality rate	Disability rate

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Perusahaan

- (i) Pada tanggal 20 September 2017, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Jaka Tingkir Express dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp33.000.000.000, tingkat bunga 11,5% per tahun, dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- (ii) Pada tanggal 15 April 2020, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Dahan Karya Bertunas dengan total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000, tanpa bunga, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
- (iii) Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan amendemen perjanjian pinjaman dengan PT Dahan Karya Bertunas dengan total pinjaman menjadi sebesar Rp8.000.000.000.
- (iv) Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan melakukan novasi pinjaman dengan PT Jaka Tingkir Express dan mengalihkan hak dan kewajiban kepada PT Niscala Utama Cemerlang.
- (v) Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Niscala Utama Cemerlang dengan total pinjaman sebesar Rp33.000.000.000, tingkat bunga 11% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.

Entitas anak

**a. PT Makassar Metro Network ("MMN")
sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN")**

- (i) Dalam keputusannya No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah memberikan izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) untuk menyelenggarakan tol Ujung Pandang dalam ikatan usaha patungan dengan MMN.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY

The Company

- (i) On September 20, 2017, the Company provided loan to PT Jaka Tingkir Express with a total loan amounting to Rp33,000,000,000, an interest rate of 11.5% per annum, with a period of 4 (four) years from the signing of the agreement.
- (ii) On April 15, 2020, the Company provided loan to PT Dahan Karya Bertunas amounting to Rp5,000,000,000, bears no interest, with a period of 3 (three) years from the signing of the agreement.
- (iii) On October 1, 2021, the Company amended the loan agreement to PT Dahan Karya Bertunas with total loan become Rp8,000,000,000.
- (iv) On December 10, 2021, the Company made a loan arrangement with PT Jaka Tingkir Express and transferred all rights and obligation to PT Niscala Utama Cemerlang.
- (v) On December 10, 2021, the Company provided loan to PT Niscala Utama Cemerlang with a total loan amounting to Rp33,000,000,000, an interest rate of 11% per annum, with a period of 2 (two) years from the signing of the agreement.

Subsidiaries

**a. PT Makassar Metro Network ("MMN")
formerly PT Bosowa Marga Nusantara
("BMN")**

- (i) In its decision No. 276/KPTS/1994 dated August 26, 1994, the Minister of Public Working of the Republic of Indonesia has given permission to PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) to have a joint operation with MMN pertinent to the operational of Ujung Pandang toll road.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

a. PT Makassar Metro Network (“MMN”) sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara (“BMN”) (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994 dari Notaris Mestariy Habie, S.H., MMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap pertama sedangkan tahap kedua akan diatur kemudian dengan ketentuan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya.

MMN setuju bahwa setelah berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol, maka jalan tol dan fasilitas yang berada dalam daerah milik jalan langsung dengan serta merta kembali kepada Jasa Marga. Jasa Marga berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol tanpa wajib menyerahkannya atau membayarkannya kepada MMN.

Perjanjian kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk tol seksi I, II dan III. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 402/KPTS/M/2010 tanggal 12 Juli 2010 menetapkan dan menyetujui untuk mengeluarkan tol seksi III dari ruang lingkup kewajiban MMN tanpa merubah tarif awal dan masa konsesi.

Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor JL. 01.03-Mn/518 tanggal 21 September 2005, dan pengumuman pemenang tender investasi jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum nomor JL.01.03-PB/69 tanggal 27 September 2005, ditetapkan bahwa pemenang tender investasi jalan tol ruas Makassar seksi IV adalah MMN.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Departemen Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh JM. Atas hal tersebut, MMN diwajibkan untuk mengganti Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

a. PT Makassar Metro Network (“MMN”) formerly PT Bosowa Marga Nusantara (“BMN”) (continued)

Based on Deed No. 322 dated August 29, 1994 of Mestariy Habie, S.H., MMN has the rights to operate toll road for 30 (thirty) years for the first phase and the second phase will be rearranged later on that it will be less than 30 (thirty) years since one or the whole part of the toll road operation.

MMN agreed that after the end period of toll operation, then all the toll road and its facilities in the area will be handed over to Jasa Marga. Jasa Marga has the right to operate and to maintain the toll road without any obligation to hand over or pay to the MMN.

The joint contract agreement applied for the toll sections I, II, and III, respectively. According to the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 402/KPTS/M/2010 dated July 12, 2010 determined and agreed to take out the toll road section III from the scope of MMN liability without changes the initial tariff and concession.

Based on the letter from the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. JL. 01.03-Mn/518 dated September 21, 2005, and the tender bid winner announcement from Public Works Department No. JL. 01.03-PB/69 dated September 27, 2005, MMN was appointed as the winner for Makassar toll road section IV investment tender.

Under Law No. 38 year 2004 concerning roads and Government Regulation No. 25 concerning toll roads, the Government has transferred part of the toll road authority to the Department of Public Works which is represented by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) relating to the regulation, concessionaire and control that previously conducted by JM. Above this matter, MMN is required to replace Operational Authority Agreement (PKP) to Toll Road Concessionaire Agreement (PPJT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

a. PT Makassar Metro Network (“MMN”) sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara (“BMN”) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Agustus 2010, MMN mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 23 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2010. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada MMN hak melaksanakan jalan tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2028.

- (ii) Pada 1 Juni 2012, MMN dan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.
- (iii) Pada tanggal 9 Mei 2016, MMN dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (iv) Pada tanggal 15 Februari 2021, MMN dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Mandiri) melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun hingga tanggal 20 Agustus 2023.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

a. PT Makassar Metro Network (“MMN”) formerly PT Bosowa Marga Nusantara (“BMN”) (continued)

On August 31, 2010, MMN entered into PPJT with BPJT of the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 dated August 31, 2010 with notary Deed No. 23 of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta, dated August 31, 2010. In this agreement, BPJT appointed and granted MMN to operate Ujung Pandang Section I and II toll road with concession period until April 12, 2028.

- (ii) On June 1, 2012, MMN and PT Bank Central Asia Tbk (BCA) entered into agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 10 years from the signing date until May 31, 2022.
- (iii) On May 9, 2016, MMN and PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) entered into an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 10 years from the signing of this agreement.
- (iv) On February 15, 2021, MMN and PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Mandiri) entered into an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 3 years until August 20, 2023.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

a. PT Makassar Metro Network (“MMN”) sebelumnya PT Bosowa Marga Nusantara (“BMN”) (lanjutan)

- (v) Pada tanggal 23 Oktober 2017, MMN mendapatkan Keputusan Menteri dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. JL.03.04-Mn/1132 tanggal 23 Oktober 2017. Dalam Surat Keputusan ini, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menetapkan perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2043. Bersamaan dengan ini, MMN dan BPJT segera melakukan amandemen terhadap Akta Perjanjian Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II, No. 23, tanggal 31 Agustus 2010.
- (vi) Pada tanggal 2 April 2018, MMN mengadakan perjanjian dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk yang merupakan kontraktor utama untuk struktur pembangunan Jalan Tol Pettarani di Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp1.623.814.821.677.
- (vii) Pada tanggal 26 Mei 2020, MMN melakukan perubahan perjanjian dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk yang merupakan kontraktor utama untuk struktur pembangunan Jalan Tol Pettarani di Makassar dengan nilai awal kontrak sebesar Rp1.623.814.821.677 menjadi Rp1.667.679.750.239. Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah pembayaran yang sudah dilakukan kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebesar Rp1.561.014.579.978 (2020: Rp1.526.991.761.210).

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

a. PT Makassar Metro Network (“MMN”) formerly PT Bosowa Marga Nusantara (“BMN”) (continued)

- (v) On October 23, 2017, MMN obtained Minister Decree from Ministry of Public Works Republic Indonesia with Minister Decree No. JL.03.04-Mn/1132 dated October 23, 2017. In that Minister Decree, Ministry of Public Works Republic Indonesia granted an amendment of Toll Road Concession Plans for Ujung Pandang Section I and II with concession period until April 12, 2043. Along with this agreement, MMN and BPJT will revise the previous Deed of Agreement for Ujung Pandang Section I and II Toll Roads, No. 23, dated August 31, 2010.
- (vi) On April 2, 2018, MMN entered into an agreement with PT Wijaya Karya Beton Tbk as the primary contractor for the structure of the construction of Pettarani Toll Road in Makassar with contract value of Rp1,623,814,821,677.
- (vii) On May 26 2020, MMN changed the agreement with PT Wijaya Karya Beton Tbk as the primary contractor for the structure of the construction of Pettarani Toll Road in Makassar with initial contract value of Rp1,623,814,821,677 to Rp1,667,679,750,239. As of December 31, 2021, total payment to PT Wijaya Karya Beton Tbk was amounting to Rp1,561,014,579,978 (2020: Rp1,526,991,761,210).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

- (i) JTSE mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (DPU), sebagai pemegang hak Jalan Tol Ruas Makassar Seksi IV, dengan Surat Perjanjian bernomor 190/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006. Dalam perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JTSE, hak untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JTSE dengan masa konsesi selama 35 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, JTSE wajib melaksanakan pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selain hal tersebut, JTSE selama masa konsesi dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, JTSE akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
- (ii) Pada 1 Juni 2012, JTSE dan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA), melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2022.

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")

- (i) BSD mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Jasa Marga"), sebagai pemegang hak Jalan tol ruas Pondok Aren-Serpong, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 183 tanggal 19 Desember 1996 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, Jasa Marga menunjuk dan memberi wewenang kepada BSD sebagai pengembang tunggal untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Jasa Marga serta menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh BSD selama 28 tahun, termasuk masa pembangunannya.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

- (i) JTSE entered into a Toll Road Concessionaire Agreement with the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia (DPU) as the right holder of Makassar Section IV Toll Road through Agreement Letter No. 190/PPJT/V/Mn/2006 dated May 29, 2006. In this agreement, DPU appointed and assigned JTSE to develop and to operate the toll road on behalf of the government and to conduct toll road management at its own risk and cost for a concession period of 35 years including construction period. During the operation period, JTSE has to maintain and to provide insurance coverage to the toll road. Moreover, during the concession period, the subsidiary was entitled to place an advertisement, utilities and/or utilities building in the toll road area. At the expiry of the concession period, JTSE should hand-over the toll road to The Toll Road Authority (BPJT).
- (ii) On June 1, 2012, JTSE and PT Bank Central Asia Tbk (BCA), entered into an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement is valid for a period of 10 years from the signing date until May 31, 2022.

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")

- (i) BSD entered into a Toll Road Operational Authority Agreement with PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Jasa Marga") as the right holder of the Pondok Aren - Serpong toll road section, which was notarized by Deed No. 183 dated December 19, 1996 of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta. Based on the agreement, Jasa Marga appointed and authorized BSD to develop and operate the toll road on behalf of Jasa Marga and to manage the toll road operation for 28 years, including the construction period, at BSD's own risk and cost.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**c. PT Bintaro Serpong Damai (“BSD”)
(lanjutan)**

Selama masa operasi, BSD wajib membayar kepada Jasa Marga sejumlah persentase tertentu dari hasil jalan tol setiap bulannya. Jasa Marga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. S543/MK.16/1996 tanggal 25 Oktober 1996 untuk mengadakan Perjanjian tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, perusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BSD diwajibkan untuk mengganti PKP menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BSD mengadakan PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian bernomor 01/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tanggal 31 Agustus 2010 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BSD hak melaksanakan jalan tol ruas Pondok Aren - Serpong dengan masa konsesi hingga tanggal 1 Oktober 2028.

Selama masa operasi, BSD wajib melakukan:

- 1) Pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimum ditetapkan oleh BPJT;
- 2) Pelebaran jalan dan pembangunan simpang susun sesuai dengan rencana bisnis BSD atau permintaan BPJT (dengan syarat dan kondisi tertentu);
- 3) Jalan akses sesuai dengan permintaan BPJT (dengan kondisi tertentu); dan
- 4) Menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai (“BSD”)

During the operation of the toll road, BSD has to pay to Jasa Marga a certain percentage from the monthly toll road revenues. Jasa Marga has received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. S543/MK.16/1996 dated October 25, 1996 to arrange that agreement.

Based on Law No. 38 year 2004 concerning the roads and Government Regulation No. 25 on the toll roads, the Government has submitted part of the toll road authority to the Ministry of Public Works, which is represented by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) relating to the regulation, concessionaire and control that were previously managed by Jasa Marga. On this matter, BSD is required to replace the PKP into Toll Road Concession Agreement (PPJT).

On August 31, 2010, BSD entered into a PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) with the BPJT of the Ministry of Public Works of Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 dated August 31, 2010 with Notarial Deed No. 22 dated August 31, 2010 from Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta. In this agreement, BPJT appoints and grants BSD rights to operate Pondok Aren - Serpong toll road with concession period until October 1, 2028.

During the operation, BSD has obligations to conduct:

- 1) *Maintenance in accordance with minimum service standards set by BPJT;*
- 2) *Road widening and construction of interchanges in accordance with BSD business plan or request from BPJT (with certain terms and conditions);*
- 3) *Construction of access roads in accordance with the request from BPJT (with certain conditions); and*
- 4) *Provides insurance as a toll road asset protection.*

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Selain hal tersebut, BSD, selama masa konsesi, dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, BSD akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

Pada tanggal 18 Januari 2022, BSD diberikan tambahan masa konsesi penguasaan Jalan tol Pondok Aren – Serpong selama dua belas tahun berdasarkan Berita Acara Kesepakatan no.04/BA/Pt.6 mengenai Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Pondok Aren – Serpong. Sesuai Berita Acara Kesepakatan tentang perubahan Perjanjian Kuasa Penyelenggara (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk Ruas Pondok Aren – Serpong no.BA.264/BPJT/K/HK.02.03/2030 tanggal 29 April 2010, masa konsesi ditambahkan mulai 1 Oktober 2028 hingga 30 September 2040.

- (ii) Berdasarkan "Berita Acara Kesepakatan Atas Perubahan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong" No 73/BA-DIR/2008 tanggal 15 Mei 2008, BSD dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sepakat untuk menunjuk penilai independen untuk menentukan besaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren - Serpong yang harus dibayarkan oleh BSD kepada Jasa Marga. Berdasarkan notulen rapat tanggal 6 April 2010 yang dihadiri perwakilan dari BSD dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, disepakati terhitung mulai Maret 2010, BSD akan melakukan pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol kepada Jasa Marga sesuai tingkat persentase bagi hasil sebesar 5,98% dari pendapatan tol untuk ruas jalan tol Pondok Aren - Serpong. Tingkat persentase bagi hasil tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai, berdasarkan laporannya tanggal 2 November 2009.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

In addition, BSD, during the concession period, is able to use toll road's space for advertisement, utility and/or utility building. At the end of the concession period, BSD will hand over the toll road to BPJT.

On January 18, 2022, BSD was granted an additional concession period for the control of the Pondok Aren – Serpong toll road for twelve years based on the Minutes of Agreement no.04/BA/Pt.6 regarding Changes in Business Plans for the Concession of the Pondok Aren – Serpong Toll Road. In accordance with the Minutes of Agreement concerning the changes in Perjanjian Kuasa Penyelenggara (PKP) to the Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) for the Pondok Aren – Serpong area no.BA.264/BPJT/K/HK.02.03/2030 dated 29 April 2010, the concession period was extended starting October 1, 2028 to September 30, 2040.

- (ii) *Based on the "Berita Acara Kesepakatan Atas Perubahan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong" No. 73/BA-DIR/2008 dated May 15, 2008, BSD and PT Jasa Marga (Persero) Tbk. agreed to assign an independent appraiser to determine fees of operation and maintenance of toll road section Pondok Aren - Serpong which should be pay by the BSD to Jasa Marga. Based on the minutes of meeting dated April 6 2010, which was attended by representatives of BSD and PT Jasa Marga (Persero) Tbk., it is agreed that, starting March 2010, BSD will pay to Jasa Marga for toll road operation and toll road maintenance fees based on profit sharing percentage at rate of 5.98% of toll road revenue for section Pondok Aren - Serpong. Such profit sharing percentage was determined based on the calculation from PT Hutama Penilai, on its report dated November 2, 2009.*

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

- (iii) Pada tanggal 17 April 1997, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") mengadakan perjanjian sewa tanah milik KAI seluas 43.088,41 m² selama 5 tahun dari tanggal 17 April 1997 sampai dengan tanggal 17 April 2002. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *addendum* perpanjangan perjanjian sewa tanah tanggal 23 Maret 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011.

Berdasarkan "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati harga dari sewa lahan milik KAI sebesar Rp3.530.931.250 dan berdasarkan perjanjian "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No. 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD dikenakan biaya pengawasan operasional pada lahan milik KAI sebesar Rp564.506.250. Harga sewa tersebut untuk masa pemanfaatan tanggal 17 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Maret 2016 dan masa perjanjian ini berakhir pada tanggal 16 Oktober 2016.

Berdasarkan kontrak nomor KL01/IV/15/KA-2017 dan nomor KL701/IV/13/KA-2017 tanggal 11 April 2017, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati untuk memperpanjang masa sewa lahan milik KAI sebesar Rp4.316.070.001 dan BSD dikenakan biaya pengawasan operasional pada lahan milik KAI sebesar Rp683.930.000. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 16 Oktober 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

- (iii) On April 17, 1997, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") has entered into land rental agreement for an area of 43,088.41 m² land for 5 years commencing on April 17, 1997 until April 17, 2002. The agreement can be extended according to both parties' agreement. Based on the addendum of rent agreement dated March 23, 2007, both parties agreed to extend the maturity of rental until October 16, 2011.

Based on agreement "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 dated June 27, 2016, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed the cost of rental land amounting to Rp3,530,931,250 and based on agreement "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No. 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD was charged for supervision operational cost on PT KAI rented land amounting Rp564,506,250. Cost of rental for the period started on October 17, 2011 until March 31, 2016 and this agreement period ended on October 16, 2016.

Based on contract number KL01/IV/15/KA-2017 and KL701/IV/13/KA-2017 dated April 11, 2017, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed to extend rent land period of KAI amounting to Rp4,316,070,001 and BSD is charged for supervision operational cost on PT KAI rented land amounting Rp683,930,000. This agreement will be ended on October 16, 2021. As of the completion date of financial statement, this agreement is still in the process of being extended.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

**c. PT Bintaro Serpong Damai (“BSD”)
(lanjutan)**

- (iv) Pada 19 Maret 2020, BSD bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk, melakukan perjanjian kerjasama penggunaan uang elektronik berbentuk kartu untuk pembayaran tol. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.
- (v) Pada tanggal 22 Maret 2021, BSD dan PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengoperasian Bersama pada Gerbang Tol Serpong 6 dan 7. Perjanjian ini berlaku hingga berakhirnya salah satu dari PPJT BSD maupun CSJ.
- (vi) Pada tanggal 23 Maret 2021, BSD dan PT Marga Trans Nusantara (MTN), menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengoperasian Bersama pada Gerbang Tol Serpong 2 dan 3. Perjanjian ini berlaku hingga berakhirnya salah satu dari PPJT BSD maupun MTN.

d. PT Inpola Meka Energi (“IME”)

- (i) Pada tanggal 28 Desember 2009, IME melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung, Sumatera Utara. Perjanjian ini telah dilakukan delapan kali addendum, addendum terakhir pada tanggal 5 April 2021.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

**c. PT Bintaro Serpong Damai (“BSD”)
(continued)**

- (iv) On March 19, 2020, BSD and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk, make an agreement in the electronic form of money card for toll payment. This agreement lasts for a period of 3 years from the date of October 31, 2018 until October 31, 2021. As of the completion date of financial statement, this agreement is still in the process of being extended.
- (v) On March 22, 2021, the Company and PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), signed Cooperation Agreement for Joint Operation Services at Serpong 6 and 7 Toll Gates. This agreement is valid until the expiration of either PPJT BSD or CSJ.
- (vi) On March 23, 2021, the Company and PT Marga Trans Nusantara (MTN), signed Cooperation Agreement for Joint Operation Services at Serpong 2 and 3 Toll Gates. This agreement is valid until the expiration of either PPJT BSD or MTN.

c. PT Inpola Meka Energi (“IME”)

- (i) On December 28, 2009, IME entered into Electrical Power Sales Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) for Minihydro Power Plant (PLTM) at Lau Gunung, North Sumatera. This agreement has been amended eight times, last amendment dated April 5, 2021.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

d. PT Inpolo Meka Energi ("IME") (lanjutan)

Dalam perjanjian tersebut, IME akan membangun PLTM Lau Gunung dengan kapasitas terpasang sebesar 2x5 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya untuk pembangunan, pengujian dan *commissioning* serta pengoprasian dan pemeliharaan.

Selanjutnya IME setuju untuk menjual seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun, dihitung dari pertama kali energi listrik disalurkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN yang telah dimulai pada tanggal 16 Desember 2020.

Sampai dengan tanggal posisi laporan keuangan konsolidasian, adendum yang terakhir mengubah kesepakatan terkait rekening penagihan dan pembayaran.

- (ii) Pada tanggal 5 Mei 2014, IME menandatangani Perjanjian Penyediaan Jasa Pendorongan dengan PT PP (Persero) Tbk, pihak ketiga, terkait pembangunan PLTM Lau Gunung. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 540 hari kalender, dihitung sejak pelunasan uang muka proyek dan pengurusan perizinan yang diperlukan.

Sampai dengan tanggal posisi laporan keuangan konsolidasian, telah dilakukan tujuh kali adendum yang mengubah kesepakatan terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian induk menjadi 1684 hari kalender, dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua syarat dimulainya pekerjaan.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

d. PT Inpolo Meka Energi ("IME") (continued)

In the agreement, IME shall build PLTM Lau Gunung with installed capacity of 2x5 MW which includes design, engineering, cost of construction, testing and commissioning as well as operation and maintenance.

Furthermore, IME agrees to sell the entire power which is generated by PLTM Lau Gunung to PLN in accordance with the agreed terms and conditions. This cooperation will take place until 20 years, valid from the first time the power is channeled from PLTM Lau Gunung to PLN which has started on December 16, 2020.

As of completion date of consolidated Financial Statements, the last amendmend which have changed approved billing and payment accounts.

- (ii) *On May 5, 2014, IME entered into Provision of Chartering Services agreement with PT PP (Persero) Tbk, third party, regarding to construction of PLTM Lau Gunung. Period of services is for 540 calendar days valid from the settlement of project advance and license required.*

As of completion date of consolidated Financial Statements, the agreement has been amended over seven times which have changed approved construction timeline in the master agreement to 1684 calendar days, starting from the date all conditions for the commencement of work are fulfilled.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

e. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (“RPSL”)

Pada tanggal 5 September 2016, RPSL melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat dengan perjanjian No.0085.PJ/HKM.00.01/WKB/2016 atau No.006/RPSL/PNK/IX/2016.

RPSL akan membangun PLTBm 10 MW Siantan dengan kapasitas terpasang sebesar 1x10 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian, pelaksanaan, fasilitas interkoneksi, titik transaksi, fasilitas khusus, sistem pengukuran, dan pengamanan.

Selanjutnya, RPSL setuju untuk menjual 10 MW tenaga listrik yang diproduksi atau dihasilkan dari PLTBm PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun sejak tanggal operasi komersial.

f. PT Dain Celicani Cemerlang (“DCC”)

Pada tanggal 24 April 2012, DCC menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Air Bersih dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) dengan jangka waktu 20 tahun (belum termasuk waktu pembangunan). Dalam perjanjian tersebut, DCC akan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di atas tanah KIM seluas 8.873,68 m² dengan bentuk kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT) dengan kesepakatan volume air bersih yang disalurkan di titik penyerahan minimum sebesar 250.000 m³/bulan dengan harga Rp5.800 per m³ (tidak termasuk PPN).

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

e. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (“RPSL”)

On September 5, 2016, RPSL made an Electrical Power Purchase Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) for Biomass Power Plant (PLTBm) at Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Pontianak, West Kalimantan, No.0085.PJ/HKM.00.01/WKB/2016 or No.006/RPSL/PNK/IX/2016.

RPSL will build PLTBm 10 MW Siantan with 1x10 MW of installed capacity, which includes the design, engineering, supply costs, construction, testing, commissioning, interconnection facility, transaction point, special facility, measurement system, and secure.

Furthermore, RPSL agrees to sell 10 MW power which produced or generated from PLTBm PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari to PLN accordance with the terms and conditions agreed. This cooperation will take up to 20 years since generating Commercial Operation Date.

f. PT Dain Celicani Cemerlang (“DCC”)

On April 24, 2012, DCC entered into Cooperation Agreement regarding Treated Water Supply to PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) for period of 20 years (excluding construction phase). The agreement states that DCC shall build a Water Treatment Plant (WTP) on the land owned by KIM of 8,873.68 m² under Build Operate Transfer (BOT) scheme. Both parties agree the minimum supply of treated water volume at transfer point is 250,000 m³/month at price of Rp5,800 per m³ (excluding VAT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

f. PT Dain Celicani Cemerlang (“DCC”) (lanjutan)

Selanjutnya, DCC wajib membangun IPA jika kebutuhan air KIM telah melebihi 250.000 m³/bulan dengan harga yang akan dievaluasi dan disesuaikan sebesar 10% setiap 3 tahun atau setiap terjadinya kenaikan tarif listrik, BBM dan lainnya yang mempengaruhi langsung biaya produksi. DCC dan KIM sepakat untuk hanya menggunakan air permukaan sungai Deli dan sumber air permukaan lainnya di area KIM dengan kapasitas maksimum sebesar 1.000 liter/detik.

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang namun jika tidak diperpanjang, DCC harus secara otomatis menyerahkan seluruh sarana dan prasarana serta IPA kepada KIM.

Perjanjian ini tidak memasukan adanya opsi pembaharuan perjanjian kecuali terjadinya keadaan kahar sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan jika KIM tidak melaksanakan pembayaran, DCC tidak menyalurkan air bersih atau salah satu pihak mengalami kepailitan sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian.

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola (“SCTK”)

- (i) Perjanjian Pertahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

f. PT Dain Celicani Cemerlang (“DCC”) (continued)

Furthermore, DCC is obliged to build WTP when KIM water demand has exceeded 250,000 m³/month. The price will be evaluated and adjusted at 10% in every 3 years or at the time of the increase in electricity, fuel and other tariffs which affect production costs directly. DCC and KIM agreed to use surface water from Deli river and other surface sources around KIM area with a maximum capacity of 1,000 liters/seconds.

The term of this agreement can be prolonged, but if it is not, DCC will transfer all of its assets to KIM, automatically.

The agreement is excluded of any agreement renewal option unless the corresponding force majeure described in the agreement. The agreement shall terminated if KIM does not made payment, DCC does not deliver treated water or one of the parties is insolvent as described in the agreement.

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola (“SCTK”)

- (i) Agreement on work phasing out of the Development, Operation, Management System for Water Supply and Distribution.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa:

- 1) Memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/detik yang akan diserap hingga tahun 2015.
- 2) Membangun IPA berkapasitas 175 liter/detik pada tahun 2014 yang akan terserap habis hingga tahun 2018.
- 3) Membangun IPA berkapasitas 100 liter/detik pada tahun 2018 yang akan terserap habis hingga tahun 2021.
- 4) Jangka waktu Perjanjian Konsesi untuk pembangunan IPA yang ada dengan kapasitas 100 liter/detik adalah 30 tahun, dimulai tanggal 1 Juni 1996 dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026.
- 5) Jangka waktu Amandemen Perjanjian Konsesi adalah selama 25 tahun sejak selesainya pembangunan IPA tahap I pada tahun 2014 dan akan berakhir pada tahun 2039.
- 6) SCTK wajib membayar pajak air baku kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp100,98 per m³.
- 7) SCTK memberikan bagian air yang terjual setiap bulannya kepada PDAM sebesar 2% dari setiap kubik air yang terjual.
- 8) PDAM berhak menerima royalti air berupa curah secara cuma-cuma sebesar 7,5% dari volume penjualan ke industri.
- 9) Menyerahkan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan seluruh fasilitas sistem penyediaan air minum SCTK kepada PDAM saat perjanjian kerjasama ini berakhir.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to/that:

- 1) Utilize Water Treatment Plant (WTP) capacity of 100 litres/second and absorb the capacity until 2015.
- 2) Build WTP with capacity of 175 litres/second in 2014 and fully absorb the capacity until 2018.
- 3) Build a WTP with capacity of 100 litres/second in 2018 and fully absorb the capacity until 2021.
- 4) The Concession Agreement period for the existing WTP with capacity of 100 litres/second is for 30 years, began on June 1, 1996 and will expires on May 30, 2026.
- 5) The Amendment of Concession Agreement period is for 25 years valid from the completion of first phase WTP in 2014 and will expire in 2039.
- 6) SCTK shall pay raw water tax to Regency Government amounting to Rp100.98 per m³.
- 7) SCTK shall provide grants to PDAM on monthly basis, 2% from each cubic meter of water sold.
- 8) PDAM entitled to receive royalty in bulk water for free, 7.5% from sales volume to industrial customers.
- 9) Hand over in good condition and fully operating the entire of SCTK's water treatment system facility to PDAM when the agreement expires.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

Entitas anak (lanjutan)

**g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")
(lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa: (lanjutan)

- 10) Mengelola sumber air baku untuk diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi kapasitas produksi sebesar 375 liter/detik, dan dapat ditingkatkan atas persetujuan para pihak apabila kapasitas dan ketersediaan air baku memungkinkan.
- 11) Tarif air minum ditetapkan Bupati Serang berdasarkan usulan SCTK dan rekomendasi dari PDAM.
- 12) Pengalihan saham SCTK pada perusahaan baru, ke afiliasi SCTK atau ke pihak lain yang menyebabkan kepemilikan saham SCTK secara keseluruhan berkurang dari 51%, harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PDAM.

(ii) Perjanjian Pengembangan Penyediaan Air Bersih Serang Timur

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 1999 antara STR dan JSNM tentang Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Serang Timur dengan kapasitas sampai dengan 100 liter per detik, STR dan JSNM menyepakati kerjasama dalam pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur sesuai dengan ketentuan-ketentuan di perjanjian kerjasama.

**37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCY (continued)**

Subsidiaries (continued)

**g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")
(continued)**

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to that: (continued)

- 10) Manages the source of raw water to be produced and distributed to meet production capacity of 375 liters/second and can be increased based on all parties approval if the capacity and availability of raw water are possible.
- 11) Drinking water tariff is determined by Serang Regent based on SCTK proposal and PDAM recommendation.
- 12) Transfer of SCTK's shares to new entity, to SCTK affiliated or other parties which will cause SCTK ownership to be less than 51%, must obtain written approval first from PDAM.

(ii) Water Supply Development Agreement East Serang

Based on the Cooperation Agreement dated January 14, 1999 between STR and JSNM regarding to Development of Water Supply in East Serang with capacity up to 100 litres per second, STR and JSNM agreed to cooperate in management and distribution of treated water in East Serang Timur with terms as stated in cooperation agreement.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (lanjutan)

(ii) Perjanjian Pengembangan Penyediaan Air Bersih Serang Timur (lanjutan)

Pada tanggal 2 Desember 2013, SCTK dan STR sepakat untuk mengakhiri perjanjian pelimpahan wewenang atas pengolahan air di Serang tertanggal 20 November 1995. Dengan berakhirnya perjanjian pelimpahan wewenang tersebut, maka Perjanjian Kerjasama antara STR dan JSNM juga berakhir. Selanjutnya, pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur menjadi wewenang SCTK.

38. INFORMASI SEGMENT

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Grup menggunakan segmen usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki enam segmen operasi yang dilaporkan berupa jasa pengelola jalan tol, investasi, pelabuhan, air bersih, energi dan menara telekomunikasi.

Informasi konsolidasian berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis adalah sebagai berikut:

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (continued)

(ii) Water Supply Development Agreement East Serang (continued)

As of December 2, 2013, SCTK and STR agreed to terminate the right transfer agreement of water management in Serang dated November 20, 1995. After the termination, Cooperation Agreement between STR and JSNM was terminated. Then, right of management and distribution of treated water in East Serang was transferred to SCTK.

38. SEGMENT INFORMATION

Based on the financial information used by management in evaluating segment performance and determining the allocation of its resources, the Group uses business segments based on products and services and has six operating segments as reported in the form of toll road management services, investment, ports, water, energy and telecommunications towers.

Consolidated information based on business segments and geographical segments are as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021									
Segmen Usaha	Jasa pengelola jalan tol/ Toll road operator services	Investasi/ Investment	Pelabuhan/ Port	Penyediaan air/ Water supply	Energi/ Energy	Telekomunikasi/ Telecommunication	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	Business Segment
Pendapatan dan penjualan	610.731.996.195	-	-	78.434.881.503	155.622.606.897	-	-	844.789.484.595	Revenues and sales
Beban segmen	(305.866.871.006)	-	-	(41.402.908.488)	(91.235.909.017)	-	-	(438.505.698.511)	Segment cost and expenses
Hasil segmen (Bruto)	304.865.125.189	-	-	37.031.973.015	64.386.697.880	-	-	406.283.796.084	Segment results (Gross)
Beban umum dan administrasi	(110.785.724.935)	(82.551.008.542)	(2.771.555.701)	(32.401.418.025)	(31.699.324.829)	(780.839.132)	70.857.011.092	(190.132.860.072)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	4.310.485.158	398.003.681	1.584.315.611	2.154.173.404	123.741.332	372.485.737	(966.000.000)	7.977.204.923	Financial income
Beban keuangan	(107.724.388.880)	29.552.586.660	(11.787.293)	(1.973.974.018)	(31.756.460.011)	(157.817.468)	(31.778.815.654)	(143.848.656.664)	Financial cost
Bagian atas laba entitas asosiasi	47.229.395.779	-	(4.186.582.779)	4.994.882.833	-	-	-	48.037.695.833	Equity in net income of associates
Pendapatan (beban) lain-lain	(36.788.333.846)	57.082.372.283	355.992.517	(8.538.747.157)	(6.583.479.319)	(96.001.050)	(70.800.000.000)	(65.368.196.572)	Other operating income (expense)
Laba sebelum pajak	101.106.558.465	4.481.954.082	(5.029.617.645)	1.266.890.052	(5.528.824.947)	(662.171.913)	(32.685.804.562)	62.948.983.532	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(37.297.928.300)	685.833.460	-	(451.673.114)	(124.266.351)	-	-	(37.188.034.305)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	63.808.630.165	5.167.787.542	(5.029.617.645)	815.216.938	(5.653.091.298)	(662.171.913)	(32.685.804.562)	25.760.949.227	Profit for the year
Informasi lainnya:									Other information:
Aset segmen	5.219.369.359.981	2.644.396.444.762	156.204.111.123	451.717.081.448	708.526.789.239	85.191.752.307	(2.678.076.533.023)	6.587.329.005.837	Segment assets
Liabilitas segmen	2.673.573.123.874	219.616.572.557	225.000.116	126.634.614.952	391.236.081.673	1.024.174.557	(186.443.731.127)	3.225.865.836.602	Segment liabilities
Perolehan/(pelepasan) aset tetap	3.528.046.228	638.074.032	-	945.794.543	3.729.891.736	-	-	8.839.806.539	Acquisition/(disposal) of property, plant, and equipment
31 Desember 2021/December 31, 2021									
Segmen Geografis	Jabodetabek	Makassar	Medan	Serang	Pontianak	Eliminasi	Konsolidasian	Geographic Segment	
Pendapatan	218.649.819.001	395.680.544.826	54.043.956.317	55.994.785.316	121.292.390.977	(872.011.842)	844.789.484.595	Revenues	
Aset segmen	5.646.393.387.492	3.081.551.233.069	539.707.193.348	212.437.036.229	233.766.607.166	(3.126.526.456.467)	6.587.329.005.837	Segment assets	
Aset pajak tangguhan	1.456.777.530	-	6.823.528.026	1.756.777.730	-	-	9.877.083.286	Deferred tax assets	
Liabilitas segmen	1.113.112.482.663	2.080.819.720.970	401.643.834.006	128.221.796.664	93.973.849.711	(591.905.847.412)	3.225.865.836.602	Segment liabilities	
Liabilitas pajak tangguhan	14.375.315.787	57.842.143.569	-	-	6.246.932.455	-	78.464.391.811	Deferred tax liabilities	

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

39. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020									
Segmen Usaha	Jasa pengelola jalan tol/ Toll road operator services	Investasi/ Investment	Pelabuhan/ Port	Penyediaan air/ Water supply	Energi/ Energy	Telekomunikasi/ Telecommunication	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	Business Segment
Pendapatan dan penjualan	1.373.555.585.855	-	-	73.904.030.355	122.659.689.751	-	-	1.570.119.305.961	Revenues and sales
Beban segmen	(1.124.369.216.338)	-	-	(34.637.184.191)	(73.694.842.134)	-	-	(1.232.701.042.663)	Segment cost and expenses
Hasil segmen (Bruto)	249.186.369.517	-	-	39.266.846.164	48.965.047.617	-	-	337.418.263.298	Segment results (Gross)
Beban umum dan administrasi	(84.907.218.798)	(15.682.139.891)	(5.275.890.937)	(31.886.497.237)	(26.999.117.174)	(2.385.507.181)	(5.561.308.104)	(172.697.679.322)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	5.557.343.102	105.410.659.555	2.317.504.285	2.818.075.385	615.261.094	2.087.952.848	(95.409.034.117)	23.397.762.152	Financial income
Beban keuangan	(44.060.413.049)	(4.341.291.946)	(14.873.868)	(8.645.996.865)	(11.157.405.611)	(158.088.313)	6.746.010.146	(61.632.049.506)	Financial cost
Bagian atas laba entitas asosiasi	43.189.949.528	-	(3.324.937.316)	1.249.545.592	-	-	-	41.114.557.804	Equity in net income of associates
Pendapatan (beban) lain-lain	(16.983.139.663)	(5.628.386.784)	186.379.157	(534.660.515)	187.085.923	(599.290.507)	(8.584.556.891)	(31.956.569.280)	Other operating income (expense)
Laba sebelum pajak	151.982.890.637	79.758.840.934	(6.111.818.679)	2.267.322.524	11.610.871.849	(1.054.933.153)	(102.808.888.966)	135.644.285.146	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(19.010.314.890)	(455.475.505)	-	(563.794.180)	(2.992.814.967)	-	-	(23.022.399.542)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	132.972.575.747	79.303.365.429	(6.111.818.679)	1.703.528.344	8.618.056.882	(1.054.933.153)	(102.808.888.966)	112.621.885.604	Profit for the year
Informasi lainnya: Aset segmen	4.476.152.407.571	2.642.399.664.033	161.163.968.205	413.797.149.318	721.577.099.791	86.317.956.674	(2.654.724.852.843)	5.846.683.392.749	Other information: Segment assets
Liabilitas segmen	1.973.499.809.962	210.966.541.761	-	89.848.157.051	397.957.900.712	1.379.506.827	(182.076.412.335)	(2.491.575.503.978)	Segment liabilities
Perolehan/(pelepasan) aset tetap	3.038.789.527	195.600.000	-	278.872.783	93.741.874.833	-	-	97.255.137.143	Acquisition/(disposal) of property, plant, and equipment
31 Desember 2020/December 31, 2020									
Segmen Geografis	Jabodetabek	Makassar	Medan	Serang	Pontianak	Eliminasi	Konsolidasian	Geographic Segment	
Pendapatan	192.389.116.933	1.184.680.389.756	20.272.738.637	50.931.337.453	122.572.119.544	(726.396.362)	1.570.119.305.961	Revenues	
Aset segmen	4.969.036.748.726	2.976.406.441.205	540.062.179.732	213.428.582.658	237.102.091.183	(3.089.352.650.755)	5.846.683.392.749	Segment assets	
Aset pajak tangguhan	1.111.523.443	-	3.192.636.604	1.457.802.566	-	-	5.761.762.613	Deferred tax assets	
Liabilitas segmen	485.763.819.433	1.946.039.521.038	390.258.445.621	130.913.639.941	104.409.881.939	(565.799.603.994)	2.491.575.503.978	Segment liabilities	
Liabilitas pajak tangguhan	10.899.175.818	52.605.935.370	-	-	3.846.976.872	-	67.352.088.060	Deferred tax liabilities	

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Grup, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Grup dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Grup adalah untuk menjaga dan melindungi Grup melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Grup.

Considering that good risk management practice implementation could better support the performance of the Group, hence, risk management would always be an important supporting element for the Group in operating its business. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Group is to maintain and protect the Group through managing the risk of losses, which might arise from its various activities as well as maintaining risk level in order to match with the direction already established by the management of the Group.

Grup memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

The Group has exposure to the following risk from financial instruments, such as: credit risk, interest risk, and liquidity risk.

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

a. Interest Rate Risk on Fair Value and Cash Flow

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar dan arus kas masa datang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas (lanjutan)

Eksposur Grup terhadap suku bunga timbul dari pinjaman bank. Pinjaman bank pada suku bunga variabel tersebut mempengaruhi arus kas Grup atas risiko suku bunga yang sebagian saling hapus dengan kas yang ditempatkan pada suku bunga variabel. Untuk meminimalisir risiko suku bunga, Grup mengatur biaya bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen melakukan penilaian terhadap suku bunga yang ditawarkan bank untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan penempatan dan mengadakan perjanjian pinjaman baru.

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pendapatan dan pengeluaran Grup hampir seluruhnya diterima dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif terutama *cross currency swaps* untuk mengelola liabilitas Grup sesuai dengan kebijakan keuangan Grup.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan tertentu. Grup memberikan pembayaran secara kredit hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel.

Selain itu, saldo piutang dimonitor secara berkelanjutan dengan tujuan bahwa eksposur Grup terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang teratur dan bereputasi. Eksposur maksimal atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat dari setiap jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Interest Rate Risk on Fair Value and Cash Flow (continued)

The Group exposure to the interest rate risk arises from bank loans. Bank loans at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk which is partially offset by cash held at variable rates. To minimize interest rate risk, the Group manages interest cost by evaluating market rate trends. Management conducts assessments among interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision in relation to its placements and to enter a new loan agreement.

b. Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. Revenues and expenditures of the Group almost entirely received and paid in Rupiah.

The Group uses derivative financial instruments, principally cross currency swaps to manage Group's liabilities in accordance with the Group's treasury policies.

c. Credit Risk

Credit risk is the risk where one of the parties on a financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss. Credit risk faced by the Group was derived from credits granted to certain customers. The Group only provides credit terms with recognized and credible third parties.

In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

Cash and cash equivalents are placed in financial institutions which are regulated and reputable. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statement of financial position.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/December 31, 2021		31 Desember 2020/December 31, 2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Maksimum eksposur/ Maximum exposure	Nilai tercatat/ Carrying value	Maksimum eksposur/ Maximum exposure	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	986.018.533.965	986.018.533.965	366.324.551.448	366.324.551.448	Cash and cash equivalents
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	34.015.068.632	34.015.068.632	43.850.751.128	43.850.751.128	Financial assets designated at fair value through other comprehensive income
Piutang usaha - Pihak ketiga	25.463.783.159	25.463.783.159	28.669.489.858	28.669.489.858	Trade receivables - Third parties
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	64.658.149.509	64.658.149.509	69.041.624.556	69.041.624.556	Non-trade receivables - Third parties
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	54.851.111.827	54.851.111.827	29.173.932.000	29.173.932.000	Restricted cash in banks
Jumlah	1.165.006.647.092	1.165.006.647.092	537.060.348.990	537.060.348.990	Total

d. Risiko Likuiditas

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai dan dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2021:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Jumlah/ Total	
Utang usaha	74.713.370.590	-	74.713.370.590	Trade payables
Utang non-usaha	38.215.578.662	-	38.215.578.662	Non-trade payables
Beban akrual	39.484.832.628	-	39.484.832.628	Accrued expenses
Utang sewa	2.787.581.761	-	2.787.581.761	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	1.470.450.443	591.548.297	2.061.998.740	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	403.171.862.184	2.455.155.467.015	2.858.327.329.199	Long-term loans
Jumlah	559.843.676.268	2.455.747.015.312	3.015.590.691.580	Total

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Credit Risk (continued)

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

d. Liquidity Risk

The management has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves and by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below represents the maturity schedule of the Group financial liabilities based on undiscounted contractual payments as of December 31, 2021:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko Permodalan

Tujuan utama Grup dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, Grup dapat memberikan imbal hasil yang memadai kepada para pemegang saham serta juga sekaligus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Dalam mengelola permodalan tersebut, manajemen senantiasa memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap struktur keuangan dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Di samping itu, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat guna mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama periode penyajian.

Berikut adalah *gearing ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah liabilitas (dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Pinjaman	2.860.183.122.050	2.008.872.027.735	<i>Debts</i>
Kas dan setara kas	(986.018.533.965)	(366.324.551.448)	<i>Cash and cash equivalents</i>
Pinjaman - bersih	1.874.164.588.085	1.642.547.476.287	<i>Net debt</i>
Ekuitas	3.361.609.015.141	3.355.107.888.771	<i>Equity</i>
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	0,56	0,49	<i>Net debt to equity</i>

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital Risk

The primary objective of the Group in managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity. Accordingly, the Group can provide adequate returns to shareholders as well as providing benefits to other stakeholders.

In managing capital, management always pay attention to maintain a healthy capital ratio between the total liabilities and equity. Adjustments to the financial structure are based on changing economic conditions and risk characteristics of the underlying asset. In addition, a policy geared to maintain a healthy capital structure for securing access to funds at reasonable cost.

In maintaining and adjusting its capital structure, the Group may issue new shares, seek financing through loans, restructuring of existing debt or sell assets to reduce borrowing. There was no change in the objectives, policies and processes to capital management during the presentation.

The following is a *gearing ratio* which is the ratio between the total debt (net of cash and cash equivalents) to total equity as of December 31, 2021 and 2020.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengakuan Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Pengukuran nilai wajar Tingkat 1 yang diperoleh dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Pengukuran nilai wajar Tingkat 2 yang diperoleh dari input selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Pengukuran nilai wajar Tingkat 3 yang diperoleh dari teknik penilaian yang memasukkan input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
ASET		
Kas dan setara kas	986.018.533.965	366.324.551.448
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	34.015.068.632	43.850.751.128
Piutang usaha	25.529.517.914	28.741.489.858
Piutang non-usaha	115.502.477.155	126.756.542.956
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	54.851.111.827	29.173.932.000
Jumlah	1.215.916.709.493	594.847.267.390

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
LIABILITAS		
Utang usaha	74.713.370.590	102.299.576.629
Utang non-usaha	38.215.578.662	38.553.579.392
Beban akrual	38.727.542.893	161.019.708.427
Utang pembiayaan konsumen	2.061.998.740	4.007.904.318
Pinjaman jangka panjang	2.858.327.329.199	2.004.864.123.417
Jumlah	3.012.045.820.084	2.310.744.892.183

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (lanjutan)

Fair Value of Financial Instruments Estimation

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purpose.

PSAK 68, "Fair Value Measurement" requires disclosures of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The fair value of financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant, are as follows:

	ASSETS
Cash and cash equivalent	
Financial assets available for sale	
Trade receivables	
Non-trade receivables	
Restricted cash in banks	
Total	

	LIABILITIES
Trade payables	
Non-trade payables	
Accrued expenses	
Consumer financing liabilities	
Long-term loans	
Total	

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
(lanjutan)**

**Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
antara IME dan PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) (PLN)**

Pada tanggal 2 Februari 2022, IME dan PLN sepakat melakukan amandemen perjanjian jual beli tenaga listrik. Pada addendum ini, para pihak sepakat mengubah rekening penagihan dan pembayaran dari rekening pada PT Bank Central Asia Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

42. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

**Amendment of the Power Purchase Agreement
between IME and PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) (PLN)**

On February 2, 2022, IME and PLN agreed to amend the power purchase agreement. In this addendum, the parties agreed to change the billing and payment account from the account at PT Bank Central Asia Tbk to PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

2021

Laporan Tahunan
Annual Report



Nusantara Infrastructure

PT Nusantara Infrastructure Tbk

Equity Tower 38th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190 - Indonesia
P. + 62 21 515 0100
F. + 62 21 515 1221
www.nusantarainfrastructure.com